



RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana. 9

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006); dan
 10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
3. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RAPBD Tahun 2026 adalah rencana keuangan tahunan daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
9. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan

Pembangunan...

Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaan serta rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN
- BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB. VII PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA Tahun 2026 dan rancangan PPAS Tahun 2026; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2026.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Bapelitbangda untuk dijadikan bahan masukan perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2026 dan Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2026, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (4) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak melalui tahapan evaluasi apabila terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD tahun 2026 ditetapkan.
- (5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 25 Juli 2025

BUPATI ROTE NDAO,



PAULUS HENUK

Mengesahkan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

APISON TOMASUL, SH
NIP. 19760214 200604 1005

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR GRAFIK.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-74
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-101
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sampai Tahun 2025 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	II-123
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-309
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-309
2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-311
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Perekonomian Nasional	III-1
3.1.2 Perekonomian Provinsi NTT	III-3
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Rote Ndao.....	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	IV-4
4.2.1 Isu Strategis	IV-4

	4.2.2	Tema dan Prioritas pembangunan	IV-5
	4.2.3	Sinkronisasi Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Makro Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026.....	IV-14
	4.3	Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-21
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
	5.1	Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-1
	5.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Pemerintah Pusat	V-49
	5.3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Pemerintah Provinsi	V-50
	5.4	Prioritas Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026	V-51
	5.5	Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026	V-52
	5.6	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	V-56
	5.7	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	V-57
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
	6.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.....	VI-1
	6.2	Indikator Kinerja Daerah	VI-3
BAB VII		PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	II-2
2.2	Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2024 Menurut Bulan di kabupaten Rote Ndao ..	II-8
2.3	Rata-Rata Temperatur dan Kelembaban Udara Tahun 2024 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao	II-9
2.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao.....	II-10
2.5	Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Rote Ndao	II-11
2.6	Prioritas Intervensi Aksi Ketahanan Iklim Kabupaten Rote Ndao	II-18
2.7	Indeks Ketahanan Daerah Rote Ndao	II-19
2.8	Jenis, Jumlah, Dampak dan Kerugian Akibat Bencana di Kabupaten Rote Ndao 2004-2021.....	II-22
2.9	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2024.....	II-25
2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Jenis Kelamin	II-26
2.11	Distribusi Penduduk Per Kecamatan	II-26
2.12	Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II-27
2.13	Struktur Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II-27
2.14	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024.....	II-31
2.15	Skor Pola Pangan Harapan.....	II-32
2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-33
2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian.....	II-34
2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Pariwisata.....	II-34
2.19	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	II-35
2.20	Nilai dan Distribusi Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	II-35
2.21	Inflasi Kabupaten Rote Ndao Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024....	II-38
2.22	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024.....	II-40
2.23	Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024.....	II-41
2.24	Tingkat Kemiskinan.....	II-42
2.25	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin.....	II-43
2.26	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-47
2.27	Indeks Pendidikan.....	II-48
2.28	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten, Provinsi dan Nasional.....	II-49
2.29	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	II-50

2.30	Usia Harapan Hidup.....	II-52
2.31	<i>Treatment Covarage</i> Kasus Tuberkulosis (TBC).....	II-56
2.32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	II-57
2.33	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	II-60
2.34	Presentase PMKS Mandiri.....	II-61
2.35	Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.....	II-63
2.36	Indeks SPBE	II-64
2.37	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II-66
2.38	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tahun 2024	II-66
2.39	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	II-67
2.40	Indeks Reformasi Birokrasi	II-68
2.41	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	II-68
2.42	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	II-69
2.43	Indeks Daya Saing Daerah	II-72
2.44	Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).....	II-73
2.45	Capaian SPM Untuk Tiap Jenis Layanan.....	II-99
2.46	PDRB Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Lapangan Usaha Khususnya Industri Pengolahan atau Manufacturing	II-103
2.47	Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan	II-106
2.48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	II-106
2.49	Indeks Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	II-107
2.50	Presentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak.....	II-107
2.51	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap.....	II-108
2.52	Status Desa di Kabupaten Rote Ndao.....	II-111
2.53	Indikator Tiga Pilar Ekonomi Hijau.....	II-113
2.54	Durasi Penyinaran Matahari (Persen).....	II-114
2.55	Data Pembangunan Instalasi PLTS Terpusat oleh KESDM	II-114
2.56	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.....	II-117
2.57	Persentase Pengelolaan Sampah.....	II-118
2.58	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga.....	II-118
2.59	Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat	II-119
2.60	Kasus Kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao.....	II-120
2.61	Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	II-121
2.62	Realisasi Investasi Daerah di Kab. Rote Ndao	II-121
2.63	Rasio Ketergantungan.....	II-122
2.64	Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.....	II-124

2.65	Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025-2029 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	II-125
2.66	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	II-126
2.67	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah ...	II-310
3.1	Indikator Perekonomian Nasional Tahun 2021-2024.....	III-2
3.2	Indikator Ekonomi Makro Provinsi NTT Tahun 2021-2024.....	III-3
3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	III-5
3.4	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	III-5
3.5	Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	III-7
3.6	Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	III-8
3.7	Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.....	III-9
3.8	Inflasi Kabupaten Rote Ndao Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022- 2024.....	III-10
3.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020- 2024	III-11
3.10	Prospek Perekonomian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.....	III-12
3.11	Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2026.....	III-17
3.12	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2026.....	III-19
3.13	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022- 2026.....	III-21
3.14	Kolaborasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah.....	III-24
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026	IV-2
4.2	17 Program prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik cepat	IV-6
4.3	Kegiatan Prioritas Utama	IV-7
4.4	Program Strategis Nasional (ProSN).....	IV-10
4.5	Sinkronisasi Isu Strategis Kabupaten Rote Ndao dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026	IV-15
4.6	Sinkronisasi Tema Pembangunan Kabupaten Rote Ndao dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026.....	IV-16
4.7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Rote Ndao dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026	IV-16
4.8	Keselarasan Asta Cita, Dasa Cita dan Mbule Sio	IV-19
4.9	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026	IV-21
4.10	Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2023-2025	IV-22

5.1 Rekapitulasi Anggaran Program Per Urusan Tahun 2026 V-1

5.2 Kontribusi Anggaran Kabupaten Rote Ndao terhadap Prioritas Nasional
Tahun 2026 V-49

5.3 Kontribusi Anggaran Kabupaten Rote Ndao terhadap Prioritas Provinsi NTT
Tahun 2026 V-51

5.4 Kontribusi Anggaran Kabupaten Rote Ndao terhadap Prioritas Kabupaten
Tahun 2026 V-52

5.5 Rencana Program Yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 V-53

5.6 Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan
Perangkat Daerah Tahun 2026 V-56

5.7 Rekapitan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026..... V-58

6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 VI-1

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... VI-3

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan Antara RKPD terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain	I-6
2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao.....	II-1
2.2	Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao	II-4
2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao	II-6
2.4	Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao	II-9
2.5	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao	II-11
2.6	Tipologi Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan Hasil Kajian Hidrogeomorfologi	II-13
2.7	Penanganan Kawasan Konservasi dan Rawan Longsor	II-14
2.8	Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Erosi	II-20
2.9	Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Bencana Alam	II-21

DAFTAR GRAFIK

2.1.	Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao	II-10
2.2.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024.....	II-21
2.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024.....	II-25
2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024	II-32
2.5.	Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	II-37
2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-41
2.7.	Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-43
2.8.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao Tahun 2020 – 2024.....	II-44
2.9	Tren Kematian Ibu dan Kematian Bayi Tahun 2020 – 2024	II-46
2.10.	Perbandingan IPM Kabupaten Rote Ndao Terhadap Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-47
2.11	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024.....	II-53
2.12.	Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2020-2024.....	II-54
2.13.	Tren Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024.....	II-55
2.14.	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-59
2.15.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-63
2.16.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	II-65
2.17.	Persentase Koperasi Berkualitas.....	II-102
2.18.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	II-103
2.19.	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	II-104
2.20.	Jumlah Kunjungan Wisata.....	II-105
2.21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	II-106
2.22.	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2020-2024	II-108
2.23.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.....	II-109
2.24.	Desa Maju dan Berkembang Tahun 2020-2024	II-110
2.25.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II-112
2.26.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2020-2024	II-115
2.27.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi layak Tahun 2020-2024.....	II-116
3.1	Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.....	III-9
3.2	PAD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	III-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan dokumen RKPD memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan berbasis pada *e-planning*. Dokumen RKPD ini disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- f. Perumusan rancangan akhir RKPD
- g. Penetapan RKPD.

Dokumen RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting diantaranya:

1. RKPD Tahun 2026, secara substansial merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 ini merupakan periode tahun kedua dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

2. RKPD Tahun 2026 memuat arahan operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2026.
3. RKPD Tahun 2026 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Tahun 2026 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah. Prinsip prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2026, dalam upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0005);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006).

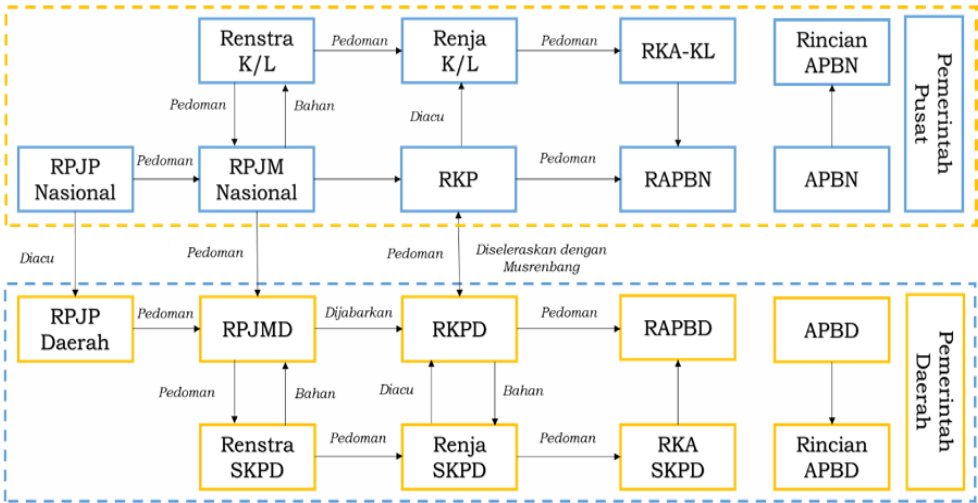
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RKPD Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026.
- c. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

- d. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- e. RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan sektoral lainnya.
- f. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- g. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.

Gambar 1.1
Hubungan Antara RKPD Terhadap
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah :

- a. Sebagai operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026;
- b. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2026;
- c. Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2026;

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sistematika dokumen RKPD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara rinci program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan pagu indikatif tahun 2026 dari masing-masing perangkat daerah.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rote Ndao untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini menguraikan hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Karakteristik lokasi dan wilayah

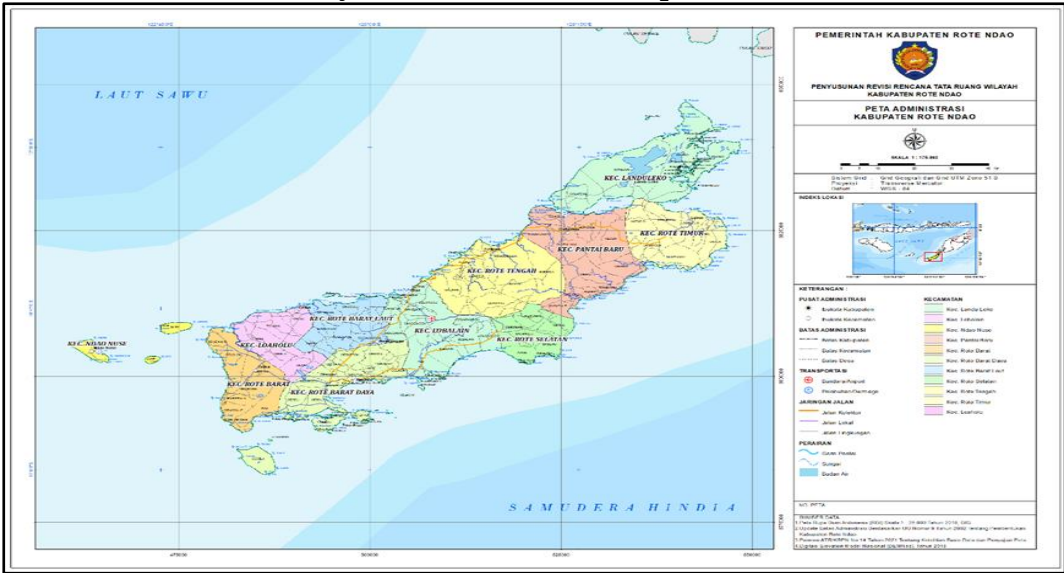
1) Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan nusantara, dengan luas wilayah daratan 1.280,10 km², luas wilayah perairan 2.376 km².

Secara administrasi kewilayahan Kabupaten Rote Ndao sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Laut Timor, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 - 2033

Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 11 kecamatan, 112 desa, 7 kelurahan dan 572 Dusun/Lingkungan, dengan jumlah rukun warga sebanyak 804 dan rukun tetangga sebanyak 1.622 dengan 10 Kecamatan terletak di pulau Rote, dan satu kecamatan kepulauan yang terdiri dari pulau Ndao, Nuse dan Do'o. Rincian luas wilayah kecamatan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Luas Wilayah (KM ²)	Luas Wilayah (%)
1.	Landu Leko	7	32	54	194,06	15,16
2.	Pantai Baru	15	98	201	176,18	13,76
3.	Rote Tengah	8	48	94	162,50	12,69
4.	Lobalain	18	75	187	145,70	11,38
5.	Rote Barat	7	41	88	116,28	9,08
6.	Rote Barat Daya	19	165	335	114,57	8,95
7.	Rote Timur	11	71	142	110,84	8,66
8.	Rote Barat Laut	12	115	215	98,53	7,70
9.	Rote Selatan	7	39	78	73,38	5,73
10.	Loaholu	10	66	132	73,87	5,77
11.	Ndao Nuse	5	36	72	14,19	1,11
Jumlah total		119	804	1.622	1.280,10	100

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

2) Letak dan Kondisi Geografis

Letak astronomis Kabupaten Rote Ndao berada di antara 10°25’ LS sampai 11°00’ LS dan di antara 121°49’ BT sampai 123°26’BT. Terdapat 120 pulau, dimana 7 (tujuh) pulau yang berpenghuni adalah pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Ndana, Nusa Manuk, Usu dan sisanya 113 pulau tidak berpenghuni.

Pengelolaan 120 pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan bagi Pemerintah khususnya terkait pulau-pulau berpenghuni dalam hal menyediakan sarana dan prasarana konektivitas akses pelayanan yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulau-pulau tersebut. Untuk pulau-pulau tak berpenghuni difokuskan tata kelola aset pada pemantauan aktivitas penguasaan lahan agar tidak dikuasai secara ilegal.

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah di atas Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang sangat besar, dengan luas wilayah perairan laut yang cukup luas dan panjang garis pantai kurang lebih 330 km, Kabupaten Rote Ndao memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa di antaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia yakni Pantai Nemberala dan Pantai Bo’a.

Ditinjau dari kondisi Geostrategis Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, namun pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan Rote Ndao dan kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia.

Kondisi wilayah lautan di atas juga berdampak terhadap potensi bencana siklon tropis yang sering melewati perairan pada perbatasan Samudera Hindia

dengan Benua Australia. Ini telah terbukti dengan bencana Siklon Seroja yang terjadi pada tahun 2021 silam. Siklon tropis tersebut bukan baru pernah terjadi. Tercatat sejak tahun 1960 hingga sekarang sudah terjadi 10 siklon tropis dengan rata-rata satu siklon tropis terjadi setiap sepuluh tahun.

Selain itu kondisi perbatasan dengan celah Timor sebagai kawasan pengeboran minyak lepas pantai dapat menyebabkan risiko terjadinya pencemaran laut. Kondisi ini pernah terjadi pada tahun 2012 dimana pernah terjadi pencemaran minyak lepas pantai yang merugikan petani rumput laut di wilayah Kabupaten Rote Ndao hingga ke wilayah pesisir pulau Timor

3) Topografi

Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar dengan wilayah yang sebagian besar merupakan daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rincian dataran 35% (45.250 Ha), berbukit dan gunung 25% (32.625 Ha) dan lainnya 40% (50.135 Ha). Rata-rata kemiringan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao berada pada rentang $0 \geq 40\%$, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kemiringan lahan khususnya kecamatan Rote Barat dan Rote Timur lebih landai dari kecamatan lainnya di pulau Rote. Lereng dengan kemiringan lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Rote Timur sebesar 0,33% dari luas wilayahnya.
2. Kecamatan Pantai Baru 47,74% dari luas wilayahnya kemiringannya 2-15%, 38% berkemiringan 15-40%, sedangkan 11,70% dari luas wilayahnya berkemiringan 0-2%.
3. Kecamatan Rote Tengah merupakan daerah yang berbukit- bukit dan bergunung dilihat dari kemiringan lahan 15% sampai 40% sebesar 49,3% dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao.
4. Dan dari luas lahan yang memiliki kemiringan $>40\%$ di Kecamatan Rote Tengah terdapat luas 70% dari luas wilayah secara keseluruhan.

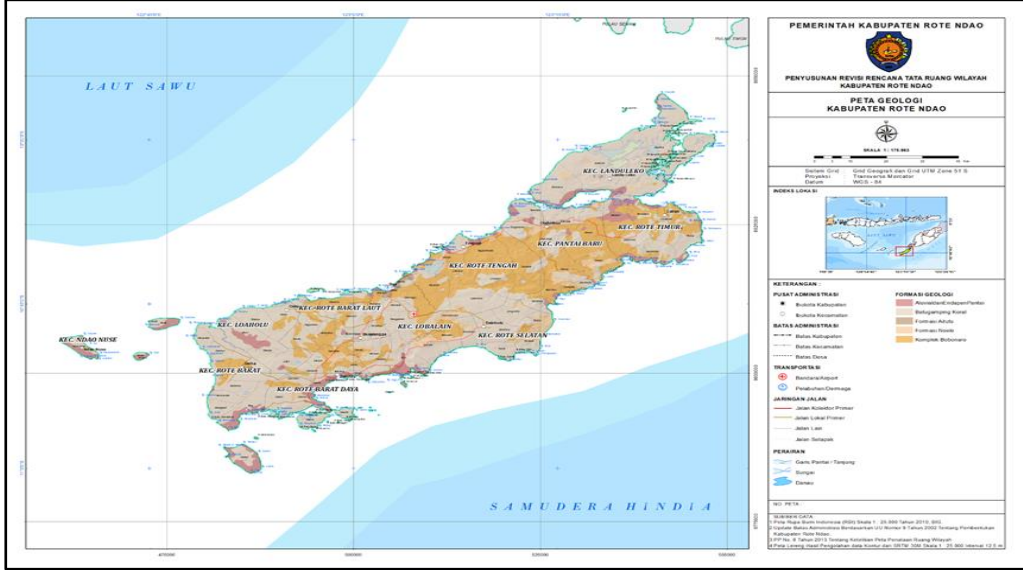
4) Geologi

Pulau Rote dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, sama seperti pulau Timor, Sabu dan Sumba, terbentuk melalui proses pengangkatan (*uplift*), sebagai akibat dari pergeseran kerak bumi dari lempeng Australia dan lempeng Asia. Pergeseran antara dua lempengan tersebut mendorong kerak-kerak kepulauan Nusa Tenggara ke atas. Pengangkatan ini terus berlangsung, dan diperkirakan laju pengangkatan berlangsung beberapa mm per tahun. Kabupaten Rote Ndao berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Dirjen Geologi dan Sumber Daya

Mineral terdapat bahan galian golongan C dan golongan B, antara lain lempung botonitan, batu gamping, batu mangan, gypsum, batu hias setengah permata, kalsit dan aragonit. Selain itu adanya palung minyak Rote I dan II di Selatan Pulau Rote.

Gambar 2.2

Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 - 2033

Rote Ndao juga mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, yang dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, tetapi pada kenyataannya masih memiliki konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan tradisional Rote Ndao. Selain itu, adanya kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia juga merupakan salah satu masalah yang ada. Serta, adanya potensi risiko pencemaran laut dengan adanya pengeboran lepas Pantai Australia dan transportasi laut seperti yang pernah terjadi pada Tahun 2009. Selain itu, badai siklon juga merupakan salah satu tantangan karena kepulauan Rote Ndao yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

5) Hidrologi

Potensi hidrologi didominasi oleh air permukaan yang berasal dari sungai dan danau, air bawah tanah dan mata air untuk menyediakan air sepanjang tahun. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun berjumlah 12 buah, dengan panjang sungai 32 km. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 (enam) buah, dengan total volume kurang lebih 7 (tujuh) juta meter kubik.

Pemanfaatan sumber air baku yang dikelola oleh PDAM digunakan untuk pelayanan air minum di Kabupaten Rote Ndao berasal dari 8 (delapan) sumber

yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 liter/detik, Oemau 10 liter/detik, Lualemba 15 liter/detik, Lidabesi 10 liter/detik, Nioen 15 liter/detik, Lelebe 10 liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat Pantai Baru 5 liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat idle capacity sebesar 53 liter/detik yang dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih.

Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan Air Tanah (CAT). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 km², CAT Batutua luas 229 km² dan CAT Rote luas 250 km². Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainnya, dapat menopang kebutuhan air utama di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan data-data sumur bor, sumur gali, mata air, pengukuran geolistrik Potensi air tanah di dalam Cekungan Air Tanah Nemberala dapat dikelompokkan menjadi empat bagian air tanah, yaitu:

1. Potensi air tanah dangkal pada batu gamping dan berhubungan dengan air laut, dapat terjadi intrusi air laut apabila pengambilan air tanah berlebihan. Untuk kelompok ini meliputi daerah dengan morfologi pedataran tersebar di daerah pesisir/pantai yang melingkari Cekungan Air tanah Nemberala. Meliputi daerah Oeseli, Oenggaut, Nemberala, Oelolok, Mbueain, Boni.
2. Potensi air tanah dangkal sampai dalam pada batu gamping. Tersebar di daerah Oebou, Oeseli, Boa, oenggaut, Nemberala, Oenitas, Lalukoen, Oetefu, Lidor, Oehandi, Meoain, Modosinal, Ingguanak.
3. Batu gamping yang tidak berpotensi air tanah. Tersebar di Oelua, Tolama, Temas, Oebela.
4. Lapisan *Impermeable* (tidak memiliki potensi air tanah). Dapat dikembangkan rekayasa air permukaan (Embung).

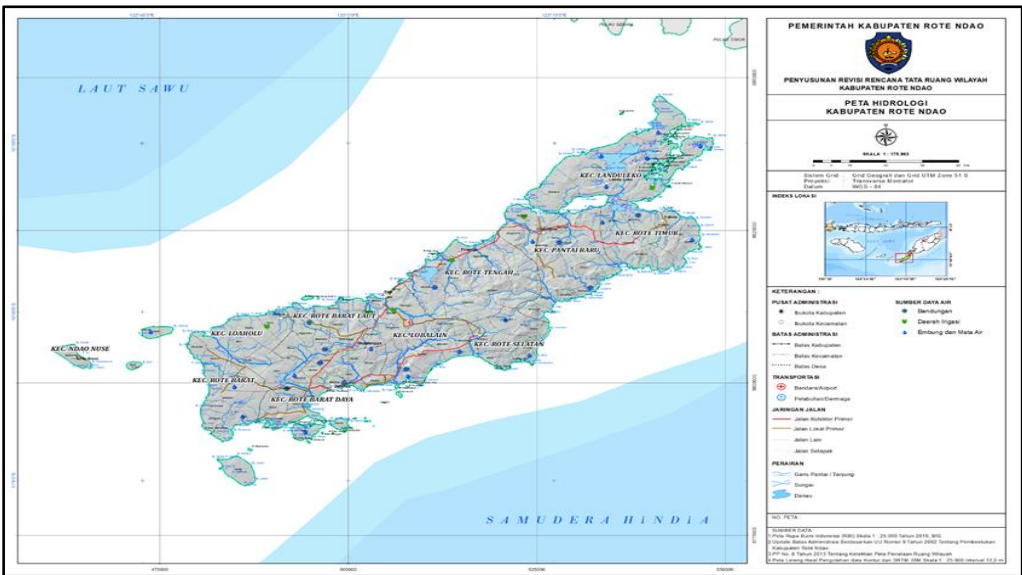
Berdasarkan data-data sumur bor, sumur gali, mata air, pengukuran geolistrik Potensi air tanah di dalam Cekungan Air Tanah Batutua dapat dikelompokkan menjadi Lima bagian air tanah, yaitu:

1. Potensi air tanah dangkal pada batu gamping dan berhubungan dengan air laut, dapat terjadi intrusi air laut apabila pengambilan air tanah berlebihan. Untuk kelompok ini meliputi daerah dengan morfologi pedataran tersebar di daerah pesisir/pantai selatan Cekungan Air Tanah Batutua, meliputi daerah Batutua, Dolasi, Kuli, Inaoe, dan Dodaek.

- 2. Potensi air tanah dangkal pada batu gamping dapat dimanfaatkan dengan sumur gali. Potensi air tanah jenis ini tersebar setempat-setempat di daerah Daleholu, Lenguselu, Suelain, Busalangga, Batutua, Tuanatuk, Mokdale dan Maubesi.
- 3. Potensi air tanah dalam pada batu gamping dapat dimanfaatkan dengan sumur bor. Potensi air tanah jenis ini tersebar di daerah Lidamanu, Lenguselu, Inaoe, Suelain, Oelasin, Haloama, Helebeik, Sanggaoen, Oelunggu, Maubesi, Oetutulu dan Batutua.
- 4. Batu gamping yang tidak berpotensi air tanah tersebar di daerah Suelain, Kolobolon, Daleholu, Dodaek, setempat-setempat di daerah Oetutulu, dan Tuanatuk.
- 5. Lapisan *Impermeable* (tidak memiliki potensi air tanah) dapat dikembangkan rekayasa air permukaan (Embung). Lapisan impermeable ini tersebar di daerah: Mbokak, Lekik, Oebafok, Oebatu, Modosinal, Netenain, Oetutulu, Daudolu, Tuanatuk, Baadale, Oelunggu, Maubesi, Helebeik, Bebalain, kolobolon, Maubesi, Lidabesi dan Onatali.

Lapisan *Impermeable* (tidak memiliki potensi air tanah) dapat dikembangkan rekayasa air permukaan (Embung). Lapisan *impermeabel* ini tersebar di daerah Olafulihaa, Edalode dan Serubeba.

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 - 2033

Potensi hidrologi di Kabupaten Rote Ndao relatif terbatas. Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air untuk musim kemarau merupakan kendala untuk wilayah ini. Ini berisiko terhadap terjadinya bencana kekeringan. Selain hal ini disebabkan karena ketidakberimbangan antara input presipitasi dan

luaran berupa evapotranspirasi (ET), salah satu penyebab lainnya adalah karakteristik daerah aliran sungai (DAS). DAS merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh pegunungan/perbukitan yang sama yang memiliki fungsi hidrologis, yaitu menampung air, menyimpan dan mengalirkan air hujan melalui satu outlet utama. Hasil analisis DAS di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa dari total 161 DAS, hanya 1 DAS diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai DAS yang berukuran kecil (luas DAS 10.000 - <100.000 ha) dan sisanya 160 DAS terkategori sebagai DAS berukuran sangat kecil (luas DAS < 10.000 ha).

Padahal, semakin luas suatu DAS, hasil akhir (water yield) yang diperoleh akan semakin besar, karena hujan yang ditangkap juga semakin banyak. Oleh karena itu dengan bentuk penampang DAS-DAS yang sebagian besar berukuran sangat kecil yang berfungsi sebagai processing dari input presipitasi, maka dapat diperkirakan persoalan ketersediaan air dan kontinuitasnya adalah salah satu faktor penghambat pengembangan produktifitas pertanian di Kab. Rote Ndao. Apalagi bila konservasi tanah dan air tidak dilakukan untuk menahan selama mungkin air permukaan dan air tanah pada musim kemarau, serta memperkecil peluang terjadinya erosi dan sedimentasi yang membawa dampak negatif, baik on-site maupun off-site.

Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun berjumlah 12 buah. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume 7 (tujuh) juta meter kubik. Selain air permukaan, potensi air tanah juga sudah diidentifikasi. Dengan demikian, maka tidak mengherankan ketika hasil digitasi titik lokasi embung secara on-screen menggunakan citra Google Earth menunjukkan 349 lokasi embung yang tersebar di Kabupaten Rote Ndao. Embung sangat berperan penting bagi wilayah Rote Ndao karena dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Embung dapat berperan untuk menahan air permukaan sehingga dapat mendistribusikan air dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan

6) Klimatologi

Kabupaten Rote Ndao memiliki iklim tropis kering dengan pola musim yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur yang bergantian bertiup sepanjang tahun. Pergerakan arah dan waktu angin muson ini dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan Australia. Pengaruh pola angin tersebut

menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Jumlah hari hujan dalam setahun pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rote Ndao 135 hari, paling banyak terjadi pada bulan Maret. Curah hujan rata-rata tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April dan Desember. Berdasarkan rincian tabel di bawah, curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao diatas 445,8 mm dan hari hujan diatas 25 hari hujan terjadi pada bulan Desember. Penilaian faktor iklim yang digambarkan dalam bentuk curah hujan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian terutama pada pola dan waktu menanam.

Kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu mengantisipasi curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi. Berikut rincian tabel curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Rote Ndao selama 1 tahun:

Tabel 2.2
Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2024
Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao

No.	Bulan	Curah Hujan (MM)	Hari Hujan (HH)
1.	Januari	178,5	21
2.	Februari	252,2	18
3.	Maret	445,8	21
4.	April	243,2	16
5.	Mei	19,9	6
6.	Juni	0,5	2
7.	Juli	21,0	4
8.	Agustus	-	-
9.	September	89,7	9
10.	Oktober	24,4	4
11.	November	55,1	9
12.	Desember	440,6	25

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Dalam Angka, Tahun 2025

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Lekunik-Baa mencatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2024 adalah 34,4°C terjadi pada bulan November, dan terendah adalah 30,3°C pada bulan Juli. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 99% per tahun. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 77% sampai dengan 91%.

Tabel 2.3

Rata-Rata Temperatur dan Kelembapan Udara Tahun 2024

Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao

No	Bulan	Suhu Udara (°C)		Rata-Rata	Kelembaban (%)		Rata-Rata
		Max	Min		Max	Min	
1	Januari	23,9	32,4	28,9	63	97	84
2	Februari	23,2	31,8	27,8	79	97	88
3	Maret	22,6	31,8	27,3	84	100	90
4	April	21,8	32,5	27,2	77	98	86
5	Mei	23,2	31,9	27,3	72	87	81
6	Juni	22,6	31,1	25,6	70	87	77
7	Juli	22,0	30,3	25,1	57	89	76
8	Agustus	21,4	31,2	25,6	59	86	79
9	September	22,2	32,2	26,9	72	93	80
10	Oktober	23,6	33,6	28,5	65	84	78
11	November	24,7	34,4	29,8	64	89	77
12	Desember	24,2	31,3	27,1	84	97	91

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao Dalam Angka, Tahun 2025

Gambar 2.4

Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

Berdasarkan tabel 2.2, 2.3 dan Peta di atas, kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu pengantisipasi curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi. Curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao diatas 280 mm pada bulan Februari dan hari hujan tertinggi berada pada bulan Februari, yaitu sebanyak 21 hari hujan

7) **Penggunaan Lahan**

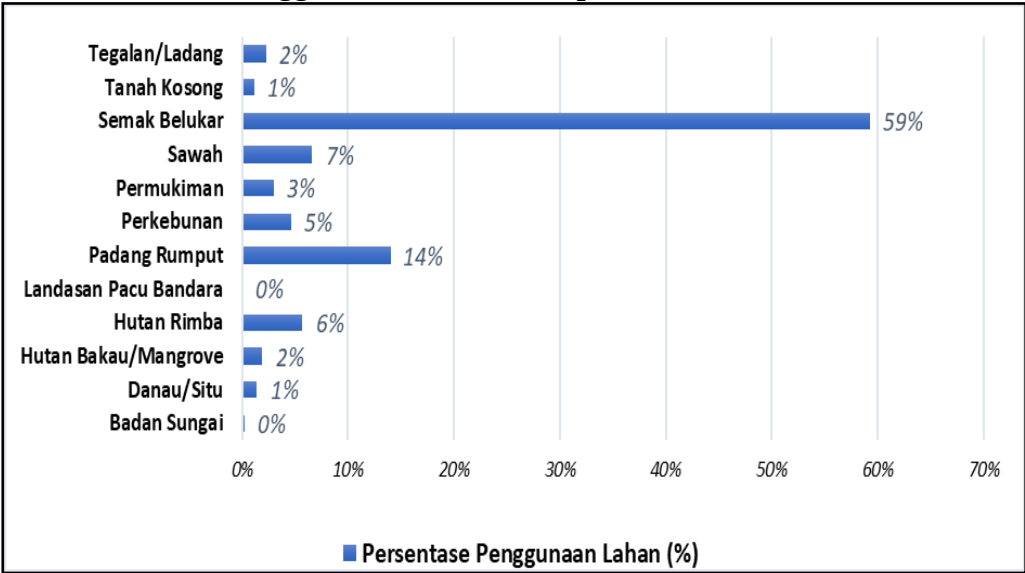
Penggunaan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao saat ini secara garis besar terbagi atas dua kelompok utama jenis penggunaan, yaitu penggunaan lahan basah/sawah dan penggunaan lahan kering. Penggunaan lahan basah antara lain terdiri dari irigasi teknis setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa dan sawah tadah hujan. Kategori penggunaan lahan terbesar lainnya adalah belukar/tegalan/ladang dan padang rumput. Selain itu terdapat penggunaan fasilitas-fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk mengetahui gambaran penggunaan lahan saat ini di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel penggunaan lahan Kabupaten Rote Ndao dan gambar peta penggunaan lahan.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Badan Sungai	238,86	0,19
2	Danau/Situ	1765,70	1,38
3	Hutan Bakau/Mangrove	2417,14	1,89
4	Hutan Rimba	7255,56	5,67
5	Landasan Pacu Bandara	5,35	0,00
6	Padang Rumput	17926,41	14,00
7	Perkebunan/Kebun	5932,30	4,63
8	Permukiman/Area Terbangun	3806,83	2,97
9	Sawah	8459,29	6,61
10	Semak Belukar	75873,81	59,27
11	Tanah Kosong	1441,97	1,13
12	Tegalan/Ladang	2886,77	2,26
	Luas Wilayah	128.010,00	100

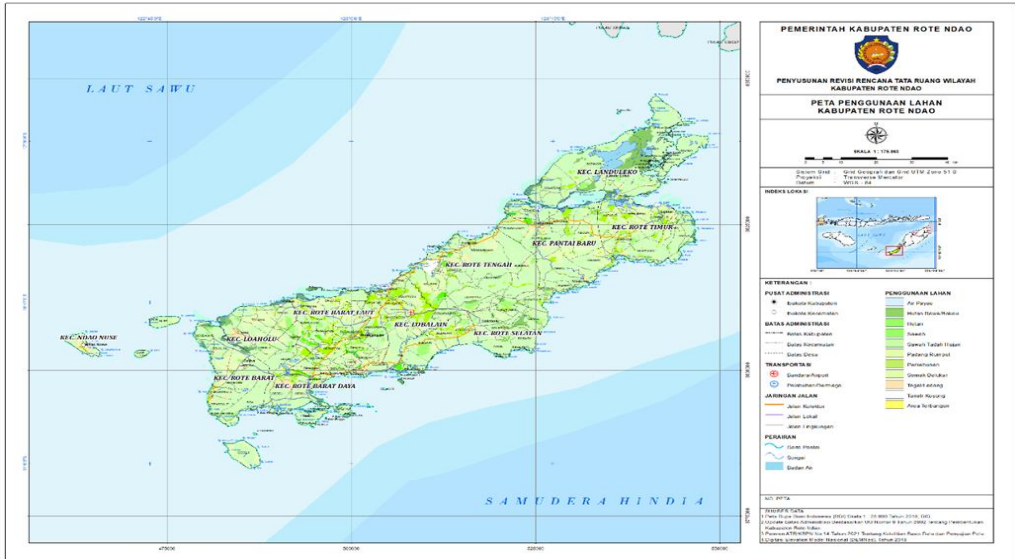
Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Grafik 2.1
Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Rencana pola ruang merupakan suatu rencana untuk menggambarkan fungsi-fungsi dan gambaran aktivitas dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budidaya).

Rencana pola ruang wilayah merupakan kegiatan memanfaatkan ruang melalui program-program pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Rencana pola ruang kawasan wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya

Tabel 2.5
Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Rote Ndao

No.	Pemanfaatan Ruang	Ha	Km2	%
A	Kawasan Lindung			
A.1	Badan Air	2.060,67	20,61	1,61
A.2	Hutan Lindung	7.497,05	74,97	5,86
A.3	Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya	53.529,34	535,29	41,82
A.4	Sempadan Pantai	2.830,71	28,31	2,21
A.5	Sempadan Sungai	966,92	9,67	0,76
A.6	Sempadan Embung	106,30	1,06	0,08
A.7	Sempadan Danau/Situ	264,91	2,65	0,21
A.8	Sempadan Mata Air	240,77	2,41	0,19
A.9	Suaka Marga Satwa Harlu	1.604,36	16,04	1,25
A.10	Taman Buru Ndana	1.418,43	14,18	1,11
A.11	Suaka Marga Satwa Laut	0,41	0,00	0,00
	Sub Total	70.519,87	705,20	55,09
B	Kawasan Budidaya			
B.1	Hutan Produksi Tetap	9.380,48	93,80	7,33
B.2	Pertanian Tanaman Pangan	11.990,96	119,91	9,37
B.3	Pertanian Hortikultura	1.602,10	16,02	1,25

No.	Pemanfaatan Ruang	Ha	Km2	%
B.4	Perkebunan	3.748,71	37,49	2,93
B.6	Padang Pengembalaan	12.232,41	122,32	9,56
B.7	Kawasan Wisata			
	1. Nembrala dan Sekitarnya	8.752,61	87,53	6,84
	2. Mulut Seribu dan Sekitarnya	2.524,60	25,25	1,97
	3. Oesosole dan Sekitarnya	3.975,86	39,76	3,11
B.8	Kawasan Permukiman Perkotaan	1.530,57	15,31	1,20
B.9	Kawasan Permukiman Perdesaan	1.751,83	17,52	1,37
	Sub Total	57.490,13	574,90	44,91
	Jumlah	128.010,00	1.280,10	100,00

Sumber : Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

B. Kawasan Rawan Bencana

Kriteria lindung untuk kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang teridentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor serta banjir. Adapun maksud dari direncanakannya kawasan rawan bencana adalah sebagai mitigasi bencana yaitu upaya manusia dalam menurunkan dampak negatif terhadap suatu kejadian bencana, sehingga pengaruh yang lebih buruk dapat dihindari. Dengan demikian penelitian dan pengamatan dalam usaha perencanaan dan persiapan untuk meminimalkan efek bencana alam lebih baik daripada menghadapi kenyataan yang lebih buruk akibat terjadinya bencana.

1) Kawasan Rawan Bencana Longsor

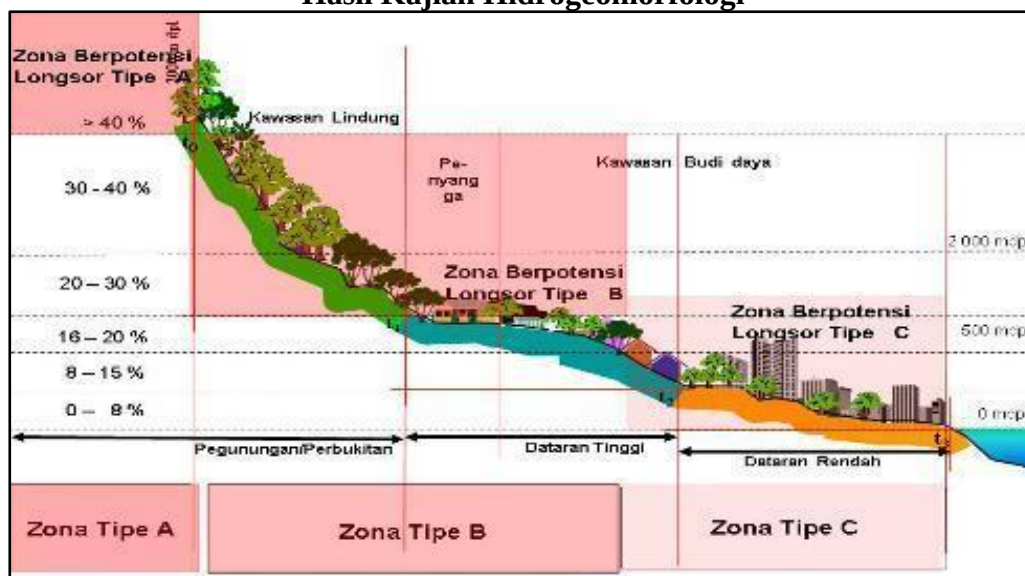
Kawasan rawan bencana longsor di Rote Ndao potensi terbesar terjadi di Kecamatan Lobalain Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Desa Oeleka, Desa Helebeik, Desa Kuli, dan Desa Kolobolon. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Maubesi, Desa Lidabesi, Kelurahan Onatali, Desa Suebela dan Desa Limakoli. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole dan Desa Dodaek. Kecamatan Pantai Baru di Desa Nusakdale, Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Oetutulu dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Mbokak. Gerakan tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao. Upaya untuk pengendalian kawasan rawan longsor dilakukan hal-hal berikut:

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1) Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
 - 2) Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;

- 3) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya; dan
 - 4) Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat.
- b. Acuan peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor.
 - c. Perizinan pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor.
 - d. Perangkat insentif dan disinsentif pada kawasan rawan longsor.
 - e. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang kawasan rawan longsor.

Mengingat kawasan sepanjang DAS ini sekaligus merupakan kawasan penyangga untuk mencegah pendangkalan waduk yang disebabkan oleh longsor dan erosi, maka upaya penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi juga harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah atau ground cover yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak.

Gambar 2.6
Tipologi Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan
Hasil Kajian Hidrogeomorfologi



Gambar 2.7

Penanganan Kawasan Konservasi dan Rawan Longsor



2) Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Rote Ndao itupun bukan banjir tapi genangan. Kawasan rawan bencana banjir/genangan yang ada di Rote Ndao berada di sekitar kawasan-kawasan dengan kondisi drainase yang buruk, antara potensi kerentanan terbesar terjadi di *Desa Busalangga Barat, Desa Dalek Esa, Desa Lekunik, Desa Mundek, Desa Holoama, Desa Lalukoen, Desa Lidor, Desa Meoain, Kelurahan Mokdale, Desa Oebafok, Desa Oehandi, Desa Oelua, Desa Oenitas, Desa Sanggaoen dan Desa Temas*. Konsep pengendalian genangan di Kabupaten Rote Ndao dibangun dengan orientasi konservasi dan berbasis partisipasi masyarakat, dengan harapan akan berjalan efektif dan menunjang pengkondisian perbaikan kualitas lingkungan. Pelaksanaan penanggulangan akan lebih efektif jika dilakukan secara berjenjang. Penghijauan difokuskan pada daerah yang sangat kritis, dilanjutkan pada daerah agak kritis. Penyusunan prioritas bangunan baru dapat didasarkan pada status sungai dalam kaitannya dengan bahaya banjir.

Dalam melakukan pengendalian banjir perlu disusun strategi agar dapat dicapai hasil yang diharapkan, meliputi:

- Penghijauan kawasan Resapan Air;
- Pembuatan tanggul-tanggul sungai;
- Normalisasi sungai dan saluran drainase;
- Pembuatan terasering.

3) Kawasan Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Kabupaten Rote Ndao garis pantai sekitar kurang lebih 521,01 Km dan seperti wilayah lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai dan gelombang pasang (ekstrim). Kawasan rawan abrasi dan gelombang yaitu di Wilayah pantai Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:

- Gelombang ekstrim terjadi hampir sepanjang tahun, hal ini dipengaruhi oleh pola angin dan pola tekanan udara. Gelombang ekstrim menjadi salah satu faktor utama fluktuatifnya harga barang dan jasa serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao. Pada periode bulan Nopember sampai bulan Pebruari umum terjadi gelombang musim barat, yaitu gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir Kabupaten Rote Ndao yang berhadapan dengan Samudera Hindia meliputi desa-desa di *Kecamatan Landu Leko bagian utara yaitu Desa Pukuafu, Desa Sotimori, Desa Lifuleo, Desa Bolatena. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Tesabela dan Desa Tunganamo. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Nggodimeda, Desa Siomeda, Kelurahan Onatali, Desa Lidabesi dan Desa Maubesi. Kecamatan Lobalain pada Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, dan Desa Baadale. Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Daudolu, Desa Tualima, Desa Hundihuk, Kecamatan Loaholu Desa Oelua, Desa Holulai, Desa Oebela, Desa Tasilo dan Desa Boni. Kecamatan Rote Barat pada Desa Mbueain, Desa Oelolot, Desa Sedeen, Desa Nemberala dan Desa Oenggaut. Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbailendeki, Desa Anarae dan Desa Mbuilombo. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Oeseli.* Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan februari
- Pada bulan April sampai dengan bulan November umumnya terjadi gelombang musim timur, merupakan gelombang dari selatan yakni Samudera Hindia memasuki Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di selatan dan timur Kabupaten Rote Ndao. Gelombang musim timur juga merupakan pertanda datangnya musim kemarau. Tingginya pola tekanan dan kecepatan angin menyebabkan gelombang timur dan selatan yang melanda *Kecamatan Landu Leko pada Desa Pukuafu, Desa Tenalain, Desa Daiama, Kelurahan Londalusi, Desa Faifua, Desa Mukekuku, dan Desa Batefalu. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Oeledo, Desa Sonimanu, Desa Lenupetu, Desa Batulilok, dan Desa Nusakdale. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole, Desa Dodaek dan*

Desa Inaoe. Kecamatan Lobalain pada Desa Kolobolon, Desa Bebalain, Desa Suelain, dan Desa Kuli. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Fuafuni, Desa Dolasi, Desa Sakubaton, Desa Oetefu, Desa Oebou, Desa Oeseli dan Desa Landu. Kecamatan Rote Barat pada Desa Boa, Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbailendeki, Desa Ndaonuse dan Desa Mbuilombo.

4) Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim

Kabupaten Rote Ndao, sebagai kabupaten kepulauan di ujung selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Australia, memiliki beberapa kawasan yang sangat rawan terhadap cuaca ekstrim. Terutama, perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, serta posisi geografis Rote Ndao yang terbuka terhadap sistem cuaca Samudra Hindia dan Laut Timor. Berikut adalah kawasan-kawasan yang paling rentan:

- a) **Kawasan Pesisir:** Sebagai daerah kepulauan dan kategori pulau kecil, pesisir Rote Ndao merupakan kawasan yang rawan terhadap cuaca ekstrim karena: Menerima dampak langsung dari siklon tropis yang terbentuk di Samudra Hindia, berhadapan langsung dengan wilayah perairan dengan gelombang tinggi. Wilayah pemukiman di sekitar pesisir seperti pada Kelurahan Metina dan Desa Papela berpotensi berdampak langsung saat gelombang tinggi.
- b) **Kawasan Pulau - Pulau Kecil:** Pulau - pulau kecil di sekitar Pulau Rote sangat rentan terhadap cuaca ekstrim karena minimnya vegetasi pelindung, ketinggian daratan yang relatif rendah, infrastruktur pengaman yang terbatas, dan potensi terisolasi pada kondisi cuaca tertentu. Pulau Nusa Manuk, Pulau Usu, Pulau Ndao, Pulau Ndana, Pulau Landu, Pulau Nuse berisiko tinggi terhadap badai dan gelombang ekstrim.
- c) **Kawasan Teluk dan Selat:** Area teluk dan selat di perairan Kabupaten Rote Ndao memiliki kerentanan antara lain: selat antara Pulau Rote dan Pulau Timor sering mengalami turbulensi angin dan arus laut yang kuat, Teluk Papela dan perairan pesisir dapat mengalami perubahan arus mendadak saat cuaca ekstrim, serta perairan antara pulau - pulau kecil sering mengalami peningkatan gelombang yang rawan dan berbahaya bagi nelayan.
- d) **Kawasan Kekeringan :** Bahaya kekeringan, terjadi akibat curah hujan di bawah nilai tertentu, serta wilayah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan kawasan karstic dengan penyimpanan air permukaan yang terbatas. Pada umumnya potensi kekeringan terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berakibat lahan petani sulit mendapatkan air. Wilayah dengan potensi kekeringan dengan skala tinggi sampai skala sangat tinggi

dapat terjadi di Desa Serubeba, Kelurahan Londalusi, Desa Hundiho, Desa Faifua, Desa Mukekuku, Desa Batefalu, Desa Pukuafu, Desa Tenalai dan Desa Daiama.

5) Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi bencana longsor dan banjir dan tsunami, sistem jalur evakuasi bencana di kabupaten Rote Ndao meliputi:

- a) Jalur evakuasi kawasan rawan longsor meliputi:
 - Ruas jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer serta jalan lain sebagai jalur evakuasi;
 - Pemanfaatan Lapangan-lapangan dan ruang terbuka di area ketinggian di seluruh Kabupaten Rote Ndao
 - Pemanfaatan Gedung-gedung pemerintahan sebagai posko bencana.
- b) Jalur evakuasi kawasan rawan banjir, meliputi:
 - Pemanfaatan ruas jalan Provinsi dan Kabupaten sebagai jalur evakuasi
 - Pemanfaatan Lapangan-lapangan dan ruang terbuka di area ketinggian
 - Pemanfaatan Gedung-gedung pemerintahan sebagai posko bencana
 - Fasilitas ruang terbuka lainnya.
- c) Jalur evakuasi kawasan gelombang pasang/Tsunami, meliputi:
 - Pemanfaatan ruas jalan Provinsi dan Kabupaten sebagai jalur evakuasi
 - Pemanfaatan Lapangan-lapangan dan ruang terbuka di area ketinggian
 - Pemanfaatan Gedung-gedung pemerintahan sebagai posko bencana
 - Fasilitas ruang terbuka lainnya.

6) Ancaman Perubahan Iklim

Kabupaten Rote Ndao, sebagai kabupaten kepulauan kecil yang terletak di ujung selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Australia, menghadapi tantangan unik terkait perubahan iklim. Posisi geografis yang unik ini menjadikan Rote Ndao sebagai benteng terdepan Indonesia, juga menempatkannya pada garis terdepan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global.

Dampak perubahan iklim akan mempengaruhi sistem sosial dan ekologis secara luas dan rumit, termasuk teknologi, ekonomi, serta perubahan sosial dan ekologi yang melintasi berbagai wilayah, kelompok, dan sektor. Empat sektor yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah sektor pertanian, sumber daya air, kesehatan, serta sektor kelautan dan pesisir. Dalam sektor pertanian, ada potensi penurunan produksi tanaman pangan seperti padi. Sumber

daya air memiliki potensi peningkatan kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Kesehatan dapat terpengaruh dengan meningkatnya kejadian penyakit menular seperti DBD, malaria, dan pneumonia. Sementara sektor kelautan dan pesisir berisiko dengan peningkatan tinggi gelombang yang dapat mengancam keselamatan pelayaran serta kenaikan permukaan laut yang dapat menyebabkan banjir di wilayah pesisir.

Bappenas (2021) mengkategorikan lokasi terdampak perubahan iklim yang memerlukan intervensi aksi ketahanan iklim ke dalam 3 tingkatan prioritas yaitu **super prioritas**, **top prioritas**, dan **prioritas** berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi. Kriteria lokasi prioritas ketahanan iklim pada empat sektor prioritas ditentukan berdasarkan tujuh komponen, yaitu (i) Proyeksi Iklim, (ii) Potensi Bahaya, (iii) SIDIK, (iv) IRBI, (v) Potensi Kerugian Ekonomi, (vi) usulan K/L, dan (vii) Validasi Lapangan. Berdasarkan hasil kajian Bappenas tahun 2021, Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam salah satu wilayah di Provinsi NTT yang rentan terhadap perubahan iklim sehingga menjadi Lokasi prioritas aksi ketahanan iklim.

Tabel 2.6
Prioritas Intervensi Aksi Ketahanan Iklim Kabupaten Rote Ndao

Sektor	Kategori Prioritasi Aksi Ketahanan Iklim			
	Super Prioritas	Top Prioritas	Prioritas	Non-Prioritas
1. Kelautan & Pesisir:				
• Subsektor Kelautan	-	√	-	-
• Subsektor Pesisir	-	√	-	-
2. Air	-	√	-	-
3. Pertanian	-	√	-	-
4. Kesehatan:				
• Penyakit DBD	-	-	-	√
• Penyakit Malaria	-	-	-	√
• Penyakit Pneumonia	-	-	-	√

Sumber: Bappenas, Tahun 2021

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Rote Ndao, sektor yang masuk dalam lokasi top prioritas ketahanan iklim, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor air, dan sektor pertanian.

7) **Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen kapasitas dalam menghasilkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta diperlukan menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah.

IKD Kabupaten Rote Ndao adalah seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Indeks Ketahanan Daerah Rote Ndao

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (poin)	0,28	0,47	0,50	0,52

Sumber: BPBD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa IKD Kabupaten Rote Ndao cenderung meningkat sejak tahun 2021. Tahun 2021 tercatat IKD adalah 0,28, meningkat menjadi 0,52 pada Tahun 2024.

8) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat pengukuran kuantitatif yang esensial dalam menilai potensi dampak bahaya alam di suatu wilayah. Instrumen ini menjadi fondasi penting untuk manajemen risiko bencana dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Risiko Bencana di Rote Ndao didominasi oleh ancaman kekeringan, abrasi pantai, dan banjir musiman dengan kategori risiko sedang hingga tinggi.

Dari segi bahaya, kekeringan menjadi ancaman paling signifikan dengan frekuensi 3-5 kejadian per tahun, mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Abrasi pantai semakin intensif akibat peningkatan permukaan air laut dan berkurangnya ekosistem pesisir pelindung. Banjir juga terjadi saat puncak musim hujan di beberapa wilayah dengan topografi rendah, terutama di wilayah pertanian yang berpengaruh pada produksi pertanian

Komponen kerentanan Rote Ndao diperparah oleh infrastruktur terbatas, sebaran pemukiman di wilayah rawan bencana, dan ketergantungan tinggi pada pertanian tadah hujan. Secara sosial-ekonomi, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan akses terbatas terhadap layanan dasar meningkatkan kerentanan masyarakat.

Dari aspek kapasitas, kurang dari 30% desa berstatus "Desa Tangguh Bencana" mengindikasikan kesiapsiagaan yang belum optimal. Sistem peringatan dini hanya menjangkau 30-40% wilayah rawan bencana, sementara jalur evakuasi teridentifikasi di 50-60% wilayah potensial terdampak.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Rote Ndao dijabarkan sebagai berikut:

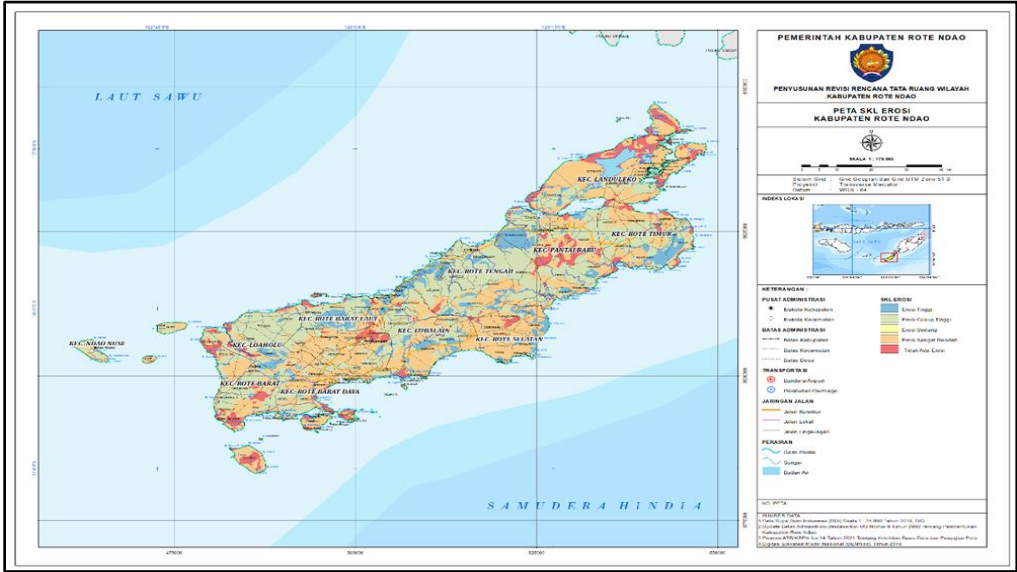
- Potensi longsor yang kecil ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rote Ndao akibat tergerusnya permukaan tanah oleh limpasan air hujan.

- Potensi bencana banjir terjadi wilayah aliran sungai dan saluran-saluran yang sudah melebihi daya tampungnya sebagai akibat pendangkalan dan kerusakan lingkungan oleh manusia.
- Potensi bencana abrasi yang berpotensi tinggi terdapat di wilayah bagian Selatan Kabupaten Rote Ndao.
- Potensi bencana angin kencang (seperti siklon tropis Seroja) yang berpotensi terdapat di wilayah Kabupaten Rote Ndao

Kawasan rawan bencana dibagi menjadi 4 (empat), yaitu kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi pada periode bulan November sampai bulan Februari umumnya terjadi gelombang musim barat. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari dan pada bulan April sampai dengan bulan November umumnya terjadi gelombang musim timur, merupakan gelombang dari selatan yakni Samudera Hindia memasuki Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di selatan dan timur Kabupaten Rote Ndao. Gelombang musim timur juga merupakan pertanda datangnya musim kemarau, Kawasan rawan bencana gerakan tanah, Kawasan rawan bencana gempa walaupun pun termasuk klasifikasi gempa rendah dan, Kawasan rawan bencana angin kencang/Angin Puting Beliung.

Gambar 2.8

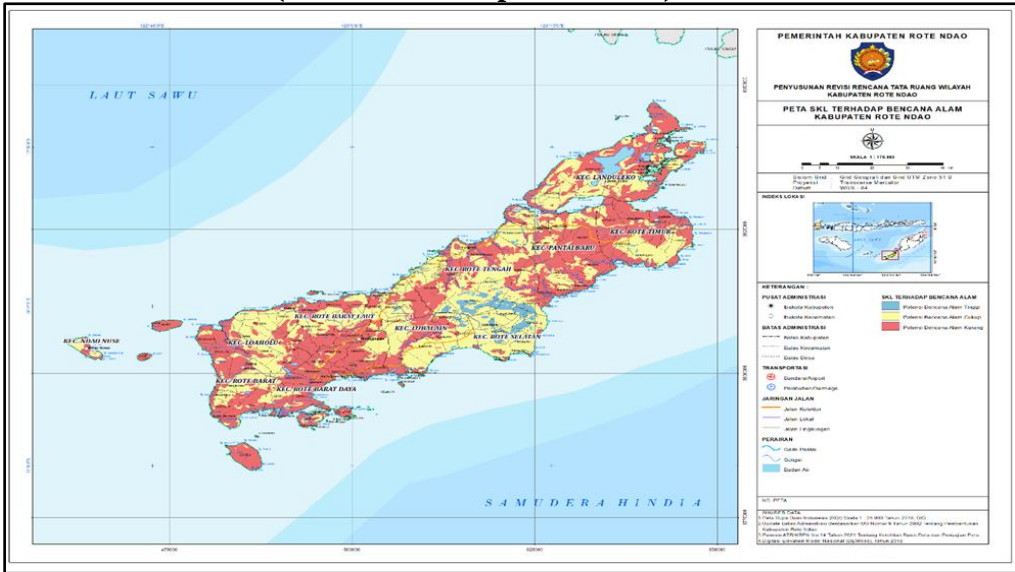
Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Erosi



Sumber : Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Gambar 2.9

Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Bencana Alam

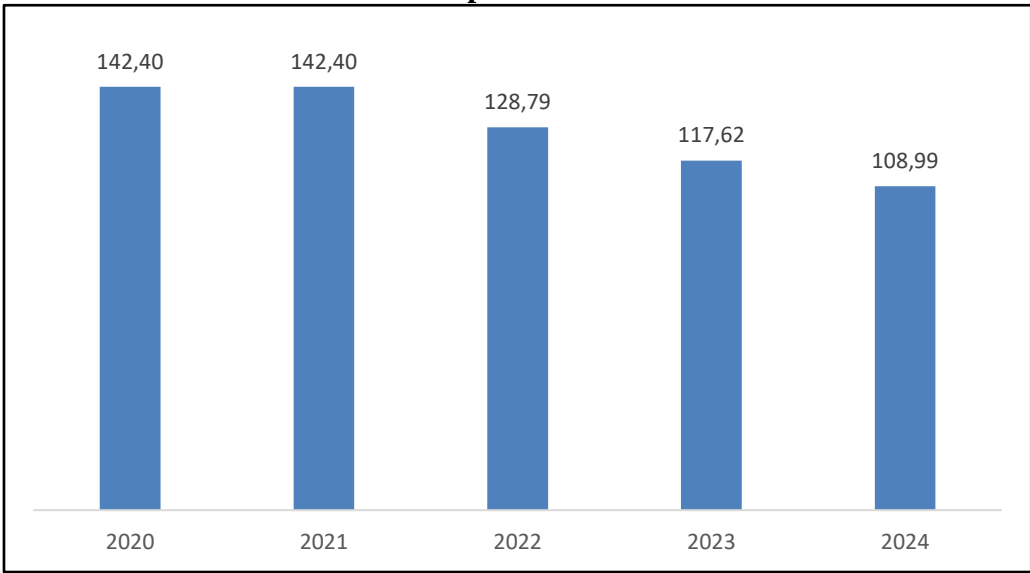


Sumber : Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Berdasarkan data inaRISK BNPB menunjukkan bahwa kategori Risiko Bencana di Kabupaten Rote Ndao adalah sedang, dan untuk melihat tren indeks risiko bencana dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024



Sumber : Inarisk BNPB, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, indeks risiko bencana dari tahun 2020-2021 tidak mengalami perubahan yaitu berada pada 142,40 poin. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 128,79 poin dan terus menurun menjadi 108,99 poin pada tahun 2024. Penurunan Indeks Risiko Bencana disebabkan oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bencana: Jika suatu daerah berhasil meningkatkan kapasitas dan efektivitas sistem manajemen bencana,

- termasuk dalam hal perencanaan, mitigasi, respons, dan pemulihan, maka risiko bencana dapat berkurang
2. Implementasi Kebijakan Mitigasi yang Sukses: Jika pemerintah dan masyarakat berhasil menerapkan kebijakan mitigasi yang efektif seperti regulasi bangunan yang lebih ketat, pengelolaan lahan yang berbasis risiko, atau kampanye kesadaran masyarakat tentang cara menghadapi bencana, maka risiko bencana dapat menurun.
 3. Perubahan Sosial-Ekonomi: Peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih kuat dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana, sehingga menyebabkan penurunan risiko bencana.
 4. Pengurangan Faktor Pemicu Bencana: Jika faktor-faktor pemicu bencana seperti perubahan iklim, aktivitas geologi, atau kebakaran hutan dikelola dengan lebih baik atau berkurang, maka risiko bencana dapat menurun.
 5. Peran Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk dalam hal partisipasi dalam perencanaan komunitas dan pengimplementasian rencana darurat, dapat membantu mengurangi risiko bencana.
 6. Pengetahuan dan Teknologi: Kemajuan dalam penelitian dan teknologi mitigasi bencana, seperti sistem peringatan dini yang lebih baik, pemodelan risiko yang lebih canggih, atau infrastruktur tahan gempa, dapat membantu mengurangi risiko bencana, dan
 7. Pendekatan Holistik: Pendekatan terhadap pengurangan risiko bencana yang holistik dan berbasis pada pemahaman akan interaksi antara berbagai faktor risiko, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan, juga dapat menghasilkan penurunan IRB yang signifikan

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia DIBI-BNPB tahun 2022, pada periode 18 tahun terakhir (Tahun 2004 – 2022) jumlah kejadian bencana, dampak dan perhitungan total kerugian di Kabupaten Rote Ndao seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Jenis, Jumlah, Dampak, dan Kerugian Akibat Bencana
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004-2021

Tahun	Bencana	Jumlah Kejadian	Dampak	Total Kerugian (Rp)
2004	Banjir	1	203 rumah rusak	1.092.000.000
2008	Banjir	1		9.467.000.000
	Puting beliung	2	1 orang luka – luka, 16 orang terdampak, 77 rumah rusak dan 1 fasilitas pendidikan rusak	14.024.000.000

Tahun	Bencana	Jumlah Kejadian	Dampak	Total Kerugian (Rp)
	Tanah longsor	1		8.500.000.000
	Abrasi	1		13.300.000.000
2009	Puting beliung	2	77 orang terdampak, 16 rumah rusak dan 3 fasilitas perkantoran rusak	150.425.000.000
	Banjir	1		150.000.000
2010	Tanah longsor	2	155 orang terdampak, 15 rumah rusak	1.532.000.000
2014	Banjir	1	1 orang meninggal dan 5 unit rumah rusak	
	Kekeringan	1	32.026 orang menderita	
2015	Banjir	1	85 orang mengungsi	
2018	Puting beliung	4	6 unit rumah rusak	
	Kekeringan	1	22.217 orang menderita	
	Banjir	4	55 unit rumah rusak	
2019	Kekeringan	1	51.076 orang menderita	
	Puting beliung	1	1 orang luka – luka, 1 rumah rusak dan 1 fasilitas perkantoran rusak	
2020	Kebakaran hutan dan lahan	1		
2021	Puting beliung	1	19 rumah rusak	
	Banjir	2	1 orang meninggal, 74 orang luka-luka, 17.699 orang terdampak, 5.563 mengungsi, 8.760 rumah rusak, 1 jembatan rusak	
2022	Banjir	2	Satu orang korban meninggal dunia terseret banjir. Kerusakan 2 unit Jembatan	52,500
			kerusakan pada tanggul embung kerusakan areal persawahan dengan umur padi 2bulan .	520.000.000
	Gelombang pasang/Rob-abrasi	1	Kurang lebih 50 meter tembok panahan pantai rusak	50.000.000
	Angin kencang	2	1 Rumah Rusak (1 RB), 1 KK (5 Jiwa) dievakuasi/mengungsi	10.000.000
			2 Rumah Rusak (1 unit RR, 1 Unit RB), 2 KK (10 Jiwa) dievakuasi/mengungsi	25.000.000

Sumber: DIBI-BNPN tahun 2021, Pusdalops PB-BPBD NTT tahun 2022

Berdasarkan data kejadian bencana dimaksud diketahui bahwa terdapat 6 jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Rote Ndao, dengan total 29 kejadian. Siklon Tropis Seroja dicatat sebagai ‘banjir’ dengan penjelasan bencana sebagai banjir, angin kencang dan abrasi pantai. Hal ini terjadi karena

belum dimasukkan sebagai salah satu jenis bencana di Indonesia dan masih menggunakan dampak Siklon Tropis.

9) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKHD) adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat daerah, seperti kabupaten/kota, provinsi, atau wilayah administratif lainnya. Tujuan IPKHD adalah untuk menilai sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam melestarikan, melindungi, dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

IPKHD membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi upaya-upaya dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Dengan memahami tingkat keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan hayati secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

10) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Rote Ndao telah merasakan dampak terhadap perubahan iklim. Kekeringan, badai/ siklon, dan banjir merupakan bencana yang hampir dihadapi oleh masyarakat Rote Ndao setiap tahunnya. Sehingga pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam secara permanen, sehingga dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Hal ini melibatkan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rote Ndao ditentukan oleh tiga komponen utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Kualitas air Rote Ndao menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber air tawar, intrusi air laut pada wilayah pesisir, dan sistem sanitasi yang belum optimal. Embung-embung tradisional sebagai penampung air hujan mengalami tekanan akibat sedimentasi dan evaporasi tinggi. Kualitas udara relatif baik dibandingkan wilayah industri, meski tantangan berupa debu pada musim kemarau dan emisi dari PLTD masih ada. Tutupan lahan didominasi savana dan hutan kering dengan sejumlah kawasan mangrove di pesisir. Faktor yang mempengaruhi IKLH meliputi kondisi geografis pulau kecil beriklim kering,

aktivitas ekonomi yang didominasi pertanian dan perikanan tradisional, serta keterbatasan infrastruktur lingkungan.

Secara detail capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	48,93	67,77	69,59	68,17

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

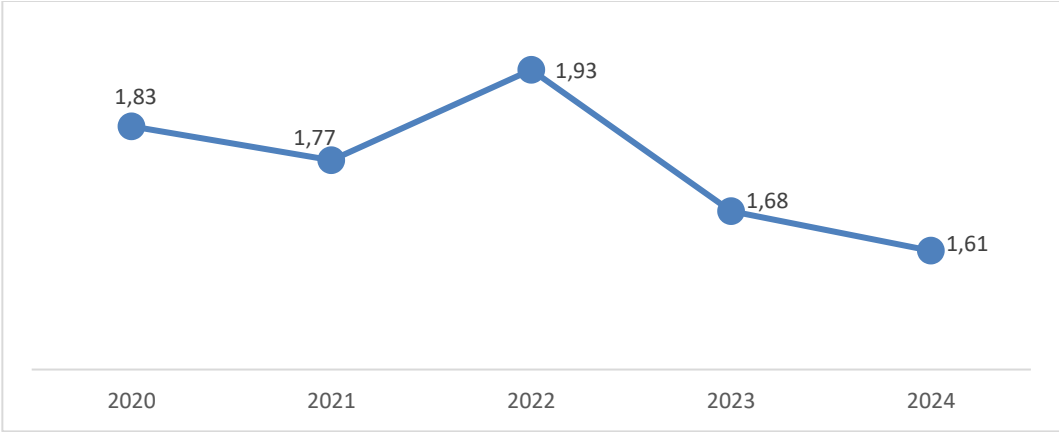
2.1.1.2 Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Grafik di bawah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rote Ndao dinamika dengan tren penurunan yang sangat kecil dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,83%, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,61% pada tahun 2024.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini menunjukkan tren yang relatif stabil dengan perubahan yang minimal. Angka pertumbuhan yang berada di kisaran 1,6-1,8% menggambarkan pertumbuhan penduduk yang moderat di wilayah tersebut. Meskipun terjadi penurunan, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rote Ndao masih berada pada level yang menunjukkan dinamika kependudukan yang positif, dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan tidak terlalu tinggi.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Rasio Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Rote Ndao terlihat bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebesar 76.968 lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, yakni sebesar 75.982 dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah 101,30 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101,30 penduduk laki-laki. Gambaran penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki – Laki (Jiwa)	72.428	73.522	74.936	75.766	76.968
2.	Perempuan (Jiwa)	71.336	72.450	73.875	74.755	75.982
3.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	143.764	145.972	148.811	150.521	152.950
4.	Sex Ratio (%)	102	101	101	101,35	101,30

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2025

C. Kepadatan Penduduk

Adapun distribusi penduduk per kecamatan di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Distribusi Penduduk Per Kecamatan

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rote Timur	14.343	14.533	14.785	14.924	15.133
2	Pantai Baru	14.476	14.667	14.920	15.059	15.268
3	Rote Tengah	8.984	9.060	9.173	9.216	9.300
4	Rote Selatan	6.015	6.089	6.188	6.241	6.322
5	Lobalain	30.669	31.210	31.891	32.328	32.925
6	Rote Barat Laut	18.578	15.808	16.117	16.304	16.569
7	Rote Barat Daya	24.309	24.738	25.276	25.625	26.097
8	Rote Barat	9.113	9.270	9.467	9.593	9.765
9	Landu Leko	5.247	5.317	5.409	5.459	5.536
10	Loaholu	8.338	11.525	11.750	11.886	12.079
11	Ndao Nuse	3.692	3.755	3.835	3.886	3.956
Jumlah total		143.764	145.972	148.811	150.521	152.950

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Seperti terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2020-2024 masih tampak bahwa penyebaran penduduk tahun 2024 masih bertumpu di Kecamatan Lobalain, yakni sebanyak 32.925 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Rote Barat Daya sebanyak 26.097 jiwa, Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 16.569 jiwa, Kecamatan Pantai Baru sebanyak 15.268 jiwa dan Kecamatan Rote Timur sebanyak 15.133 jiwa. Jumlah distribusi penduduk di Kabupaten Rote Ndao menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.12

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	16.910	17.093	17.093	16.761	16.689
5 – 9	15.921	16.188	16.188	16.649	16.755
10 – 14	13.343	13.586	13.586	14.827	15.382
15 – 19	12.323	12.351	12.351	12.661	12.842
20 – 24	10.999	10.975	10.975	11.572	11.854
25 – 29	11.498	11.794	11.794	11.171	11.084
30 – 34	11.485	11.826	11.826	11.765	11.794
35 – 39	10.307	10.590	10.590	11.159	11.411
40 – 44	8.847	9.107	9.107	9.735	10.009
45 – 49	6.674	6.929	6.929	7.846	8.284
50 – 54	5.661	5.911	5.911	5.996	6.198
55 - 59	5.161	5.418	5.418	5.274	5.317
60 – 64	4.227	4.475	4.475	4.527	4.663
65 – 69	3.929	4.179	4.179	3.747	3.708
70 – 74	3.006	3.243	3.243	3.158	3.194
75 +	3.473	3.720	5.146	3.673	3.766
Jumlah total	143.764	147.385	148.811	150.521	152.950

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan data komposisi penduduk tahun 2020-2024 distribusi penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif umur 15-64 tahun, kemudian diikuti oleh penduduk usia non produktif 0-14 tahun. Data di atas menunjukkan dari tahun 2020-2024 kelompok umur 5-9 tahun berada pada posisi terbanyak dengan rata-rata sebanyak 16.755 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin untuk Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Struktur Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	0-4	8.429	8.260	16.689
2	5-9	8.646	8.109	16.755
3	10-14	7.749	7.633	15.382
4	15-19	6.658	6.184	12.842
5	20-24	6.037	5.817	11.854
6	25-29	5.459	5.625	11.084
7	30-34	5.746	6.048	11.794
8	35-39	5.581	5.830	11.411
9	40-44	4.941	5.068	10.009
10	45-49	4.237	4.047	8.284
11	50-54	3.151	3.047	6.198
12	55-59	2.756	2.561	5.317
13	60-64	2.333	2.330	4.663
14	65-69	1.889	1.819	3.708
15	70-74	1.557	1.637	3.194
16	75+	1.799	1.967	3.766
Jumlah		76.968	75.982	152.950

Sumber: Diolah dari BPS, Tahun 2025

2.1.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Sumber Daya Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Rote Ndao. Keberadaan PPI Tulandale akan menjadi pusat bisnis kegiatan perikanan, baik di subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Posisi lokasi PPI Tulandale yang berada di Kecamatan Lobalain, sebagai penopang utama dari aktivitas ekonomi sektor perikanan di Kecamatan Lobalain, dengan Ba'a sebagai PKL Kabupaten Rote Ndao, sedangkan 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah akan berkontribusi sebagai zona pendukung dan keterkaitan terhadap kebutuhan bahan baku produksi perikanan di Kecamatan Lobalain, atau Zona Inti PPI Tulandale. Pengembangan sentra perikanan di SKPT Rote Ndao akan dilaksanakan sejak dari proses pra – produksi hingga pasca – produksi. Industri perikanan dilakukan hulu ke hilir oleh seluruh pelaku bisnis yang terpusat pada sentra sentra yang telah ditetapkan. Usaha perikanan yang dikembangkan meliputi usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pembangunan perikanan diarahkan pada perikanan modern yang berorientasi pada agrobisnis, berbudaya industri, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan juga dilakukan secara rasional, efisien, berhasil dalam mewujudkan, memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan petani nelayan yang profesional, maju dan mandiri melalui eksploitasi, eksplorasi dan konservasi kekayaan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sumberdaya perikanan dan kelautan, baik perikanan tangkap maupun budidaya sangat potensial untuk dikembangkan guna mendorong pembangunan perikanan terutama di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Sumberdaya tersebut diantaranya jenis-jenis ikan pelagis dan demersal seperti ikan kembung (*Rastrelling sp*), ikan teri (*Stelophorus sp*), ikan tembang (*Sardinella sp*), kerapu (*Epinephelus sp*), ikan lencam (*Lethrinus sp*), ikan kakap (*Lutjanus sp*) dan sebagainya sedangkan jenis rumput laut seperti *Euchema cottonii*, *hallymenia* dan shakol serta pengolahan hasil perikanan seperti ikan asin, dodol rumput laut dan sebagainya. Sumberdaya perikanan di wilayah Kabupaten Rote Ndao diperkirakan memiliki potensi tangkap lestari ikan mencapai 17.875 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 14.300 ton/tahun, meliputi komoditi unggulan berupa ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan-ikan demersal. Potensi yang baru dimanfaatkan rata-rata/tahun 30-40%. Luas lahan untuk kegiatan budidaya cukup besar yaitu 32.675 ha dengan pemanfaatan baru mencapai 10 ha. Potensi tersebut didukung oleh berbagai kehidupan komunitas perairan diantaranya ekosistem terumbu karang, lamun dan

mangrove yang masih baik serta potensi budidaya rumput laut. Selain itu, di wilayah Kabupaten Rote Ndao juga terdapat beberapa sungai/kali kecil yang merupakan daerah estuaria yang subur. Faktor lain yang turut mendukung potensi perikanan di Kabupaten Rote Ndao adalah tingkat pencemaran industri dan rumah tangga masih rendah serta penggunaan alat tangkap masih bersifat sederhana/ tradisional.

1. Potensi Perikanan di Kabupaten Rote Ndao:
 - Luas Perairan: 376 Km²
 - Panjang Garis Pantai: 330 Km
 - Lebar Garis Pantai: 7,2 Km
 - Perikanan Tangkap Lestari: 875 Ton/Tahun
 - Perikanan Tangkap yang diperbolehkan: 300 Ton
2. Budidaya Laut: 675 Ha
 - Budidaya Perairan: 127 Ha
 - Budidaya Pantai: 12.937 Ha
 - Budidaya Rumput Laut: 32.000 Ha
 - Budidaya Mutiara: 30 Ha
 - Tambak Garam: 206 Ha
 - Ekosistem Terumbu Karang: 714 Ha
 - Vegetasi Mangrove: 232 Ha
 - Balai Benih Ikan (BBI): 3 Ha
 - Kawasan Minapolitan: 58 Buah
 - Sentral Kawasan Minapolitan: 3 Buah
3. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya:
 - Perikanan Tangkap (Catch): 310 Ton/Tahun
 - Lahan Budidaya Mutiara: 5 Ha
 - Lahan Budidaya Rumput Laut: 214 Ha
 - Lahan Budidaya Payau: 5 Ha
 - Lahan Budidaya Perikanan Darat (Air Tawar): 5 Ha
 - Lahan Tambak Garam: 5 Ha

B. Potensi Sumber Daya Pertanian

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu padi, jagung, sorgum, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Komoditas hortikultura yang paling banyak diproduksi adalah bawang merah, selain itu terdapat komoditas lainnya seperti cabai besar, cabe rawit, kol kubis, tomat, petsay/sawi dan kangkung. Buah-buahan tahunan yang paling banyak di produksi adalah buah pepaya dan buah nangka. Komoditas perkebunan dengan luas tanam terbesar adalah kelapa. Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain kelapa, Mangga, jeruk, pisang, semangka, alpukat, sukun dan buah naga.

C. Potensi Produksi Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Rote Ndao tidak dialokasikan sebagai kegiatan tersendiri namun merupakan suatu kegiatan tambahan di sektor pertanian, sehingga peruntukan lokasi pakan dan pengembalaan disesuaikan dengan lokasi kegiatan pertanian. Potensi pengembangan kawasan komoditi peternakan unggulan di Rote Ndao adalah: ternak sapi potong, ternak kerbau, ternak kuda, ternak kambing, ternak domba, ternak babi dan ternak ayam pedaging.

D. Potensi Kepariwisata

Pariwisata merupakan leading sektor dan memiliki potensi untuk dikembangkan dan diperkenalkan baik di dalam dan luar negeri. Pengembangan *Eco—Edu Tourism* yang berkiblat pada tiga hal utama: ekowisata, eduwisata dan wisata budaya merupakan peluang pariwisata Rote Ndao untuk bertumbuh dan berkembang. Konsep *eco edu tourism* memperluas definisi tradisional pariwisata dari '*tourist destinations*' menjadi ekosistem pembelajaran, penelitian dan budaya yang berkelanjutan.

Eco edu tourism menjadi peluang karena beberapa potensi yang dimiliki oleh Rote Ndao antara lain: Keanekaragaman hayati dengan beberapa sumberdaya endemic Pulau Rote, kekayaan budaya, panorama alam dan pantai yang unik dan cantik sebagai ke khasan pulau – pulau kecil.

E. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu daerah. IKP dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kondisi ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. IKP menggabungkan tiga dimensi utama ketahanan pangan:

1. Ketersediaan Pangan - mengukur kecukupan produksi dan pasokan pangan
2. Keterjangkauan Pangan - mengukur kemampuan masyarakat mengakses pangan secara ekonomi
3. Pemanfaatan Pangan - mengukur kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat

Nilai IKP berkisar antara 0-100 dengan kategorisasi sebagai berikut:

- Sangat Rawan (0-40) : Kondisi ketahanan pangan sangat buruk
- Rawan (40-50) : Kondisi ketahanan pangan buruk
- Kurang Tahan (50-60) : Kondisi ketahanan pangan kurang memadai
- Cukup Tahan (60-70) : Kondisi ketahanan pangan cukup baik
- Tahan (70-80) : Kondisi ketahanan pangan baik
- Sangat Tahan (80-100) : Kondisi ketahanan pangan sangat baik

Berdasarkan Tabel di bawah, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren positif selama periode 2020-2024. Dari nilai 68,21 indeks pada 2020, IKP sempat turun menjadi 66,41 indeks di 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, kabupaten ini menunjukkan resiliensi yang baik dengan pemulihan pada 2022 (68,23 indeks).

Pencapaian terbaik terjadi pada 2023-2024 dengan IKP mencapai 70,43 indeks dan 71,27 indeks. Capaian ini mengangkat status Rote Ndao dari kategori "Cukup Tahan" menjadi "Tahan" dalam hal ketahanan pangan. Peningkatan konsisten selama tiga tahun terakhir mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pangan lokal, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat.

Tabel 2.14

Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	68,21	66,41	68,23	70,43	71,27

F. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH juga merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Skor PPH Kabupaten Rote Ndao menunjukkan trend kenaikan pada periode 2020 – 2024. Pada Tahun 2020, nilai PPH adalah sebesar 56,40, lalu naik menjadi 89,10 selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Nilai PPH ini mencerminkan situasi konsumsi pangan yang konsisten di daerah ini. Nilai PPH

yang konsisten di Tahun 2023 dan 2024 ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Rote Ndao telah mencapai tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan yang cukup baik, karena semakin mendekati nilai ideal 100. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi konsumsi pangan masyarakat Rote Ndao relatif beragam dan cukup seimbang antara berbagai kelompok pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta kelompok pangan lainnya.

Meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, stabilnya nilai PPH ini bisa mengindikasikan konsistensi dalam pola konsumsi masyarakat dan keberhasilan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Namun, kondisi ini juga bisa menunjukkan adanya tantangan dalam upaya peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi pangan untuk mencapai skor yang lebih ideal mendekati 100.

Tabel 2.15
Skor Pola Pangan Harapan

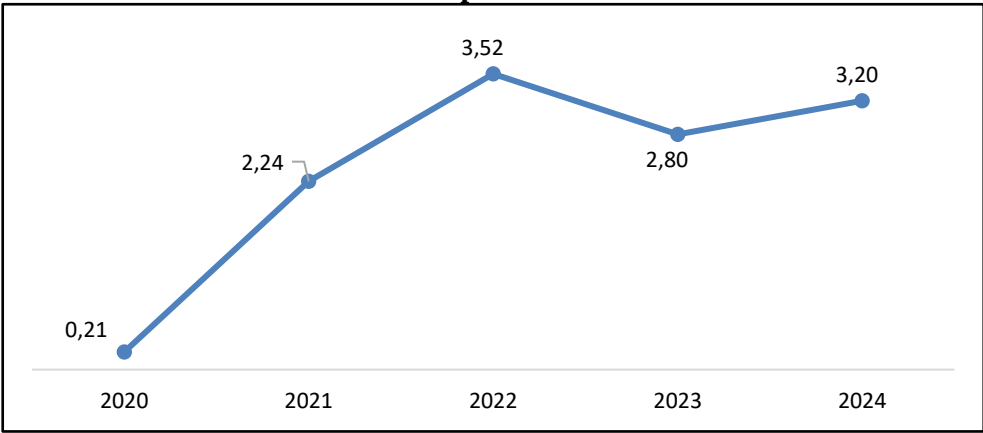
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pola Pangan Harapan (Nilai)	56,40	61,30	53,10	56,40	55,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 0,21 % meningkat hingga tahun 2022 menjadi 3,52 %. Tahun 2023 kembali turun menjadi 2,80 %, namun kembali meningkat di Tahun 2024 sebesar 3,20 %.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Nilai laju pertumbuhan ekonomi dibentuk oleh beberapa aspek pengukuran. Secara detail disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan ekonomi	%	0,21	2,24	3,52	2,80	3,20
<i>Aspek Pengukuran:</i>						
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,01	4,01	4,84	2,42	1,98
B - Pertambangan dan Penggalian	%	2,22	2,07	1,85	3,48	4,82
C - Industri Pengolahan	%	-4,11	-5,68	4,45	9,13	7,23
D - Pengadaan Listrik dan Gas	%	25,54	6,74	1,19	11,78	10,84
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,7	11,9	0,45	2,16	4,42
F - Konstruksi	%	-10,28	4,3	0,01	7,87	0,38
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-6,13	3,59	7,29	5,19	5,02
H - Transportasi dan Pergudangan	%	-2,44	2,98	9,62	2,72	8,03
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-9,23	4,23	5,40	3,82	7,67
J - Informasi dan Komunikasi	%	13,6	0,96	3,46	2,40	3,23
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	%	9,93	2,7	0,79	1,35	4,41
L - Real Estate	%	-0,42	5,38	3,76	2,45	1,97
M,N - Jasa Perusahaan	%	-40,31	-14,44	2,96	2,93	5,34
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	-1,29	-3,23	0,13	0,01	5,97
P - Jasa Pendidikan	%	1,58	-1,72	- 0,57	2,75	2,99
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	5,88	8,91	1,88	4,67	3,59
R,S,T,U - Jasa lainnya	%	-9,72	0,04	0,40	4,24	2,57
PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)	%	0,21	2,24	3,52	2,80	3,20

Sumber: BPS Kab Rote Ndao, Tahun 2025

Menurut BPS Rote Ndao, selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Administrasi Pendidikan; Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rote Ndao. Walaupun demikian, Tabel di atas menunjukkan adanya

penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun, pertanian dan pariwisata merupakan potensi yang perlu dikembangkan..

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	%	1,01	4,01	4,84	2,42	1,98

Sumber: BPS Rote Ndao, Tahun 2025

PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah nilai tambah bruto atas barang atau jasa yang diproduksi bidang usaha pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu yaitu terhitung dari tahun 2010. Laju Pertumbuhan sektor pertanian mengalami fluktuasi, hal ini terjadi karena total pendapatan dari PDRB sektor ini meningkat namun tidak signifikan,

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Pariwisata

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Pariwisata	%	-393,02	-145,83	6,35	4,51	6,35

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

PDRB Sektor Perdagangan dan Pariwisata adalah nilai tambah bruto atas barang atau jasa yang diproduksi bidang usaha perdagangan dan pariwisata dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu yaitu terhitung dari tahun 2010. Laju Pertumbuhan sektor akomodasi makan mengalami fluktuasi, hal ini terjadi karena total pendapatan dari PDRB sektor ini meningkat namun tidak signifikan, tahun 2020 mengalami minus karena terdampak Covid-19 mengakibatkan jumlah kunjungan warung dan restoran mengalami penurunan.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam suatu wilayah menurut lapangan usaha. PDRB sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu PDRB harga konstan di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan PDRB harga berlaku dimana perhitungan menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

Nilai dan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 serta nilai dan distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	898,52	1,01	934,60	4,01	979,86	4,84	1.003,54	2,42	1.023,46	1,98
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,35	2,22	15,66	2,07	15,95	1,85	16,51	3,48	17,30	4,82
C.	Industri Pengolahan	23,85	-4,11	22,50	-5,68	23,50	4,45	25,64	9,13	27,50	7,23
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,42	25,54	1,51	6,74	1,53	1,19	1,71	11,78	1,90	10,84
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,14	5,70	2,39	11,90	2,40	0,45	2,45	2,16	2,56	4,42
F.	Konstruksi	95,11	-10,28	99,20	4,30	99,21	0,01	107,02	7,87	107,42	0,38
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	145,67	-6,13	150,90	3,59	161,90	7,29	170,30	5,19	178,85	5,02
H.	Transportasi dan pergudangan	60,49	-2,44	62,29	2,98	68,29	9,62	70,14	2,72	75,78	8,03
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	-9,23	3,31	4,23	3,49	5,40	3,63	3,82	3,90	7,67
J.	Informasi dan Komunikasi	116,96	13,60	118,08	0,96	122,17	3,46	125,11	2,40	129,15	3,23
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,78	9,93	16,21	2,70	16,33	0,79	16,55	1,35	17,28	4,41
L.	Real Estate	20,63	-0,42	21,74	5,38	22,56	3,76	23,11	2,45	23,57	1,97
M.	Jasa Perusahaan	00,91	-40,31	0,78	-14,44	0,80	2,96	0,83	2,93	0,87	5,34
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	272,87	-1,29	264,06	-3,23	264,39	0,13	264,42	0,01	280,20	5,97
O.	Jasa Pendidikan	187,74	1,58	184,51	-1,72	183,45	-0,57	188,50	2,75	194,13	2,99
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,11	5,88	75,27	8,91	76,69	1,88	80,27	4,67	83,15	3,59
Q.	Jasa Lainnya	1,97	-9,72	1,97	0,04	1,97	0,40	2,06	4,24	2,11	2,57
Produk Domestik Regional Bruto		1.931,72	0,21	1.974,99	2,24	2.044,51	3,52	2.101,79	2,80	2.169,12	3,20

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2024

Tabel 2.20

Nilai dan Distribusi Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.510,32	47,65	1.592,66	48,57	1.736,86	49,59	1.835,22	49,14	1.912,56	48,84
B.	Pertambangan dan Penggalian	23,02	0,73	23,74	0,72	24,97	0,71	26,55	0,71	27,73	0,71

Lapangan Usaha		2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
C.	Industri Pengolahan	38,47	1,21	36,46	1,11	39,28	1,12	46,70	1,25	53,35	1,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	0,05	1,78	0,05	1,89	0,05	2,18	0,06	2,41	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,74	0,09	3,10	0,09	3,16	0,09	3,25	0,09	3,43	0,09
F.	Konstruksi	140,80	4,44	148,93	4,54	157,34	4,49	174,60	4,68	176,45	4,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	211,47	6,67	224,75	6,85	252,67	7,21	280,83	7,52	304,00	7,76
H.	Transportasi dan pergudangan	100,74	3,18	104,33	3,18	120,22	3,43	131,74	3,53	145,91	3,73
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	0,19	6,14	0,19	6,61	0,19	7,08	0,19	7,84	0,20
J.	Informasi dan Komunikasi	132,74	4,19	134,06	4,09	139,28	3,98	143,41	3,84	150,66	3,85
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,31	0,70	23,95	0,73	26,08	0,74	26,97	0,72	28,05	0,72
L.	Real Estate	31,54	1,00	32,84	1,00	36,84	1,05	40,42	1,08	44,68	1,14
M.	Jasa Perusahaan	1,71	0,05	1,47	0,04	1,55	0,04	1,62	0,04	1,74	0,04
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425,74	13,43	417,07	12,72	419,86	11,99	435,71	11,67	439,43	11,22
O.	Jasa Pendidikan	417,33	13,17	414,83	12,65	418,61	11,95	445,80	11,94	472,28	12,06
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,79	3,15	109,92	3,35	114,14	3,26	128,99	3,45	141,88	3,62
Q.	Jasa Lainnya	3,19	0,10	3,22	0,10	3,38	0,10	3,61	0,10	3,74	0,10
Produk Domestik Regional Bruto		3.169,43	100,00	3.279,26	100,00	3.502,73	100,00	3.734,68	100,00	3.916,13	100,00

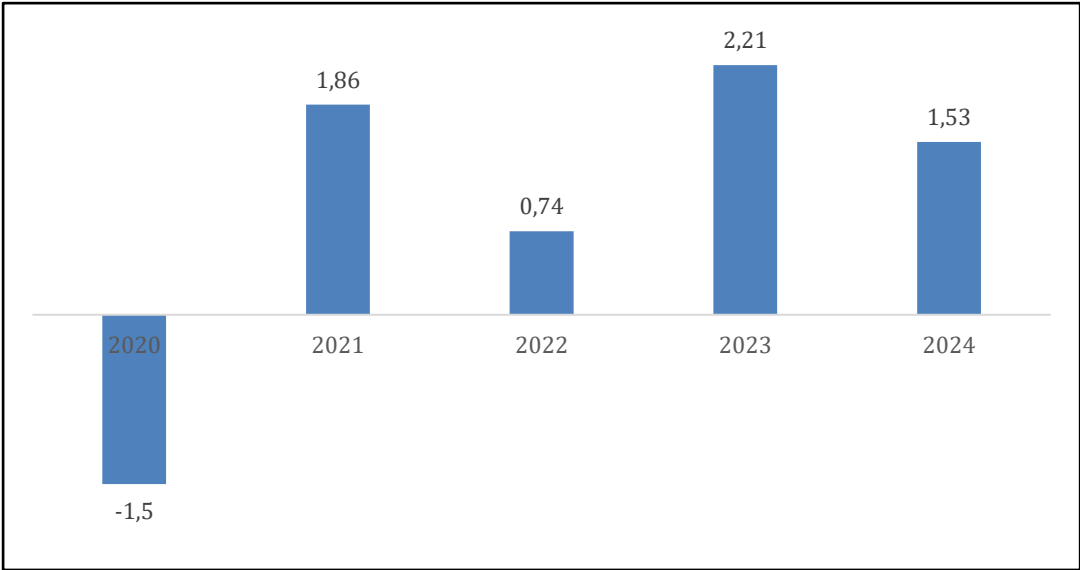
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2020 - 2024

C. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya nilai mata uang. Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Adapun data inflasi Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dan 2024 di ambil dari data hasil rilisan Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut grafik laju inflasi Kabupaten Rote Ndao pada Triwulan 4 (empat) Desember 2020-Desember 2024.

Grafik 2.5

Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan data inflasi sesuai Grafik di atas, Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi inflasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Tahun 2020 menjadi tahun yang unik karena daerah ini mengalami deflasi sebesar -1,5%, yang menunjukkan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa. Kondisi deflasi ini kemungkinan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi mulai pulih dengan inflasi kembali positif mencapai 1,86%. Angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi setelah periode deflasi sebelumnya, meskipun masih dalam kategori inflasi rendah yang terkendali. Tahun 2022 menunjukkan perlambatan laju inflasi menjadi 0,74%, yang merupakan tingkat inflasi terendah dalam periode positif. Ini mengindikasikan stabilitas harga yang baik dan kondisi ekonomi yang relatif stabil.

Namun, tahun 2023 menjadi tahun dengan inflasi tertinggi dalam periode ini, yaitu 2,21%. Kenaikan ini bisa dikaitkan dengan berbagai faktor ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi harga komoditas dan biaya hidup. Di tahun 2024, inflasi kembali turun menjadi 1,53%, menunjukkan adanya upaya pengendalian inflasi yang berhasil. Angka ini masih dalam batas wajar dan menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika ekonomi Kabupaten Rote Ndao yang cukup responsif terhadap berbagai kondisi ekonomi, baik domestik maupun global, dengan tren yang menuju stabilisasi di tahun-tahun terakhir.

Tabel 2.21
Inflasi Kabupaten Rote Ndao
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2024	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	107,32	0,94
2	Pakaian dan Alas Kaki	100,82	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar lainnya	102,27	-
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,86	-
5	Kesehatan	101,60	-0,01
6	Transportasi	110,84	-0,04
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,38	-0,05
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	100,81	0,01
9	Pendidikan	100,18	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,02	0,09
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,50	0,57

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi, diantaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Pada Desember 2024 Kabupaten Rote Ndao menurut kelompok pengeluaran mengalami inflasi sebesar 1,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar angka riil inflasi di Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan indeks harga konsumen disebabkan oleh naiknya semua kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok transportasi dan makanan, minuman dan tembakau. Untuk mengatasi inflasi, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar strategi penanggulangannya dapat diketahui.

Upaya mengendalikan laju inflasi perlu dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi daerah, melakukan pemantauan dan pemberian informasi harga sembako, pengendalian harga komoditas strategis/utama (beras, cabe dan bawang merah), pemantauan dan pengendalian BBM, serta melakukan antisipasi kenaikan harga menjelang hari raya keagamaan. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah dengan memperlancar arus distribusi barang dengan peningkatan konektivitas antar daerah dari jalur laut mengingat Kabupaten Rote Ndao sebagai kabupaten kepulauan.

D. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Laporan BPS menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Rote Ndao berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 3,91 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 181 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 3,73 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 2,10 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 2,16 triliun rupiah pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,16 persen.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Administrasi Pendidikan; Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rote Ndao.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai PDRB per kapita. Nilai tersebut merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rote Ndao atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB

per kapita tercatat sebesar 22,161 juta rupiah yang secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 25,595 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun, kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan Tingkat pendapatan. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (Miliar Rupiah)					
ADHB	3.169,4	3.279,2	3.503,7	3.734,6	3.916,1
ADHK 2010	1.931,7	1.974,9	2.044,5	2.101,7	2.169,1
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	22.161	22.306	23.669	24.900	25.603
ADHK 2010	13.510	13.435	13.818	14.013	14.176
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2020	0,2	-0,56	2,85	1,41	1,16
Jumlah Penduduk	143.764	147.385	148.811	150.521	152.950
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,83	1,77	1,93	1,68	1,61

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

E. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- a) Indeks Gini < 0,3 = ketimpangan rendah
- b) 0,3=< Indeks Gini <=0,5 = ketimpangan sedang (moderat)
- c) Indeks Gini >0,5 = ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,400. Pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan menjadi 0,325. Pada tahun 2024 menjadi 0,316. Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao dikategorikan dalam ketimpangan sedang (moderat). Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pada desil 1 (satu) atau masyarakat miskin ekstrim.

Tabel 2.23

Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Gini	0,400	0.39	0,34	0,325	0,316

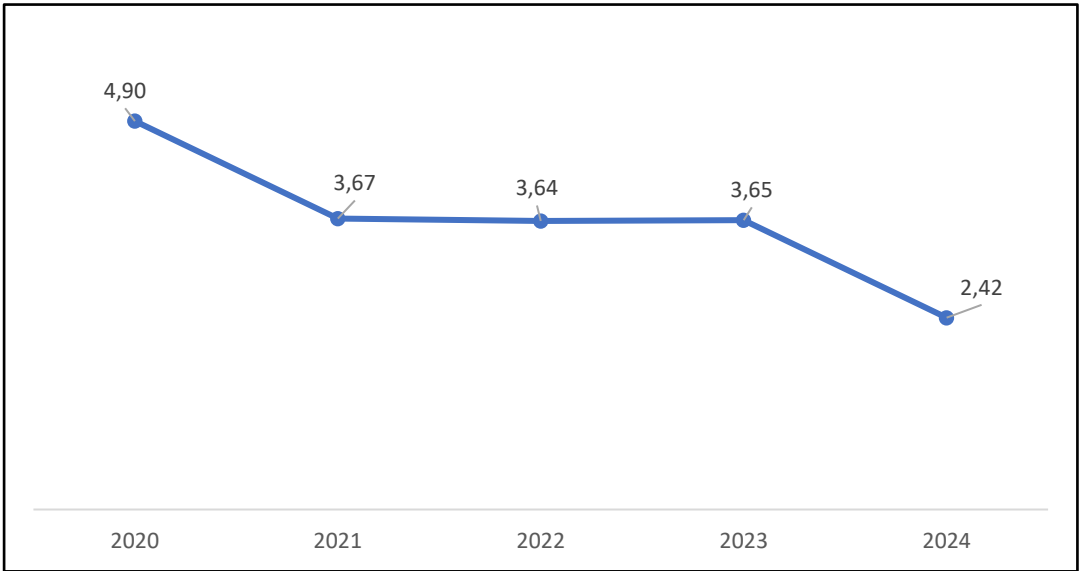
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah pengangguran sementara yang terjadi secara alami ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih cocok. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara penganggur terhadap angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran di bidang angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rote Ndao dijabarkan dalam grafik berikut:

Grafik 2.6

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami trend penurunan pada periode 2020 – 2024. Tingkat pengangguran pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,90 persen dan konsisten menurun setiap tahunnya, dan mencapai nilai 2,42 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan jumlah lapangan kerja di Kabupaten Rote Ndao terbatas sedangkan jumlah pencari kerja semakin bertambah.

G. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan. Metode pengukuran kemiskinan meliputi pengukuran berdasarkan garis kemiskinan

(pendapatan atau konsumsi), dan pengukuran berdasarkan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin.

Tabel 2.24
Tingkat Kemiskinan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Presentasi kemiskinan	%	27,54	28,08	27,45	27,05	25,78

Sumber: BPS Rote Ndao, Tahun 2025

Data kemiskinan Kabupaten Rote Ndao dalam periode 2020-2024 menunjukkan perjalanan yang menarik dengan pola fluktuatif namun berakhir positif. Periode dimulai dengan tingkat kemiskinan 27,54% pada 2020, kemudian mengalami peningkatan menjadi 28,08% pada 2021 - kemungkinan sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun, sejak 2022 mulai terlihat tren perbaikan yang konsisten: turun menjadi 27,45% (2022), berlanjut ke 27,05% (2023), dan mencapai titik terendah 25,78% pada 2024. Yang patut dicatat adalah penurunan terbesar terjadi pada tahun terakhir dengan selisih 1,27 poin persentase, menunjukkan adanya percepatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Secara keseluruhan, dari puncak tertinggi di 2021 hingga 2024, terjadi penurunan sebesar 2,30 poin persentase.

Meskipun menunjukkan tren positif, tingkat kemiskinan yang masih di atas 25% mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan, terutama mengingat karakteristik Rote Ndao sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis dan akses yang unik.

1) Persentase Penduduk Miskin

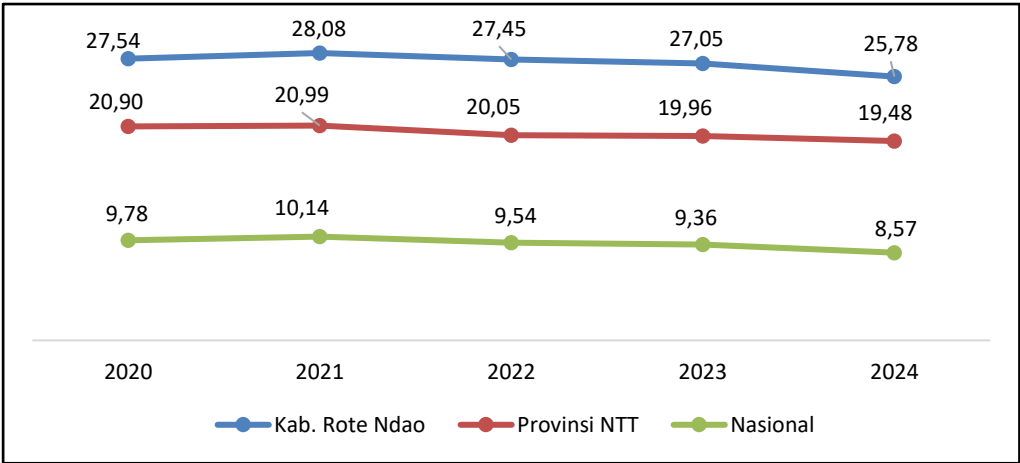
Grafik di bawah menunjukkan bahwa Kabupaten Rote Ndao memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Rote Ndao mencapai 27,54%, jauh di atas rata-rata Provinsi NTT yang sebesar 20,90% dan nasional yang hanya 9,78%.

Tren perkembangan kemiskinan di Rote Ndao menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung menurun. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 28,08% (titik tertinggi dalam periode ini), tingkat kemiskinan mulai menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022 turun menjadi 27,45%, kemudian terus menurun pada 2023 menjadi 27,05%, dan mencapai 25,78% pada tahun 2024.

Perbandingan dengan Provinsi NTT dan nasional menunjukkan bahwa meskipun Rote Ndao mengalami penurunan kemiskinan, tingkat kemiskinannya masih tetap yang di atas kemiskinan Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Rote Ndao (25,78%) masih lebih tinggi 6,3 poin persentase dari rata-rata Provinsi NTT (19,48%) dan hampir tiga kali lipat dari rata-rata nasional (8,57%). Sehingga,

meskipun terjadi perbaikan dengan penurunan sekitar 1,76 poin persentase selama periode 2020-2024, Kabupaten Rote Ndao masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Grafik 2.7
Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2025

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Di Kabupaten Rote Ndao, perkembangan penduduk miskin sejak tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, selama kurun waktu 5 tahun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao yang paling tinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 51.710 jiwa dengan Garis Kemiskinan (GK) 341.135/bulan/kapita, dan tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 52.890 jiwa dengan Garis Kemiskinan (GK) 426.843/bulan/kapita. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	322.619	48.770	27,54
2021	341.135	51.710	28,08
2022	372.179	52.430	27,45
2023	410.491	53.550	27,05
2024	426.843	52.890	25,78

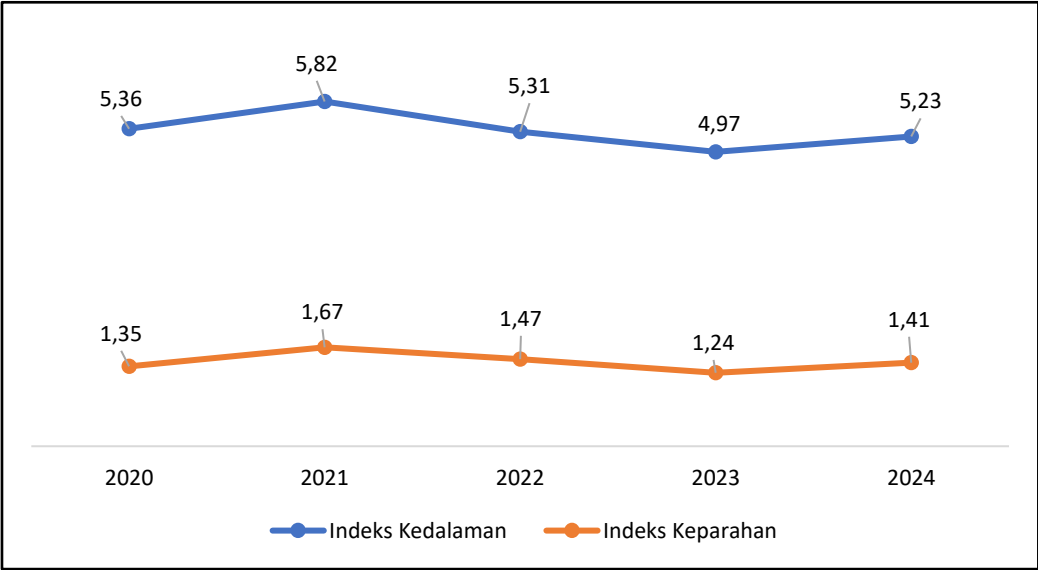
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota, Tahun 2025 (BPS) & LP2KD,Tahun 2025

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin. Analisis lebih lanjut bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sepanjang kurun waktu 2020 – 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sebesar 5,36 persen, menurun menjadi 5,23 persen ditahun 2024, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2020 sebesar 1,35 persen, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,41 persen. Secara rinci dijabarkan pada grafik di bawah:

Grafik 2.8

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2025

H. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator dalam menilai status kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB bukanlah sebatas indikator kesehatan ibu dan anak, melainkan menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisien dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai cara dilakukan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi

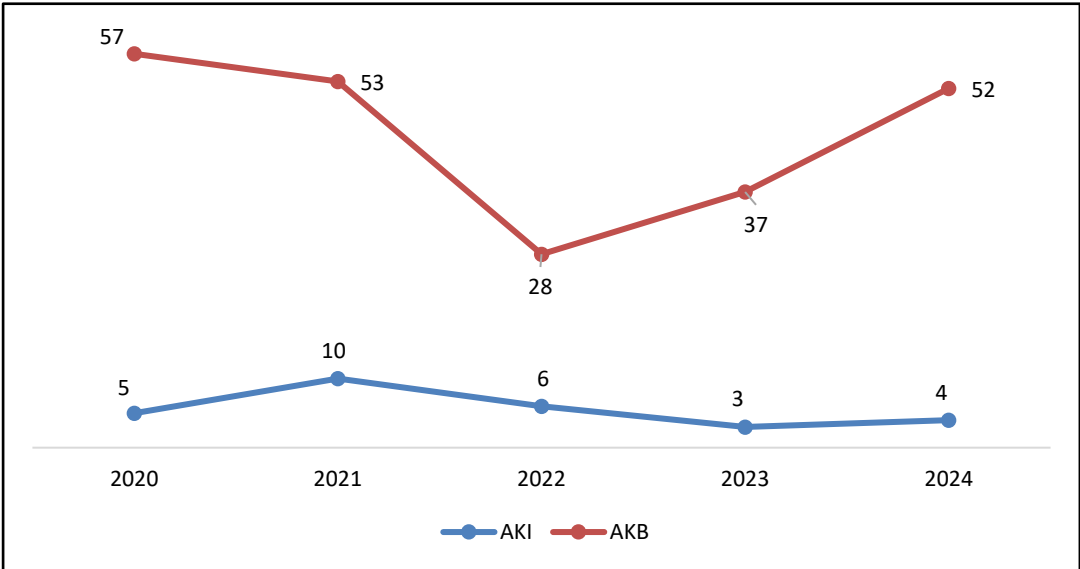
Puskesmas pembantu, menempatkan tenaga bidan di Pustu, memperpanjang waktu pelayanan di Puskesmas Rawat Inap serta meningkatkan kualitas pelayanan. Khususnya untuk mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas. Dan juga kebijakan prioritas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Faktor penyebab kematian bayi yaitu tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Semakin tinggi AKB di suatu wilayah dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut masih relatif rendah. Kematian bayi pada umumnya disebabkan karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Sepsis, Pneumonia, Diare, Observasi Febris, Syok Haemoragik dan Demam. Angka kematian ibu (AKI) yang terus meningkat terjadi di Kabupaten Rote Ndao disebabkan karena faktor pandemi COVID-19, status gizi, kesehatan perorangan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi mereka serta masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, akar penyebab kematian ibu adalah karena 3 Terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kematian dan kesehatan pada bayi sangat terkait dengan imunisasi, status gizi, penyakit menular, kemiskinan dan juga fasilitas kesehatan yang tersedia. Disparitas cakupan pelayanan karena kendala geografis, sosial ekonomi dan klasifikasi tempat tinggal masih menjadi kendala secara nasional. Cakupan pelayanan selama persalinan dan pasca persalinan haruslah dapat menjangkau masyarakat miskin dan sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat mengurangi kematian bayi atau meningkatkan kelangsungan hidup bayi.

Angka Kematian Ibu pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi namun meningkat, tahun 2020 sebanyak 57 ibu meninggal menurun menjadi 28 ibu tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 52 orang pada tahun 2024. Kematian Bayi masih terus terjadi namun fluktuatif, tahun 2020 sebanyak 5 orang, meningkat menjadi 10 orang tahun 2021 kemudian menurun menjadi 4 orang pada tahun 2024. Berikut grafik angka kematian Ibu dan bayi tahun 2020-2024:

Grafik 2.9

Tren Kematian Ibu dan Kematian Bayi Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa angka kematian bayi tahun 2020 sebanyak 57 kasus lebih tinggi dari tahun 2021 yakni sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2022 kasus kematian bayi menurun menjadi 28 kasus, meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 37 dan tahun 2024 menjadi 52 kasus yang disebabkan karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, pneumonia, diare, demam dan kelainan bawaan lainnya. Kasus kematian ibu Tahun 2021 sebanyak 10 kasus, pada tahun 2022 menurun menjadi 6 kasus dan menurun kembali menjadi 3 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 4 kasus.

I. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur IPM, digunakan indikator seperti angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan GNI per kapita. Tabel di bawah ini menyajikan data terkait indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.26

Indeks Pembangunan Manusia

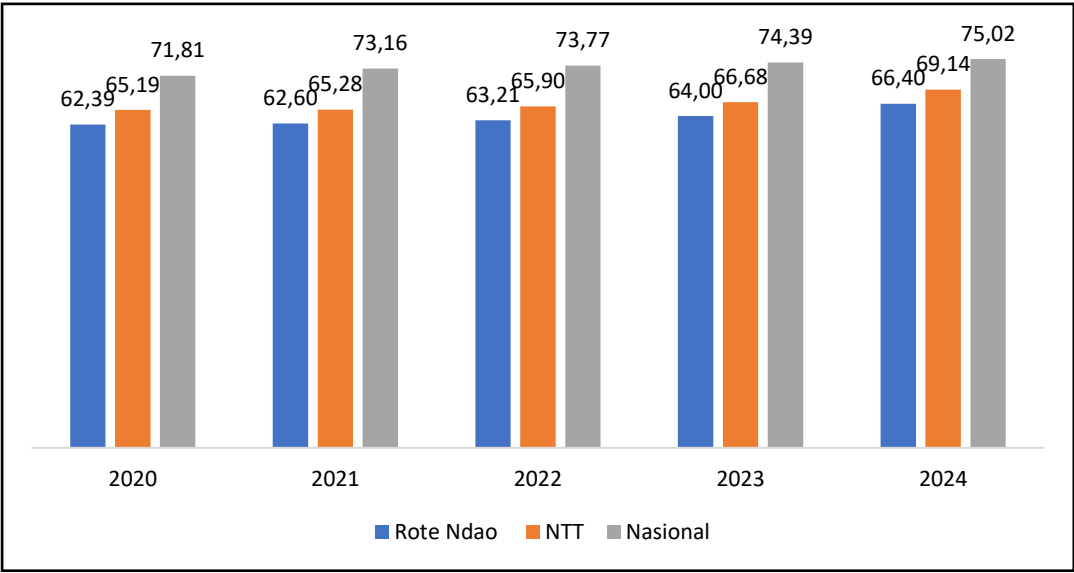
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	62,39	62,60	63,21	64,00	66,40

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Di Kabupaten Rote Ndao IPM meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.10

Perbandingan IPM Kabupaten Rote Ndao Terhadap Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selama Tahun 2020-2024 angka IPM Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan dari 62,39 pada tahun 2020 menjadi 66,40 pada tahun 2024. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao agar menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

Bidang pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam upaya penurunan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat memacu peningkatan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu program prioritas di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan urusan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia potensial dan kompetitif, dimulai dari menyiapkan dan mengembangkan kualitas pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan non formal (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA atau SMK/MAK), pendidikan luar biasa, pendidikan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta program manajemen pelayanan pendidikan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rote Ndao telah menunjukkan kemajuan dan keberhasilan dari berbagai jenjang pendidikan, sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Rote Ndao telah memiliki 124 Sekolah Dasar Negeri dan 28 Sekolah Dasar Swasta sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 40 Sekolah Negeri dan 5 Sekolah Menengah Pertama Swasta yang tersebar di 11 kecamatan, kenaikan angka rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah.

1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian Pendidikan suatu daerah. Indeks Pendidikan terbentuk dari beberapa faktor pendukung, antara lain kelengkapan sarana Pendidikan yang tersedia untuk setiap jenjang mulai dari sekolah dasar. Rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Pendidikan suatu daerah.

Indeks Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao adalah seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27
Indeks Pendidikan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan (poin)	0,619	0,623	0,626	0,628	0,629

Sumber: BPS Provinsi NTT, Tahun 2025

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mencerminkan efek dari perbaikan dalam sistem pendidikan atau faktor-faktor lain serta menunjukkan kelanjutan dari upaya

untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menunjukkan komitmen terus-menerus dari Pemerintah Rote Ndao untuk meningkatkan pendidikan. Tren ini menggambarkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan pendidikan formal dan peningkatan lama waktu yang dihabiskan individu dalam sistem pendidikan selama periode waktu yang diamati. Hal ini dapat memiliki dampak positif pada perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, rata-rata lama sekolah di tingkat provinsi (NTT) juga terus mengalami peningkatan, pada tingkat nasional juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Rote Ndao masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Berikut tabel rata-rata lama sekolah Rote Ndao, NTT dan Nasional:

Tabel 2.28

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rote Ndao	7,59	7,71	7,76	7,82	7,83
Provinsi	7,63	7,69	7,70	7,82	8,02
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

3) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusta Statistik (BPS).

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2020 hingga 2024 untuk Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tingkat nasional. Terlihat bahwa HLS di Kabupaten Rote Ndao relatif stabil dan terus meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya, dari 13,18 tahun pada 2020 menjadi 13,23 tahun pada 2024. Angka ini sejalan dengan rata-rata provinsi Nusa Tenggara

Timur, yang juga mencapai 13,23 tahun pada 2024. Konsistensi ini menunjukkan bahwa akses dan peluang pendidikan di Rote Ndao cukup baik dan mengalami peningkatan bertahap.

Dibandingkan dengan angka nasional, HLS di Kabupaten Rote Ndao dan NTT secara keseluruhan selalu berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2020, HLS nasional tercatat 12,98 tahun dan meningkat menjadi 13,21 tahun pada tahun 2024. Kesenjangan positif ini menunjukkan bahwa di Rote Ndao dan NTT, anak-anak memiliki peluang yang lebih baik untuk menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan rata-rata nasional. Peningkatan ini menjadi indikasi positif dari upaya pemerintah daerah dan provinsi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang tentunya mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik.

Tabel 2.29
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Rote Ndao (Tahun)	13,18	13,19	13,21	13,22	13,23
Prov. Nusa Tenggara Timur (Tahun)	13,18	13,20	13,21	13,22	13,23
Nasional (Tahun)	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025; BPS Prov. NTT, Tahun 2025

Statistik Indonesia, Tahun 2025

4) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam kelompok usia tersebut. Pendidikan tinggi di sini biasanya meliputi: Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).

Di Kabupaten Rote Ndao data tingkat pendidikan yang tersedia adalah data ASN, yang terdiri dari D1 sebanyak 5 orang, D2 sebanyak 41 orang, D3 sebanyak 503 orang, D4 sebanyak 71 orang, S1 sebanyak 1.872 orang, S2 sebanyak 67 orang dan S3 sebanyak 1 orang dengan total 2.560 orang.

5) Angka Literasi/Numerasi

Skor Literasi dan Numerasi mengacu pada hasil penilaian atau pengukuran kemampuan individu dalam membaca, memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi secara efektif (literasi) dan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka (numerasi). Skor Literasi

dan Numerasi biasanya digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi dan numerasi suatu populasi, baik secara nasional maupun regional.

Skor Literasi dan Numerasi penting karena kemampuan literasi dan numerasi memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Hasil penilaian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam memperbaiki kemampuan literasi dan numerasi di masyarakat.

6) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu :

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian IPLM 2024 oleh Perpustakaan Nasional, dilaporkan bahwa IPLM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah 65,02. Nilai indeks ini naik dari nilai IPLM Tahun 2023 sebesar 56,19. Berdasarkan Nilai IPLM Tahun 2024, Kabupaten Rote Ndao masuk dalam kategori sedang, dan nilai indeks ini lebih tinggi dibanding nilai IPLM Provinsi NTT yaitu 62,62.

B. Kesehatan

Kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang menjadi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Prioritas intervensi dalam bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao adalah penurunan angka kematian bayi dengan intervensi pada jumlah tenaga bidan dan

tenaga penyuluhan gizi untuk ibu hamil dan balita, jumlah tenaga dokter dan perawat untuk mengurangi angka keluhan kesehatan. Selain itu juga diperlukan tenaga penyuluh kesehatan agar kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa tenaga kesehatan yang disiapkan dan perlu adanya penambahan jumlah sarana kesehatan untuk kecamatan dan desa yang dimekarkan. Kebijakan urusan kesehatan Kabupaten Rote Ndao yaitu percepatan penanggulangan masalah kesehatan dan gizi buruk dengan : Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia serta program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1) **Umur Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program. Usia Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Usia Harapan Hidup

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
UHH Rote Ndao (Tahun)	64,60	64,88	65,26	65,60	65,85
UHH NTT (Tahun)	67,01	67,15	67,47	67,77	71,83

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan BPS Prov. NTT, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020, yaitu 64,60 tahun dan meningkat hingga tahun 2024 mencapai 65,85 tahun. Hal ini menunjukan

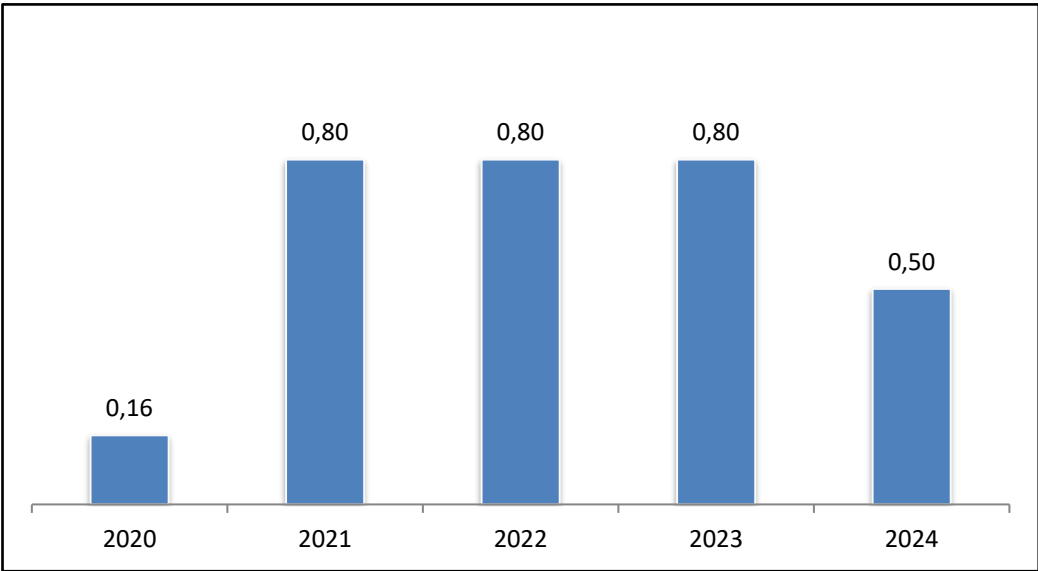
seseorang yang lahir pada tahun 2024 memiliki usia harapan hidup selama 65,85 tahun.

2) **Persentase Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*), atau dengan kata lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Gizi buruk merupakan bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan pencernaan atau penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Kelaparan yang lama bisa berujung pada status gizi buruk. Masalah gizi buruk merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta juga berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Perkembangan balita Gizi buruk disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.11

Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

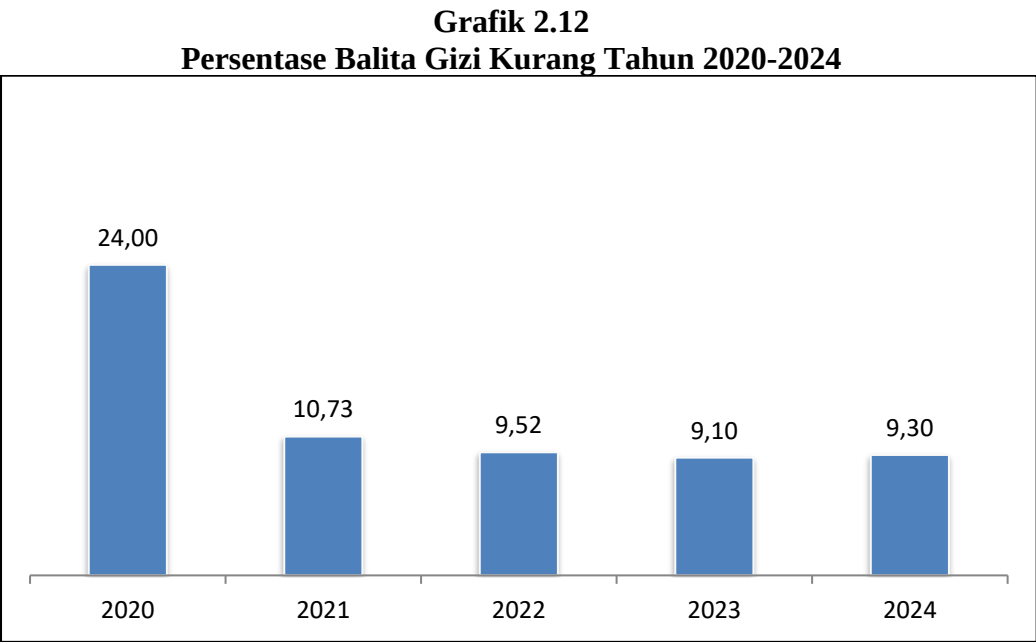
Grafik di atas menunjukkan fluktuasi persentase balita dengan status gizi buruk selama periode 2020-2024. Data menunjukkan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,16%, kemudian mengalami peningkatan drastis menjadi 0,80% pada tahun 2021 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 0,50%.

Dari Tahun 2020 – Tahun 2021 terjadi lonjakan lima kali lipat dari 0,16% menjadi 0,80%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi keluarga. Persentase gizi buruk bertahan pada angka 0,80% selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021 – 2023, menunjukkan belum

optimalnya program intervensi gizi. Namun kemudian terjadi penurunan menjadi 0,50% mengindikasikan adanya perbaikan, meskipun masih belum kembali ke level pra-pandemi.

3) **Balita Gizi Kurang**

Grafik di bawah menyajikan tren penurunan yang signifikan dalam persentase balita dengan status gizi kurang selama periode 2020-2024.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, 2025

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Persentase Balita gizi buruk di Kabupaten Rote Ndao memiliki trend penurunan yang cukup signifikan. Presentasi tertinggi balita gizi kurang terjadi pada tahun 2020 sebesar 24%, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 10,73% pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut hingga mencapai titik terendah 9,10% pada tahun 2023, namun mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,30% pada tahun 2024.

Pada periode 2020 – 2021 terjadi penurunan signifikan sebesar 13,27 poin persentase (dari 24% menjadi 10,73%). Hal ini adanya inovasi Gerbang Linsek dan Mama Boi yang mendorong semua lini untuk bekerja. Selanjutnya terjadi penurunan bertahap pada 2021 - 2023 dari 10,73% menjadi 9,10%, menunjukkan konsistensi program intervensi gizi dalam mengatasi masalah gizi kurang.

Penurunan persentase gizi kurang dari 24% menjadi sekitar 9% dalam kurun waktu 4 tahun merupakan pencapaian yang luar biasa, menunjukkan efektivitas program-program gizi dan inovasi yang telah diimplementasikan, seperti inovasi Kakak Angkat Adik Asuh, Gerbang Linsek, Rote Cerdas dan Inovasi Mama Boi.

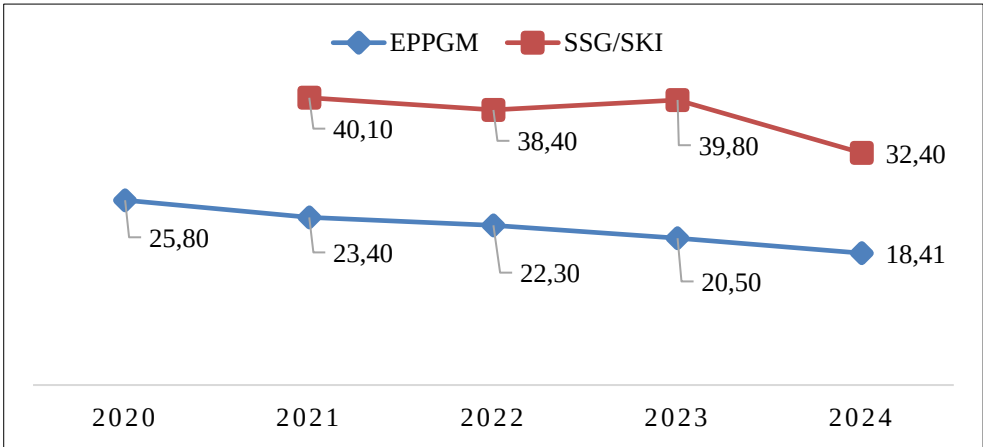
Terhadap grafik balita gizi buruk dan balita gizi kurang maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbaikan signifikan dalam mengatasi

gizi kurang, diperlukan strategi khusus untuk mencegah progresivitas ke gizi buruk, terutama pada kelompok balita yang paling rentan.

4) **Prevalensi Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi gagal tumbuh pada anak Balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh, dan lingkungan (ketersediaan sanitasi dan akses air bersih). Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 stunting sebesar 25,80 persen mengalami penurunan menjadi 18,41 persen pada tahun 2024. Ini menandakan ada usaha dan kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi balita stunting. Percepatan penanganan dan penurunan angka stunting ini harus segera dilakukan agar tidak terjadi putusnya generasi penerus pembangunan yang cerdas dan kreatif. Seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama perlu melakukan upaya secara terpadu dan bersinergi sehingga diharapkan angka tersebut menurun sesuai target. Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13
Tren Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024



Sumber: Data Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Stunting pada tahun 2018, berbagai pendekatan penanganan stunting terus dilakukan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting. Pendekatan pencegahan Stunting dilakukan melalui Gerakan RevOlusi TERpadu (ROTE) CERDAS yaitu:

- C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di fasilitas kesehatan (revolusi KIA)
- E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- R : Rutin ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita
- D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang cukup (gemar makan ikan/revolusi laut)

A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jamban sehat
S : Selalu beri ASI eksklusif

Pendekatan CERDAS dalam penanganan stunting merupakan salah satu pendekatan penanganan stunting di Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao No. 68 Tahun 2024 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi Dengan Penguatan Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Kabupaten Rote Ndao. Pendekatan ini merupakan payung terhadap berbagai inovasi dalam mencegah dan menangani stunting di Kabupaten Rote Ndao. Salah satu inovasi lainnya yang mulai gencar dilakukan sejak tahun 2021 untuk penanganan baduta stunting, yaitu Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh (Gerakan Ka’a Fa’di). Gerakan ini mendorong seluruh ASN menjadi kakak angkat bagi seluruh baduta stunting di Kabupaten Rote Ndao. Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 25,80 persen menurun menjadi 18,41 persen pada tahun 2024. Tren penurunan prevalensi stunting tidak terlepas dari 3 intervensi/inovasi utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rote Ndao, yaitu:

1. Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh
2. Inovasi Mama Bo’i
3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan local

5) **Treatment Covarage Kasus Tuberkulosis (TBC)**

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Insidensi TB mengacu pada jumlah kasus baru penyakit TB yang terjadi dalam suatu populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Insidensi biasanya diukur dalam bentuk jumlah kasus baru yang terjadi per seribu atau per seratus ribu populasi dalam satu tahun. *Treatment Coeverage* Kasus *Tuberkulosis* (TBC) dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Treatment Covarage Kasus Tuberkulosis (TBC)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Treatment Coeverage</i> Kasus <i>Tuberkulosis</i> (TBC)	111	66	234	262	159

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

6) **Indeks Keluarga Sehat**

Keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam

rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga, antara lain yaitu 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga.

7) **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan dari tahun tahun 2020 sebesar 80,20 persen meningkat menjadi 98,88 persen pada tahun 2024 yang berarti sekitar 9 dari 10 penduduk di kabupaten ini telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional. Angka ini sudah tergolong tinggi dan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kenaikan ini menandakan bahwa hampir seluruh penduduk Rote Ndao kini telah terlindungi oleh program JKN. Pencapaian ini sangat penting karena berarti masyarakat di kabupaten tersebut memiliki jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN yang hampir mencapai 99% ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan *universal health coverage* di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dari risiko finansial akibat biaya Kesehatan. Berikut tabel cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tahun 2020-2024:

Tabel 2.32

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	80.20	80,12	93,21	90,93	98,88

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, cakupan kepesertaan JKN di Rote Ndao mencapai 90,93%, yang berarti sekitar 9 dari 10 penduduk di kabupaten ini telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional. Angka ini sudah tergolong tinggi dan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Kemudian pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang cukup substansial menjadi 98,88%. Kenaikan sebesar 7,95% ini menandakan bahwa hampir seluruh penduduk Rote Ndao kini telah terlindungi oleh program JKN. Pencapaian ini sangat penting karena berarti masyarakat di kabupaten tersebut memiliki jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN yang hampir mencapai 99% ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan universal health coverage di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dari risiko finansial akibat biaya Kesehatan

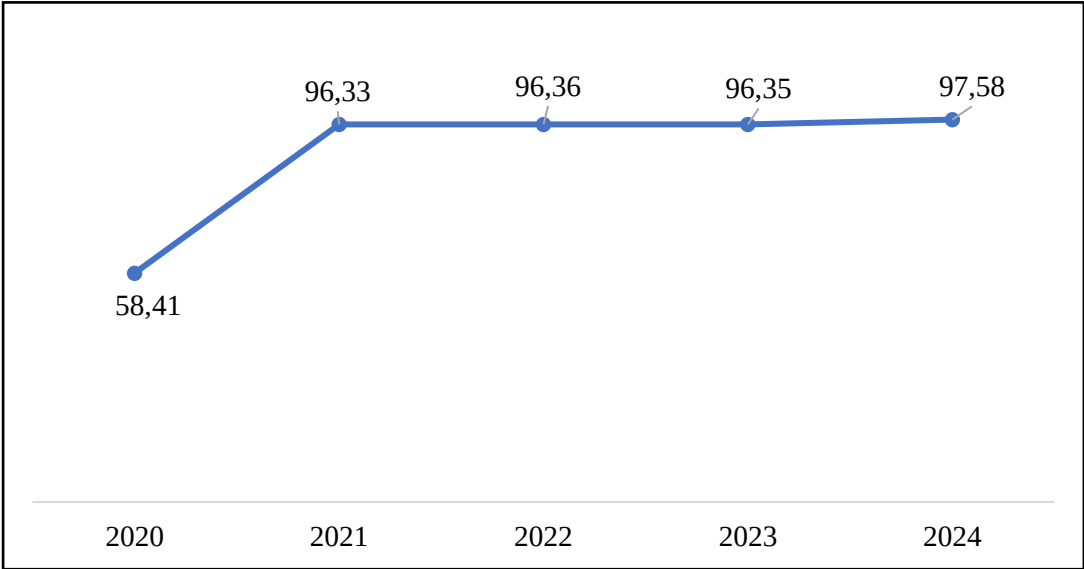
C. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Rote Ndao merupakan angkatan kerja yang terdiri atas jumlah total yang bekerja dan pengangguran berbanding terhadap angkatan kerja, rasio penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan tahun 2020 sebesar 58,41 persen meningkat menjadi 97,58 persen pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah yang bekerja dan pengangguran.

Rasio penduduk yang bekerja dengan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 58,41%. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid -19 yang membuat banyak pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sulit melamar pekerjaan di tempat yang baru dan membuat banyak penduduk tidak memiliki pekerjaan. Namun pada tahun 2021 mulai terjadi kondisi pemulihan pada sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024. Berikut rasio penduduk bekerja Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:

Grafik 2.14

Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

D. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital.

IMDI Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2024 adalah sebesar 45,16. Dari 4 Pilar pembentuk IMDI, nilai tertinggi adalah pilar ketrampilan digital (52,66), dan nilai terendah adalah Pemberdayaan (26,09). Nilai IMDI Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini di atas nilai IMDI Propinsi NTT yaitu 42,32 bahkan juga di atas nilai indeks nasional yang tercatat sebesar 43,34 di tahun yang sama. Ada trend kenaikan nilai indeks di Rote Ndao sejak IMDI diperkenalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2022. Nilai IMDI Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2022 adalah 32,32 dan naik menjadi 41,74 di Tahun 2023.

E. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 10,07 persen dengan rincian jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 6.062 orang dibandingkan total jumlah penduduk bekerja sebanyak 60.220 orang, tahun 2023 sebesar 18,64 persen dengan rincian jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 10.412 orang dibandingkan total jumlah penduduk bekerja sebanyak 55.870 orang, tahun 2024 sebesar 26,63 persen dengan rincian jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 11.749 orang dibandingkan total jumlah penduduk bekerja sebanyak 44.121 orang. Berikut tabel cakupan kepesertaan jaminan sosial tahun 2020-2024:

Tabel 2.33

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	N/A	N/A	10,07	18,64	26,63

Sumber: Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Presentase PMKS Mandiri

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hambatan ini bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. PMKS sering kali membutuhkan intervensi dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengatasi masalah yang dihadapi.

PMKS dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis masalah yang mereka hadapi. Kategori utama PMKS adalah:

- 1) Anak Terlantar, Anak terlantar adalah anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai dari orang tua atau wali mereka. Mereka sering kali hidup di jalanan atau di tempat-tempat penampungan sementara dan berisiko tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.
- 2) Lansia Terlantar; Lansia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mendapatkan perawatan atau perhatian yang memadai dari keluarga mereka. Mereka mungkin tinggal sendiri tanpa dukungan yang memadai dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- 3) Penyandang Disabilitas; Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka memerlukan bantuan khusus untuk mencapai kemandirian dan integrasi sosial yang lebih baik.
- 4) Korban Kekerasan; Korban kekerasan mencakup individu yang mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk pulih dari trauma serta bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase PMKS yang menerima bantuan tercatat sebesar 42,18%. Angka ini terus mengalami perbaikan hingga mencapai 46,15% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan program bantuan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di wilayah tersebut. Namun, angka ini

juga menunjukkan bahwa masih diperlukan kerja lebih lanjut untuk memastikan seluruh PMKS mendapatkan dukungan yang memadai. Berikut capaian kinerja pelayanan Bidang sosial di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.34
Presentase PMKS Mandiri

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang tertangani (%)	42,18	65,38	65,38	65,38	46,15
2	Persentase PMKS Mandiri (%)	N/A	N/A	N/A	2,47	3,93

Sumber: Dinas Sosial Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

G. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang masuk usia kerja. Pentingnya hal ini adalah untuk mengukur sejauh mana inklusi dan aksesibilitas dunia kerja terhadap penyandang disabilitas di sebuah wilayah.

H. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni, toleransi, dan kerukunan antara berbagai kelompok agama di suatu wilayah, negara, atau komunitas. Indeks semacam ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hubungan antarumat beragama dalam suatu masyarakat bersifat damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama membantu pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi kerukunan antarumat beragama, serta merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi di antara kelompok-kelompok agama. Dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai, inklusif, dan berdaya, serta mencegah konflik antaragama yang merugikan bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

I. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga adalah evaluasi untuk mengukur dan menganalisis kualitas hubungan serta fungsi dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika keluarga, tingkat kepuasan dan kesejahteraan anggota keluarga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Indeks Kualitas Keluarga membantu dalam mengevaluasi keadaan keluarga secara komprehensif dan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang

memerlukan perbaikan atau perhatian khusus. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas keluarga, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat merancang program-program yang mendukung keluarga dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih baik. Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Berikut ini lima dimensi Indeks Kualitas Keluarga beserta indikator yaitu:

- a. Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS) (3 Indikator) terdiri dari:
 1. Kepemilikan surat nikah
 2. Kepemilikan akte kelahiran.
 3. Tinggal dalam satu rumah.
- b. Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) (6 Indikator) terdiri dari:
 1. Mampu makan lengkap.
 2. Tidak menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas.
 3. Tidak ada menderita masalah gizi.
 4. Ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak.
 5. Tidak ada anak merokok.
 6. Tidak ada sakit
- c. Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) (8 Indikator) terdiri dari:
 1. Kepemilikan rumah.
 2. Mempunyai penghasilan tetap per bulan.
 3. Mempunyai tabungan.
 4. Memiliki asuransi kesehatan.
 5. Tidak menunggak membayar iuran pendidikan anak.
 6. Tidak ada anak putus sekolah.
 7. Istri bekerja.
 8. Mengelola keuangan keluarga bersama.
- d. Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) (6 Indikator) terdiri dari:
 1. Tidak ada kekerasan antar suami dan istri.
 2. Tidak ada kekerasan antar orangtua dan anak.
 3. Tidak ada berhadapan dengan hukum.
 4. Melakukan rekreasi bersama.
 5. Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak.
 6. Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.
- e. Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) (6 Indikator) terdiri dari:
 1. Tidak ada anak dinikahkan.
 2. Orangtua mengajarkan pola hidup bersih dan sehat.

- 3. Berpartisipasi kegiatan sosial.
- 4. Memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia.
- 5. Melakukan kegiatan agama.
- 6. Anak bersama orang dewasa menggunakan media sosial.

J. Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender (*Gender Development and Empowerment Index*) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. Indeks semacam ini dirancang untuk mencerminkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan layanan, serta sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang.

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

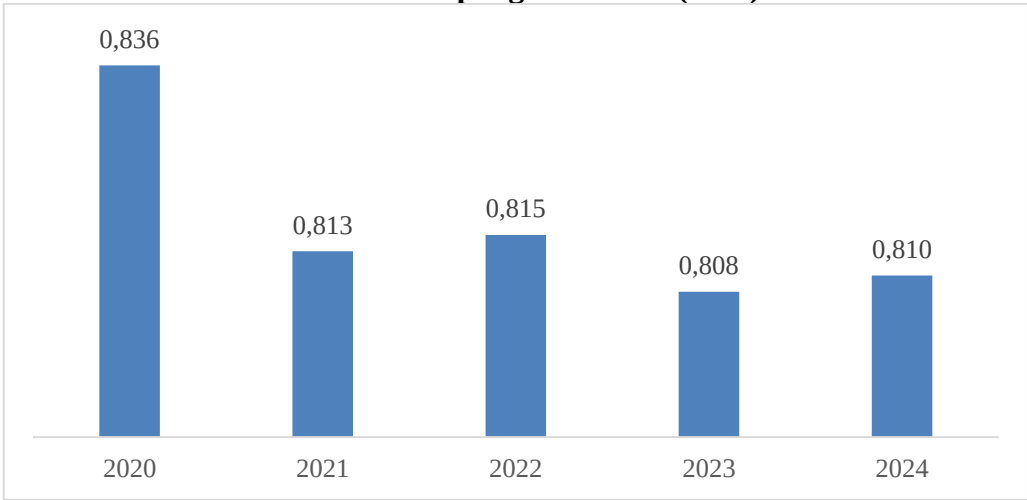
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	84,62	84,08	84,86	85,28	85,60
2	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	65,80	47,20	47,40	50,03	50,43

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dari 0,836 persen menjadi 0,813 poin, hal ini disebabkan oleh faktor kontrol atas sumber daya ekonomi, pendidikan, pendapatan, angka kematian, akses dalam mendapatkan pekerjaan, upah, dan wewenang di area publik dan swasta yang masih lemah terhadap perempuan. Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,815 poin dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,808 poin, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,810 poin.

Grafik 2.15
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2024

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Kabupaten Rote Ndao mencatat kemajuan signifikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan peningkatan indeks dari kategori "Cukup" menjadi kategori "Baik". Skor itu meningkat dari nilai indeks 2,48 di Tahun 2022 ke nilai indeks 2,99 di Tahun 2023. Peningkatan indeks SPBE Kabupaten Rote Ndao ke nilai 2,99 tidak hanya menandakan peningkatan internal, tetapi juga melampaui rata-rata nilai indeks nasional saat ini yang berada pada nilai 2,7. Secara rinci, Indeks SPBE ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Indeks SPBE

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE (skor)	1,00	2,48	2,99	3,35

Sumber: Dinas KISP Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

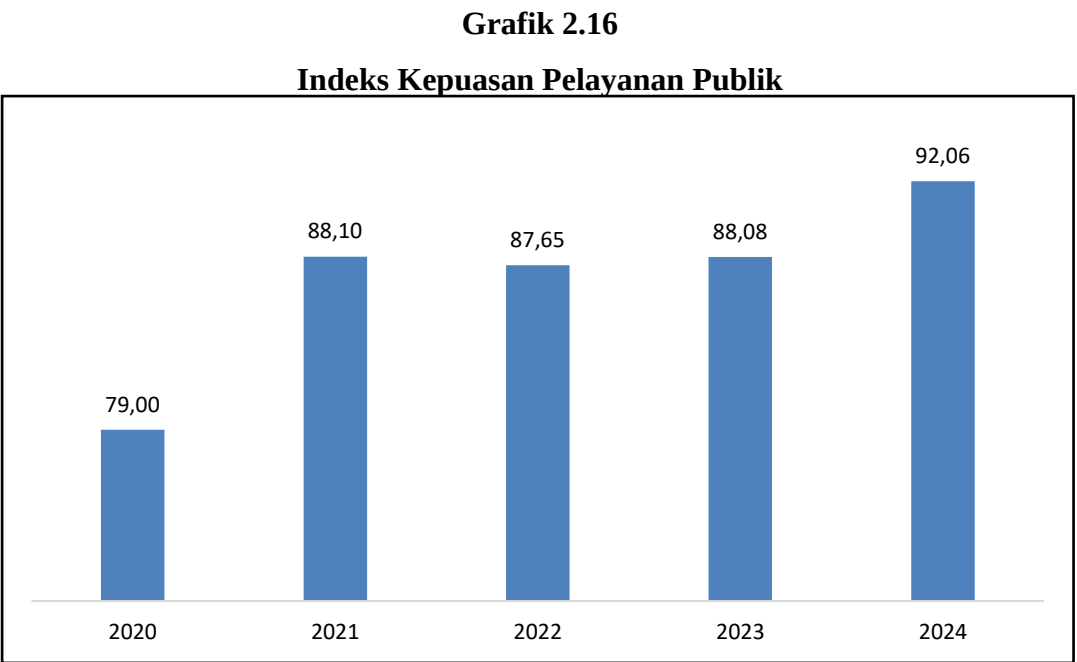
C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrument dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Tujuan dari IPP adalah

untuk mengevaluasi sejauh mana kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi oleh pelayanan yang diberikan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.

IPP biasanya melibatkan survei yang dilakukan kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan publik tertentu. Survei ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan layanan, kemudahan akses, kualitas layanan, tingkat kepuasan terhadap interaksi dengan petugas pelayanan, dan kemudahan mendapatkan informasi.

Hasil dari IPP dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mengukur dampak dari upaya perbaikan yang telah dilakukan. Dengan memantau IPP secara teratur, pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat dan terus meningkatkan kualitasnya. Berikut grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024:



Sumber: Bapelitbangda Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kabupaten

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif dirancang sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Indeks pelayanan publik merupakan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 78,74 Poin dan meningkat 87,65 Poin pada tahun 2022, tetapi mengalami penurunan menjadi 88,08 Poin pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 89,29 Poin.

Tabel 2.37
Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78,74	88,10	87,65	88,08	89,29

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat kecamatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat. IKM biasanya diukur melalui survei yang mencakup berbagai aspek pelayanan, seperti:

- 1) Prosedur Pelayanan: Seberapa mudah dan jelas prosedur yang harus diikuti masyarakat untuk mendapatkan layanan.
- 2) Waktu Pelayanan: Seberapa cepat layanan diberikan.
- 3) Jenis Layanan: Jenis layanan dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Perilaku Pelaksana: Keramahan dan sikap petugas terhadap masyarakat.
- 5) Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas yang memadai dalam mendukung layanan.
- 6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Responsivitas petugas dalam menangani keluhan atau masukan dari masyarakat.

Tabel 2.38
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
di Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Realisasi 2024
1	Lobalain	86,83
2	Rote Barat Laut	92,28
3	Rote Barat Daya	91,01
4	Rote Barat	88,17
5	Rote Selatan	88,83
6	Rote Tengah	87,78
7	Pantai Baru	86,67
8	Rote Timur	86,39
9	Ndao Nuse	91,72
10	Landu Leko	87,83
11	Loaholu	91,39

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

E. **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

- 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini yang dihasilkan berdasarkan pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.39
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BKAD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah salah satu alat evaluasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur kinerja reformasi birokrasi. Tujuan utama dari IRB adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan dan regulasi, manajemen kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola, dan inovasi. Data yang digunakan untuk menghitung IRB biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei kepada pegawai negeri dan masyarakat umum, analisis dokumen kebijakan, dan evaluasi kinerja birokrasi.

Melalui IRB, pemerintah dapat memantau perkembangan reformasi birokrasi, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, serta mengukur dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, IRB menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak mulai terukur pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, data indeks ini belum tersedia (N/A). Pada 2022, nilai awal yang tercatat adalah 42,14

poin. Kemudian, pada 2023 terjadi peningkatan menjadi 50,77 poin, dan pada 2024 indeks ini semakin membaik dengan capaian 62,68 poin. Kenaikan ini mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.40

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	N/A	42,14	50,77	62,68

Sumber: Penilaian Kemenpan RB, Tahun 2025

G. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

SAKIP bertujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya SAKIP, diharapkan bahwa kinerja pemerintah akan lebih terukur dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 2.41

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC	CC	B

Sumber: Penilaian Kemenpan RB, Tahun 2025

Sesuai Tabel di atas, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang konsisten dengan pencapaian terobosan signifikan pada tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa instansi mempertahankan predikat "CC" (Cukup) selama empat tahun berturut-turut dari 2020 hingga 2023, kemudian berhasil meraih peningkatan menjadi predikat "B" (Baik) pada tahun 2024.

Perjalanan SAKIP di Kabupaten Rote Ndao selama 2020-2024 mencerminkan proses pematangan bertahap yang bermuara pada pencapaian terobosan signifikan. Konsistensi di level CC selama empat tahun dari Tahun 2020 – 2023 menunjukkan fondasi yang solid, sementara lompatan ke predikat B pada 2024 mengindikasikan komitmen serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Pencapaian ini bukan

hanya sekedar peningkatan nilai, tetapi representasi dari transformasi tata kelola yang lebih baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan momentum positif ini, instansi memiliki potensi besar untuk terus berkembang menuju level akuntabilitas yang lebih tinggi di masa mendatang.

H. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. IPKD merupakan satuan ukuran yang menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD Provinsi dinilai oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/ Kota dinilai oleh Gubernur. Indeks pengelolaan keuangan daerah biasanya mengevaluasi beberapa aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas. Nilai ini menjadi indikator penting tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangannya.

Tabel 2.42
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	NA	NA	NA	78,89	75,90

Sumber: BKAD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir yang tersedia datanya. Setelah periode 2020-2022 dimana data IPKD tidak tersedia, Kabupaten Rote Ndao berhasil mencatatkan kinerja yang baik dengan skor 78,89 pada tahun 2023 dan menjadi 75,90 pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan transformasi positif dari periode ketidaktersediaan data menuju pencapaian yang membanggakan. Capaian ini bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi refleksi komitmen nyata terhadap tata kelola keuangan yang baik. Pencapaian ini menjadi fondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rote Ndao. Dengan momentum positif yang telah terbangun, Kabupaten Rote Ndao memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

I. Nilai Sistem Merit

Sistem merit adalah sebuah sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti pengadaan, pengembangan karir, promosi, dan lainnya. Nilai sistem merit diukur melalui penilaian mandiri menggunakan sistem skor dan bobot, yang mencakup aspek seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, hingga manajemen kinerja.

Penilaian sistem merit merupakan indikator yang baru diterapkan pada periode RPJMD 2025 – 2029. Dengan sistem merit, maka kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, dan wajar tanpa diskriminasi. Aspek pengukuran nilai sistem merit meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan ASN: Sudah memiliki rencana kebutuhan ASN untuk 5 Tahun berdasarkan Anjab dan ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun;
2. Pengadaan ASN: sudah memiliki kebijakan internal (Perbup) terkait pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang bersala dari instansi lain;
3. Pengembangan Karier: Memiliki kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
4. Promosi dan Mutasi: Memiliki kebijakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan, didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan Talent Pool;
5. Manajemen Kinerja: Penerapan manajemen kinerja yang dimunlai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala, dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya dan menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi serta diklat;
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Menghubungkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dalam membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
7. Perlindungan dan Pelayanan: Mempunyai program perlindungan dan memberikan pelayanan kepada pegawai;

8. Sistem Informasi: Memiliki sistem yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit, seperti sistem informasi kepegawaian, Assessment Center, e-performance, e – office, dll.

J. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang mengukur kemampuan daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menarik investasi. IDSD terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Ke empat komponen ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha (entry) dan juga kemudahan menutup usaha bagi entitas bisnis yang tidak efisien (exit), serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Skor IDSD Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Rote Ndao adalah seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.43
Indeks Daya Saing Daerah

	2022	2023	2024
Rote Ndao	-	2,63	3,10
NTT	3,20	3,42	3,41
Nasional	3,26	3,44	3,43

Sumber: BRIN IDSD, Tahun 2025

Tabel Indeks Daya Saing Daerah menunjukkan perbandingan kinerja daya saing antara Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tingkat nasional selama periode 2022-2024. Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam indeks daya saing daerahnya. Peningkatan sebesar 0,47 poin dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup substansial dalam berbagai aspek daya saing daerah.

Meski Rote Ndao menunjukkan peningkatan pesat, skornya pada 2024 (3,10) masih berada di bawah rata-rata provinsi NTT (3,41), dengan selisih 0,31 poin. Kabupaten Rote Ndao pada 2024 masih tertinggal 0,33 poin dari rata-rata nasional, namun gap ini terus mengecil seiring dengan tren peningkatan yang konsisten.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Rote Ndao saat ini masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, kabupaten ini sedang dalam fase *catching up* yang sangat menjanjikan. Peningkatan konsisten dari 2,63 ke 3,10 dalam rentang waktu satu tahun mencerminkan upaya pembangunan dan reformasi yang efektif di tingkat daerah

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kabupaten Rote Ndao adalah salah satu pulau paling selatan dalam jajaran kepulauan Nusantara Indonesia. Pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau Rote antara lain Pulau Ndao, Ndana, Naso, Usu, Manuk, Doo, Helina, Landu. Sebagian besar penduduk yang mendiami pulau/kabupaten Rote Ndao menurut tradisi tertua adalah suku-suku kecil Rote Nes, Bara Nes, Keo Nes, Pilo Nes, dan Fole Nes. Suku-suku tersebut mendiami wilayah kestuan adat yang disebut Nusak. Semua Nusak yang ada di pulau Rote tersebut kemudian disatukan dalam wilayah kecamatan. Masyarakat Rote Ndao mengenal suatu legenda yang menuturkan bahwa awal mula orang Rote datang dari Utara, dari atas, lain do ata, yang konon kini Ceylon. Kedatangan mereka menggunakan perahu lete-lete.

Strata sosial terdapat pada setiap leo. Lapisan paling atas yaitu mane leo (leo mane). Yang menjadi pemimpin suatu klein didampingi leo fetor (wakil raja) yang merupakan jabatan kehormatan untuk keluarga istri mane leo. Fungsi mane leo untuk

urusan yang sifatnya spiritual, sedangkan fetor untuk urusan duniawi. Filosofi kehidupan orang Rote yakni mao tua do lefe bafi yang artinya kehidupan dapat bersumber cukup dari mengiris tuak dan memelihara babi. Dan memang secara tradisional orang-orang Rote memulai perkampungan melalui pengelompokan keluarga dari pekerjaan mengiris tuak. Mata pencaharian masyarakat Suku Rote umumnya berladang, beternak, menangkap ikan, menyadap nira, dan membuat produk kerajinan. Hasil pertanian utamanya adalah padi, jagung, dan ubi kayu, sedangkan hewan ternak utama adalah kerbau, sapi, kuda, dan ayam. Produk kerajinan Suku Rote yang terkenal adalah kain tenun dan topi Adat Ti'i Langga.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kesejahteraan dalam aspek kebudayaan suatu masyarakat. Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender.

Tabel 2.44

Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

No	Dimensi	Indikator	
1	Dimensi Ekonomi Budaya	1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan
2	Dimensi Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas
		3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)
		4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian
		5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah
		6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
		2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
		3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.
		4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.
		5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir
		6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong
		7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari
		8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga
4	Dimensi Warisan Budaya	1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran
		2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
		3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari
		4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir. (*tahun 2021 ada

No	Dimensi	Indikator	
			perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung) dari nilai maksimum 70 untuk tahun 2018-2020 menjadi nilai maksimum 100 untuk tahun 2021-2022)
		5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir
		6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir
5	Dimensi Ekspresi Budaya	1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir
		2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir
		4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir
6	Dimensi Budaya Literasi	1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir
		2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir
7	Dimensi Gender	1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki
		2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat
		3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terbagi dalam 6 bidang urusan, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial

A. Bidang Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	60,00	57,33	90,15	77,68	86,59
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	104,01	61,58	90,15	91,67	92,23
3	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	83,64	61,58	90,15	77,46	76,63
4	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	82,00	100,00	100,00	100,00
5	Angka putus sekolah	Orang	14	15	20	18	15
6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	96,61	46,50	53,03	67,01	67,20
7	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,83	84,57	96,94	96,94	97,05
8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,08	84,32	93,17	93,26	94,28
9	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	44,89	57,22

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	36,88	46,19
11	Numerasi SD/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	34,68	46,19
12	Numerasi SMP/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	27,11	45,47
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	N/A	N/A	N/A	10,53	10,53

B. Bidang Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Kematian Ibu	Orang	5	10	6	3	4
		per 100.000 KH	170,71	357,40	249,79	119,76	116,99
2	Kasus Kematian Bayi	Orang	57	53	28	40	52
		per 1.000 KH	19,46	18,94	11,66	15,97	15,21
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 KH	26,30	20,00	14,20	19,60	15,80
4	Prevalensi wasting balita	%	9,70	10,50	9,50	10,20	9,30
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase <i>Succes Rate Tuberculosis</i>	%	81,00	80,00	89,00	88,00	83,00
8	Prevalensi HIV/AIDS	Per 100.000 penduduk	0,10	0,19	0,30	0,31	0,34

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	48,11	51,67	45,75	44,67	44,83
2	Persentase luas daerah yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	11,19	11,73	12,42	13,12	14,00
3	Persentase rumah tangga bersanitasi dan memiliki air minum layak	%	77,63	79,92	80,09	79,54	80,69
4	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	43,49	47,02	27,33	32,97	33,47
6	Persentase jalan strategis desa terbangun	%	25,20	28,66	33,80	37,01	41,26
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	25,42	26,64	28,20	29,80	31,79
8	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%	75,76	79,92	80,09	79,54	80,69
9	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	77,63	79,47	79,47	72,84	73,37

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan	%	N/A	5,42	5,43	81,47	81,47

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman layak	%	53,77	61,87	65,25	63,69	64,12

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase gangguan tantribun dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat tanggap (respons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase desa tangguh bencana	%	8,40	16,80	16,80	21,00	25,20
5	Persentase penanganan pra bencana	%	100,00	100,00	103,00	100,00	100,00
6	Persentase penanganan keadaan darurat bencana	%	100,00	99,98	100,00	100,00	107,00
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	65,00	65,00	65,00	65,00	66,00

F. Bidang Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang dilayani	%	N/A	N/A	N/A	41,57	76,37

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tenaga kerja lokal yang terampil dan produktif (bersertifikat)	%	4,17	4,86	5,21	5,56	5,46
2	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	1,48	1,91	2,33	2,75	3,18

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15
2	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	N/A	N/A	0.09	0,08	0,11
3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	N/A	N/A	100	88,00	100,00

C. Urusan Pertanahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan Pemda bersertifikat	%		3,50	7,67	9,19	10,04

D. Bidang Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	0	0	50,00	51,67	53,33

E. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,34	92,23	89,95
2	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	90,90	97,32	86,76	90,64	94,19
3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	75,54	86,29	82,96	86,80	88,77
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	48,04	51,88	53,85	63,13	64,39
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	N/A	N/A	N/A	32,68	37,42

F. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase desa maju dan berkembang	%	N/A	56,25	62,50	73,21	75,00
2	Persentase Bumdes berkembang	%	N/A	45,00	58,00	20,95	23,76

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Total fertility rate (TFR) / Angka Kelahiran Total	%	3,67	3,67	3,60	3,27	3,11
2	Indeks Pembangunan Keluarga	%	N/A	N/A	N/A	60,90	54,40
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	63,20
4	Angka Prevalensi Kontarsepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	N/A	N/A	50,04	52,93	50,32
5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	N/A	N/A	0,87	18,50	20,30

H. Bidang Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kualitas layanan perhubungan	%	N/A	N/A	N/A	34,96	33,98
2	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	N/A	N/A	N/A	12,50	13,97
3	Persentase uji KIR angkutan barang dan penumpang	%	N/A	N/A	N/A	12,50	13,97
4	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	40,44	40,44	42,89	53,02	53,99

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	84,14	84,14	99,90	98,84
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	N/A	N/A	N/A	76,76	100
3	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	1,34
4	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

J. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	7,54	7,64	7,92	8,10	8,25
2	Persentase koperasi aktif	%	85,15	79,59	84,72	84,73	84,73

K. Bidang Penanaman Modal

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	85,30	90,21	87,92	92,09
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (Miliar)	N/A	119	788	906	1.242

L. Kepemudaan dan Olahraga

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	3,00	0,10
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	41,16	0,20
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	41,16	0,20
4	Persentase atlit yang mendapatkan medali dalam Kejurprov/Kejurda	%	36,64	36,64	41,67	57,65	21,62

M. Statistik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	1,34

N. Persandian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

O. Bidang Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	86,25	87,36	88,25	88,80	91,08
2	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	969	908	3.794	3.390	2.667
3	Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	2.400	946	76.264	1.526	954

P. Bidang Kearsipan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	%	N/A	N/A	N/A	9,90	13,64
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	9,09	18,18	27,27	38,64	52,27

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Secara keseluruhan, Kabupaten Rote Ndao menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai layanan urusan pilihan. Sektor pariwisata menunjukkan pertumbuhan paling mengesankan, sementara sektor pertanian dan peternakan memberikan stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan pada tahun 2020-2021 (saat pandemic COVID19), sebagian besar sektor berhasil pulih dan menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan pada tahun-tahun berikutnya.

A. Bidang Pariwisata

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	Festival	1	1	4	4	4
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan	6	6	7	9	17
3	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	Jumlah	23	23	79	91	91
4	PDRB sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	Rp. (Miliar)	5.968	6.144	6.600	6.950	6.950
5	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	3.606	7.500	10.077	16.215	16.374
6	Rata-rata lama tinggal	Hari	4	4	4	4	4
7	Retribusi jasa usaha pariwisata	Rp. (Juta)	N/A	12,06	45,62	49,14	50,55
8	Destinasi wisata yang dikembangkan	Destinasi	5	6	16	17	20
9	Jumlah Desa Wisata	Desa	2	19	19	19	19
10	Jumlah pariwisata yang ber-CHSE	Jumlah	50	21	21	21	21

B. Bidang Kelautan dan Perikanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase produksi perikanan	%	-1,60	-45,30	12,90	2,64	7,98
2	Produksi perikanan laut	Ton	19.910	10.886	12.290	12.614	13.621
3	Produksi perikanan darat	Ton	8,20	9,90	12,60	13,80	18,40
4	Konsumsi ikan	kg/ perkapita/ Tahun	50,70	51,00	53,50	58,42	59,51

C. Bidang Pertanian

1) Sektor Pertanian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi sektor pertanian	Ton	152.058	153.364	159.547,10	161.768,59	156.134,07
2	Produksi sektor perkebunan	Ton	3.445,52	3.411,13	4.571,65	5.149,76	5.149,76
3	Persentase ketersediaan pangan utama	%	37,28	34,81	35,48	37,83	37,83

2) Sektor peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	1,04	2,14	4,22	3,26	3,16
2	Populasi ternak besar	ekor	94.783	93.903	97.877	99.548	101.251
3	Populasi ternak kecil	ekor	128.379	130.055	136.088	140.172	144.377
4	Populasi ternak unggas	ekor	97.432	103.486	107.310	112.675	118.310

D. Bidang Perdagangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	-6,13	3,59	7,29	5,19	5,02

E. Bidang Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian	%	-4,11	-5,68	4,45	9,13	7,23

F. Bidang Transmigrasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase transmigran yang mandiri	%	31,28	36,91	42,54	48,17	53,80
2	Persentase transmigran lokal yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.3.4 Pendukung Urusan Pemerintahan

Secara keseluruhan, pendukung urusan pemerintahan Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren positif dengan berbagai pencapaian yang melampaui target, terutama dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan produktivitas legislatif. Namun, masih terdapat area yang memerlukan perhatian khusus seperti kesehatan BUMD, peningkatan PAD, dan program pengembangan SDM aparatur.

A. Sekretariat Daerah

1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase layanan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Bagian Hukum

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase produk hukum daerah yang diharmonisasi dan diasistensi	%	N/A	92,00	99,09	94,17	166,00
2	Presentase fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan Kasus perdata dan TUN pemerintah daerah	%	N/A	100,00	100,00	100,00	83,00
3	Persentase publikasi produk hukum daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	N/A	100,00	100,00	100,00	166,00

3. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian layanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	%	N/A	90,57	93,00	98,11	98,04
3	Persentase BUMD yang sehat	%	N/A	85,00	90,00	98,00	100,00
4	Ketersediaan data potensi sumberdaya alam	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Skor	N/A	34,61	30,57	36,16	36,66
2	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	N/A	28,40	17,30	14,01	14,51
3	Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	Skor	N/A	1,76	8,82	8,82	8,82

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	Skor	N/A	4,44	4,44	13,33	13,33

5. Bagian Organisasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Organisasi	poin	78,74	88,10	87,63	85,00	90,22

6. Bagian Umum

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	89,10	75,34	88,00	100,00	92,16
2	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokolan	%	89,10	75,34	88,00	100,00	92,16

B. Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah	%	80,00	28,57	225,00	100,00	175,00
3	Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	%	180,00	106,00	180,00	180,00	170,00
4	Persentase rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

C. Perencanaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Poin	16,93	17,24	18,66	19,01	20,42
2	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00

D. Keuangan

1. Keuangan dan Aset

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penetapan APBD	Tepat waktu / Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase pengelolaan aset daerah	%	73,91	74,79	75,19	75,38	75,65
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8,34	6,11	3,10	6,14	5,16
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Pendapatan Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	4,43	4,22	3,02	3,78	3,92
2	Persentase Realisasi PAD	%	126,07	94,81	100,83	117,57	102,36

E. Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	92,21	93,74	97,78	93,23	86,19
2	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,42	99,58	99,81	99,93	99,73

F. Pendidikan dan Pelatihan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan formal	%	92,60	93,75	96,67	74,35	92,86

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase ASN yang telah lulus pendidikan dan pelatihan struktural	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

G. Penelitian dan Pengembangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

H. Pengawasan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Temuan	18	17	6	6	9
2	Persentase evaluasi AKIP perangkat daerah	%	N/A	N/A	21,28	34,78	100,00
3	Level Maturitas SPIP	Level	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
4	Level Kapabilitas APIP	Level	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang profesional	%	N/A	N/A	N/A	76,00	76,00
6	Persentase TLHP APIP	%	N/A	N/A	N/A	76,00	76,00
7	Persentase TLHP BPK	%	N/A	N/A	N/A	71,76	75,00

2.1.3.5 Kewilayahan

Secara keseluruhan, sebagian besar kecamatan menunjukkan kinerja yang baik dalam bidang layanan dasar, dengan tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yang konsisten 100% di semua kecamatan. IKM umumnya berada dalam rentang 85-92 poin, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik. Beberapa kecamatan seperti Rote Barat Laut, Ndao Nuse, dan Loaholu menunjukkan kinerja terdepan, sementara beberapa kecamatan lain masih perlu melengkapi data untuk indikator tata kelola administrasi desa dan aktivitas lembaga kemasyarakatan.

A. Kecamatan Lobalain

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,75	89,41	86,83
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

B. Kecamatan Rote Barat Laut

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	84,47	91,66	92,28
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	NA	NA	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	NA	NA	100,00

C. Kecamatan Rote Barat Daya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	89,08	91,01
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

D. Kecamatan Rote Barat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	86,44	88,17
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

E. Kecamatan Rote Selatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	90,00	88,83
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00

F. Kecamatan Rote Tengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	89,19	87,78
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

G. Kecamatan Pantai Baru

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	78,14	86,67
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00

H. Kecamatan Rote Timur

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	76,26	86,39
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

I. Kecamatan Ndao Nuse

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	92,68	91,72
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

J. Kecamatan Landu Leko

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	84,47	85,58	87,83
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

K. Kecamatan Loaholu

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,75	89,41	91,39
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.3.6 Pemerintahan Umum

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ormas/LSM/Yayasan yang dibina	%	N/A	N/A	N/A	67,74	24,55
2	Persentase peran potensi paham radikal dan konflik sosial budaya yang ditangani	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00

2.1.3.7 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi indikator kinerja kunci perangkat daerah tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

❖ **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Kinerja pelayanan dasar menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan menyeluruh. Sektor pendidikan mengalami penurunan partisipasi di semua jenjang, sementara layanan kesehatan ibu dan anak menurun drastis. Meski demikian, terdapat pencapaian positif pada penanganan keamanan dan ketertiban (100%), layanan korban bencana, dan peningkatan skrining kesehatan lansia. Infrastruktur pekerjaan umum stabil namun masih memerlukan perbaikan. Secara

keseluruhan, pelayanan dasar membutuhkan perhatian serius untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat.

a. Bidang Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	N/A	54,28	87,55	75,85	86,59
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	N/A	83,43	96,04	86,19	83,85
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	N/A	55,17	86,06	70,71	67,73
4	Persentase Penduduk usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pensisikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	%	N/A	50,50	64,13	271,54	14,68

b. Bidang Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,06	0,06	0,08	0,83	0,07
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi	%	0	0	0	100,00	100,00
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	70,47	76,43	56,43	71,12	58,13
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	55,67	77,84	64,93	70,38	67,30
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	24,42	85,23	70,84	76,00	66,05
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	62,64	79,30	73,31	93,90	86,62
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	34,30	90,32	94,27	85,77	79,65
8	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	14,13	41,57	50,30	43,41	67,00
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	34,30	10,18	57,13	77,75	81,88

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	14,13	18,49	20,10	23,11	84,14
11	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	20,98	30,37	23,28	30,51	51,62
12	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	88,11	151,30	162,71	163,86	129,48
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	%	39,56	42,48	48,89	49,62	47,40
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	64,79	143,84	124,71	124,11	125,96

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	2,80	2,94	2,15	1,72	0,57
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota	%	77,63	79,47	0	72,84	73,37
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	75,76	79,92	80,09	79,54	80,69
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	48,11	51,67	58,00	44,67	44,83
5	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	3,91	5,21	6,08	6,08	6,09
6	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	N/A	18,91	18,90	16,95	12,25
3	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	N/A	0	0,15	0,15	0,14

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	N/A	70,00	52,00	83,33	90,91
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	N/A	10,60	7,70	7,70	7,09

2. Bencana daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	N/A	11,87	1,71	100,00	100,00
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	N/A	1,60	1,71	100,00	90,90
3	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	N/A	66,67	97,70	100,00	107,00

f. Bidang Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi	%	N/A	12,56	25,83	5,53	8,61

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)						
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	88,29	6,73	90,83

❖ **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar menunjukkan kinerja yang bervariasi dengan beberapa pencapaian menonjol. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan kepemilikan KIA anak mencapai 99,20% menjadi highlight positif. Namun, digitalisasi pelayanan publik masih tertinggal (0%), sektor ketenagakerjaan menghadapi tantangan kompetensi, dan pengentasan desa tertinggal menurun drastis. Stabilitas dalam bidang statistik dan kearsipan menunjukkan komitmen tata kelola yang baik. Diperlukan akselerasi dalam digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

a. Bidang Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	6,00	6,48	6,40	5,56	0,136
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	150.25	146,87	135,89	0	119,64
3	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	28,00	31,77	30,90	30,90	21,09
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/kota	%	75,00	100,00	55,11	100,00	67,48

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	N/A	1,73	3,34	0,05	3,69
2	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	0,09	0,08	0,11	0,06	0,13

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	N/A	0,60	0,75	0,80	0,08

c. Urusan Pangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	37,28	34,81	35,48	37,83	38,02

d. Bidang Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,70	71,60	67,77	69,59	68,17
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	46,60	54,73	72,49	71,66	69,26
3	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan,Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	N/A	0	95,15	96,30	3,59

e. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	%	N/A	90,90	84,95	84,98	94,19
2	Persentase Anak Usia 1-7 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	N/A	9,21	35,74	39,43	34,83
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	N/A	74,69	82,95	84,94	99,20
4	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	N/A	2,17	2,17	2,17	15,90

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	42,86	N/A	40,00	30,43	4,54
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	N/A	3,67	3,27	3,27	3,11
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	86,41	76,38	50,04	52,93	50,31
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	%	N/A	13,50	34,30	25,70	20,03

h. Bidang Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	N/A	81,67	81,67	81,67	81,50
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	%	N/A	0,32	0,32	0,32	0,315

i. Bidang Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	N/A	75,02	74,39	72,20	84,83

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	N/A	20,69	22,16	22,16	19,70
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasusaha	%	N/A	5,63	5,48	5,48	4,60

k. Urusan Penanaman Modal

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	N/A	1.146,2	59,90	-84,96	86,00

l. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	N/A	0,07	0,07	0,07	58,00
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	N/A	0,21	0,21	0,20	85,00
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,00

m. Urusan Statistik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	100,00	89,13	100,00	100,00
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	N/A	100,00	69,56	100,00	100,00

n. Bidang Persandian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	40,61

o. Bidang Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	70,07
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	N/A	8,95	N/A	N/A	65,02

p. Bidang Kearsipan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	N/A	14,78	28,44	29,02	28,46
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	56,80

❖ **Urusan Pemerintahan Pilihan**

a. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	19.918	2.651,90	6.988	6.501	12.378

b. **Urusan pariwisata**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	N/A	-46,88	11.475	2,99	76,20
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	N/A	112,22	-44,32	144,39	79,85
3	Tingkat hunian akomodasi	%	N/A	23,05	27,49	26,97	34,89
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	N/A	0,03	25,40	0,14	0,17

c. **Urusan Pertanian**

1. **Pertanian**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Hektar	N/A	467,12	522,22	660,04	586,27

2. Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	N/A	-54,62	-5,85	-45,33	N/A

d. Bidang Perdagangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N/A	39,88	21,01	58,31	65,80
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	N/A	16,21	17,73	10,88	35,00

e. Bidang Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	N/A	2,06	N/A	3,61	1,84
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	N/A	95,00	1,00	1,00	100,00

❖ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Bidang Perencanaan dan Keuangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11,25	13,35	8,46	31,53	13,46
2	Rasio PAD	%	37,55	0,96	3,02	3,77	2,21
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	N/A	2,00	N/A	N/A	0
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
5	Rasio belanja urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Level	N/A	64,67	80,79	57,73	40,69
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	N/A	10,00	10,00	4,00	4,00

b. Bidang Pengadaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	N/A	50,34	88,74	67,31	86,53
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	N/A	19,93	56,07	91,58	48,16
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	N/A	N/A	313,55	73,00	-6,48

c. Bidang Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	412,27	81,60	83,26	74,41
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	66,49	18,51	15,66	22,76
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	5,48	27,84	27,77	30,57

d. Urusan Keuangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12,12	5,60	3,95	5,85	-0,29
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	4,85	3,59	0,82	18,15	-3,47
3	Manajemen aset	%	N/A	4,00	100,00	100,00	100,00
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,60	8,05	3,60	0,06	6,14

e. **Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	97,10	311,11	100,00	100,00	99,97
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	0,94	100,00

2.1.3.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah dan berhak diperoleh warga negara secara minimal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2/2018 dan regulasi terkait lainnya, SPM memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan yang setara dan terstandarisasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kesejahteraan sosial, dan perumahan. Pemenuhan SPM merupakan esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan SPM diatur secara teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0mor 59 Tahun 2021, di mana di dalamnya mengatur jenis dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Pemerintah menerapkan SPM berdasarkan antara lain pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasara dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Hasil penerapan SPM di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah seperti yang ditampilkan pada Grafik di bawah ini.

Tabel 2.45
Capaian SPM Untuk Tiap Jenis Layanan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2024 (%)
1	Pendidikan	1 Pendidikan Dasar Usia Dini	64,50	56,59	86,88	95,06
		2 Pendidikan Dasar	87,50	75,62	90,72	98,39
		3 Pendidikan Kesenjangan	75,60	68,20	90,60	98,46
2	Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76,84	44,06	75,43	55,65
		2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80,03	51,95	76,31	61,31
		3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	86,65	56,67	80,80	60,04

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2024 (%)
		4 Pelayanan Kesehatan Balita	73,09	58,65	89,83	80,43
		5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	76,26	75,42	81,30	56,04
		6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	58,11	40,25	46,35	64,08
		7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	11,66	45,70	79,26	79,19
		8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33,50	16,09	29,85	91,85
		9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10,08	18,63	40,06	54,64
		10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100,00	80,00	89,88	93,41
		11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	43,43	30,67	51,52	50,57
		12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	98,45	80,00	95,29	100,00
3	Pekerjaan Umum	1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	69,60	0,00	90,00	100,00
		2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	61,92	83,33	90,00	100,00
4	Perumahan Rakyat	1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85,00	85,00	100,00	100,00

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2024 (%)
		2 Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Trantibumlinmas	1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	N/A	43,33	95,14	93,33
		2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	N/A	80,00	94,70	95,00
		3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	N/A	80,00	83,03	90,00
		4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	N/A	80,00	97,98	6,34
		5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	N/A	80,00	93,60	96,97
6	Sosial	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	N/A	81,33	81,82	86,15
		2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	N/A	81,33	82,00	88,33
		3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	N/A	82,67	45,00	46,69
		4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	N/A	0,00	0,00	0,00

Dari Tabel di atas, dapat terlihat bahwa rendahnya capaian SPM bidang sosial dipengaruhi oleh 2 layanan yaitu rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (46,69%) dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (0%), hal ini disebabkan karena gelandangan dan pengemis di luar panti belum temukan di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

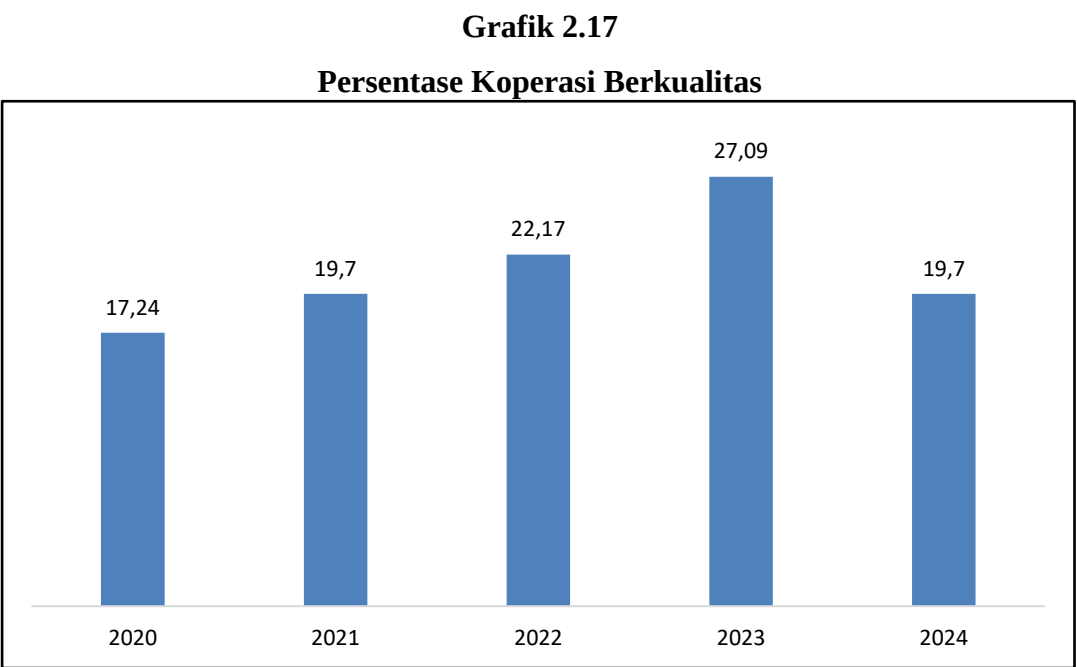
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Persentase Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, usaha, keuangan, hingga manfaat bagi anggota dan masyarakat. Koperasi yang berkualitas memiliki kinerja baik di berbagai bidang, menerapkan prinsip-prinsip koperasi, dan bermanfaat bagi anggotanya.

Koperasi Berkualitas di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebesar 17,24 persen meningkat menjadi 27,09 pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 19,70 persen. Berikut grafik koperasi berkualitas Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:



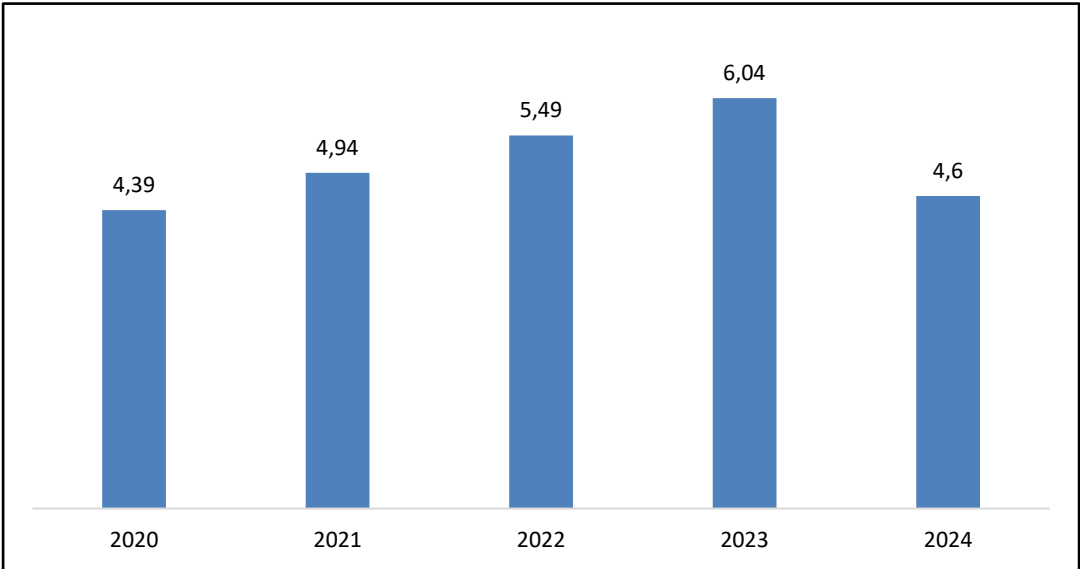
Sumber: Dinas Koperindag, Tahun 2025

B. Pesentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Pengusaha mikro, atau wirausaha mikro, adalah individu yang memulai dan mengoperasikan usaha bisnis kecil, seringkali dengan sumber daya, modal, dan staf yang terbatas. Usaha mikro menjadi wirausah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebesar 4,39 persen meningkat menjadi 6,04 persen pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,6 persen karena perbandingan terhadap jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Rote Ndao semakin banyak. Berikut grafik persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:

Grafik 2.18

Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha



Sumber: Dinas Koperindag, Tahun 2025

C. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari pengolahan kegiatan lainnya. industri Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual, dan unit yang melakukan pengolahan bahan bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Peranan PDRB Bruto Kabupaten Rote Ndao menurut Lapangan Usaha khususnya Industri pengolahan atau manufacturing dijabarkan seperti di bawah ini.

Tabel 2.46

PDRB Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Lapangan Usaha Khususnya Industri Pengolahan atau Manufacturing

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan (%)	1,21	1,11	1,12	1,25	1,36

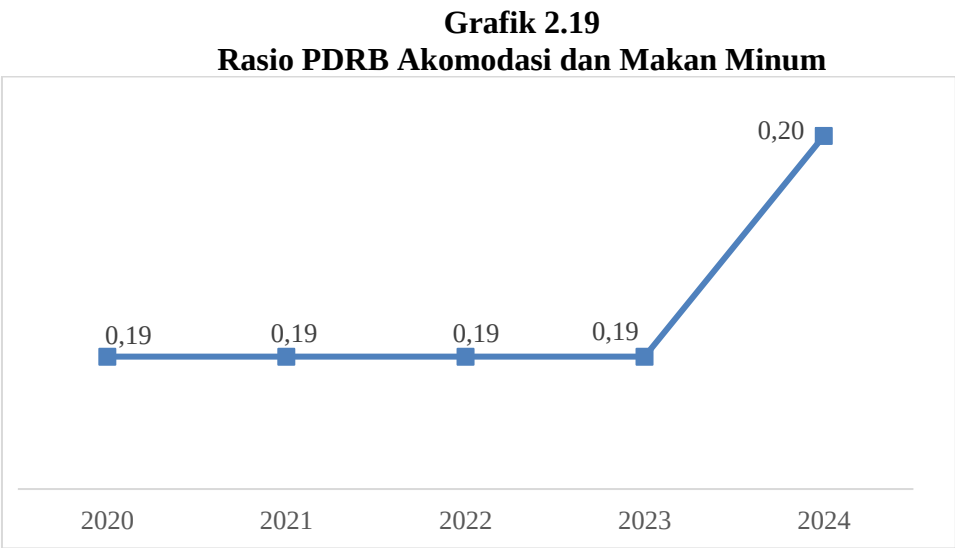
Sumber: BPS Rote Ndao, Tahun 2025

Pada tahun 2020 sampai 2021, terjadi penurunan kontribusi dari 1,21% menjadi 1,11%. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas produksi, distribusi bahan baku serta

penurunan permintaan pasar, terutama untuk produk olahan lokal seperti hasil pertanian dan perikanan. Pada tahun 2021 sampai 2022, kontribusi sedikit meningkat dari 1,11% menjadi 1,12%, menunjukkan awal pemulihan setelah pandemi. Namun, peningkatannya masih terbatas karena sebagian besar pelaku industri kecil dan rumah tangga masih menghadapi kendala modal dan bahan baku. Sektor ini menunjukkan tren meningkat konsisten dari 1,12% pada tahun 2022 menjadi 1,36% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya: pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi; meningkatnya pengolahan hasil pertanian dan perikanan lokal, misalnya produk olahan kelapa, ikan kering, abon ikan, atau hasil tenun tradisional; dan dukungan dari program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM industri pengolahan dan pemberdayaan ekonomi kreatif.

D. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024 mengalami stagnasi sebesar 0,19% dari tahun 2020 hingga 2023, kemudian meningkat menjadi 0,20% pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan jumlah rumah makan sebanyak 84 unit pada tahun 2024. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang tercatat sebanyak 16.374 orang pada tahun 2024. Berikut grafik rasio PDRB sector penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:

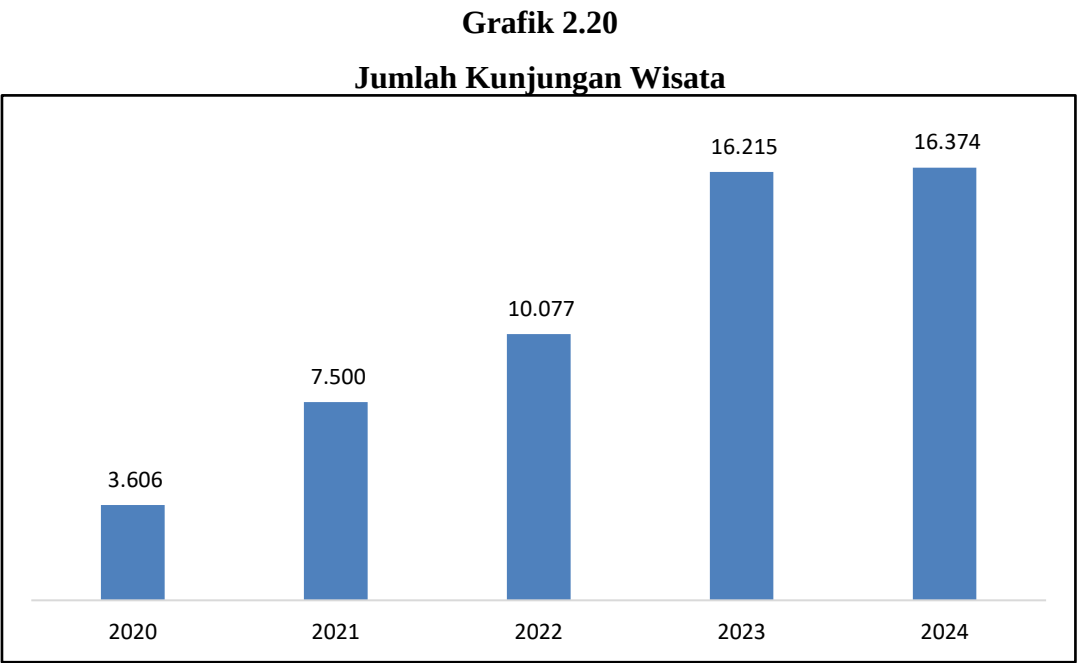


Sumber: BPS Rote Ndao, Tahun 2025

E. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun tahun 2020 kunjungan wisata jumlahnya masih sedikit karena imbas dari Covid-19 sehingga mengakibatkan mobilisasi wisatawan asing dan nusantara ke Rote Ndao mengalami penurunan yang

cukup signifikan. Sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 meningkat karena didorong oleh promosi dan akses transportasi yang sudah lancar sehingga mendorong wisatawan terus berdatangan ke Kabupaten Rote Ndao. Hal lain yang mendorong peningkatan kunjungan yaitu destinasi wisata pantai dan budaya yang beragam, sehingga keunikan ini menjadi salah satu tolak ukur utama. Berikut grafik Kunjungan wisatawan Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:



Sumber: BPS Rote Ndao, Tahun 2025

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK merupakan indikator penting untuk memahami kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan suatu daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao.

Angkatan Kerja adalah penduduk yang usianya masuk ke dalam kategori usia kerja, termasuk diantaranya penduduk yang saat ini telah bekerja maupun penduduk yang sedang dalam proses mencari pekerjaan itu sendiri. Semua orang yang berada di dalam masa usia produktif (usia kerja) akan dikategorikan sebagai angkatan kerja, kelompok ini termasuk dalam kategori berkerja dan menganggur.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Rote cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2020 sebanyak 94.378 jiwa dengan rincian jumlah bekerja sebanyak 89.749 jiwa dan jumlah pengangguran sebanyak 4.627 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk bekerja menurun menjadi 72.774 jiwa dan jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 1.804 jiwa. Angka pengangguran menurun karena lapangan usaha yang sudah semakin terbuka, sehingga penduduk yang bekerja sudah terserap, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47

Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan

No	Angkatan Kerja	Laki-Laki + Perempuan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bekerja	89.749	95.587	98.290	68.227	72.774
2.	Pengangguran	4.627	3.645	3.708	2.586	1.804
Jumlah		94.376	99.232	101.998	70.813	74.578

Sumber : BPS Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 71,82% mengalami fluktuasi karena berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga keadaan perekonomian yang naik turun berpengaruh pada partisipasi angkatan kerja usia produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.48

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,07	74,16	73,20	68,99	71,82

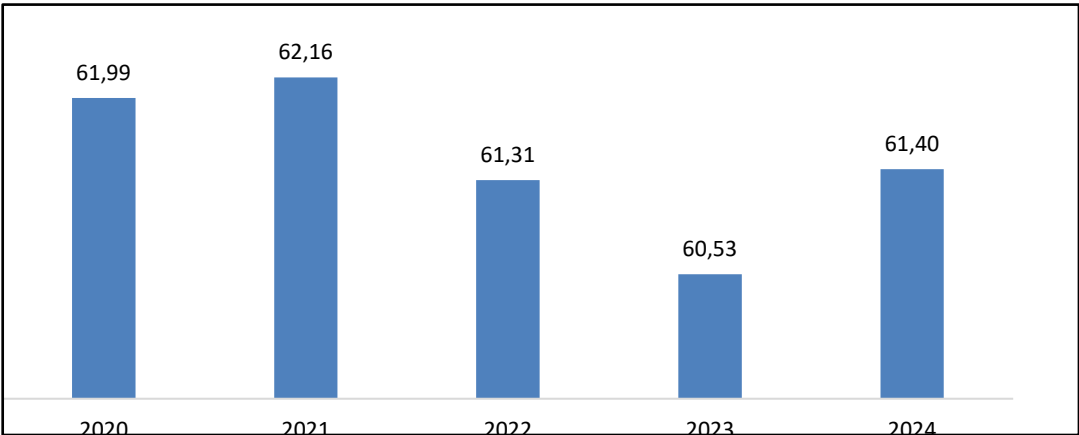
Sumber : BPS Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan Kabupaten Rote Ndao cenderung fluktuatif, tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari 61,99 persen menjadi 62,16 persen pada tahun 2021. Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 61,40.

Faktor penyebab menurunnya Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan di Kabupaten Rote Ndao yaitu rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pelayanan publik maupun swasta.

Grafik 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Sumber: Kab. Rote Ndao Dalam Angka, Tahun 2025

G. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menilai seluruh inovasi daerah, baik di bidang digital maupun non-digital. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap inovasi yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Skor Indeks Inovasi Daerah Rote Ndao Tahun 2024 adalah sebesar 40,18 masuk dalam kategori inovatif. Nilai ini naik dari nilai indeks di Tahun 2023 yaitu 39,48.

H. Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Indeks Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan merupakan pengukuran kuantitatif yang menilai kualitas infrastruktur berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Infrastruktur berkelanjutan didefinisikan sebagai infrastruktur yang dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dipelihara dengan mempertimbangkan:

- 1. Ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam
- 2. Efisiensi sumber daya (energi, air, material)
- 3. Dampak lingkungan yang minimal
- 4. Inklusivitas dan aksesibilitas sosial
- 5. Kelayakan ekonomi jangka panjang
- 6. Inovasi dan teknologi hijau

Pengukuran indeks kualitas infrastruktur berkelanjutan merupakan proses yang kompleks dan kontekstual, yang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, jenis infrastruktur, dan prioritas pembangunan berkelanjutan di masing-masing wilayah. Berikut adalah Indeks kualitas infrastruktur berkelanjutan Rote Ndao seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Indeks Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	%	30,74	46,21	53,74	49,11	49,52

Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

I. Persentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak

Presentasi infrastruktur perumahan dan pemukiman layak merupakan capaian pembangunan infrastruktur perumahan layak yang terintegrasi dengan air minum dan sanitasi layak.

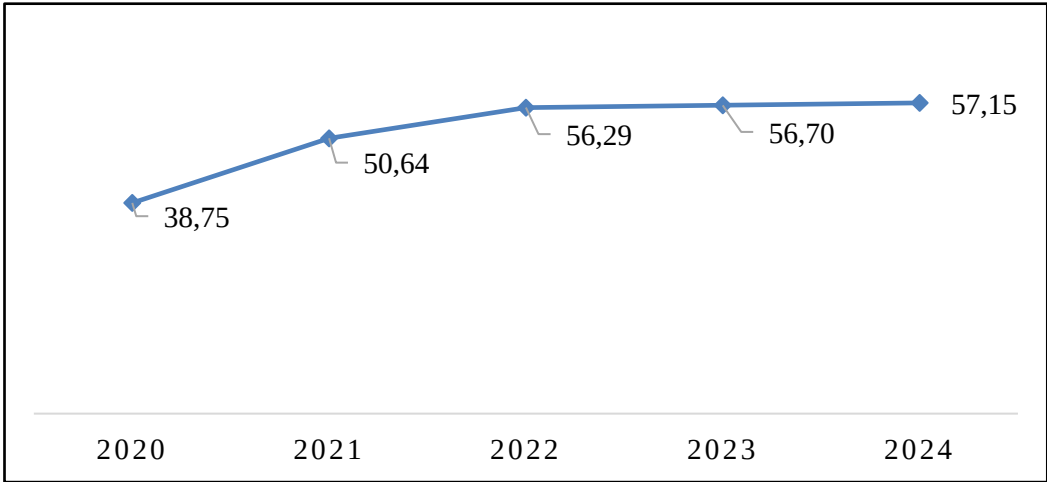
Tabel 2.50
Presentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase infrastruktur perumahan dan pemukiman layak	%	54,04	62,24	65,65	64,09	64,66

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah keseluruhan. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, angka rumah layak huni tercatat sebesar 38,75%, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 50,64%. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 56,29% dan meningkat lagi menjadi 56,70% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali naik sedikit menjadi 57,15%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan dalam penyediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat di wilayah ini. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.22
Persentase Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

J. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap berarti jalan yang dikelola pemerintah kabupaten memiliki kondisi baik dan atau sedang sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Kondisi mantap merujuk pada jalan yang tidak mengalami kerusakan berat atau signifikan, sehingga aman dan nyaman untuk dilalui kendaraan.

Berikut adalah persentase jalan kabupaten Rote Ndao dalam kondisi mantap seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

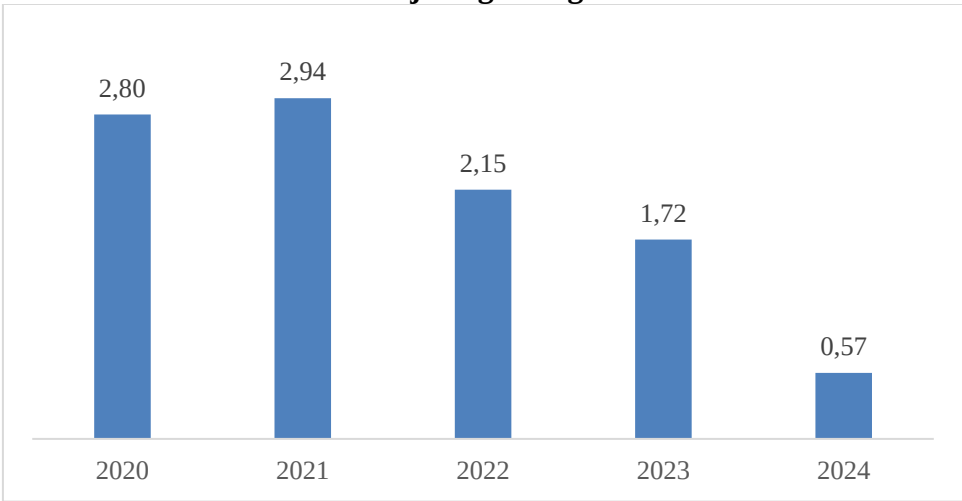
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	48,11	51,67	58,00	44,67	44,83

Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

K. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren menurun tajam dari 2,94% pada tahun 2021 menjadi 0,57% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan adanya penurunan kinerja sistem irigasi kabupaten, yang perlu segera ditangani melalui langkah rehabilitasi, pemeliharaan, dan manajemen air yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian daerah. Secara rinci rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.23
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi



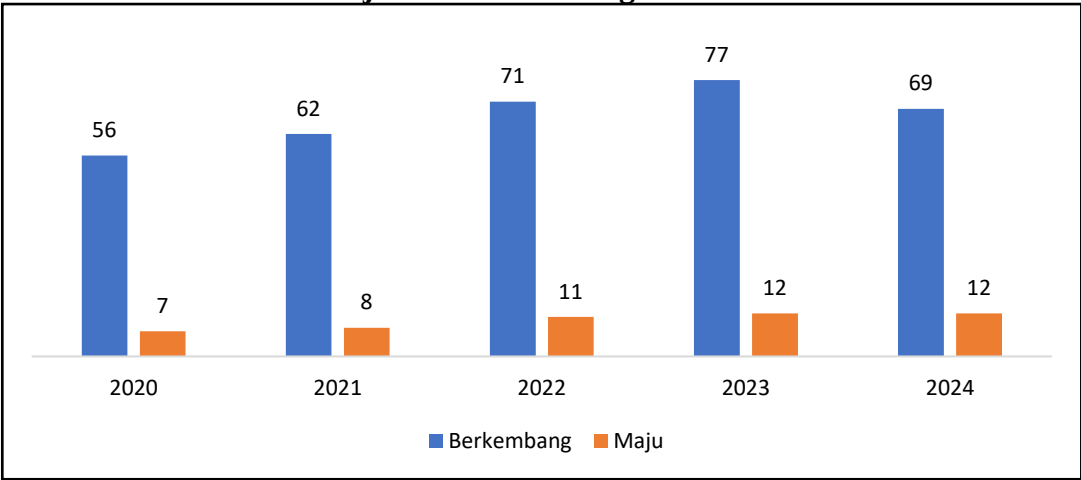
Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

L. Desa maju dan berkembang

Kriteria desa maju yaitu memiliki infrastruktur yang memadai, ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, masyarakat yang berdaya, lingkungan yang lestari, dan pemerintahan yang efektif sedangkan kriteria desa berkembang masih memiliki potensi, namun belum optimal dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur.

Desa maju dan berkembang di Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan, tahun 2020 desa maju sebanyak 7 desa dan berkembang sebanyak 56 desa meningkat menjadi 12 desa maju dan berkembang sebanyak 77 desa pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 69 desa berkembang sedangkan desa maju tetap 12 desa, penurunan pada tahun 2024 karena kriteria yang ditetapkan dan Indeks Desa Membangun mengalami perubahan penilaian sehingga jumlah desa maju dan berkembang menurun. Berikut grafik desa maju dan berkembang Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024.

Grafik 2.24
Desa Maju dan Berkembang Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Desa Membangun Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Dari Tabel di atas diketahui bahwa status desa tertinggal cenderung menurun, bahkan desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Di sisi lain terdapat peningkatan jumlah desa berkembang dan desa maju. Progres ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk terus mengawal pembangunan desa agar dapat meningkatkan status desa nya melalui pembangunan di desa.

M. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa adalah indikator strategis yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024, indeks ini memberikan pedoman dalam menilai kemajuan desa melalui enam dimensi kunci. Indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kemajuan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Desa diatur berdasarkan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Sebelum Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 diterbitkan, status desa ditentukan berdasarkan Indeks Desa Membangun. Perubahan nama dari “Indeks Desa Membangun” menjadi “Indeks Desa” diikuti oleh beberapa perubahan penting. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024, perubahan tersebut mencakup:

1. Penyederhanaan Nama
Nama ‘Indeks Desa Membangun’ diubah menjadi ‘Indeks Desa’ untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman.
2. Perubahan Dimensi
Indeks Desa memiliki enam dimensi utama, yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
3. Penambahan Indikator
Setiap dimensi memiliki indikator-indikator spesifik yang lebih terukur dan terperinci untuk mengukur kemajuan desa.

4. Perubahan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekarang melibatkan proses yang lebih ketat dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektifitas pengukuran kemajuan desa, serta memfasilitasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hingga tahun 2024, masih bernama Indeks Desa Membangun atau IDM, suatu indeks yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Capaian IDM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 0,653 maka, status desa di Kabupaten Rote Ndao dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Status Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024

Status Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	0	0	0	0
Maju	7	8	11	12	12
Berkembang	56	62	71	77	69
Tertinggal	48	42	30	23	31
Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
Jumlah	112	112	112	112	112

Sumber: Dinas PMD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

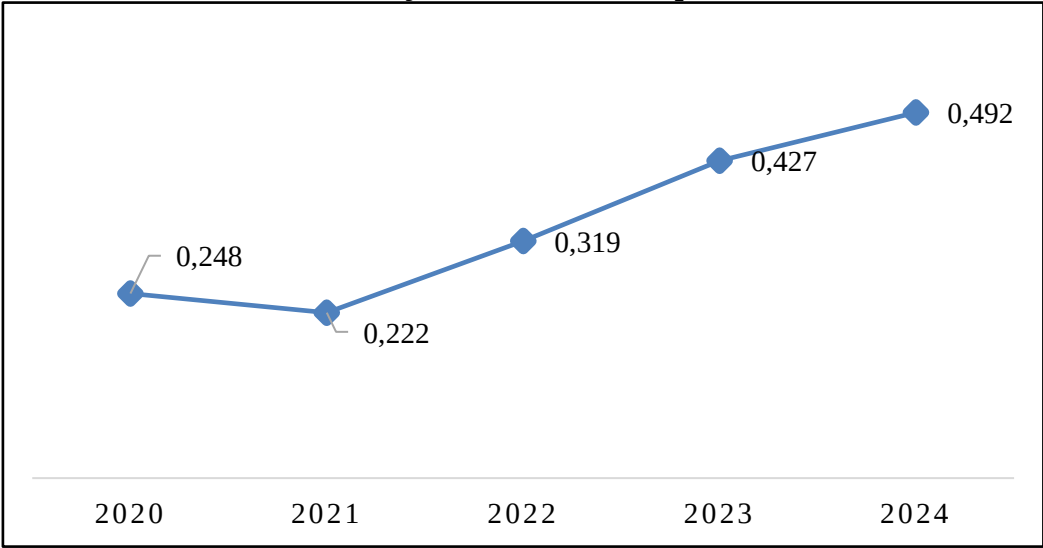
Dari Tabel di atas diketahui bahwa status desa tertinggal cenderung menurun, bahkan desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Di sisi lain terdapat peningkatan jumlah desa berkembang dan desa maju. Progres ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk terus mengawal pembangunan desa agar dapat meningkatkan status desa nya melalui pembangunan di desa.

N. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK Lapangan Usaha pada periode tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan penurunan dari 0,248% menjadi 0,222%. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga berimplikasi langsung pada menurunnya tingkat konsumsi serta pemanfaatan berbagai jasa, khususnya jasa perhotelan, penginapan, restoran, warung makan, dan sektor jasa lainnya yang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, rasio tersebut kembali mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai 0,492% pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya stabilitas perekonomian daerah, yang ditandai dengan pulihnya

mobilitas masyarakat serta meningkatnya kembali akses dan konsumsi terhadap berbagai jenis pelayanan jasa. Perbaikan kondisi ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong aktivitas usaha, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Lapangan Usaha kembali menunjukkan perkembangan positif.

Grafik 2.25
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB



Sumber: BPS Kab.Rote Ndao Tahun 2025

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, serta transisi menuju energi terbarukan. Selain itu, Indeks Ekonomi Hijau juga mengukur kontribusi sektor-sektor ekonomi hijau, seperti pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan industri ramah lingkungan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian alam..

Melalui Indeks Ekonomi Hijau, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat memantau kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan. Indeks ini juga menjadi panduan dalam merancang strategi dan kebijakan yang mendukung pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan penerapan konsep ekonomi hijau, diharapkan tercipta keseimbangan antara pembangunan yang pesat dan pelestarian lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun mendatang. Indeks

ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan

Tabel 2.53

Indikator Tiga Pilar Ekonomi Hijau

Pilar		Indikator	
A.	Pilar lingkungan	1.	Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia
		2.	Bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer
		3.	Persentase sampah terkelola
B.	Pilar ekonomi	4.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
		5.	Produktivitas pertanian
		6.	Produktivitas tenaga kerja sektor industry
		7.	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa
C.	Pilar sosial	8.	Rata-rata lama sekolah
		9.	Angka harapan hidup
		10.	Tingkat kemiskinan
		11.	Tingkat pengangguran terbuka

B. Porsi EBT dalam Bauran Energi

Energi Baru Terbarukan (EBT) merujuk pada sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak terbatas, seperti matahari, angin, air, dan biomassa. EBT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber energi konvensional, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, karena EBT memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global dan diversifikasi sumber energi. Banyak negara dan organisasi telah meningkatkan investasi dan kebijakan untuk menggalakkan penggunaan EBT guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Data dari UPT BMKG dan beberapa penelitian terkait energi angin di Rote menunjukkan bahwa pada periode musim penghujan tercatat memiliki nilai kecepatan angin yang rendah (3 – 5 m/s) daripada periode bulan kemarau (4 – 8 m/s). Arah angin di Rote Ndao sangat dipengaruhi oleh angin monsun. Pada saat bulan Desember – Maret, arah angin dominan cenderung berasal dari barat dan barat laut. Sedangkan Mei - September arah angin dominan cenderung dari arah timur dan tenggara. Kecepatan rata-rata angin dengan nilai tinggi umumnya berada di wilayah

selatan Rote Ndao. Sedangkan kecepatan angin rata-rata minimum umumnya berada di wilayah utara hingga tengah Rote Ndao. Wilayah Rote Ndao berpotensi sebagai sistem konversi energi angin (SKEA) berskala kecil (Oktober – Maret) hingga besar (April – September). Wilayah pesisir memiliki kecepatan angin yang lebih stabil dikarenakan wilayah pesisir memiliki gaya gesek yang lebih rendah.

Selain energi angin, energi yang bisa dimanfaatkan adalah energi matahari. BPS NTT mencatat durasi penyinaran matahari adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Durasi Penyinaran Matahari (Persen)

Durasi Penyinaran Matahari	2020	2021	2022	2023
	82,0	76.3	73.5	79.4

Sumber: BPS Provinsi NTT, Tahun 2024

Sementara data pembangunan instalasi PLTS yang dikerjakan oleh Kementrian ESDM di Kab Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55
Data Pembangunan Instalasi PLTS Terpusat oleh KESDM

Tahun	Lokasi	Kapasitas (KW)	Sumber Dana
2011	Maeoe	5	DAK
2012	1. Desa Suebela,	15	APBN
	2. Desa Lidor,	15	
	3. Desa Bo’a	15	
2013	1. Desa Oelasin (Fuafuni)	10	APBN
	2. Desa Landu	10	
	3. Desa Limakoli	4	
2014	Desa Dodaek	15	DAU
2015	1. Desa Nuse	25	DAU
	2. Desa Daiama	75	APBN
	3. Desa Landu	5	APBN
	4. Desa Kuli	5	APBN
	5. Desa Batefalu	10	APBN
2016	1. Desa Mbokak	50	APBN
2019	1. Desa Tenalai	70	PLN (APBN)
2021	1. Desa Fuafuni	19	Kerjasama NGO BAPPENAs

Sumber: Sasongko, dll, Tahun 2022

C. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

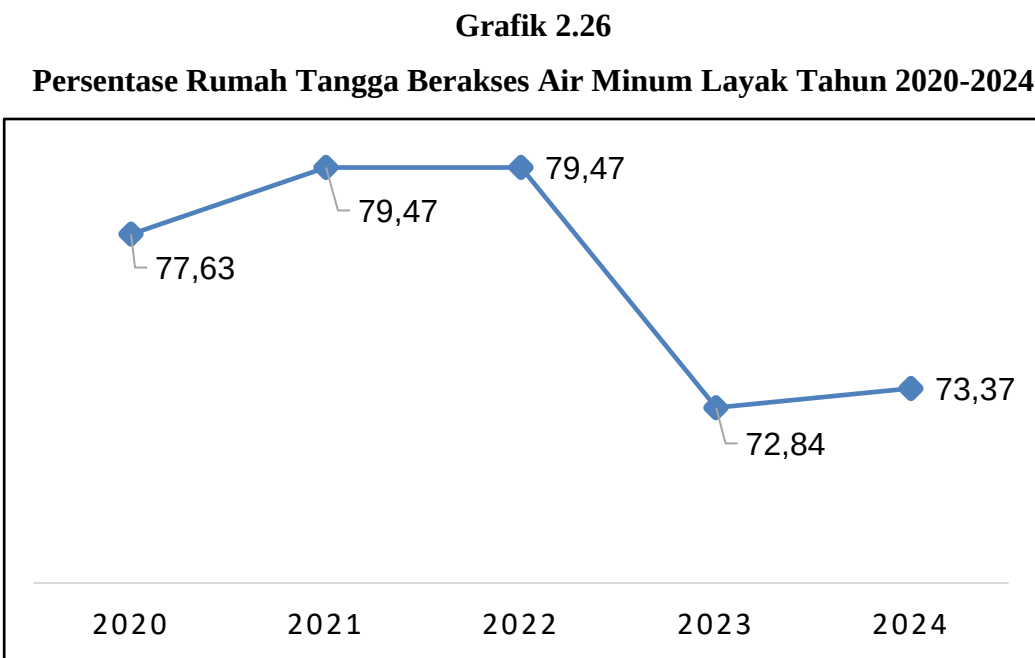
Konektivitas digital pada pemerintah daerah mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur teknologi, aplikasi perangkat lunak, platform

komunikasi, dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan publik.

Konektivitas digital pada pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan implementasi bergantung pada komitmen pemimpin, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

D. Persentase rumah tangga berakses air minum layak

Air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus tersedia dengan layak dan mudah diakses. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2024 rumah tangga berakses air minum mencapai 80.69%. Angka tersebut jauh dari target nasional sebesar 100% penduduk berakses air minum. Capaian rumah tangga akses air minum baru pada kondisi desa ber air minum, belum rumah tangga dengan air minum. Artinya bahwa akses air minum belum mencapai rumah tangga/sambungan rumah (SR) keseluruhan. Secara rinci perkembangan rumah tangga berakses air minum dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

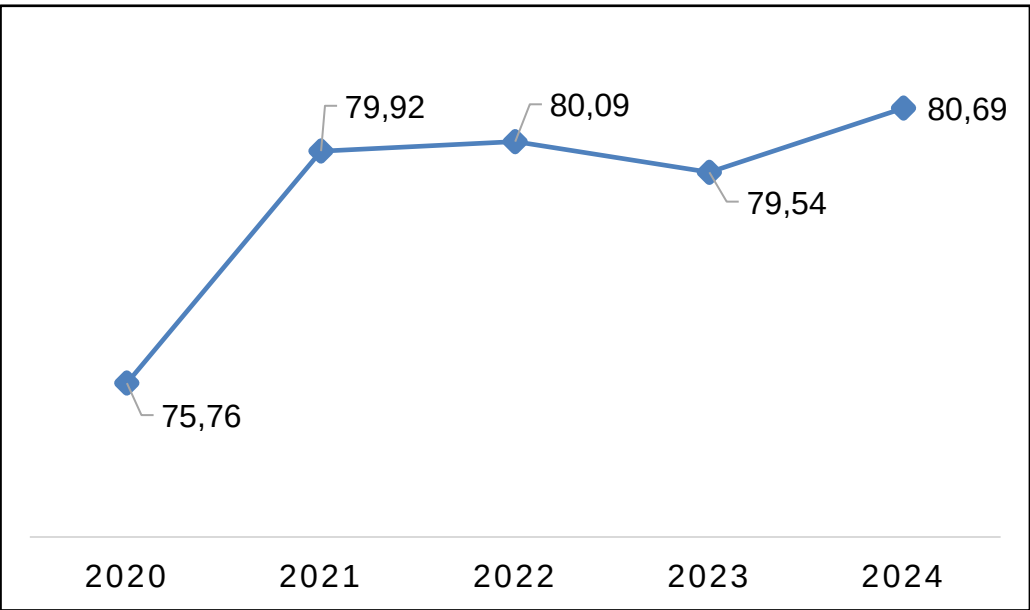
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa trend rumah tangga berakses air minum mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pemerintah melakukan upaya yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan akses air minum layak.

E. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, sehingga menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar masih memprihatinkan baik secara nasional maupun di tingkat kabupaten. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya masyarakat dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Oleh sebab itu penanganan sanitasi menjadi kesepakatan nasional yang harus diimplementasikan dalam rangka meningkatkan derajat sanitasi secara nasional maupun di tingkat daerah.

Tren persentase rumah tangga bersanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, angka rumah tangga bersanitasi layak tercatat sebesar 75,76% dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 79,92%. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022, meskipun hanya sedikit, mencapai 80,09%. Namun, di tahun 2023 terjadi penurunan tajam menjadi 79,54%, hampir menyamai angka pada tahun 2020. Meski begitu, pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan yang cukup baik dengan capaian 80,69%, menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun ini. Pola ini menunjukkan adanya perbaikan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao. Secara rinci perkembangan pembangunan sanitasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.27
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Persentase Sampah yang Ditangani dan Dikelola

1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan besar volume sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada suatu wilayah tertentu persatuan waktu (m3/jam). Timbulan sampah digunakan untuk menentukan fasilitas yang akan digunakan dalam pengelolaan sampah. Menurut SNI 19-3964-1995, untuk menghitung besaran sistem dapat digunakan timbulan sampah apabila belum dilakukan perhitungan timbulan sampah sebagai berikut:

- Satuan timbulan sampah untuk kota sedang (dengan jumlah penduduk 100.000< p <500.000) yaitu: 2, 75-3,25 L/orang/hari atau 0,70-0,80 kg/orang/hari
 - Satuan timbulan sampah untuk kota kecil (dengan jumlah penduduk <100.000) yaitu: 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari
- Perkiraan ini digunakan sebagai salah satu acuan untuk pemilihan sistem pengelolaan sampah agar dapat dilakukan dengan efisien.

Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam satuan timbulan sampah untuk Kota Sedang karena jumlah penduduknya di antara 100.000 <p<500.000. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN), Timbulan Sampah di Rote Ndao pada Tahun 2024 adalah sebesar 135.05 Ton per hari atau 49,291.78 ton per tahun. Angka ini sedikit meningkat dari Tahun 2022 dan 2023 yang memiliki angka sama yaitu 133,75 per hari atau 48.819,44 per tahun.

Jumlah TPA di Kabupaten Rote Ndao tercatat adalah sebanyak 1 di desa Oelunggu, status TPA A. Data SIPSN mencatat TPA ini menampung sampah sebanyak 3.931,05 ton per tahun pada Tahun 2023. Sehingga, Capaian kinerja pengelolaan sampah Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56

Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Tahun	Timbunan Sampah (ton/thn)	Pengurangan sampah (%)	Penanganan sampah (%)	Sampah terkelola (%)
2024	49.291,78	2.1	6	8,10
2023	48,819,44		8,05	8,05
2022	48,819,44		8,06	8,06

Sumber: Website SIPN, Tahun 2025

2) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Persentase jumlah sampah yang tertangani meningkat dari tahun 2020 sebesar 17,56% menjadi 70,46% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah armada sampah untuk mengangkut sampah yang ada

di kontainer penampung sampah. Pelayanan ini pun hanya untuk wilayah Kota Ba'a. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah personil dan fasilitas pendukung lainnya sehingga wilayah operasi armada persampahan hanya dibatasi untuk wilayah Perkotaan Ba'a. Terkait pengolahan sampah, Kabupaten Rote Ndao belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dimana selama ini yang dilayani hanya pengangkutan sampah dan selanjutnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Desa Oelunggu. Secara detail capaian kinerja Bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57

Persentase Pengelolaan Sampah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pengelolaan Sampah (%)	17,56	54,73	72,49	71,66	70,46

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

G. Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

Rasio gas rumah tangga merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak rumah tangga yang mengandalkan gas sebagai sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak. Secara umum, masyarakat di Rote Ndao masih lebih sering menggunakan minyak tanah dibandingkan gas LPG. Hal ini dikarenakan fleksibilitas penggunaan minyak tanah yang lebih mudah, meskipun gas LPG dianggap lebih hemat dan ramah lingkungan. Masyarakat masih menggunakan minyak tanah dikarenakan bisa digunakan di berbagai jenis kompor sumbu dan masih lebih terjangkau, terutama untuk masyarakat dengan pendapatan rendah

Berikut adalah Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.58

Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

	2021	2022	2023	2024
Kab. Rote Ndao	N/A	N/A	0,014	0,016
Prov. NTT	1,41	1,26	1,43	-

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Rote Ndao merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Sebab ketentraman dan ketertiban yang stabil pada suatu daerah merupakan salah satu dasar suksesnya pelaksanaan pembangunan.

Secara umum kondisi di Kabupaten Rote Ndao kondusif dan terkendali meskipun ada gejolak/konflik masyarakat, namun tidak sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Kondisi yang kondusif membuat masyarakat dan pemerintah dapat melakukan kegiatan dengan aman, nyaman dan tenteram. Indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah jumlah penegakan perda, cakupan petugas linmas, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), Jumlah layanan bencana kebakaran, dan tingkat waktu tanggap bencana kebakaran. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada meningkatnya jumlah petugas Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta menurunnya jumlah kasus-kasus yang mengganggu ketertiban umum. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) meningkat dari 0,75% pada tahun 2020 menjadi 0,69% pada tahun 2024. Capaian indikator ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,75	0,75	0,72	0,69	0,69
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota (%)	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.

C. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan angka-angka yang menunjukan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Data kriminalitas diperoleh dari hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi dalam satu tahun.

Tabel 2.60

Kasus Kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kriminalitas	361	376	270	317	360

Sumber: Statistik Kriminal Prov. NTT, Tahun 2025

Kasus kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi, tahun 2020 sebanyak 361 kasus tindak pidana yang dilaporkan, meningkat menjadi 376 kasus pada tahun 2021, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 270 kasus dan meningkat lagi menjadi 360 kasus pada tahun 2024.

D. Konflik SARA

Konflik SARA adalah yang merujuk pada konflik yang berhubungan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Ini mencakup ketegangan atau bentrokan yang terjadi akibat perbedaan identitas sosial, budaya, atau kepercayaan dalam masyarakat.

E. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup disini tetapi digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rote Ndao Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), terutama pembentukan modal tetap bruto Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.61
Pembentukan Modal Tetap Bruto

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (miliar rupiah)	1.001,74	1.082,36	1.133,43	1.235,58	1.280,04

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Realisasi Investasi Daerah

Laju Perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cepat apabila didukung oleh penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjaring investor maka kondisi daerah yang kondusif, regulasi yang jelas dan pengurusan ijin yang tidak berbelit-belit serta pelayanan yang prima sangat diperlukan. Disamping itu database potensi sumberdaya baik sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang jelas dan akurat dan kejelasan status tanah harus dipersiapkan secara baik oleh daerah sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi di daerah. Indikator kinerja Bidang penanaman modal dapat dilihat pada perkembangan jumlah investor dan besarnya nilai investasi swasta.

Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024. Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) terus meningkat dari 54 pada 2020 menjadi 86 pada 2024. Nilai investasi pun melonjak tajam, dari Rp15,4 miliar pada 2020 menjadi Rp1,24 triliun pada 2024, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin tinggi. Realisasi investasi juga mengalami fluktuasi, dengan kenaikan terbesar pada 2024 sebesar Rp334,1 miliar. Di sisi lain, persentase bangunan atau usaha berizin mengalami tren positif, meningkat dari 50% pada 2020 menjadi 142% pada 2024. Angka-angka ini menunjukkan perkembangan pesat dalam iklim investasi dan kepatuhan perizinan di wilayah tersebut. Adapun capaian kinerja Bidang penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Realisasi Investasi Daerah di Kab. Rote Ndao

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	54	60	74	80	86
Jumlah nilai investasi berskala	15.405	493.030	788.394	906.968	1.242.351

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)					
Realisasi investasi PMDN/PMA (x1.000.000)	62.590,6	119.440,7	64.423,98	222.990,83	334.135,00
Persentase bangunan/usaha berizin	50	115,87	104	140,29	142

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan atau dependency ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Atau diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk Angkatan kerja di suatu wilayah.

Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu:Pertama Sebagai indikator demografi Artinya perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependency ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. Fungsi kedua adalah Indikator keadaan ekonomi suatu wilayah. Rasio ketergantungan menjadi indikator keadaan ekonomi suatu wilayah. Artinya lewat perhitungan ini, bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang.

Rasio ketergantungan Kabupaten Rote Ndao tahun 2020–2024 dihitung dengan mencakup seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, sehingga memberikan gambaran mengenai beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Rasio Ketergantungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan	64,51	64,47	63,95	64,14	63,67

Sumber: BPS NTT, Tahun 2025

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sampai Tahun 2025 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, telah dilakukan telaahan secara komprehensif terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi ini didasarkan pada rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025, dengan cakupan penilaian hingga Triwulan II tahun berjalan.

Proses evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing perangkat daerah, serta menilai sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menyusun prioritas pembangunan tahun berikutnya, sekaligus sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian.

Adapun rincian capaian kinerja dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam RKPD Tahun 2025, serta tingkat pencapaian terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disajikan secara lebih rinci dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.64

**REKAPAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

NO	NAMA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 YANG DIEVALUASI (%)				TINGKAT REALISASI ANGGARAN KAS
		KINERJA		KEUANGAN		
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10,47	SR	21,92	SR	49,34
2	Dinas Kesehatan	17,16	SR	17,16	SR	57,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12,69	SR	5,78	SR	26,80
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	27,87	SR	23,40	SR	49,57
5	Satuan Polisi Pamong Praja	47,10	SR	28,18	SR	66,79
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22,36	SR	30,05	SR	48,29
7	Dinas Sosial	20,38	SR	39,49	SR	53,68
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	32,71	SR	40,84	SR	64,02
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	33,06	SR	23,60	SR	53,30
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32,80	SR	32,96	SR	48,84
11	Dinas Kependudukan dan Capil	12,82	SR	14,42	SR	41,47
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41,06	SR	42,41	SR	51,46
13	Dinas Perhubungan	50,28	SR	19,35	SR	50,46
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	38,52	SR	49,98	SR	52,79
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44,30	SR	36,74	SR	63,52
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45,55	SR	44,17	SR	68,30
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35,83	SR	45,13	SR	81,51
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,85	S	51,44	R	74,68
19	Dinas Perikanan	23,44	SR	35,36	SR	48,45
20	Dinas Peternakan	28,55	SR	43,72	SR	55,74
21	Bagian Umum	85,44	T	31,70	SR	22,93
22	Bag. Adm. Pemerintahan dan Kesra	6,56	SR	7,28	SR	53,49
23	Bagian Hukum	35,00	SR	31,70	SR	81,30
24	Bagian Organisasi	81,50	T	71,58	S	80,16
25	Bagian Ekbang dan SDA	55,73	R	63,31	R	80,31
26	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	56,11	R	50,18	SR	53,09
27	Sekretariat DPRD	61,91	R	42,88	SR	73,85
28	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	45,86	SR	36,43	SR	58,43
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26,12	SR	36,64	SR	39,77
30	Badan Pendapatan Daerah	19,44	SR	16,36	SR	47,32
31	BKPSDMD	30,01	SR	16,79	SR	87,68
32	Inspektorat Daerah	33,88	SR	38,64	SR	51,87
33	Kec. Lobalain	60,39	R	52,79	R	70,98
34	Kec. Rote Barat Laut	53,57	R	37,15	SR	46,60
35	Kec. Rote Barat Daya	32,81	SR	52,96	R	50,96
36	Kec. Rote Barat	40,17	SR	39,67	SR	65,14
37	Kec. Rote Selatan	35,18	SR	45,99	SR	87,38
38	Kec. Rote Tengah	25,49	SR	40,51	SR	50,12
39	Kec. Pantai Baru	10,71	SR	27,77	SR	45,27
40	Kec. Landuleko	11,95	SR	18,99	SR	71,50
41	Kec. Ndao Nuse	35,37	SR	41,47	SR	42,96
42	Kec. Rote Timur	29,46	SR	63,34	R	65,45
43	Kec. Loaholu	66,82	S	61,56	R	42,10
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53,13	R	55,68	R	68,01
RATA - RATA		37,19	SR	36,99	SR	57,79

TABEL 2.65

**REKAPAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD TAHUN 2025-2029
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	NAMA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 YANG DIEVALUASI (%)			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2,14	SR	5,13	SR
2	Dinas Kesehatan	17,16	SR	3,58	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,57	SR	2,99	SR
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7,78	SR	5,47	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9,42	SR	5,64	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,47	SR	5,66	SR
7	Dinas Sosial	10,19	SR	7,36	SR
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6,54	SR	8,17	SR
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7,08	SR	3,74	SR
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6,56	SR	9,95	SR
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2,56	SR	2,55	SR
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,21	SR	8,37	SR
13	Dinas Perhubungan	3,13	SR	3,87	SR
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	40,46	SR	13,86	SR
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13,09	SR	4,97	SR
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48,39	SR	7,26	SR
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,00	SR	5,27	SR
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,86	SR	24,05	SR
19	Dinas Perikanan	11,72	SR	7,07	SR
20	Dinas Peternakan	5,71	SR	8,92	SR
21	Bagian Umum	18,45	SR	5,69	SR
22	Bag. Adm. Pemerintahan dan Kesra	1,42	SR	1,96	SR
23	Bagian Hukum	33,89	SR	9,29	SR
24	Bagian Organisasi	16,30	SR	14,32	SR
25	Bagian Ekbang dan SDA	11,15	SR	13,12	SR
26	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11,22	SR	10,04	SR
27	Sekretariat DPRD	61,91	R	9,72	SR
28	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,31	SR	6,42	SR
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5,22	SR	7,33	SR
30	Badan Pendapatan Daerah	3,89	SR	2,62	SR
31	BKPSDMD	16,94	SR	9,09	SR
32	Inspektorat Daerah	11,06	SR	4,75	SR
33	Kec. Lobalain	18,42	SR	8,47	SR
34	Kec. Rote Barat Laut	10,71	SR	5,65	SR
35	Kec. Rote Barat Daya	24,55	SR	62,06	R
36	Kec. Rote Barat	7,52	SR	6,91	SR
37	Kec. Rote Selatan	7,93	SR	5,59	SR
38	Kec. Rote Tengah	62,75	R	8,17	SR
39	Kec. Pantai Baru	49,12	SR	4,58	SR
40	Kec. Landuleko	3,00	SR	3,89	SR
41	Kec. Ndao Nuse	15,38	SR	31,03	SR
42	Kec. Rote Timur	5,89	SR	9,05	SR
43	Kec. Loaholu	10,58	SR	9,48	SR
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,79	SR	10,85	SR
RATA - RATA		14,87	SR	9,18	SR

TABEL 2.66
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN ROTE NDAO DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
KABUPATEN ROTE NDAO

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
1	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.356.505.515.791		-		284.055.081.937		81.467.820.562			81.467.820.562			
1	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah B30	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	1.109.871.636.650		-		227.981.227.337		79.280.422.908			79.280.422.908			
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%													
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%													
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%													
1	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	186.740.000		-	100	32.972.500	42,11	27.295.000	507,52		27.295.000			
1	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	165.740.000			12	30.457.000	3	26.675.000	25,00	87,58	3	26.675.000,00	5,00	16,09
2	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Laporan	21.000.000			7	2.515.500	5	620.000	71,43	24,65	5	620.000,00	14,29	2,95
2	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		1.107.646.518.650		-	100	227.584.584.537	57,06	79.033.725.245			79.033.725.245			
3	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122.760	Orang/bulan	1.106.478.573.650			29.106	227.338.515.537	16.632	78.934.755.245	57,14	34,72	16.632	78.934.755.245,00	13,55	7,13
4	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320	Dokumen	1.167.945.000			64	246.069.000	11	98.970.000	17,19	40,22	11	98.970.000,00	3,44	8,47
3	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	266.496.250		-	100,00	57.093.800	2,98	24.350.000			24.350.000			
5	1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50	Dokumen	162.496.250			5	35.493.800	5	24.350.000	100,00	68,60	5	24.350.000,00	10,00	14,98
6	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	815	Laporan	104.000.000			163	21.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.037.426.750		-	100,00	164.275.500	50,83	132.697.203			132.697.203			
7	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.870.000			1	2.374.000	-	957.000	-	40,31	-	957.000,00	-	8,06

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	128.250.000			3	33.650.000	3	33.644.100	100,00	99,98	3	33.644.100,00	30,00	26,23
9	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	196.380.000			1	23.503.000	0	23.031.000	20,00	97,99	0	23.031.000,00	4,00	11,73
10	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	141.686.750			1	15.368.500	-	11.557.000	-	75,20	-	11.557.000,00	-	8,16
11	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	559.240.000			18	89.380.000	9	63.508.103	50,00	71,05	9	63.508.103,00	10,00	11,36
5	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	298.075.000		-	100,00	67.615.000	25,00	24.220.460				24.220.460		
12	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	298.075.000			12	67.615.000	3	24.220.460	25,00	35,82	3	24.220.460,00	5,00	8,13
6	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	436.380.000		-	100,00	74.686.000	3,33	38.135.000				38.135.000		
13	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	Unit	421.380.000	1		28	71.686.000	1	38.135.000	3,57	53,20	2	38.135.000,00	1,43	9,05
14	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15.000.000	-		2	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	90	%	244.269.364.384		-		55.680.415.600		2.169.547.654				2.169.547.654		
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	20	%													
		Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,7	%													
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI	67,21	%													
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS	55,12	%													
		Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI	62,67	%													
		Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS	55,46	%													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85,22	%													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	71,17	%													

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	0	Orang													
		persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)															
		Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	0	Orang													
7	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-12 tahun Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7-12 tahun	100	%	123.655.381.584		-	100,00	29.450.654.800	8,55	915.678.305			915.678.305			
15	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	Paket	1.898.000.000			2	379.600.000	-	84.581.255	-	22,28	-	84.581.255,00	-	4,46
16	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	Peserta Didik	500.000.650			100	87.118.650	-	34.775.700	-	39,92	-	34.775.700,00	-	6,96
17	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	6.490	Orang	5.398.750.550			1.298	846.505.550	374	153.571.830	28,81	18,14	374	153.571.830,00	5,76	2,84
18	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	375	Satuan Pendidikan	500.000.000			75	83.540.000	-	11.204.000	-	13,41	-	11.204.000,00	-	2,24
19	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	750	Satuan Pendidikan	91.496.550.000			150	18.267.563.000	-	74.902.000	-	0,41	-	74.902.000,00	-	0,08
20	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	260	Orang	500.000.000			60	79.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55	Dokumen	1.500.000.000			11	275.400.000	1	28.200.000	9,09	10,24	1	28.200.000,00	1,82	1,88
22	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10.000	Paket	4.116.173.200			2.248	1.516.173.200	-	465.538.520	-	30,70	-	465.538.520,00	-	11,31
23	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15	Ruang	2.733.200.000			4	1.623.200.000	-	1.360.000	-	0,08	-	1.360.000,00	-	0,05
24	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	Unit	900.000.000			2	200.000.000	-	6.495.000	-	3,25	-	6.495.000,00	-	0,72
25	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.245	Orang	1.250.000.000			249	205.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	750	Satuan Pendidikan	500.000.000			147	75.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
27	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	170	Ruang	10.823.067.184			36	5.502.702.400	-	55.050.000	-	1,00	-	55.050.000,00	-	0,51
28	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5	Paket	1.539.640.000			3	307.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 13-15 tahun Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13-15 tahun	100	%	77.491.210.800		-	100,00	15.636.100.800	6,26	762.618.849				762.618.849		
29	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	112	Ruang	5.210.000.000			2	210.000.000	-	5.425.000	-	2,58	-	5.425.000,00	-	0,10
30	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10	Paket	1.862.400.000			5	372.480.000	-	89.413.900	-	24,01	-	89.413.900,00	-	4,80
31	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700	Peserta Didik	750.000.000			100	134.280.000	-	8.650.000	-	6,44	-	8.650.000,00	-	1,15
32	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2.835	Orang	2.973.494.800			567	503.741.800	200	18.700.000	35,27	3,71	200	18.700.000,00	7,05	0,63
33	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	240	Satuan Pendidikan	1.600.000.000			48	231.153.000	-	50.239.000	-	21,73	-	50.239.000,00	-	3,14
34	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	215	Satuan Pendidikan	55.127.025.000			43	11.025.405.000	-	21.539.000	-	0,20	-	21.539.000,00	-	0,04
35	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250	Orang	375.000.000			50	64.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55	Dokumen	750.000.000			11	150.000.000	-	27.950.000	-	18,63	-	27.950.000,00	-	3,73
37	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	215	Satuan Pendidikan	500.000.000			43	85.460.000	-	34.491.000	-	40,36	-	34.491.000,00	-	6,90
38	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	Ruang	1.813.691.000			3	813.691.000	-	19.179.000	-	2,36	-	19.179.000,00	-	1,06
39	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	215	Orang	750.000.000			43	134.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10.000	Paket	4.115.200.000			2.274	1.515.200.000	-	461.126.949	-	30,43	-	461.126.949,00	-	11,21

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
41	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	12	Paket	1.664.400.000			5	396.000.000	-	25.905.000	-	6,54	-	25.905.000,00	-	1,56
9	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya pendidikan anak usia dini	100	%	32.600.102.000		-	100,00	8.503.746.000	0,03	443.494.000				443.494.000		
42	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	Unit	726.940.000			1	254.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	9	Paket	400.000.000			9	400.000.000	-	276.457.500	-	69,11	-	276.457.500,00	-	69,11
44	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.445	Orang	6.039.000.000			265	1.107.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	750	Orang	1.582.500.000			150	237.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	125	Satuan Pendidikan	1.020.800.000			25	192.020.000	1	67.027.500	4,00	34,91	1	67.027.500,00	0,80	6,57
47	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	665	Satuan Pendidikan	14.732.970.000			133	2.946.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55	Dokumen	500.000.000			11	100.000.000	1	20.450.000	9,09	20,45	1	20.450.000,00	1,82	4,09
49	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14	Ruang	3.347.892.000			9	2.499.892.000	-	54.518.000	-	2,18	-	54.518.000,00	-	1,63
50	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4.100	Orang	1.500.000.000			820	215.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	26.115	Peserta Didik	750.000.000			5.223	150.000.000	-	18.043.000	-	12,03	-	18.043.000,00	-	2,41
52	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	Ruang	2.000.000.000			2	400.000.000	-	6.998.000	-	1,75	-	6.998.000,00	-	0,35
10	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan (usia 7-18 tahun)	100	%	10.522.670.000		-	100,00	2.089.914.000	0,19	47.756.500				47.756.500		
53	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20	Satuan Pendidikan	9.522.670.000			4	1.904.534.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
54	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55	Dokumen	500.000.000			11	90.820.000	1	27.805.500	9,09	30,62	1	27.805.500,00	1,82	5,56
55	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.500	Orang	500.000.000			500	94.560.000	-	19.951.000	-	21,10	-	19.951.000,00	-	3,99
3	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase Tenaga Pendidik yang Memiliki Kompetensi	100,44	%	1.344.313.755		-		213.849.000		17.850.000				17.850.000		
		Indeks pemerataan Guru															
		Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik															
11	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD,dan pendidikan non formal/ kesetaraan	100	%	1.344.313.755		-	100,00	213.849.000	-	17.850.000				17.850.000		
56	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	965	Dokumen	1.079.650.000			193	177.530.000	-	15.130.000	-	8,52	-	15.130.000,00	-	1,40
57	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55	Laporan	264.663.755			11	36.319.000	-	2.720.000	-	7,49	-	2.720.000,00	-	1,03
4	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase siswa yang memahami bahasa dan sastra daerah	80,48	%	1.020.201.002		-		179.590.000		-				-		
12	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bahasa dan Sastra Daerah	1	Bahasa	1.020.201.002		-		179.590.000		-				-		
58	1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	5	Bahasa	1.020.201.002			1	179.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA				35.894.497.542		-		7.581.009.800		1.341.935.000				1.341.935.000		
5	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	71,43	%	24.714.915.077		-		5.454.828.800		164.668.000				164.668.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
		Persentase pemuda berprestasi dan tidak mampu yang memperoleh beasiswa	100	%													
		Rasio Wirausaha Pemuda															
13	2.19.02.2.01 Penyardaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyardaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	100	%	23.964.915.077		-	100,00	5.304.828.800	-	64.668.000			64.668.000			
59	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	20	Kegiatan	23.964.915.077			4	5.304.828.800	-	64.668.000	-	1,22	-	64.668.000,00	- 0,27	
14	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4	Dokumen	750.000.000		-		150.000.000		100.000.000			100.000.000			
60	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	3.250	Orang	750.000.000			650	150.000.000	225	100.000.000	34,62	66,67	225	100.000.000,00	6,92 13,33	
6	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlit yang berprestasi	100	%	10.797.007.090		-		2.051.181.000		1.177.267.000			1.177.267.000			
		Persentrase Atlit yang masuk Pelatnas															
15	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas siswa pada bidang keolahragaan	86,00	%	10.797.007.090		-	100,00	2.051.181.000	50,00	1.177.267.000			1.177.267.000			
61	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	20	Dokumen	10.797.007.090			4	2.051.181.000	2	1.177.267.000	50,00	57,39	2	1.177.267.000,00	10,00 10,90	
7	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka yang aktif	100	%	382.575.375		-		75.000.000		-			-			
		Tingkat PArtisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan															
16	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	Organisasi	382.575.375		-		75.000.000		-			-			
62	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	Dokumen	382.575.375			1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH			-		1.392.400.013.333		-		291.636.091.737		82.809.755.562	10,47	28,39		82.809.755.562	2,14 5,13	
Rata-rata capaian Kinerja (%)												10,47	21,92		82.809.755.562,00	2,14	5,13
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
RENCANA ANGGARAN KAS												Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		49,34			
Faktor Pendorong kebersihan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk menyukseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan														
Faktor Penghambat pencapaian kinerja			: pergantian ASN, kurangnya pemahaman percepatan penyerapan anggaran dan perlu peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan														
Tindakanlajut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:														
Tindakanlajut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya			:														

EVALUASI HASIL RKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROTE NDAO
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%
1	2	3	4			5			6			7			8 = 7/6x100			9 = 5 + 7			10=9/4x100		
	BELANJA DAN REALISASI (DINKES + RSUD + 12 PUSKESMAS)										129.374.270.707	36		46.017.510.904									
1. DINKES																							
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	249.315.081.331				100	%	60.895.957.603	52		31.389.891.954	52		52	52		31.389.891.954	52		13
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%					100	%													
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%					100	%													
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%					100	%													
1	Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	342.650.000				19	doku men	69.680.000	10		40.077.000	53		58	10		40.077.000	10		12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran Perangkat Daerah	60	Doku men	212.650.000				12	dokum en	56.580.000	6		28.122.000	50,00		49,70	6,00		28.122.000	10		13
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Doku men	130.000.000				7	dokum en	13.100.000	4		11.955.000	57,14		91,26	4,00		11.955.000	13		9
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan ASN	100	%	247.217.533.718				100	%	60.314.426.453	26		31.175.884.645	26		52	26		31.175.884.645	26		13

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K	Rp.		K	Rp		K	Rp		K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	245.902.756.365				12	bln (611 org)	60.040.918.453	6	31.170.274.645	50	52	6	31.170.274.645	10	13
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	5	Doku men	1.173.573.353				12	bln (7 org)	244.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Doku men	141.204.000				3	kali	28.560.000	-	5.610.000	-	20	-	5.610.000	-	4
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15	Doku men	177.266.880				1	doku men	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Doku men	177.266.880				5	Orang	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatmya Layanan Administrasi Perkantoran	5	Doku men	60.000.000				2	doku men	39.285.000	-	32.245.000	-	82	-	32.245.000	-	54
7	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Doku men	60.000.000				12	bulan (224 org)	39.285.000	-	32.245.000	-	82	-	32.245.000	-	54
5	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	bulan	1.112.202.000				12	bln	289.135.250	-	61.288.300	-	21	-	61.288.300	-	6
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	114.852.000				6	Unit	178.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5		225.000.000				12	bln	25.288.000	-	12.086.000	-	48	-	12.086.000	-	5
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	100.000.000				43.081	lbr	14.019.250	-	5.740.000	-	41	-	5.740.000	-	6

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Kali	672.350.000				18	Kali	71.008.000	8	43.462.300	44	61	8	43.462.300	9	6
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	laporan	125.358.167				2	laporan	66.406.900	2	38.399.015	100	58	2	38.399.015	40	31
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	125.358.167				12	Bulan	66.406.900	6	38.399.015	50	58	6	38.399.015	10	31
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	45	Unit	282.506.686				11	Unit	88.224.000	6	41.997.994	55	48	6	41.997.994	13	15
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	280.070.566				10	Unit	82.024.000	6	40.507.994	60	49	6	40.507.994	30	14
14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	2.436.120				7	unit	6.200.000	1	1.490.000	14	24	1	1.490.000	4	61
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Ibu (AKI)	117	per 100.000 KH	62.758.896.587				116,00	per 100.000 KH	24.190.402.943	-	2.798.162.054	-	12	-	2.798.162.054	-	4
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita)	38	%					35,30	%									
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100,00	%									
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100,00	%									

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4		5			6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	48	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara Dengan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%				100,00	%								
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	134	%				100,00	%								

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4		5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase Persentase Rumah Tangga ber PHBS	75	%				75,75	%									
		Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	11	%				30,00	%									
8	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kelengkapan Data SPA (Sarana Prasarana Alat Kesehatan)	74	% %	41.262.880.914			74	%	15.037.542.250	0	50.462.500	0	0	0	50.462.500	0	0
15	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas/ Pustu terbangun	15	Unit	28.226.328.060			21	paket	8.063.800.600	1	10.370.000	5	0	1	10.370.000	7	0
16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	60	Unit	527.826.000			2	Unit	1.143.772.000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	paket	681.487.300			1	paket	681.487.300	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	16	pkt	51.519.878			1	paket	225.585.950	-	8.721.000	-	4	-	8.721.000	-	17
19	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, BHMP, Vaksin, Makanan dan Minuman di failitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	paket	8.406.970.134			100	%	4.833.552.400	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BHMP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	5	paket	215.332.707				1	paket	89.344.000	1	31.371.500	100	35	1	31.371.500	20	15
9	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penduduk mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	20.425.919.686				100	%	8.867.613.311	27	2.667.062.785	27	30	27	2.667.062.785	27	13
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.130	orang	448.290.369				100	%	50.215.680	-	11.914.000	-	24	-	11.914.000	-	3
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.305	orang	346.181.946				100	%	303.346.146	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	12.010	orang	151.364.256				100	%	151.364.256	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59.825	orang	236.853.111				100	%	83.390.991	-	20.043.500	-	24	-	20.043.500	-	8
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146.745	orang	98.959.965				100	%	22.104.390	-	4.139.600	-	19	-	4.139.600	-	4
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424.505	orang	252.949.512				100	%	90.257.558	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.215	orang	54.707.744				100	%	17.193.068	52,00	4.636.210	52	27	52	4.636.210	0	8
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	112.700	orang	38.571.494				100	%	6.424.600	-	3.740.000	-	58	-	3.740.000	-	10

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.930	orang	672.038.214				1.625	org	6.409.150	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	595	orang	111.014.800				100	%	17.111.000	-	10.339.000	-	60	-	10.339.000	-	9
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17.955	orang	478.334.598				100	%	10.940.000	-	9.576.000	-	88	-	9.576.000	-	2
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20.495	orang	106.539.648				100	%	22.204.700	-	18.325.700	-	83	-	18.325.700	-	17
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	doku men	3.134.975.408				100	%	851.108.341	-	184.992.800	-	22	-	184.992.800	-	6
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	Doku men	19.153.994				12	puske smas	38.108.417	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Doku men	1.419.820.319				6	dokum en	547.460.080	4	26.492.175	72	5	4	26.492.175	86	2
36	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Doku men	530.001.979				1	dokum en	263.247.290	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Doku men	458.624.964				100	%	69.004.350	-	10.770.350	-	16	-	10.770.350	-	2
38	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Doku men	1.089.473.974				3	dokum en	263.425.850	2	56.295.500	67	21	2	56.295.500	40	5
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	doku men	8.585.055.987				7	dokum en	5.713.222.200	6	2.241.236.200	86	39	6	2.241.236.200	100	26

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp		K		Rp	K	Rp.		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
40	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang di distribusikan	5	paket	400.157.071				1	paket	84.039.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	51.825	orang	963.993.594				12	puskesmas	39.593.000	6	28.063.000	50	71	6	28.063.000	0	3	
10	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Informasi Kesehatan	100	%	204.997.468				12	bln	85.008.800	6	50.127.619	50	59	6	50.127.619	6	24	
42	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	puskesmas	204.997.468				12	puskesmas	85.008.800	6	50.127.619	50	59	6	50.127.619	50	24	
11	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	100	%	865.098.519				100	%	200.238.582	3	30.509.150	3	15	3	30.509.150	3	4	
43	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60	kl	865.098.519				12	unit	200.238.582	3	30.509.150	25	15	3	30.509.150	5	4	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50	%	20.906.147.050				66,67	%	7.969.395.719	2	1.618.806.100	3	20	2	1.618.806.100	4	8	
		Persentase Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas	83	%					83,83	%										
		Persentase Pemenuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe sesuai standar (7 Spesialis (4 dasar dan 3 Penunjang)		%					100	%										

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
12	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	83	%	19.651.037.295				100	%	6.853.915.000	2	1.568.398.000	2	23	2	1.568.398.000	3	8
44	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	896	orang	18.528.722.700				12	bln	6.817.451.000	6	1.568.398.000	50	23	6	1.568.398.000	1	8
45	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	doku men	1.122.314.595				3	kali	36.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	%	1.255.109.755				100	%	1.115.480.719	2	50.408.100	2	5	2	50.408.100	2	4
46	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	422	Orang	1.255.109.755				188	Orang	1.115.480.719	2	50.408.100	1	5	2	50.408.100	0	4
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman	100	%	562.073.239				95	%	274.616.250	9	25.152.455	10	9	9	25.152.455	9	4
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		%					100	%									
14	Keg :Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	29.871.967				100	%	14.714.500	13	3.950.000	13	27	13	3.950.000	13	13

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%
1	2	3	4			5			6			7			8 = 7/6x100			9 = 5 + 7			10=9/4x100		
47	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5	doku men	29.871.967				2	kl	14.714.500	2		3.950.000	90	27		2		3.950.000	36		13
15	Keg :Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%	214.143.474				100	%	100.370.000	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
48	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5	doku men	214.143.474				3	kl	100.370.000	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
16	Keg : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	doku men	318.057.797				100	%	159.531.750	13		21.202.455	13	13	13	13		21.202.455	13		7
49	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	240	produ k	318.057.797				11	produ k	159.531.750	3		21.202.455	27	13	3	3		21.202.455	1		7

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100	%	524.861.191				80,00	%	142.950.310	8	11.734.380	10	8	8	11.734.380	8	2
		Persentase Posbindu Aktif	100	%					90	%									
		Persentase Orang yang discreaning di Posbindu	100	%					60	%									
		Persentase Posyandu Aktif	100	%					>90	%									
17	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100	%	254.624.287				100	%	39.845.220	9	3.740.000	9	9	9	3.740.000	9	1
50	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	doku men	254.624.287				1	dokum en	39.845.220	1	3.740.000	100	9	1	3.740.000	20	1
18	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UKBM	100	%	270.236.904				1	doku men	103.105.090	1	7.994.380	100	8	1	7.994.380	1	3
51	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50	%	270.236.904				82	%	103.105.090	8	7.994.380	9	8	8	7.994.380	16	3
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)					334.067.059.399						93.473.322.825	-	35.843.746.943	15	20	-	35.843.746.943	15	6

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%
1	2	3	4			5			6			7			8 = 7/6x100			9 = 5 + 7			10=9/4x100		
2. RSUD - BA'A																							
VI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Ibu (AKI)	117	per 100.000 KH	24.668.157.527				116	per 100.000 KH	9.688.283.507	35		3.391.802.948	30	35	35		3.391.802.948	30	14		
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita)	38	%					35,3	%													
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100	%					100	%													
		Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94	%					100	%													

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	48	%					100	%									
		Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%									
		Persentase Warga Negara Dengan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%					100	%									
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	134	%					100	%									
		Persentase Persentase Rumah Tangga ber PHBS	75	%					75,75	%									
		Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	11	%					30	%									
19	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kelengkapan Data SPA (Sarana Prasarana Alat Kesehatan) Persentase Ketersediaan Obat essensial sesuai Standar	74	%	16.621.788.768				100	%	6.995.508.607	32	2.219.689.383	32	32	32	2.219.689.383	43	13
52	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5	pkt	2.263.266.120				1	paket	1.374.977.000	1	420.135.248	100	31	1	420.135.248	20	19
53	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, BHMP, Vaksin, Makanan dan Minuman di failitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, BHMP, Vaksin, Makanan dan Minuman di failitas Kesehatan	5	pkt	28.102.658.035				1	paket	5.620.531.607	1	1.799.554.135	100	32	1	1.799.554.135	20	6

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penduduk mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	6.639.003.965				100	%	1.998.671.900	36	718.818.129	36	36	36	718.818.129	36	11
54	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5	doku men	6.526.885.602				1	paket	1.942.892.900	1	718.818.129	100	37	1	718.818.129	20	11
55	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	unit	112.118.363				8	unit	55.779.000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	100	%	1.407.661.190				100	%	694.103.000	65	453.322.436	65	65	65	453.322.436	65	32
56	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	%	1.407.661.190				1	paket	694.103.000	1	453.322.436	100	65	1	453.322.436	1	32
VII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	100	%	15.177.807.158				66,67	%	7.500.816.000	45	3.362.954.000	67	45	45	3.362.954.000	45	22
		Persentase Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas	83	%					83,83	%									
		Persentase Pemenuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe sesuai standar (7 Spesialis (4 dasar dan 3 Penunjang)		%					100	%									
22	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Kesehatan yang berkompeten	62	%	15.177.807.158				62	%	7.500.816.000	45	3.362.954.000	72	45	45	3.362.954.000	72	22

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp		K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%
1	2	3	4			5			6			7			8 = 7/6x100			9 = 5 + 7			10=9/4x100		
57	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	5	dokumen	15.177.807.158				1	dokumen	7.500.816.000	1		3.362.954.000	100	45		1		3.362.954.000	20		22
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)					39.845.964.685			-			17.189.099.507	-		6.754.756.948	48	40		-		6.754.756.948	37		18
3. PUSKESMAS																							
1	OPERASIONAL PUSKESMAS EAHUN	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	8.843.566.582				100	%	1.813.502.348	14		244.896.743	14	14	14	14		244.896.743	14		3
2	OPERASIONAL PUSKESMAS SOTIMORI	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	3.984.876.515				100	%	806.999.489	17		135.782.400	17	17	17	17		135.782.400	17		3
3	OPERASIONAL PUSKESMAS KORBAFO	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	5.110.962.981				100	%	1.183.366.007	10		116.052.261	10	10	10	10		116.052.261	10		2
4	OPERASIONAL PUSKESMAS SONIMANU	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	3.815.983.822				100	%	918.126.300	26		238.405.901	26	26	26	26		238.405.901	26		6
5	OPERASIONAL PUSKESMAS FEAPOPI	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	5.247.889.009				100	%	1.139.897.663	18		201.830.842	18	18	18	18		201.830.842	18		4
6	OPERASIONAL PUSKESMAS BAA	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	16.306.280.718				100	%	3.381.347.343	35		1.180.296.315	35	35	35	35		1.180.296.315	35		7
7	OPERASIONAL PUSKESMAS OELE	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	4.696.745.290				100	%	953.170.503	17		160.604.127	17	17	17	17		160.604.127	17		3
8	OPERASIONAL PUSKESMAS BUSALANGGA	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	9.215.173.392				100	%	1.939.156.305	21		403.862.559	21	21	21	21		403.862.559	21		4

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K		Rp	K	Rp.		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	OPERASIONAL PUSKESMAS OELABA	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	10.592.444.807				100	%	1.654.163.957	14	230.037.760	14	14	14	230.037.760	14	2
10	OPERASIONAL PUSKESMAS BATUTUA	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	16.479.588.533				100	%	2.988.846.282	11	319.737.905	11	11	11	319.737.905	11	2
11	OPERASIONAL PUSKESMAS DELHA	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	5.757.218.590				100	%	1.258.573.935	3	41.111.100	3	3	3	41.111.100	3	1
12	OPERASIONAL PUSKESMAS NDAO	Jumlah Dokumen Kegiatan Bersumber Dana BOK dan JKN	100	%	3.183.387.096				100	%	674.698.243	22	146.389.100	22	22	22	146.389.100	22	5
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)					93.234.117.335						18.711.848.375	-	3.419.007.013	17,16	17,16	-	3.419.007.013	17,16	3,58
TOTAL DINKES + RSUD + 12 PUSKESMAS					467.147.141.419						129.374.270.707		46.017.510.904	SR	SR		46.017.510.904	SR	SR
Rencana Anggaran Kas												Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		57,02					

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	Disiplin kerja dan 9 sub kegiatan dengan capaian kinerja diatas 50%
Faktor penghambat keberhasilan kinerja	Perlu peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan 35 sub kegiatan dengan capaian kinerja di bawah 50%
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja
Tindakanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya	-

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
I.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang di sampaikan tepat waktu	100,00	%	23.111.245.802		-	100,00	4.246.069.202	25,00	1.814.832.093	25,00	42,74	25,00	1.814.832.093	25,00	7,85
		Peresentase Terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	%		100,00		25,00									
		Presentase Penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100,00	%		100,00		25,00									
		Presentase Barang Milikk Daerah dalam kondisi baik	100,00	%		100,00		25,00									
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang di sampaikan tepat waktu	95,00	Dokum en	590.000.000	-	-	19,00	110.000.000	4,00	58.450.000	21,05	53,14	4,00	58.450.000	4,21	9,91
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,00	Dokum en	295.000.000			12,00	55.000.000	6,00	30.770.000	50,00	55,95	6,00	30.770.000	10,00	10,43
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,00	Dokum en	295.000.000			7,00	55.000.000	1,00	27.680.000	14,29	50,33	1,00	27.680.000	2,86	9,38
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100,00	%	17.911.561.402	-	-	56,00	3.241.384.602	14,00	1.545.810.117	25,00	47,69	14,00	1.545.810.117	14,00	8,63
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220,00	OB	16.716.561.402			44,00	3.046.384.602	22,00	1.541.995.117	50,00	50,62	22,00	1.541.995.117	10,00	9,22

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,00	Dokumen	1.195.000.000			12,00	195.000.000	6,00	3.815.000	50,00	1,96	6,00	3.815.000	10,00	0,32
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktugkat Daerah	100,00	%	57.000.000	-	-	12,00	11.400.000	3,00	-	25,00	-	3,00	-	3,00	-
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60,00	Dokumen	57.000.000			12,00	11.400.000	3,00	-	25,00	-	3,00	-	5,00	-
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	100,00	%	2.753.350.000	-	-	52,00	257.332.600	5,00	72.216.351	9,62	28,06	5,00	72.216.351	5,00	2,62
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,00	Paket	9.987.000			1,00	1.987.000	-	888.000	-	44,69	-	888.000	-	8,89
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,00	Paket	772.955.000			9,00	89.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10,00	Paket	125.000.000			2,00	15.000.000	-	6.803.000	-	45,35	-	6.803.000	-	5,44
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5,00	Paket	125.445.000			2,00	15.267.000	-	4.588.900	-	30,06	-	4.588.900	-	3,66
10.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183,00	Laporan	1.719.963.000			38,00	135.623.600	8,00	59.936.451	21,05	44,19	8,00	59.936.451	4,37	3,48
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	%	347.000.000	-	-	24,00	64.500.000	3,00	17.842.289	12,50	27,66	3,00	17.842.289,00	3,00	5,14
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,00	Laporan	6.000.000			12,00	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	Laporan	341.000.000			12,00	61.000.000	6,00	17.842.289	50,00	29,25	6,00	17.842.289,00	10,00	5,23
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihanya Barang Milik Daerah yang terpelihara	240,00	Unit	1.452.334.400	-	-	47,00	561.452.000	5,00	120.513.336,00	10,64	21,46	5,00	120.513.336,00	2,08	8,30
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	185,00	Unit	937.334.400			37,00	141.932.000	15,00	82.713.336,00	40,54	58,28	15,00	82.713.336,00	8,11	8,82
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15,00	Unit	500.000.000			4,00	266.520.000	1,00	36.975.000,00	25,00	13,87	1,00	36.975.000,00	6,67	7,40
15.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00	Unit	15.000.000			6,00	3.000.000	1,00	825.000,00	16,67	27,50	1,00	825.000,00	2,50	5,50
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	Unit	550.000.000			1,00	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	36,18	%	32.814.646.000		-	34,20	2.470.752.970	-	2.407.000,00	-	0,10	-	2.407.000,00	-	0,01
		Persentase embung/bendung kondisi baik	59,66	%				53,98		-		-		-			
7.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Kegiatan Yang di Bangun dan Di Rehabilitasi	20,00	paket	12.134.000.000	-	-	2,00	1.036.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitas	20,00	paket	12.134.000.000			2,00	1.036.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
8.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi yang di Bangun, tingkatkan dan di rehabilitasi	9.580,50	Km	20.680.646.000	-	-	1.975,96	1.434.752.970	-	2.407.000,00	-	0,17	-	2.407.000,00	-	0,01
18.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan Irigasi yang di Bangun	7,20	Km	9.587.000.000			1.086,79	373.950.970								
20.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.580,50	Km	9.885.646.000			1.655,96	860.802.000	-	2.407.000,00	-	0,28	-	2.407.000,00	-	0,02
21.	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.054,374	Km	1.208.000.000			320,000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air minum layak (%)	76,49	%	17.405.188.040		-	75,23	1.726.828.790	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani	4,00	SR/Lite r/Detik	17.405.188.040	-	-	6,00	1.726.828.790	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20,00	Liter/De tik	17.405.188.040			6,00	1.726.828.790	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	83,22	%	24.002.506.000		-	81,96	4.667.956.000	-	9.480.000,00	-	0,20	-	9.480.000,00	-	0,04
10.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik yang terbangun	1.910,00	Rumah Tangga	24.002.506.000	-	-	382,00	4.667.956.000	-	9.480.000,00	-	0,20	-	9.480.000,00	-	0,04
23.	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub sistim Pengelolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1.910,00	Rumah Tangga	24.002.506.000			382,00	4.667.956.000	-	9.480.000,00	-	0,20	-	9.480.000,00	-	0,04

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
V.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase persetujuan bangunan gedung layak fungsi	100,00	%	937.370.000		-	69,70	155.985.000	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pengedalian Bangunan Gedung	6,00	Dokumen	937.370.000,00	-	-	2,00	155.985.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10,00	Dokumen	658.370.000,00			1,00	107.905.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Sub KegiatanPenyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5,00	Dokumen	279.000.000			1,00	48.080.000	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	70,75	%	390.869.528.068		-	60,75	18.318.264.318	-	11.248.200,00	-	0,06	-	11.248.200	-	0,00
		Persentase Panjang Jalan desa strategis terbangun	44,68	%				40,25		-		-		-		-	
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yg di Bangun, tingkatkan, Panjang Jembatan di rehab dan di bangun	137,29	Km	390.869.528.068	-	-	28,18	18.318.264.318	-	11.248.200,00	-	0,06	-	11.248.200	-	0,00
26.	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi Jalan	120,15	Km	364.667.684.250			24,03	17.108.769.000	-	11.248.200,00	-	0,07	-	11.248.200	-	0,00
27.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	6,72	Km	4.147.044.318			3,15	847.044.318			-	-	-	-	-	-
28	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	10,00	Dokumen	3.077.362.500			2,00	362.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
VII.	29 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10,42	Km	18.977.437.000			1,00	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	97,55	%	550.000.000		-	97,50	350.000.000	-	7.419.000,00	-	2,12	-	7.419.000,00	-	1,35
		Presentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Perkotaan	86,00	%				85,00		-		-		-		-	
13.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1,00	Dokumen	300.000.000	-	-	1,0	300.000.000	-	2.473.000,00	-	0,82	-	2.473.000	-	0,82
30	Pelaksanaan PersetujuanSubstansi RTRWKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	300.000.000			1,00	300.000.000	-	2.473.000	-	0,82	-	2.473.000	-	0,82
14.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Tata Ruang yang di hasilkan	5,00	Dokumen	250.000.000,00	-	-	1,00	50.000.000	-	4.946.000,00	-	9,89	-	4.946.000,00	-	1,98
31	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5,00	Dokumen	250.000.000			1,00	50.000.000	-	4.946.000,00	-	9,89	-	4.946.000,00	-	1,98
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)					489.690.483.910		-		31.935.856.280		1.845.386.293	12,69	5,78		1.845.386.293	2,57	2,99
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR	
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		26,80					
Faktor Pendorong kebersihan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk menyukseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan														
Faktor Penghambat pencapaian kinerja			: pergantian ASN, kurangnya pemahaman percepatan penyerapan anggaran dan perlu peningkatan pelakasaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya			:														

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / / Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome), /Sub (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	15.970.062.580		-	100	2.599.015.080	45	1.245.733.265	45,40	47,93	45,40	1.245.733.265	45,40	7,80
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100									
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100									
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %				100									
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95 Dok	288.275.000	-	-	19	33.655.000	11	17.963.000	57,89	53,37	11,00	17.963.000	11,58	6,23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	91.775.000			12	18.355.000	7	10.069.000	58,33	54,86	7,00	10.069.000	11,67	10,97
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	196.500.000			7	15.300.000	4	7.894.000	57,14	51,59	4,00	7.894.000	11,43	4,02
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	14.233.360.580	-	-	100	2.294.802.980	56	1.144.824.265	55,56	49,89	13,89	1.144.824.265	13,89	8,04
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.300 Orang / Bulan	13.966.312.580			420	2.244.402.980	30	1.144.824.265	7,14	51,01	30,00	1.144.824.265	0,23	8,20
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	267.048.000			12	50.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	45.000.000	-	-	12	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	45.000.000			12	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	833.762.500	-	-	100	150.215.600	31	46.955.800	30,77	31	30,77	46.955.800	30,77	5,63

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / / Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome) ,/Sub (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	5.300.000			1	1.060.000	1	1.060.000	100,00	100,00	1,00	1.060.000	20,00	20,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	18.500.000			1	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	125.000.000			2	20.050.000	1	1.474.000	50,00	7,35	1,00	1.474.000	10,00	1,18
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Disediakan	10 Paket	110.000.000			2	18.969.600	1	1.013.900	50,00	5,34	1,00	1.013.900	10,00	0,92
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	574.962.500			20	91.636.000	5	43.407.900	25,00	47,37	5,00	43.407.900	8,33	7,55
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	164.289.500	-	-	100	30.266.500	50	5.428.200	50,00	17,93	50,00	5.428.200	50,00	3,30
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	3.042.000			12	3.042.000	6	1.300.000	50,00	42,74	6,00	1.300.000	50,00	42,74
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	161.247.500			12	27.224.500	6	4.128.200	50,00	15,16	6,00	4.128.200	10,00	2,56
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	405.375.000	-	-	100	81.075.000	48	30.562.000	48,37	37,70	48,37	30.562.000	48,37	7,54
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	405.375.000			19	81.075.000	10	30.562.000	52,63	37,70	10,00	30.562.000	10,53	7,54
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	476.000.000	-	-	100	85.249.600	-	2.720.000	-	3,19	-	2.720.000	-	0,57
7	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan rumah bagi korban bencana	10 Unit	476.000.000	-	-	2	85.249.600	-	2.720.000	-	3,19	-	2.720.000	-	0,57
14	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 Unit	476.000.000			2	85.249.600	-	2.720.000	-	3,19	-	2.720.000	-	0,57
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni terbangun	57,71 %	6.406.545.700	-	-	57	1.176.037.750	-	12.337.000	-	1,05	-	12.337.000	-	0,19
8	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	6 Dokumen	2.182.940.000	-	-	1	411.770.400	-	1.012.000	-	0,25	-	1.012.000	-	0,05

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / / Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome), /Sub (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
15	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	6 Doku men	2.182.940.000	-	-	1	411.770.400	-	1.012.000	-	0,25	-	1.012.000	-	0,05
9	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	100 Unit	4.223.605.700	-	-	20	764.267.350	-	11.325.000	-	1,48	-	11.325.000	-	0,27
16	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	100 Unit	4.223.605.700			20	764.267.350	-	11.325.000	-	1,48	-	11.325.000	-	0,27
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-	-						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								-	-						
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat	16,36 %	1.000.000.000	-	-	11	134.200.400	-	29.525.000	-	22,00	-	29.525.000	-	2,95
10	Penatagunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat tanah pemda	280 Doku men	1.000.000.000	-	-	56	134.200.400	-	29.525.000	-	22,00	-	29.525.000	-	2,95
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Doku men	1.000.000.000			56	134.200.400	-	29.525.000	-	22,00	-	29.525.000	-	2,95
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGLINGKUNGAN HIDUP								-	-						
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kehati Lingkungan Hidup	100 %	300.000.000	-	-	100	237.250.000	-	15.665.000	-	6,60	-	15.665.000	-	5,22
11	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 Doku men	300.000.000	-	-	1	237.250.000	-	15.665.000	-	6,60	-	15.665.000	-	5,22
18	Penyelenggaraan KLHS Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1 Doku men	300.000.000			1	237.250.000	-	15.665.000	-	6,60	-	15.665.000	-	5,22
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,27 Poin	1.125.000.000	-	-	78	130.376.500	-	18.734.000	-	14,37	-	18.734.000	-	1,67
12	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	16 Doku men	875.000.000	-	-	4	94.371.000	-	14.654.000	-	15,53	-	14.654.000	-	1,67
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	6 Doku men	375.000.000			2	52.175.000	1	14.654.000	50,00	28,09	1,00	14.654.000	16,67	3,91

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / / Sub	Indikator Kinerja Program (Outcome), /Sub (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Doku men	500.000.000			2	42.196.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6 Doku men	250.000.000	-	-	2	36.005.500	-	4.080.000	-	11,33	-	4.080.000	-	1,63
21	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	6 Doku men	250.000.000			2	36.005.500	-	4.080.000	-	11,33	-	4.080.000	-	1,63
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Ditangani dan Dikelola	78,92 %	9.629.800.000	-	-	75	1.365.299.000	14	15.234.000	18,36	1,12	13,8	15.234.000	17,45	0,16
14	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikurangi + Jumlah sampah yang diangkut	17.182 Ton	9.629.800.000	-	-	3.265	1.365.299.000	420	15.234.000	12,87	1,12	420,3	15.234.000	2,45	0,16
22	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	11.163 Ton	9.629.800.000			2.176	1.365.299.000	1.370	15.234.000	62,94	1,12	1.370	15.234.000	12,27	0,16
Rata-rata Capaian Target Kinerja (%)				34.907.408.280		-		5.727.428.330		1.339.948.265	27,87	23,40		1.339.948.265	7,78	5,47
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		49,57					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/sub dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			: Perlu Peningkatan Kinerja baik Perencanaan maupun pelaksanaan dalam melaksanakan semua rencana program/sub yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah													

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	13.110.688.850	100	-	100	2.508.188.770	50,00	1.157.271.089	50,00	46,14	10,00	1.189.284.289	10,00	9,07
		TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	100	%		100		100		40,00		40,00		8,00		8,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95	Doku men	49.880.000	0	-	19	9.976.000	6	4.762.000	31,58	47,73	6,00	4.762.000	6,32	9,55
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Doku men	24.880.000	0	-	12	4.976.000	3	2.262.000	25,00	45,46	3,00	2.262.000	5,00	9,09
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Lapor an	25.000.000	0	-	7	5.000.000	3	2.500.000	42,86	50,00	3,00	2.500.000	8,57	10,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	11.286.828.850	0	-	12	2.257.365.770	7	1.057.696.289	150	75,38	6,00	1.057.696.289	10,00	9,37
3	Penyedaiaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	10.937.628.850	0	-	12	2.187.525.770	6	1.038.196.289	50	47,46	6,00	1.038.196.289	10,00	9,49
4	Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Doku men	349.200.000	0	-	1	69.840.000	1	19.500.000	100	28	1,00	19.500.000	20,00	5,58
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Doku men	60.000.000	0	-	1	12.000.000	-	3.302.000	-	28	-	3.302.000	-	5,50
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Doku men	60.000.000	0	-	1	12.000.000	-	3.302.000	-	28	-	3.302.000	-	5,50
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	497.140.000	100	-	100	99.428.000	83,33	54.890.000	83,33	55,21	16,67	54.890.000	16,67	11,04
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	200.175.000	0	-	2	40.035.000	2,00	36.605.000	100,00	91,43	2,00	36.605.000	20,00	18,29

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	0	-	1	15.000.000	1,00	4.116.000	100,00	27,44	1,00	4.116.000	20,00	5,49
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	0	-	1	14.860.000	1,00	2.555.000	100,00	17,19	1,00	2.555.000	20,00	3,44
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	0	-	8	29.533.000	6,00	11.614.000	75,00	39,33	6,00	11.614.000	15,00	7,87
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	-	100	15.470.000	6,00	910.000	50,00	41,18	6,00	910.000	10,00	8,24
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	0	-	12	2.210.000	6,00	910.000	50,00	41,18	6,00	910.000	10,00	8,24
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	Bulan	0	-	12	13.260.000	3,00	1.848.800	25,00	13,94	3,00	1.848.800	5,00	2,79
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	-	100	113.949.000	35,29	33.862.000	35,29	57,85	7,06	33.862.000	7,06	5,94
12	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	Unit	0	-	5	9.435.000	0	-	0,00	0,00	-	-	-	-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	0	-	11	98.514.000	5	32.362.000	45,45	32,85	5,00	32.362.000	9,09	6,57
14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	0	-	1	6.000.000	1	1.500.000	100,00	25,00	1,00	1.500.000	20,00	5,00
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/perkada	28	%	14	-	14	822.489.000	14,00	198.840.000	100,00	24,18	28,00	198.840.000	100,00	6,10
		Cakupan perlindungan masyarakat	160	%	80		80		80,00		100,00		160,00		100,00	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Cakupan ketertiban dan ketentraman umum	54	%	27		27		27,00		100,00		54,00		100,00	
7	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah aparat sat pol pp yang melakukan patroli, pengamanan festival dan pameran	16	Kasus	0	-	16	761.291.000	6	195.939.000	38	25,74	6,00	195.939.000	37,50	5,15
15	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	20	Dokumen	0	-	4	169.982.000	2	12.173.000	50,00	7,16	2,00	12.173.000	10,00	1,43
16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiba Umum	25	Dokumen	0	-	5	158.517.000	2	64.290.000	40,00	40,56	2,00	64.290.000	8,00	8,11
17	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	15	Dokumen	0	-	3	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20	Laporan	0	-	4	232.792.000	2	119.476.000	50,00	51,32	2,00	119.476.000	10,00	10,26
8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	Laporan	0	-	2	61.198.000	-	2.901.000	-	5	-	2.901.000	-	0,95
19	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	0	-	1	30.218.000	1	2.901.000	100	10	1,00	2.901.000	20,00	1,92
20	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5	Laporan	0	-	1	19.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	0	-	1	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III	PROGRAM PENCEGAHAN BIDANG KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penanggulangan kebakaran	50	Laporan	497.025.500	0	-	10	99.405.100	3	7.585.000	30,00	14,23		7.585.000	6,00	2,85
9	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran	50	Laporan	497.025.500	0	-	10	53.309.000	3,00	7.585.000	30,00	14,23	3,00	7.585.000	6,00	2,85
22	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50	Laporan	266.545.000	0	-	10	53.309.000	3,00	7.585.000	30,00	14,23	3,00	7.585.000	6,00	2,85
10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		1	Laporan	230.480.500	-	-		46.096.100								
23	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		5	Laporan	230.480.500	0	-	1	46.096.100	-	17.743.000	-	38,49	-	17.743.000	-	7,70
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)					17.150.414.350	100	-		3.430.082.870		1.381.439.089	47,10	28,18		1.381.439.089	9,42	5,64
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR	
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		66,79					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja		: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah															
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		: Peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan															
Tindakanlntjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja															
Tindakanlntjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya		: Menyesuaikan sesuai SPM Satuan Polisi Pamong Praja															

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	33.177.000	-	-	100	6.635.400	-	660.218.710	-	9.950	-	660.218.710	-	-
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	658.230.000			100	144.182.000	11,54	21.130.100	11,54	14,66	11,54	21.130.100	11,54	3,21
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	5.509.916.550			100	1.101.983.310	7,00	550.032.610	7,00	49,91	7,00	550.032.610	7,00	9,98
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	1.456.270.000	-	-	100	203.057.500	3,85	85.580.000	3,85	42,15	3,85	85.580.000	3,85	5,88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95 Doku men	33.177.000	-	-	19	6.635.400	-	3.476.000	-	52	-	3.476.000	-	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	22.152.000	-	-	12	4.430.400	6	1.271.000	50	29	6	1.271.000	10	6
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dok	11.025.000	-	-	7	2.205.000	4	2.205.000	57	100	4	2.205.000	11	20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	5.509.916.550	-	-	100	1.101.983.310	7,00	550.032.610	7,00	49,91	7,00	550.032.610	7,00	9,98
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Org/B In	5.300.541.550	-	-	196	1.060.108.310	29,00	536.072.610	14,80	50,57	29,00	536.072.610	2,96	10,11
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 doku men	209.375.000	-	-	4	41.875.000	2	13.960.000	50	33	2	13.960.000	10	7
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	44.760.000	-	-	100	8.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 doku men	44.760.000	-	-	3	8.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	530.392.500	-	-	100	118.614.500	-	14.715.000	-	12	-	14.715.000	-	3
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	2.625.000	-	-	12	525.000	-	525.000	-	100	-	525.000	-	20
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	200.625.000	-	-	4	40.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	56.500.000	-	-	12	11.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200 paket	40.642.500	-	-	40	8.128.500	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 lapora	230.000.000	-	-	20	58.536.000	10	14.190.000	50	24	10	14.190.000	10	6
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	127.837.500	-	-	100	25.567.500	23,08	6.415.100	23,08	25,09	23,08	6.415.100	23,08	5,02
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 lapora	5.460.000	-	-	1	1.092.000	1	1.092.000	100	100	1	1.092.000	20	20
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lapora	122.377.500	-	-	12	24.475.500	6,00	5.323.100	50,00	21,75	6,00	5.323.100	10,00	4,35
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.411.510.000	-	-	100	194.105.500	7,69	85.580.000	7,69	44,09	7,69	85.580.000	7,69	6,06
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	1.400.290.000	-	-	5	191.945.500	3,00	85.580.000	60,00	44,59	3,00	85.580.000	12,00	6,11
15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	11.220.000	-	-	8	2.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (orang)	10.000 warga	4.798.189.885	-	-	2.500	730.950.000	500	126.483.800	20,00	17,30	500	126.483.800	5,00	2,64

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Jumlah desa tangguh bencana	25 desa		-		5		-		-		-		-	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	550 warga		-		150		-		-		-		-	
		Indeks Resiko Bencana	111 Poin				115									
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	200 warga		-		50		-		-		-		-	
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	5 Dokumen	900.000.000	-	-	1	10.000.000	-	1.260.000	-	13	-	1.260.000	-	0
16	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5 Dokumen	900.000.000	-	-	1	10.000.000	-	1.260.000	-	13	-	1.260.000	-	0
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	2.755.000.000	-	-	100	546.230.000	-	72.638.800	-	13,30	-	72.638.800	-	2,64
17	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	55 kawasan	2.425.000.000	-	-	11	485.000.000	-	35.074.800	-	7,23	-	35.074.800	-	1,45
18	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga yang mendapatkan layanan PUSDALOPS, Sarana Prasarana perlindungan terhadap bencana, logistik terkena bencana dan bantuan air tangki	5 laporan	330.000.000	-	-	1	61.230.000	-	37.564.000	-	61,35	-	37.564.000	-	11,38
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2.043.189.885	-	-	100	164.720.000	-	52.585.000	-	31,92	-	52.585.000	-	2,57
19	Respon Cepat Darurat Bencana Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Status Kondisi Darurat yang dikeluarkan pemerintah daerah	10 dokumen	531.040.000	-	-	2	100.520.000	1	32.070.000	50	32	1	32.070.000	10	6
20	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas posko yang aktif dalam penanganan darurat bencana	5 laporan	322.612.885	-	-	1	50.000.000	-	19.770.000	-	39,54	-	19.770.000	-	6,13

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
21	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 orang	439.537.000	-	-	20	14.200.000	2	745.000	10	5	2	745.000	2	0
10	Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksanya Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	375.000.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor yang sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	35 kegiatan	375.000.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)				12.455.783.435	-	-		2.186.808.210		786.702.510	22,36	30,05		786.702.510	4,47	5,66
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			48,29				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi lintas perangkat daerah, komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Pergantian ASN, kurangnya pemahaman percepatan penyerapan anggaran & perlu peningkatan pelaksanaan tugas & fungsi sesuai perencanaan yg telah ditetapkan													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.267.865.265	-	-	100	1.785.101.003	43	771.670.226	43,23	43,23	22	771.670.226	21,61	8,33
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor														
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	122.000.000	-	-	100	21.715.000	35	7.615.000	35	35,07	18	7.615.000	18	6,24
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	70.000.000	-	-	12	12.160.000	8	7.615.000	67	63	8	7.615.000	13	11
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Lap	52.000.000	-	-	7	9.555.000	5	-	71	-	5	-	14	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan ASN	100 %	8.310.310.515	-	-	100	1.662.062.103	43	716.300.626	43	43	22	716.300.626	22	9
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Org	8.051.310.515	-	-	18	1.610.262.103	18	697.395.626	100	43	18	697.395.626	20	9
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	259.000.000	-	-	12	51.800.000	6	18.905.000	50	36	6	18.905.000	10	7
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	63.000.000	-	-	100	12.600.000	24	3.000.000	24	24	12	3.000.000	12	5
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dok	63.000.000	-	-	12	12.600.000	6	3.000.000	50	24	6	3.000.000	10	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	324.449.750	-	-	100	32.618.900	51	16.543.600	51	51	25	16.543.600	25	5
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.465.000	-	-	1	493.000	1	493.000	100	100	1	493.000	20	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	31.009.750	-	-	12	3.100.900	3	1.515.100	25	49	3	1.515.100	5	5
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	76.555.000	-	-	12	8.136.000	3	5.741.500	25	71	3	5.741.500	5	7
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	214.420.000	-	-	10	20.889.000	3	8.794.000	30	42	3	8.794.000	8	4
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	105.445.000	-	-	100	21.089.000	29	6.111.000	29	29	14	6.111.000	14	6
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	105.445.000	-	-	12	21.089.000	6	6.111.000	50	29	6	6.111.000	10	6
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	342.660.000	-	-	100	35.016.000	63	22.100.000	63	63	32	22.100.000	32	6
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	335.160.000	-	-	11	33.516.000	2	21.000.000	18	63	2	21.000.000	4	6
12	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	7.500.000	-	-	4	1.500.000	4	1.100.000	100	73	4	1.100.000	20	15
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Peran serta Kepemudaan	100 %	161.700.000	-	-	100	32.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan masyarakat	100 %	161.700.000	-	-	100	32.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lmbg	161.700.000	-	-	1	32.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase kebutuhan dasar disabilitas luar panti yang terpenuhi														
		Persentase Lansia terlanter yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %	250.810.000	-	-	100	34.302.000	24	8.150.000	24	24	12	8.150.000	12	3
8	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 %	100.000.000	-	-	100	16.480.000	39	6.400.000	39	39	19	6.400.000	6	6
14	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	200 Org	100.000.000	-	-	40	16.480.000	-	6.400.000	-	39	-	6.400.000	-	6
9	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Terlaksananya pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA	100 %	150.810.000	-	-	100	17.822.000	10	1.750.000	10	10	5	1.750.000	5	1
15	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	200 Org	150.810.000	-	-	40	17.822.000	10	1.750.000	25	10	10	1.750.000	5	1
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	100 %	613.447.000	-	-	100	78.256.400	23	18.008.000	23	23	12	18.008.000	12	3
10	Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data base fakir miskin yang valid	100 %	613.447.000	-	-	100	78.256.400	23	18.008.000	23	23	12	18.008.000	12	3
16	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	149.630 KK	438.290.000	-	-	29.926	69.558.000	43.280	12.228.000	145	18	43.280	12.228.000	29	3
17	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	71.455 KPM	86.137.000	-	-	14.291	8.663.400	12.362	5.780.000	87	67	12.362	5.780.000	17	7
18	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	250 Org	89.020.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	100 %	850.265.000	-	-	100	146.613.000	15	22.227.000	15	15	8	22.227.000	8	3
11	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100 %	850.265.000	-	-	100	146.613.000	15	22.227.000	15	15	8	22.227.000	8	3
19	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	52.500 Org	850.265.000	-	-	10.500	146.613.000	97	22.227.000	1	15	97	22.227.000	0	3
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)				11.144.087.265	0	-	100	2.076.612.403	20,38	820.055.226	20,38	39,49	10,19	820.055.226	10,19	7,36
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			53,68				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi lintas perangkat daerah, komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Pergantian ASN, kurangnya pemahaman percepatan penyerapan anggaran & perlu peningkatan pelakasanaan tugas & fungsi sesuai perencanaan yg telah ditetapkan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.006.103.670		-		2.001.220.734		918.783.334				918.783.334		
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			8.607.295.560		-		1.721.459.112		844.256.634				844.256.634		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran		8.607.295.560		-		1.721.459.112		844.256.634				844.256.634		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		37.991.340		-		7.598.268		5.444.000				5.444.000		
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perubahan Renstra, Renja PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	60	37.991.340	-	-	12	7.598.268	6	5.444.000	50	72	6	5.444.000	10	14
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah		7.910.877.670		-		1.582.175.534		758.023.834				758.023.834		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	90	7.670.877.670	-	-	18	1.534.175.534	8	746.473.834	44	49	8	746.473.834	8,89	9,73
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor Pengelola APBD	20	240.000.000	-	-	4	48.000.000	2	11.550.000	50	24	2	11.550.000	10,00	4,81
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah perangkat daerah		24.000.000		-		4.800.000		-				-		
4	Pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersedianya honor pengelola BMD SKPD	5	24.000.000	-	-	1	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		266.612.550		-		53.322.510		45.790.000				45.790.000		
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK dan jasa kebersihan kantor	60	45.774.700	-	-	12	9.154.940	6	5.812.000	50	63	6	5.812.000	10	13
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	35.947.350	-	-	12	7.189.470	6	3.000.000	50	42	6	3.000.000	10	8

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan luar Provinsi	60	184.890.500	-	-	12	36.978.100	12	36.978.000	100	100	12	36.978.000	20	20
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		147.289.000		-		29.457.800		11.470.800				11.470.800		
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan meterai surat menyurat	60	7.150.000	-	-	12	1.430.000	2	300.000	17	21	2	300.000	3	4
9	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, listrik dan air	60	140.139.000	-	-	12	28.027.800	6	11.170.800	50	40	6	11.170.800	10	8
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		220.525.000		-		44.105.000		23.528.000				23.528.000		
10	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	90	210.525.000	-	-	18	42.105.000	7	22.038.000	39	52	7	22.038.000	8	10
11	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	20	10.000.000	-	-	4	2.000.000	-	1.490.000	-	75	-	1.490.000	-	15
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			572.619.500		-		114.523.900		33.911.400				33.911.400		
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG KOMPETEN	100	503.646.525		-		100.729.305		26.049.400				26.049.400		
		PERSENTASE TENAGA KERJA DI SEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITASNYA	100													
7	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terciptanya tenaga kerja yang bersertifikat dan mampu menciptakan lapangan kerja		503.646.525		-		100.729.305		26.049.400				26.049.400		
12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terciptanya tenaga kerja yang bersertifikat dan mampu menciptakan lapangan kerja (pelatihan mengelas)	50	503.646.525	-	-	10	100.729.305	5	26.049.400	50	26	5	26.049.400	10	5
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	100	68.972.975		-		13.794.595		7.862.000				7.862.000		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		JUMLAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERLOINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DAN DIALOG SOSIAL	100													
8	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketenagakerjaan		32.856.620		-		6.571.324		4.081.000				4.081.000		
13	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Teralaksananya sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan	5	32.856.620	-	-	1	6.571.324	-	4.081.000	-	62	-	4.081.000	-	12
9	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan serta penyelesaian Hubungan Industrial		36.116.355		-		7.223.271		3.781.000				3.781.000		
14	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten	Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	20	36.116.355	-	-	4	7.223.271	-	3.781.000	-	52	-	3.781.000	-	10
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			826.188.610		-		165.237.722		40.615.300				40.615.300		
4	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE LOKAL TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENEMPATANNYA	100	361.457.260		-		72.291.452		12.631.000				12.631.000		
		PERSENTASE LUAS KAWASAN TRANSMIGRASI YANG BERKEMBANG	100													
10	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten		361.457.260		-		72.291.452		12.631.000				12.631.000		
15	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Terlaksananya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana transmigrasi di Kawasan Batutua Nusamanuk (Desa Oelolot)	5	361.457.260	-	-	1	72.291.452	-	12.631.000	-	17	-	12.631.000	-	3

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWSAAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	464.731.350		-		92.946.270		27.984.300				27.984.300		
		PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DIBINA DAN DIBERDAYAKAN	100													
11	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya pengembangan, peningkatan serta pembangunan sarana prasarana satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi		464.731.350		-		92.946.270		27.984.300				27.984.300		
16	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	Terlaksanya penyuluhan dan pelatihan bagi aparatur UPT dan transmigran	75	464.731.350	-	-	15	92.946.270	11	27.984.300	73	30	11	27.984.300	15	6
Rata-rata capaian kinerja (%)				10.006.103.670		-		2.001.220.734		918.783.334	32,71	40,84		918.783.334	6,54	8,17
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			64,02				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi lintas perangkat daerah, komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pergantian ASN, kurangnya pemahaman percepatan penyerapan anggaran dan perlu peningkatan pelakasanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																

PERANGKAT DAERAH : DP3AP2KB

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					2.423.444.924									
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah														
		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu														
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik														
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					5.565.000									
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen		3.550.000		12	1.550.000	-	-	0	0	0	-	0
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Laporan		16.490.000		7	4.015.000	7	2.720.000	100	68	7	2.720.000	20
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					2.234.500.274									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1960	Bulan		12.732.520.274		392	2.132.510.274	224	1.101.753.008	57	52	224	1.101.753.008	11
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen		522.990.000		12	101.990.000	7	35.274.000	58	35	7	35.274.000	12
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Honor Pengaman Barang Milik Daerah					9.600.000									
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Dokumen		24.000.000		12	4.800.000	-	1.600.000	0	33	0	1.600.000	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Dokumen	24.000.000			12	4.800.000	-	1.600.000	0	33	0	1.600.000	0	7
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran						69.357.900									
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	31.986.000			1	4.986.000	1	4.986.000	100	100	1	4.986.000	20	16
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	paket	175.011.000			12	12.506.000	4	9.530.000	33	76	4	9.530.000	7	5
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	124.996.900			12	7.500.900	4	6.856.650	33	91	4	6.856.650	7	5
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	548.830.000			20	44.365.000	11	31.075.900	55	70	11	31.075.900	11	6
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran						35.475.250									
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	11.975.000			12	975.000	3	325.000	25	33	3	325.000	5	3
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	172.501.250			12	34.500.250	7	10.479.459	58	30	7	10.479.459	12	6
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran						68.946.500									
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	595	Unit	776.805.000			116	68.946.500	40	20.405.000	34	30	40	20.405.000	7	3
II	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						40.600.000									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
7	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						40.600.000								
14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1000 Orang	203.000.000			200	40.600.000	-	-	0	0	0	-	0	0
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						146.046.000								
8	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						146.046.000								
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.694.360.000			1	146.046.000	1	46.439.000	100	32	1	46.439.000	20	3
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Sejahtera						20.000.000								
9	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						20.000.000								
16	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100.000.000			100	20.000.000	100	19.465.000	100	97	100	19.465.000	20	19
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak (0 s/d <18 Tahun)						230.612.500								
10	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Kejahatan Seksual Terhadap Anak						94.823.500								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
17	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	500	Orang		325.000.000			100	10.290.000	-	-	0	0	0	0
18	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	5	Dokumen		468.640.000			1	84.533.500	1	13.429.400	100	16	1	13.429.400
11	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Kejahatan Seksual Terhadap Anak							119.089.000							
19	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55	Layanan		693.165.000			11	119.089.000	5	38.753.000	45	33	5	38.753.000
12	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Kejahatan Seksual Terhadap Anak							16.700.000							
20	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100	Orang		322.000.000			20	16.700.000	9	9.236.000	45	55	9	9.236.000
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pengendalian Penduduk							307.664.000							
13	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								4.764.000							
21	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	5	Dokumen		50.200.000			1	4.764.000	-	-	0	0	0	0
14	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk							302.900.000							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
22	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	5	Laporan	300.000.000			1	60.000.000	1	29.755.000	100	50	1	29.755.000	20	10
23	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	55	Laporan	447.000.000			11	89.400.000	-	-	0	0	0	-	0	0
23	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	50	Dokumen	767.500.000			10	153.500.000	5	49.706.850	50	32	5	49.706.850	10	6
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Aseptor KB							3.250.653.650								
15	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio Aseptor KB							1.054.506.600								
24	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	50	Laporan	2.450.000.000			10	490.000.000	3	3.930.000	30	1	3	3.930.000	6	0
25	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	55	Laporan	1.000.000.000			11	200.000.000	-	-	0	0	0	-	0	0
26	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Dokumen	526.500.000			1	105.300.000	1	14.350.000	100	14	1	14.350.000	20	3
27	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	5	Dokumen	0			1	0								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
28	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	55	Organi sasi	1.296.033.000			11	259.206.600	9	29.571.400	82	11	9	29.571.400	16	2
16	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio Aseptor KB						738.501.000									
29	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	595	Orang	3.192.505.000			119	638.501.000	5	4.398.000	4	1	5	4.398.000	1	0
30	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	Lapora n	500.000.000			1	100.000.000	-	-	0	0	0	-	0	0
17	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Rasio Aseptor KB						739.197.050									
31	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	Lapora n	67.500.000			1	13.500.000	1	2.810.000	100	21	1	2.810.000	20	4
32	Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Pangjang (MKJP)	500	Orang	3.371.255.000			100	674.251.000	55	65.955.000	55	10	55	65.955.000	11	2
33	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	50	Unit	0			10	0	-	-	0	0	0	-	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
34	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	Laporan		101.250.000	1	20.250.000	-	-	0	0	0	-	0	0
35	Promosi Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	100	Orang		155.980.250	20	31.196.050	1	9.855.000	5	32	1	9.855.000	1	6
18	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keserataan - Ber-KB	Rasio Aseptor KB						718.449.000								
36	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5	Dokumen		909.745.000	1	181.949.000	-	-	0	0	0	-	0	0
37	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	88	Kampung		2.420.000.000	29	484.000.000	-	-	0	0	0	-	0	0
38	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	145	Kampung		262.500.000	29	52.500.000	5	2.040.000	17	4	5	2.040.000	3	1
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Aseptor KB						925.000.000								
19	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rasio Aseptor KB						139.600.000								
39	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	5	Laporan		48.000.000	1	9.600.000								
40	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5	Unit		650.000.000	1	130.000.000	-	-	0	0	0	-	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							785.400.000								
41	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	595	Laporan	1.785.000.000			119	357.000.000	-	-	0	0	0	-	0
42	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	595	Laporan	2.142.000.000			119	428.400.000	-	-	0	0	0	-	0
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)				41.414.788.674			0		7.344.021.074		1.566.298.667	33,06	24		1.566.298.667	7,08 3,74
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			53,30				
Faktor Pendorong kebersihan kinerja			: Koordinasi lintas perangkat daerah, komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah													
Faktor Penghambat pencapaian kinerja			: Pergantian ASN, kurangnya pemahaman percepatan penyerapan anggaran dan perlu peningkatan pelakasanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang te													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
	URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN								37.499.850								
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	86,24	%	187.499.250			82,42	37.499.850		13.898.000			-	13.898.000	0	7
		Persentase kelancaran distribusi pangan	86,24	%				82,42									
1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5	Lap oran	187.499.250			1	37.499.850		13.898.000			-	13.898.000	0	7
1	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5	Unit	62.500.000			1	12.500.000	-	7.608.000	-	61	-	7.608.000	0	12
2	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	5	Dok	124.999.250			1	24.999.850	-	6.290.000	-	25	-	6.290.000	0	5
II	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan terhadap konsumsi pangan	100	%	256.671.500			100	51.334.300		1.020.000			-	1.020.000	0	0
2	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5	Dok ume n	37.498.000			1	7.499.600		1.020.000			-	1.020.000	0	3
3	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	5	Doku men	37.498.000			1	7.499.600	-	1.020.000	-	14	-	1.020.000	0	3
3	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Lap oran	219.173.500			1	43.834.700		-			-	0	0	0
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5	Lapo ran	219.173.500			1	43.834.700	-	-	-	-	-	0	0	0
III	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di konsumsi	100	%	227.190.000			50	45.438.000		9.896.000			-	9.896.000	0	4
4	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok ume n	227.190.000			1	45.438.000		9.896.000			-	9.896.000	0	4
5	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5	Doku men	227.190.000			1	45.438.000	-	9.896.000	-	22	-	9.896.000	0	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100	%	32.685.458.300			100	6.537.091.660		3.000.428.940			-	3.000.428.940	0	9
		Presentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%				100									
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%				100									
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95	Dokumen	60.478.500			19	12.095.700		4.305.000			-	4.305.000	0	7
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	57.228.750			12	11.445.750	3	4.305.000	25	38	3	4.305.000	5	8
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Laporan	3.249.750			7	649.950	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	430	Orang/Bulan	31.480.893.300			86	6.296.178.660		2.896.544.240			-	2.896.544.240	0	9
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430	Orang/Bulan	31.129.893.300			86	6.225.978.660	-	2.873.144.240	-	46	-	2.873.144.240	0	9
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	351.000.000			1	70.200.000	-	23.400.000	-	33	-	23.400.000	0	7
7	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Dok	60.000.000			1	12.000.000		4.000.000			-	4.000.000	0	7
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	60.000.000			1	12.000.000	-	4.000.000	-	33	-	4.000.000	0	7
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	563.161.500			100	112.632.300		71.268.800			-	71.268.800	0	13
11	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	10.620.000			1	2.124.000	1	2.124.000	100	100	1	2.124.000	20	20
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	262.500.000			2	52.500.000	2	52.500.000	100	100	2	52.500.000	20	20
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	43.310.000			2	8.662.000	1	2.409.000	50	28	1	2.409.000	10	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Pake t		23.791.500			2	4.758.300	1	0	50	0	1	0
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lapo ran		222.940.000			1	44.588.000,00	1	14.235.800	100	32	1	14.235.800
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		128.250.000			100	25.650.000		8.245.400			-	8.245.400
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lapo ran		3.250.000			1	650.000	1	650.000	100	100	1	650.000
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lapo ran		125.000.000			1	25.000.000	1	7.595.400	100	30	1	7.595.400
10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		392.675.000			100	78.535.000		16.065.500			-	16.065.500
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	Unit		392.675.000			18	78.535.000	5	16.065.500	28	20	5	16.065.500
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemanfaatan bibit unggul pertanian	1250	Kg		15.348.902.225			250	3.069.780.445		1.794.026.700			-	1.794.026.700
			50	Ha					10						-	0
11	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya Sarana Pertanian	60	Bula n		11.569.784.725			12	2.313.956.945		1.623.602.700				1.623.602.700
19	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5	Lapo ran		10.931.412.000			1	2.186.282.400	1	1.623.602.700	100	74	1	1.623.602.700
20	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Lapo ran		638.372.725			1	127.674.545	-	-	-	-	-	-
12	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Lahan pengembangan intensifikasi tanaman Lahan Basah	450	Ha		3.779.117.500			90	755.823.500		170.424.000			-	170.424.000
		Luas Lahan pengembangan intensifikasi tanaman Lahan Kering	500	Ha					100						-	-
21	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5	Doku men		2.164.055.000			1	432.811.000	-	27.200.000	-	6	-	27.200.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
22	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5	Doku men	914.765.000			1	182.953.000	1	135.881.000	100	74	1	135.881.000	20	15	
23	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5	VUB	700.297.500			1	140.059.500	-	7.343.000	-	5	-	7.343.000	-	1	
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang diadakan	100	%	9.000.000.000			100	1.800.000.000		20.000.000			-	20.000.000	0	0	
13	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	35	Unit	9.000.000.000			7	1.800.000.000		20.000.000			-	20.000.000	0	0	
24	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usahatani Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15	Unit	3.025.000.000			3	605.000.000	-	20.000.000	-	3	-	20.000.000	-	1	
25	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Usaha Tani yang Direhabilitasi	20	Unit	5.975.000.000			4	1.195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	100	%	249.880.000			100	325.976.000		4.760.000			-	4.760.000	0	2	
14	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	%	249.880.000			100	325.976.000		4.760.000			-	4.760.000	0	2	
26	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	Unit	0			11	276.000.000	-	4.760.000	0,00	1,72	-	4.760.000	-	-	
27	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tersedianya Dokumen	4925	Pokt an	249.880.000			985	49.976.000	-	4.760.000	-	10	-	4.760.000	-	2	
Rata-rata capaian kinerja (%)					57.955.601.275					11.867.120.255		4.844.029.640	32,80	32,96		4.844.029.640	6,56	9,95
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR	
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100				48,84				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi lintas perangkat daerah, komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah															
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Adanya Efisiensi anggaran sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa															
Tindakanlajut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran															
Tindakanlajut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:															

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K	Rp		K	Rp.		K	Rp		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	10.073.440.220		%		100	%	1.990.424.044	-	883.353.723,00	-	44,38	-	883.353.723,00	-	8,77
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%			%		100	%		42,86		42,86		8,57		8,57	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%			%		100	%		10,34		10,34		2,07		2,07	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%			%		100	%		53,85		53,85		10,77		10,77	
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95	dok	111.965.000	dok	-	19	dok	22.393.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	Lap	111.965.000	Lap		19	Lap	22.393.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	8.915.365.220	%	-	100	%	1.783.073.044	-	849.183.723	-	47,62	-	849.183.723	-	9,52	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	Org/bln	8.649.415.220	Org/bln		22	Org/bln	1.729.883.044	-	849.183.723	-	49,09	-	849.183.723	-	9,82	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dok	265.950.000	Dok		12	Dok	53.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	24.000.000	%	-	100	%	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Dok	24.000.000	Dok		12	Dok	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	546.245.000	%	-	100	%	84.985.000	43	6.212.000	42,86	7,31	8,57	6.212.000	8,57	1,14	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp.		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	124.190.000		Paket	1	Paket	24.838.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	59.995.000		Paket	1	Paket	11.999.000	-	1.500.000	-	12,50	-	1.500.000	-	2,50
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	362.060.000		Lap	12	Lap	48.148.000	6	4.712.000	50,00	9,79	6	4.712.000	10,00	1,30
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	248.400.000		%	-	100	%	50	16.050.000	50,00	32,31	10,00	16.050.000	10,00	6,46
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	248.400.000		Lap	12	Lap	49.680.000	6	16.050.000	50,00	32,31	6	16.050.000	10,00	6,46
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	65	Unit	227.465.000	-	Unit	-	13	Unit	7,00	11.908.000	53,85	26,18	10,77	11.908.000	16,57	5,24
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	unit	227.465.000	-	unit		13	unit	7,00	11.908.000	53,85	26,18	7	11.908.000	10,77	5,24
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan KIA	100	%	1.514.475.000	%	-	100	%	178.356.000	-	68.530.000	-	38,42	-	68.530.000	-	4,53
		Persentase penerbitan KK	100	%														
		Persentase penerbitan KTP Elektronik	100	%														
8	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	Lap	1.514.475.000	-	Lap	-	1	Lap	-	68.530.000	-	38,42	-	68.530.000	-	4,53
10	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	Lap	1.514.475.000		Lap		1	Lap	-	68.530.000	-	38,42	-	68.530.000	-	4,53
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	100	%	850.000.000	%	-	100	%	90.270.000	-	1.500.000	-	1,66	-	1.500.000	-	0,18
		Persentase penerbitan Akta Perkawinan	100	%														

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp		K	Rp	K	Rp.		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase penerbitan Akta Kematian	100	%			%		100	%		-		-		-		-	
		Persentase penerbitan Akta Perceraian	20	%			%		30	%		-		-		-		-	
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Akta - Akta	5	Lap	850.000.000	-	Lap	-	1	Lap	90.270.000	-	1.500.000	-	1,66	-	1.500.000	-	0,18
11	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Lap	850.000.000		Lap		1	Lap	90.270.000	-	1.500.000	-	1,66	-	1.500.000	-	0,18
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	100	%	1.436.770.000	-	%	-	100	%	241.624.000	-	3.800.000	-	1,57	-	3.800.000	-	0,26
16	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5	dok	1.436.770.000	dok	-	1	dok	241.624.000	-	3.800.000	-	1,57	-	3.800.000	-	0,26	
12	Pegolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5	dok	1.436.770.000	-	dok	-	1	dok	241.624.000	-	3.800.000	-	1,57	-	3.800.000	-	0,26
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)			100	%	13.874.685.220		%	-	100	%	2.500.674.044	17,76	957.183.723	12,82	14,42	3,55	957.183.723	2,56	2,55
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR	
Rencana Anggaran Kas												Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		41,47					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja		: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		: Perlu peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																	
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja																	
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya		: Perlu Peningkatan Kinerja baik Perencanaan maupun pelaksanaan dalam melaksanakan semua rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah																	

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	12.226.878.900	-	-	158	2.445.375.780		1.152.852.854						
		TERWUJUNDANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	100 %		-					-						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90 dok	315.125.000		-		63.025.000		21.793.000						
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	60 lap	275.125.000	0	-	12	55.025.000	6	-	50	0	6	-	10	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 lap	40.000.000	0	0	6	8.000.000	6	2.112.000	100	26	6	2.112.000	20	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	190 Dok	10.798.948.900		0		2.159.789.780		1.058.174.854						
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 org	10.560.448.900	0	0	26	2.112.089.780	-	-	0	0	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	238.500.000	0	0	12	47.700.000	6	-	50	0	6	-	10	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	10 dok	36.000.000		0		7.200.000		-						
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 dok	36.000.000	0	0	2	7.200.000	2	-	100	0	2	-	20	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	290 Dok	664.795.000		0		132.959.000		46.325.500						
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	60 bulan	22.500.000		0	12	4.500.000		-						
7	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan yang disediakan	60 bln	150.000.000	0	0	12	30.000.000	6	28.500.000		95				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	bln	124.845.000	0	0	12	24.969.000	6	-	50	0	6	-	10	-
9	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	60	Bulan	102.500.000	0	0	12	20.500.000	6	-	50	0	6	-	10	-
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Kali	264.950.000	0	0	10	52.990.000	3	5.420.000	30	10	3	5.420.000	6	2
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	120	Dok	214.950.000		0		42.990.000		17.109.500						
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	14.950.000	0	0	12	2.990.000	3	-	25	0	3	-	5	-
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bulan	200.000.000	0	0	12	40.000.000	6	-	50	0	6	-	10	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90	unit	197.060.000		0		39.412.000		9.450.000						
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	45	unit	197.060.000	0	0	9	39.412.000	2	-	22	0	2	-	4	-
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45	unit	0	-	0	9	0	-	-	0	0	-	-	-	-
II	PROGRAM PENATAAN DESA	MENINGKATNYA PENATAAN DESA	100	%	345.000.000		0		69.000.000		21.515.500						
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa			345.000.000				69.000.000		21.515.500						
15	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan,penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	125	Desa	345.000.000	0	0	25	69.000.000	-	21.515.500	0	31	-	21.515.500	-	6
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	MENINGKATNYA PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	795.000.000		0		209.000.000		53.692.500						
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan	100	%	795.000.000		0		209.000.000		53.692.500						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
16	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	560	Desa	135.000.000	-	0	112	27.000.000	28	-	25	0	28	-	5	-
17	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitas pengelolaan keuangan desa	560	Desa	135.000.000	-	0	112	27.000.000	28	-	25	0	28	-	5	-
	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	-	Desa			0				-						
	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	Desa	125.000.000		0		25.000.000		-						
16	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama atar Desa	50	3umdes	400.000.000	-	0	10	80.000.000	7	-	70	0	7	-	14	-
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala desa yang dilantik/di berhentikan	110	desa	250.000.000			22	50.000.000								
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PRESENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	100	%	1.897.500.000		0		291.008.950		50.290.000						
		MENINGKATNYA PKK AKTIF	100	%													
		MENINGKATNYA POSYANDU AKTIF	100	%													
		MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BERINOVASI	100	%													
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukuim Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota																

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
17	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	270	Desa	125.000.000	-	0	54	25.000.000	13	-	24	0	13	-	5	-
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lemabaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	20	Posya ndu	772.500.000	-	0	4	154.500.000	4	25.175.500	100	16	4	25.175.500	20	3
19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20	Kelom pok	500.000.000	-	0	4	11.508.950	-	-	0	0	-	-	-	-
20	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60	Bulan	500.000.000	-	0	12	100.000.000	6	-	50	0	6	-	10	-
Rata-rata capaian kinerja (%)					15.264.378.900		-		3.014.384.730		1.278.350.854	41,06	42,41		1.278.350.854	8,21	8,37
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		51,46					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja					: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah												
Faktor penghambat keberhasilan kinerja					: Perlu peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan												
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan meningkatkan kinerja												
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya					:												

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100	%	9.778.569.330		100	1.955.771.066	58	923.582.452	58	47	58	923.582.452	58	9
		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%			100		217		217		217		217	
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	%			100		10		10		10		10	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	95	Doku men	292.513.250		19	58.368.250	11	15.299.000	58	26	11	15.299.000	12	5
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Doku men	142.681.250		12	28.536.250	8	8.009.000	67	28	8	8.009.000	13	6
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Lapor an	149.832.000		7	29.832.000	3	7.290.000	43	24	3	7.290.000	9	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	8.563.296.580		100	1.712.691.316	-	831.228.797	-	49	-	831.228.797	-	10
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Oran g	8.198.256.580		20	1.639.651.316	-	831.228.797	-	51	-	831.228.797	-	10
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Doku men	365.040.000		12	73.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Doku men	57.000.000		100	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Doku men	57.000.000		1	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	%	309.835.000		100	61.967.000	50	26.771.350	50	43	50	26.771.350	50	9

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5.375.000		1	1.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	Paket	51.650.000		1	10.330.000	1	10.000.000	100	97	1	10.000.000	20	19
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	50.200.000		1	10.040.000	-	5.000.000	-	50	-	5.000.000	-	10
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	51.100.000		1	10.220.000	-	1.092.350	-	11	-	1.092.350	-	2
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	151.510.000		4	30.302.000	3	10.679.000	75	35	3	10.679.000	8	7
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	130.725.000		100	26.145.000	600	13.139.000	600	50	600	13.139.000	600	10
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1	Paket	5.200.000		1	1.040.000	1	1.040.000	100	100	1	1.040.000	100	20
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	125.525.000		1	25.105.000	6	12.099.000	600	48	6	12.099.000	17	10
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100	%	425.199.500		100	85.199.500	20	37.144.305	20	44	20	37.144.305	20	9
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125	Unit	425.199.500		25	85.199.500	5	37.144.305	20	44	5	37.144.305	4	9
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	55,99	%	2.402.850.000		100	480.640.000	-	8.404.000	-	2	-	8.404.000	-	0
7	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten / kota	Persentase fasilitas keselamatan jalan (lampu jalan, rambu, pengaman jalan) yang terpasang	100	%	2.253.200.000		100	450.710.000	-	8.404.000	-	2	-	8.404.000	-	0
14	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten / kota	Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten / kota yang tersedia	80	Unit	2.253.200.000		38	450.710.000	-	8.404.000	-	2	-	8.404.000	-	0
8	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	%	149.650.000		100	29.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
15	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota.	jumlah laporan pelasananaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / provinsi	20	Laporan	149.650.000			4	29.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase perahu bongkar muat yang layak beroperasi	27,30	%	122.500.000			100	25.000.000	-	4.250.000	-	17	-	4.250.000	-	3
9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase pelabuhan pengumpang lokal kondisi baik	100	%	122.500.000			100	25.000.000	-	4.250.000	-	17	-	4.250.000	-	3
16	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Dokumen	122.500.000			1	25.000.000	-	4.250.000	-	17	-	4.250.000	-	3
Rata-rata capaian kinerja (%)					12.303.919.330				2.461.411.066		936.236.452	50,28	19,35		936.236.452	3,13	3,87
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			50,46				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Ada Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Terkendala dengan belum optimal dalam realisasi pengeluaran														
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:														

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	7.764.613.750			100	2.194.885.872	19	1.130.153.713	19	51	9	1.130.153.713	9	15
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%													
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%													
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%													
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	46.400.000			100	3.663.000	7	3.661.000	7	100	7	3.661.000	7	8
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Doku men	23.200.000			12	3.091.000	6	3.089.000	50	100	6	3.089.000	60	13
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Lapo ran	23.200.000			7	572.000	1	572.000	14	100	1	572.000	11	2
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	6.833.489.070			100	2.060.455.322	-	1.053.407.163	-	51	-	1.053.407.163	-	15
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Oran g/bln	6.616.679.070			26	2.007.215.322	-	1.031.372.163	-	51,38	-	1.031.372.163	-	16
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD	12	Doku men	216.810.000			12	53.240.000		22.035.000	-	41	-	22.035.000	-	10
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	31.200.000			100	9.000.000	33	3.000.000	33	33	17	3.000.000	17	10
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Doku men	31.200.000			12	9.000.000	4	3.000.000	33	33	4	3.000.000	33	10

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	590.773.430		100	39.105.150	19	29.145.950	19	75	9	29.145.950	9	5
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Pake t	120.363.430		2	9.321.000	-	5.952.000	-	64	-	5.952.000	-	5
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Pake t	45.410.000		2	4.184.150	-	1.393.950	-	33	-	1.393.950	100	3
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapo ran	425.000.000		12	25.600.000	3	21.800.000	25	85	3	21.800.000	25	5
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	153.620.000		100	54.660.400	63	23.145.600	63	42	31	23.145.600	31	15
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapo ran	17.288.000		12	3.991.000	12	3.991.000	100	100	12	3.991.000	100	23
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapo ran	136.332.000		12	50.669.400	3	19.154.600	25	38	3	19.154.600	25	14
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	7	Unit	109.131.250		7	28.002.000	2	17.794.000	29	64	2	17.794.000	29	16
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	109.131.250		7	28.002.000	4	17.794.000	57	64	4	17.794.000	67	16
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100	skor	126.021.000		100	10.716.450	4	9.690.000	4	90	4	9.690.000	4	8
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	%	126.021.000		100	10.716.450	4	9.690.000	4	90	4	9.690.000	100	8
12	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	perm ohon	126.021.000		12	10.716.450	4	9.690.000	100	90	4	9.690.000	100	8
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100	skor	205.297.150		100	190.353.400	38	65.864.000	38	35	38	65.864.000	38	32
		Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi														
		Persentase Lokasi Strategis / Pelayanan Publik berakses Internet														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Terdigitalisasi	100	%	205.297.150			100	190.353.400	38	65.864.000	38	35	38	65.864.000	38	32
13	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12	Laporan	120.060.000			12	120.060.000	3	31.800.000	25	26	2	31.800.000	17	26
14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	12	Dok	85.237.150			12	70.293.400	3	34.064.000	100	48	3,00	34.064.000	25	40
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL	1,34	Poin	251.000.000			1,34	13.850.300	- ,00	2.550.000	-	18	- ,00	2.550.000	-	1
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1,34	Poin	251.000.000			1,34	13.850.300	- ,00	2.550.000	-	18	- ,00	2.550.000	-	1
15	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100	%	100.000.000			10	6.250.450	-	-	100	-	-	-	100	-
16	Penyelenggaraan Stattistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	35	Lap	151.000.000			1	7.599.850	-	2.550.000	-	34	-	2.550.000	-	2
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE APLIKASI PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN KEAMANAN INFORMASI	100	%	372.962.000			100	8.603.500		420.150	-	5	- ,00	420.150	- ,00	0
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan pengaman persandian	100	%	372.962.000			100	8.603.500		420.150	-	5	- ,00	420.150	- ,00	0
17	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	372.962.000			12	8.603.500	3	420.150	25	5	3	420.150	25	0
Rata-rata capaian kinerja (%)					8.719.893.900				2.418.409.522		1.208.677.863	38,52	49,98		1.208.677.863	40,46	13,86
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		52,79					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Penyerapan anggaran Kas belum sesuai dengan target														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			: Perlu Peningkatan Kinerja baik Perencanaan maupun pelaksanaan dalam melaksanakan semua rencana program/kegiatan/ yang diakomodir dalam Renja Perangkat Da														

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	13.686.702.124		100	2.810.310.124	23	1.291.029.429	23	46	23	1.291.029.429	23	9
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah														
		Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu														
		Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik														
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95	Dok.	523.835.000		19	102.763.000	10	27.383.000	53	27	10	27.383.000	11	5
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dok.	385.565.000		12	75.913.000	7	23.303.000	58	31	7	23.303.000	12	6
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Lap	138.270.000		7	26.850.000	4	4.080.000	57	15	4	4.080.000	11	3
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	11.645.129.524		100	2.388.073.524	24	1.191.505.129	24	50	24	1.191.505.129	24	10
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172	Org/Bln	11.288.129.524		38	2.318.273.524	-	1.175.905.129	-	51	-	1.175.905.129	0	10
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	49	Dok.	357.000.000		1	69.800.000	1	15.600.000	100	22	1	15.600.000	2	4
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	57.000.000		100	11.400.000	-	3.800.000	-	33	-	3.800.000	0	7
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49	Dok.	57.000.000		1	11.400.000	1	3.800.000	100	33	1	3.800.000	2	7
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	751.026.500		100	180.490.500	7	33.633.900	7	19	7	33.633.900	7	4

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	32 Paket	237.535.000			1	63.815.000	-	0	-	-	0	0	0	0
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	78.996.500			1	14.996.500	-	1.776.700	-	12	0	1.776.700	-	2
8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	8 Paket	21.500.000			1	21.500.000	1	8.037.000	100	37	15	57.688.200	188	268,32
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129 Lap	412.995.000			1	80.179.000	1	23.820.200	100	30	1	23.820.200	1	5,77
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.200.100			100	40.040.100	22	17.195.400	22	43	22	17.195.400	22	8,59
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	200.200.100			1	40.040.100	1	17.195.400	100	43	1	17.195.400	2	8,59
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	110 %	509.511.000			18	87.543.000	13	17.512.000	71	20	13	17.512.000	12	3
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	422.108.000			7	74.908.000	3	16.512.000	43	22	3	16.512.000	9	4
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	70 Unit	57.250.000			14	8.450.000	1	1.000.000	7	12	1	1.000.000	1	1,75
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.153.000			1	4.185.000	-	0	-	-	-	0	0	0,00
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	441,38 %	300.500.000			88,70	20.500.000	30	8.140.000	34	40	30	8.140.000	7	2,71
7	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota	Presentase Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	300.500.000			100	20.500.000	34	8.140.000	34	40	34	8.140.000	34	2,71
14	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	225 Unit Usaha	300.500.000			45	20.500.000	34	8.140.000	76	40	34	8.140.000	15	2,71

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Nilai Produksi Produk Khas / Unggulan Rote	2907,156 Rp				0	58.000.000		5.091.000				5.091.000		
		Persentase Usaha Mikro yang telah Terfasilitasi untuk Pengembangan Produk	227,65 %				0									
8	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Presentase Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 %	1.797.800.000			100	58.000.000	16	5.091.000	16	9	16	5.091.000	16	0
15	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	218 Unit Usaha	1.797.800.000			40	58.000.000	4	5.091.000	10	9	4	5.091.000	2	0
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	251,6 %	2.295.800.000			45,16	15.000.000		4.819.000		32		4.819.000		
		Presentasi Pemenuhan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL)	150 %				20									
9	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Presentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	2.295.800.000			100	15.000.000	28	4.819.000	28	32	28	4.819.000	0	0,00
16	Penyediaan Sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150 Unit	2.295.800.000			20	15.000.000	7	4.819.000	35	32	7	4.819.000	5	0,00
V	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pengawasan barang-barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Bersubsidi	100 %	420.159.600			100	20.159.600	30	10.769.600	30	53	30	10.769.600	30	3
10		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	420.159.600			100	20.159.600	30	10.769.600	30	53	30	10.769.600	30	3
17		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	50 Lap	420.159.600			4	20.159.600	1	10.769.600	25	53	1	10.769.600	2	2,56

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
VI	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang diTera dan Tera ulang	100 %	217.500.000			59,12	17.500.000		3.470.000	-	20	-	3.470.000	0	2
11	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera-Tera Ulang dan pengawasan	Presentase Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 %	217.500.000			100	17.500.000		3.470.000	-	20	-	3.470.000	0	2
18	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera-Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1510 Unit	217.500.000			302	17.500.000	58	3.470.000	19	20	58	3.470.000	4	1,60
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Fasilitas Pengembangan SDM Kelompok IKM	62,02 %	9.718.100.000			11,9	559.500.000	0	7.630.000	1	1	0	7.630.000	0	0
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana IKM	354,56 %				63,64		1		1					
12	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100 %	9.718.100.000			100	559.500.000		7.630.000	-	1	-	7.630.000	0	0
19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50 Dok	9.718.100.000			10	559.500.000	-	7.630.000	-	1	-	7.630.000	0	0
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah Memiliki Ijin	17,61 %	583.270.000			3,25	241.870.000	0,31	22.740.500	9	9	0,31	22.740.500	0	4
		Persentase Produk Olahan IKM yang memiliki Label dan Kemasan Berstandar	18,05 %				3,61									
13	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 %	583.270.000			100	241.870.000	9	22.740.500	9	9	9	22.740.500	9	4

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, data kawasan Industri serta data lain Lingkup kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dok	399.858.000			1	229.158.000	1	14.661.500	100	6	1	14.661.500	20	4
21	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melaliu SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi danPublikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dok	183.412.000			1	12.712.000	-	8.079.000	-	64	-	8.079.000	0	4
Rata-rata capaian kinerja (%)				27.222.031.724	0	0	2.022	3.684.839.724	-	1.353.689.529	44,30	36,74		1.353.689.529	13,09	4,97
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			63,52				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan													
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja sesuai dengan Perubahan PMK 212 Tahun 20													
Tindakanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : DPMPTSP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
	URUSAN WAJIB																
	DPMPTSP				13.395.151.580				2.456.997.316								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	%	11.667.446.080			100%	2.268.409.216	22	1.019.340.274	2.171	44,94	122	1.019.340.274	12.171	9
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%	327.850.000			100	40.045.000	26	22.442.000	26	56,04	26	22.442.000	26	7
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dok. perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19	Dokumen	327.850.000			19	40.045.000	11	31.485.000	58	78,62	11	31.485.000	58	10
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok.	238.350.000			12	25.715.000	6	24.125.000	50	93,82	6	24.125.000	50	10
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dok.	89.500.000			7	14.330.000	5	7.360.000	71	51,36	5	7.360.000	71	8
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39	org/bln	10.119.489.080			39	2.023.897.816	9	920.306.309	23	45,47	9	920.306.309	23	9
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	org/bln	9.784.989.080			23	1.956.997.816	3	887.106.309	13	45,33	3	887.106.309	13	9
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	org/bln	334.500.000			16	66.900.000	6	33.200.000	38	49,63	6	33.200.000	38	10
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	org/bln	39.000.000			1	7.800.000	1	1.950.000	100	25,00	1	1.950.000	100	5
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	org/bln	39.000.000			1	7.800.000	1	1.950.000	100	25,00	1	1.950.000	100	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	765.245.000			100	121.236.000	20	35.960.550	20	29,66	10	35.960.550	10	5
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.500.000			1	500.000	1	500.000	100	100,00	1	500.000	100	20
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	293.575.000			1	58.715.000	1	4.715.000	100	8,03	1	4.715.000	100	2
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	37.360.000			1	6.933.000	1	4.285.000	100	61,81	1	4.285.000	100	11
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	30.205.000			1	5.565.000	-	2.699.550	0	48,51	-	2.699.550	0	9
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	kali	401.605.000			16	49.523.000	3	23.761.000	19	47,98	3	23.761.000	19	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	115.287.000			100	23.057.400	25	9.146.415	25	39,67	12,5	9.146.415	13	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai surat menyurat		Lbr													
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bln	115.287.000			12	23.057.400	6	9.146.415	50	39,67	6	9.146.415	50	8
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	300.575.000			100	52.373.000	25	20.492.000	25	39,13	12,5	20.492.000	13	7
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit 48 bulan	300.575.000			4	52.373.000	2	20.492.000	50	39,13	2	20.492.000	50	7
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi berskala Nasional (PMA dan PMDN)	81	PMA/PMDN	104.920.500			81	12.050.100		-	-	0,00	-	0	0	0
7	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi & Pendataan Potensi Investasi Daerah	100	%	104.920.500			100	12.050.100		-	-	0,00	-	0	0	0
13	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	kali 80 UMKM	104.920.500			2	12.050.100	-	-	-	-	0	0	0	0
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	100%	%	707.200.000			100%	66.734.000	52	34.943.000	52	52,36	26	34.943.000	26	5
8	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Transparasi Pelayanan Perizinan	100	%	707.200.000			100	66.734.000	52	34.943.000	52	52,36	26	34.943.000	26	5
14	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	TerlaksananyaKegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kab/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha.	1500	Ijin	707.200.000			1500	66.734.000	513	34.943.000	34	52,36	513	34.943.000	34	5
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi	50	%	915.585.000			50	109.804.000	11	30.971.950	9	28,21	6	30.971.950	11	3

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
9	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	915.585.000			100	109.804.000	9	30.971.950	9	28,21	5	30.971.950	5	3
15	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	81	PMA/ PMDN	415.585.000			81	65.293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	81	PMA/ PMDN	500.000.000			81	44.511.000	40	30.971.950	49	69,58	40	30.971.950	49	6
Rata-rata capaian Kinerja (%)					13.395.151.580	0			2.456.997.316		1.085.255.224	45,55	44,17		1.085.255.224	48,39	7,26
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			68,30				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					: Peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **)					: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya **)					:												

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	11.564.176.700		100	2.195.419.390	13	1.079.024.112	13	49	13	1.079.024.112	6,64	9,33
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%			100		13		13		13		6,64	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%			100		13		13		13		6,64	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%			100		13		13		13		6,64	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dok. perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60	Dok.	426.160.000		12	43.043.000	3	14.110.000	25	33	3	14.110.000	5,00	3,31
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dok.	426.160.000		12	43.043.000	3	14.110.000	25	33	3	14.110.000	5,00	3,31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9.826.453.200		100	1.965.290.640	28,47	954.948.588	28	48,59	28	954.948.588	28,47	9,72
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.470	oran g/bul	9.542.953.200		294	1.908.590.640	168	934.198.588	57	48,95	168	934.198.588	11,43	9,79
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok.	283.500.000		1	56.700.000	0	20.750.000	0	37	-	20.750.000	-	7,32
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Dok.	51.000.000		1	10.200.000	0,00	4.250.000	0	42	-	4.250.000	-	8,33
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok.	51.000.000		1	10.200.000	0	4.250.000	0	42	-	4.250.000	-	8,33
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	728.979.000		100	90.339.250	17	80.078.900	17	88,64	17	80.078.900	8,33	10,99
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	pake t	168.969.750		2	33.793.950	2,00	33.744.000	100	99,85	2	33.744.000	20,00	19,97
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	pake t	103.855.000		2	5.846.300	1	2.765.000,00	50	47,29	1	2.765.000	8,33	2,66
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	pake t	55.304.250		2	10.765.000	1,00	5.003.000	50	46	1	5.003.000	8,33	9,05
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Lapo ran	400.850.000		18	39.934.000	17	38.566.900	94	97	17	38.566.900	18,89	9,62

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	312.044.500			100	59.934.500	0	6.224.787	0	10	-	6.224.787	-	1,99
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	3.575.000			1	715.000	0,00	-	0	0	-	-	-	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 laporan	308.469.500			4	59.219.500	0	6.224.787	0	10,51	-	6.224.787	-	2,02
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	219.540.000			100	26.612.000	7	19.411.837	7	73	7	19.411.837	3,33	8,84
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	215.790.000			10	25.862.000	1,00	19.411.837	10	75,06	1	19.411.837	2,00	9,00
12	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	3.750.000			5	750.000	0	-	0	0	-	-	-	-
2	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan nilai Seni dan Budaya Daerah yang dilestarikan	100 %	1.811.285.500			100	319.017.100	0	125.432.800	0	39	-	125.432.800	-	6,93
7	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pagelaran seni dan budaya, jambore, festival putra putri tari ,bantuan peralatan kepada sanggar seni dan data obyek pemajuan kebudayaan	100 %	1.811.285.500			100	319.017.100	0,00	125.432.800	0	39	-	125.432.800	-	6,93
13	Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga,dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	25 Laporan	1.811.285.500			5	319.017.100	4	125.432.800	80	39,32	4	125.432.800	16,00	6,93
3	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian cagar budaya	100 %	298.485.000			100	54.057.000	0	-	0	-	-	-	-	-
8	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase data situs budaya	100 %	298.485.000			100	54.057.000	0,00	-	-	0	-	-	-	-
14	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	45 obyek	298.485.000			9	54.057.000	0	-	-	-	-	-	-	-
4	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	100 %	334.300.000			100	33.430.000	0	9.350.000	0	28	-	9.350.000	-	2,80
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	100 %	334.300.000			100	33.430.000	0,00	9.350.000	0	28	-	9.350.000	-	2,80

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
16	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 paket	334.300.000			4	33.430.000	0	9.350.000,00	-	27,97	-	9.350.000	-	2,80
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	22.000 orang	725.000.000			19000	119.650.000	0	1.700.000,00	0,00	1,42	-	1.700.000	-	0,23
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata	100 %	725.000.000			100	119.650.000	0	1.700.000,00	-	1,42	-	1.700.000	-	0,23
18	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 laporan	725.000.000			2	119.650.000	0,00	1.700.000,00	0	1,42	-	1.700.000	-	0,23
6	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	meningkatnya SDM Kepariwisataan	100 %	647.018.000			100	90.115.600	0	53.289.850	-		-	53.289.850	-	8,24
		meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber-CHSE	100 %			100		0		-		-				
11	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 %	647.018.000			100	90.115.600	0,00	53.289.850,00	-	59,13	-	53.289.850	-	8,24
19	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	1450 peserta	274.998.750			290	36.591.750	0	-	-	-	-	-	-	-
20	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Peserta	372.019.250			20	53.523.850	50	53.289.850,00	250	99,56	50	53.289.850	50,00	14,32
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)				15.380.265.200		-		2.811.689.090		1.268.796.762	35,83	45,13		1.268.796.762	7,00	5,27
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		81,51					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pel:													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Perlu Peningkatan Kinerja baik Perencanaan maupun pelaksanaan dalam melaksanake													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.917.926.578									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	2.678.917.000	-	-	100	1.367.307.598	26	716.215.424	25,88	52,38	26	716.215.424	25,88	26,74
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	42 Dok	28.200.000	-	-	33	8.274.050	19	6.509.000	57,58	78,67	19	6.509.000	45,24	34,77
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105 Dok	18.720.000	-	-	21	4.874.050	14	3.789.000	67	77,74	14	3.789.000	13,33	20,24
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Dok	6.457.500	-	-	12	3.400.000	11	2.720.000	91,67	80,00	11	2.720.000	18,33	42,12
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.354.239.600	-	-	100	1.218.791.748	25	629.162.886	25,00	51,62	25	629.162.886	25,00	26,72
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	2.270.479.600	-	-	12	1.177.751.748	9	612.062.886	75,00	51,97	9	612.062.886	15,00	26,96
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	83.760.000	-	-	12	41.040.000		17.100.000	0,00	41,67	-	17.100.000	0,00	20,42
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	30 Bulan	10.800.000	-	-	12	5.400.000		-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Bulan	10.800.000	-	-	12	5.400.000		2.250.000	0,00	41,67	-	2.250.000	0,00	20,83
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	155.222.400	-	-	100	74.148.000	35	49.713.168	35,00	67,05	35	49.713.168	35,00	32,03
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	32.772.000	-	-	12	14.841.000	6	6.146.000	50,00	41,41	6	6.146.000	10,00	18,75
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	13.628.400	-	-	12	5.360.000	6	2.008.000	50,00	37,46	6	2.008.000	10,00	14,73

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Lap	108.822.000	-	-	60	53.947.000	51	41.559.168	85,00	77,04	51	41.559.168	17,00	38,19
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	46.928.000	-	-	100	27.566.800	24	13.018.370	24,00	47,22	24	13.018.370	24,00	27,74
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	1.508.000	-	-	12	754.000	12	754.000	100	100	12	754.000	20,00	50,00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Lap	45.420.000	-	-	36	26.812.800	34	12.264.370	94,44	45,74	34	12.264.370	18,89	27,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran ,sarana dan Prasarana Kantor	100 %	83.527.000	-	-	100	33.127.000	37	17.812.000	36,60	53,77	37	17.812.000	36,60	21,32
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	83.527.000	-	-	7	33.127.000	6	17.812.000	85,71	53,77	6	17.812.000	17,14	21,32
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	100 %	833.098.400	-	-	100	498.112.530	14	127.938.851	14,02	25,68	14	127.938.851	14,02	15,36
6	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tingkat daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan	100 %	758.298.400	-	-	100	460.809.080	15	120.823.901	14,78	26,22	15	120.823.901	14,78	15,93
12	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250 Perpustakaan	606.268.400	-	-	50	78.133.950	20	47.119.500	40	60,31	20	47.119.500	8,00	7,77
13	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Ekslemplar	122.030.000	-	-	191	361.835.130	87	56.134.401	45,55	15,51	87	56.134.401	0,00	46,00
14	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	5 Layanan	30.000.000	-	-	1	20.840.000	1	17.570.000	100	84,31	1	17.570.000	20,00	58,57
7	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan	100 %	74.800.000	-	-	100	37.303.450	5	7.114.950	4,56	19,07	5	7.114.950	4,56	9,51

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
15	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten / Kota	100 org	117.320.000	-	-	20	33.733.500	13	5.925.000	65,20	17,56	13	5.925.000	13,04	
16	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	74.800.000	-	-	10	3.569.950	10	1.189.950	100	33,33	10	1.189.950	20,00	1,59
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Elektronik	100 OPD	185.664.000	-	-	100	52.506.450	24	15.964.000	24,12	30,40	24	15.964.000	24,12	8,60
8	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya arsip/dolumen baik secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.	100 %	52.084.000	-	-	100	14.021.000	20	5.494.000	19,59	39,18	20	5.494.000	19,59	10,55
17	Akuisisi pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	JumlahArsipStatisyangDilakukanAkuisisi,Pengolahan,P reservasidanAkses Arsip Statis	750 Arsip	52.084.000	-	-	150	14.021.000	131	5.494.000	87,33	39,18	131	5.494.000	17,47	10,55
9	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatna Pengeloaan Arsip Secara Elektronik	100 %	133.580.000	-	-	3	38.485.450	26	10.470.000	66,67	27,21	26	10.470.000	25,77	7,84
18	Penyediaan Informasi ,Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	JumlahLayananPenyediaanInformasi,AksesdanLayan anKearsipanTingkatDaerahKabupaten/Kota Melalui JIKN	15 Penggun a	133.580.000	-	-	3	38.485.450	2	10.470.000	66,67	27,21	2	10.470.000	13,33	7,84
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)				3.697.679.400				1.917.926.578		860.118.275	66,85	51,44		860.118.275	12,86	24,05
Predikat Kinerja											S	R			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		74,68					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Kerja sama tim dan koordinasi dengan provinsi dan pusat													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Sarana kantor yang terbatas dan kurangnya dana													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Memaksimalkan sarana yang tersedia													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			: Peningkatan dan penambahan sarana kantor untuk peningkatan kinerja													

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN															
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			11.447.734.790		-		2.289.546.958		809.526.287		35		809.526.287		7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	8.207.895.790		-	100	1.641.579.158	23	765.835.287	23	47	23	765.261.812	12	9
		Terwujudnya sarana dan Prasarana Kantor	100 %				100		-		0					
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Dokumen	130.375.000		-	16	26.075.000	12	14.157.500	75	54	12	14.157.500	13	11
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	105.375.000		-	12	21.075.000	9	14.157.500	75	67	9	14.157.500	15	13
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	25.000.000		-	4	5.000.000	3	-	75	-	3	-	9	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan ASN	100 %	7.098.182.540		-	100	1.419.636.508	7,50	705.798.392	8	50	8	705.798.392	8	10
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	6.742.117.540		-	15	1.348.423.508	15	682.872.392	100	51	15	682.872.392	20	10
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	356.065.000		-	1	71.213.000	1	22.926.000	100	32	1	22.926.000	20	6
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	18.000.000		-	1	3.600.000	-	900.000	0	25	-	900.000	0	5
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	18.000.000		-	1	3.600.000	1	900.000	100	25	1	900.000	20	5
4	Kegiatan Admisnistrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	390.874.250		-	100	78.174.850	5	26.134.475	5	33		25.561.000		7
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10 Paket	117.500.000		-	1	23.500.000			0					
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	36.264.250		-	2	7.252.850	2	573.475	100	8	2	573.475	20	2
8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material Kantor yang Disediakan	10 Paket	44.750.000		-	2	8.950.000	2	6.566.000	100	73	2	6.566.000	20	15

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	192.360.000		-	2	38.472.000	2	18.995.000	100	49	2	18.995.000	20	10
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	236.934.000		-	100	47.386.800	1	11.425.413	1	24	1	11.425.413	1	5
10	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	236.934.000		-	1	47.386.800	1	11.425.413	100	24	1	11.425.413	20	5
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	333.530.000		-	100	66.706.000	2	7.419.507	2	11	2	7.419.507	2	2
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	193.180.000		-	7	38.636.000	2	7.419.507	29	19	2	7.419.507	6	4
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	45 Unit	17.500.000		-	9	3.500.000	2	300.000	22	9	2	300.000	4	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	5 Unit	122.850.000		-	1	24.570.000		-	0	-	-	-	0	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih	6,26 %	2.430.525.500		-	5,59	486.105.100	-	6.944.000	0	1	-	6.944.000	0	0
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan	66,12 %			-	62,13		-		0					
7	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabuapten Kota	Terlaksanayan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabuapten Kota	790 Orang	2.430.525.500	-	-	158	486.105.100	-	6.944.000	0	1	-	6.944.000	0	0
14	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	790 Orang	2.430.525.500	-	-	158	486.105.100	-	6.944.000	0	1	-	6.944.000	0	0
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih	5,82 %	626.578.500		-	0,87	125.315.700		18.852.000	0	15	-	18.852.000	0	3
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan	64,65 %			-	5,05				0		-	-		
10	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10 paket	626.578.500		-	2	125.315.700		18.852.000	0	15	-	18.852.000	0	3

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
15	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 paket	81.900.000		-	1	16.380.000	-	7.597.000	0	46	-	7.597.000	0	9
16	Penjamin Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 paket	544.678.500		-	1	108.935.700	-	11.255.000	0	10	-	11.255.000	0	2
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan	30,00 %	182.735.000		-	30	36.547.000	-	17.895.000	0	49	-	17.895.000	0	10
		Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih	30,00 %				30									
11	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data statistik pengolahan dan pemasaran hasil	5 Dokumen	140.735.000		-	1	28.147.000	-	16.195.000	0	58	-	16.195.000	0	12
17	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	5 Dokumen	140.735.000		-	1	28.147.000	-	16.195.000	0	58	-	16.195.000	0	12
12	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan	5 Unit	42.000.000	-	-	100	8.400.000	-	1.700.000	0	20	-	1.700.000	0	4
		Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				-										
18	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	5 unit/paket	42.000.000	-	-	1	8.400.000	-	1.700.000	0	20	-	1.700.000	0	4
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				11.447.734.790		-		2.289.546.958		809.526.287	23,44	35,36		809.526.287	11,72	7,07
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			48,45				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Ada Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Terkendala dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah																
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja sesuai dengan Perubahan PMK 212 Tahun 2022																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																

PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	22.214.231.170			1	4.442.846.234	25	2.246.571.659	2.479	51	25	2.246.571.659	24,79	10,11
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %													
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Dok	139.684.500			19	27.936.900	5	22.313.000	26	80	5	22.313.000	5,26	15,97
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	60 Dokumen	94.250.000			12	18.850.000	6	17.273.000	50	92	6	17.273.000	10,00	18,33
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	45.434.500			7	9.086.900	4	5.040.000	57	55	4	5.040.000	11,43	11,09
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	21.060.321.670			100	4.212.064.334	29	2.085.625.330	29	50	14	2.085.625.330	14,29	9,90
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.920 org/b ln	20.732.721.670			784	4.146.544.334	60	2.064.225.330	8	50	60	2.064.225.330	1,52	9,96
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	327.600.000			12	65.520.000	6	21.400.000	50	33	6	21.400.000	10,00	6,53
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	18.000.000			100	3.600.000	-	1.200.000	-	33	-	1.200.000	-	6,67
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	18.000.000			1	3.600.000	1	1.200.000	100	33	1	1.200.000	20,00	6,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	635.320.000			100	127.064.000	34	93.239.826	34	73	17	93.239.826	16,91	14,68
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		35 Paket	212.750.000			7	42.550.000	2	42.498.570	29	100	2	42.498.570	5,71	19,98
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	58.590.000			2	11.718.000	2	11.640.000	100	99	2	11.640.000	20,00	19,87

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	27.500.000			1	5.500.000	-	2.500.000	-	45	-	2.500.000	-	9,09
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	336.480.000			24	67.296.000	9	36.601.256	38	54	9	36.601.256	7,50	10,88
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	161.250.000			100	32.250.000	21	13.661.503	21	42	10	13.661.503	10,50	8,47
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	161.250.000			2	32.250.000	-	13.661.503	-	42	-	13.661.503	-	8,47
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	199.655.000			100	39.931.000	26	30.532.000	26	76	13	30.532.000	13,15	15,29
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180 Unit	195.655.000			36	39.131.000	4	30.532.000	11	78	4	30.532.000	2,22	15,61
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	65 Unit	4.000.000			13	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan sarana peternakan	27 Unit	3.715.532.500			14	799.394.500	1	112.222.852	7	14	1	112.222.852	3,70	3,02
7	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Inseminasi Buatan, Tersedianya Straw, N2 cair dan pakan ternak babi, Terlaksananya Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Tenaga IB)	429 Ekor	3.265.532.500			329	653.106.500	-	64.048.852	-	10	-	64.048.852	-	1,96
13	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1.645 Ekor	131.980.000			329	26.396.000	50	20.722.000	15	79	50	20.722.000	3,04	15,70
14	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.645 Ekor	3.133.552.500			329	626.710.500	-	43.326.852	-	7	-	43.326.852	-	1,38
8	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan pakan ternak	15.900 Kg	450.000.000			5.300	90.000.000	-	45.000.000	-	50	-	45.000.000	-	10,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
15	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	26.500 Kg	450.000.000			5.300	90.000.000	2.650	45.000.000	50	50	2.650	45.000.000	10,00	10,00
9	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya produksi hijauan makanan ternak	48 Ha	-			24	56.288.000	-	3.174.000	-	6	-	3.174.000	-	
16	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan yang beredar	30 Ton	281.440.000			24	56.288.000	12	14.261.000	50	25	12	14.261.000	40,00	5,07
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Prasarana Peternakan	16 Unit	1.100.000.000			11	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	15 Pake	1.100.000.000			11	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55 Pake t	1.100.000.000			11	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Penyakit Menular Ternak	15 %	2.524.140.000			15	504.828.000	-	269.494.000	-	53	-	269.494.000	-	10,68
11	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Ternak	24.000 Ekor	2.498.115.000			24.000	499.623.000	-	264.410.000	-	53	-	264.410.000	-	10,58
18	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	120.000 ekor	2.498.115.000			24.000	499.623.000	9.000	264.410.000	38	53	9.000	264.410.000	7,50	10,58
12	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	27.000 Ekor	26.025.000			27.000	5.205.000	-	5.084.000	-	98	-	5.084.000	-	19,54
19	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	135.000 Ekor	26.025.000			27.000	5.205.000	-	5.084.000	-	98	-	5.084.000	-	19,54

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Usaha Peternakan Berizin	14.127 Ekor	49.390.000			7.236	74.553.000	1.000	13.184.000	14	18	1.000	13.184.000	7,08	26,69
		Meningkatnya Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah	17.365 Ekor				3.473		668		100	100			100,00	100,00
13	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan pakan, Fasilitas pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya kegiatan usaha peternakan	16.050 Ekor	49.390.000			3.210	74.553.000	668	13.184.000	21	18	668	13.184.000	4,16	26,69
20	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	16.050 Lapo ran	49.390.000			3.210	9.878.000	1.336	9.244.000	42	94	1.336	9.244.000	8,32	18,72
21	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	16.050 Lapo ran	323.375.000			3.210	64.675.000	668	3.940.000	21	6	668	3.940.000	4,16	1,22
Rata-rata capaian kinerja (%)				29.603.293.670				6.041.621.734		2.641.472.511	28,55	43,72		2.641.472.511	5,71	8,92
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			55,74				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi dan evaluasi secara terus-menerus dalam pelaksanaan program dan kegiatan																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Meningkatkan kualitas Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah																
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	102.078.864.037	0	0	100	18.512.466.772		6.802.314.468				6.765.914.468		
		TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR														
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Dokumen	57.815.579	0	0	100	6.977.800	-	0	0		0	0	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	47.196.391	0	0	12	4.978.000	-	-	0	0	0	0	0	0
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	10.619.188	0	0	7	1.999.800	-	-	0	0	0	0	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Honor Pengelola APBD dan Tersedinya administrasi Keuangang Peragkat Daerah	100 %	34.141.377.330	0,0	0	100	6.429.486.562	25	2.821.327.613	25	95	25	2.784.927.613	25	8
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	740 Orang/Bulan	33.139.091.236	0	0	148	6.240.736.562	1.184	2.784.927.613	800	45	1.184	2.784.927.613	160	8,40
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.002.286.094	0	0	12	188.750.000	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	100 Bulan	502.661.743	0	0	100	94.661.000	17	14.269.000	17	15	92	14.269.000	92	3
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen	502.661.743	0	0	6	94.661.000	3	14.269.000	50	15	3	14.269.000	10	2,84
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	100 %	120.000.000	0	0	100	0	-	-	0	0	0	0	0	0,00
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	120.000.000	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.990.298.492	0,00	0	100	891.966.950	20,34	407.739.900	20	46		407.739.900		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	237.330.727	0	0	1	44.694.000	-	-	0	0	0	0	0	0
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	114.699.497	0	0	1	21.600.150	-	-	0	0	0	0	0	0
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	542.421.304	0	0	1	102.148.500	-	-	0	0	0	0	0	0
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.232.196.682	0	0	2	224.976.000	1	25.440.000	50	11	1	25.440.000	10	2
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	249.460.645	0	0	2	46.978.300	2	21.173.000	100	45	2	21.173.000	20	8
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6910 Laporan	3.614.189.638	0	0	1382	451.570.000	610	361.126.900	44	80	610	361.126.900	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah		100 %	396.029.975	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	396.029.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	100 %	8.618.136.400	0	0	100	1.622.963.000	25	683.288.300	25	97	25	683.288.300	25	8
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	53.085.320	0	0	12	9.997.000	6	9.000.000	50	90	6	9.000.000	10	17
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	8.565.051.081	0	0	12	1.612.966.000	6	674.288.300	50	42	6	674.288.300	10	8

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18.066.730.018	0,00	0	100	3.364.457.260	32,70	1.115.503.776	33	33	33	1.115.503.776	33	6
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.126.256.501	0	0	2	203.526.000	4	53.640.000	200	26	4	53.640.000	40	5
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	265 Unit	5.271.185.702	0	0	53	963.377.000	25	229.234.676	47	24	25	229.234.676	9	4
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	243.774.563	0	0	50	45.907.500	17	9.450.000	34	21	17	9.450.000	7	4
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	11.228.635.057	0	0	7	2.114.570.760	3	795.354.100	43	38	3	795.354.100	9	7
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	196.878.195	0	0	6	37.076.000	3	27.825.000	50	75	3	27.825.000	10	14
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 %	4.174.829.295	0,00	0	100	786.202.000	18,75	362.909.279	19	46	19	362.909.279	313	9
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang/ Bulan	931.587.090	0	0	2	175.436.000	9	58.827.979	450	34	9	58.827.979	90	6
21	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1.007.681.181	0	0	2	189.766.000	1	189.410.400	50	100	1	189.410.400	10	19
22	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 Orang	642.523.525	0	0	12	121.000.000	6	82.240.900	50	68	6	82.240.900	10	13
23	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang/ Bulan	1.593.037.500	0	0	2	300.000.000	1	32.430.000	50	11	1	32.430.000	10	2
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksanya penyediaan bahan logistik untuk KDH/WKDH	100 %	14.900.492.187	0	0	100	2.806.053.000	-	337.573.200	100	94	0	337.573.200	0	2
23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60 Paket	11.226.565.383	0	0	12	2.114.181.000	1	165.023.700	8	8	1	165.023.700	2	1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60 Bulan	3.673.926.804	0	0	12	691.872.000	3	172.549.500	25	25	3	172.549.500	5	5
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya protokol dan Komunikasi Pimpinandan dokumentasi tugas pimpinan	100 %	15.110.493.018	0,0	0	100	2.509.699.200	34,52	1.059.703.400	35		35	1.059.703.400	35	7
25	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	40 Laporan	5.442.181.796	0	0	8	1.025.649.200	4	401.000.000	50	39	4	401.000.000	10	7
26	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	35 Laporan	7.813.872.199	0	0	7	1.173.803.000	3	639.903.400	43	55	3	639.903.400	9	8
27	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	40 Laporan	1.854.439.023	0	0	8	310.247.000	5	18.800.000	63	6	5	18.800.000	13	1
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)			102.078.864.037		0			18.512.466.772		6.802.314.468	85,44	31,70		6.802.314.585	18,45	5,69
Predikat Kinerja											T	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			22,93			
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Komitmen Pimpinan dan semua ASN Dalam Pelaksanaan Tugas dan Juga adanya Koordinasi yang baik antar Perangkat daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Belum rampungnya dokumen kontrak sehingga belum dilakukan proses pelelangan													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	15.924.206.500		0	100 %	3.184.841.300	0	888.163.800	0	6,03	0	888.163.800	0	6
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %		-		-					
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %		-		-					
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %		-		-					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	60 Dok	86.132.500		0	12 Dok	17.226.500	-	0		0	-	0	-	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	86.132.500		-	12 Dok	17.226.500	-	-	-	0	-	-	-	0
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dok	61.620.000		0	5 Dok	75.120.000	-	24.700.000		0	-	0	-	0
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dok	61.620.000			5 Dok	75.120.000	-	24.700.000	-	0	-	0	-	0
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60 Dok	13.800.000		0	12 Dok	27.600.000	-	9.700.000		0	-	0	-	0
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dok	13.800.000			12 Dok	27.600.000	-	9.700.000	-	0	-	0	-	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	241.348.000		0	100 %	189.569.000	-	147.304.850		53	-	100.666.025	-	42
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	45.000.000			2 Paket	24.320.000	-	24.320.000	-	0	-	0	-	0
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15.000.000			2 Paket	14.700.000	-	2.100.000	-	14	-	2.100.000	-	14
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.912.000			2 Paket	26.608.000	-	3.931.000	-	15	-	3.931.000	-	10
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285 Lap	142.436.000			57 Lap	123.941.000	-	116.953.850	-	76	-	94.635.025	-	66
4	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 Lap	13.846.000		0	24 Lap	13.569.000	2	5.233.100	8	13	2	1.745.200	2	13
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	1.846.000			12 Lap	1.989.000	-	-	-	0	-	0	-	0
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	12.000.000			12 Lap	11.580.000	2	5.233.100	17	15	2	1.745.200	3	15
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	95 Unit	658.050.000	-	0	19 Unit	2.861.756.800	-	701.225.850		3	-	89.694.775	-	14
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	39.600.000			10 Unit	26.841.000	-	2.700.000	-	0	-	0	-	0
10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	3.450.000			12 Unit	4.000.000	-	-	-	0	-	0	-	0
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	15 Unit	615.000.000			3 Unit	2.830.915.800	1	698.525.850	33	3	1	89.694.775	7	15

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	2.046.337.500		0	100 %	1.654.523.500	3	591.290.450	3	10	3	160.115.450	3	8
		Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	100 %				100 %		-		-		-		-	
6	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan	65 Dok	1.146.337.500		0	13 Dok	666.753.500	3	316.857.000	23	21	3	137.415.000	5	12
12	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	35 Dok	309.783.000			7 Dok	293.256.500	-	-	-	0	-	0	-	0
13	Pengelolaan Adm Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	5 dok	50.000.000			1 dok	27.790.000	-	14.960.000	-	0	-	0	-	0
14	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	25 Dok	786.554.500			5 Dok	345.707.000	3	301.897.000	60	40	3	137.415.000	12	17
7	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	70 Dok	900.000.000		0	14 Dok	987.770.000	-	274.433.450		2	-	22.700.450	-	3
15	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	70 Dok	900.000.000			14 Dok	987.770.000	-	274.433.450	-	2	-	22.700.450	-	3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				17.970.544.000	0			4.839.364.800	-	1.479.454.250	6,56	7,28		352.221.450	1,42	1,96
Predikat Kinerja											SR	SR		SR SR		
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			53,49				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Komitmen Pimpinan dan semua ASN Dalam Pelaksanaan Tugas dan Juga adanya Koordinasi yang baik antar Perangkat daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Belum rampungnya Dok. kontrak sehingga belum dilakukan proses pelelanggan													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM																	
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	755.686.750	0	0	100 %	135.492.850									
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	165.171.489	0	0	100 %	32.629.000									
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	72 Dokumen	165.171.489			24 Dokumen	32.629.000	4	10.560.000	17	32,36	4	10.560.000	5,56	6,39	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	24.289.925	36	0	100 %	4.800.000									
2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	24.289.925			12 Bulan	4.800.000	4	1.600.000	33,33	33,33	4	1.600.000	33,33	6,59	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	374.816.787	-	-	100 %	61.455.850									
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	230.045.323			2 Paket	34.079.850	1	22.729.750	50,00	66,70	1	22.729.750	50	9,88	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	144.771.464			12 Laporan	27.376.000	6	17.010.000	50,00	62,13	6	17.010.000	50	11,75	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, Sumber daya Air dan Listrik	100 %	71.796.969	0	0	100 %	14.188.000									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.999.676			12 Laporan	988.000	12	988.000	100,00	100,00	12	988.000	100,00	19,76	
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	66.797.293			12 Laporan	13.200.000	6	6.600.000	50,00	50,00	6	6.600.000	50,00	9,88	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	119.611.580	70	0	100 %	22.420.000								
7	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	119.611.580			4 Unit	22.420.000	2	12.788.000	50,00	57,04	2	12.788.000	50	10,69
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah	100 %	853.699.199	0	0	100 %	120.887.100								
6	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tewujudnya Pengelolaan Produk Hukum Daerah	100 %	853.699.199	0	0	100 %	120.887.100								
8	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Tersusun	50 Dokumen	274.675.971			50 Dokumen	29.883.850	-	9.180.000	-	31	0	9.180.000	0	3,34
9	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	251.375.420			3 Kasus	43.092.250	-	8.283.000	-	19,22	-	8.283.000	-	3,30
10	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Infomasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	50 Dokumen	327.647.808			50 Dokumen	47.911.000	-	37.034.000	-	77,30	-	37.034.000	-	11,30
Rata-rata capaian kinerja (%)				1.609.385.949		0		256.379.950		126.772.750	35,00	52,88		126.772.750	33,89	9,29
Predikat Kinerja											SR	R			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			81,30				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	1.494.485.000			100	298.897.000	100	195.202.700		65		195.202.700		13
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dok. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95 Dok.	124.995.000			19	24.999.000	15	20.939.000	79	84	15	20.939.000	16	17
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok.	87.500.000			12	17.500.000	12	17.490.000	100	100	12	17.490.000	20	20
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dok.	37.495.000			7	7.499.000	3	3.449.000	43	46	3	3.449.000	9	9
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan ASN	60 Bulan	185.670.000			12	37.134.000	4	16.009.000	33	43	4	16.009.000	7	9
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	185.670.000			12	37.134.000	4	16.009.000	33	43	4	16.009.000	7	9
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60 Dok.	21.000.000	0		12	4.200.000	2	1.400.000	17	33	2	1.400.000	7	7
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dok.	21.000.000			12	4.200.000	4	1.400.000	33	33	4	1.400.000	7	7
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	180	165.262.500			36	33.052.500		33.052.500				33.052.500		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	25.597.500			12	5.119.500	12	5.119.500	100	100	12	5.119.500	20	20
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	24.865.000			12	4.973.000	12	4.973.000	100	100	12	4.973.000	20	20
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	114.800.000			12	22.960.000	12	22.960.000	100	100	12	22.960.000	20	20
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Kominikasi Air dan Listrik	60 Laporan	57.900.000			12	11.580.000	6	5.046.300	50	44	6	5.046.300	10	9

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	57.900.000			12	11.580.000	6	5.046.300	50	44	6	5.046.300	10	9
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihanya Barang Milik Daerah	35 Unit	122.245.000			7	24.449.000	7	14.613.000	100	60	7	14.613.000	20	12
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	107.245.000			3	21.449.000	3	11.613.000	100	54	3	11.613.000	20	11
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000			4	3.000.000	4	3.000.000	100	100	4	3.000.000	20	20
7	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	70	817.412.500			14	163.482.500		104.142.900				104.142.900		
11	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	50 Dok.	278.049.500			10	55.609.900	10	46.882.900	100	84	10	46.882.900	20	17
12	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	10 Dok.	133.730.000			2	26.746.000	2	22.160.000	100	83	2	22.160.000	20	17
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	405.633.000			2	81.126.600	2	35.100.000	100	43	2	35.100.000	20	9
Rata-rata capaian kinerja (%)				1.494.485.000				298.897.000		195.202.700	81,50	71,58		195.202.700	16,30	14,32
Predikat Kinerja											T	S			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			80,16				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja		: Komitmen Pimpinan dan semua ASN Dalam Pelaksanaan Tugas dan Juga adanya Koordinasi yang baik antar Perangkat daerah														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		: Pandemi COVID-19 dan perlu peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Memperhatikan perencanaan agar dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya		:														

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			1.865.950.000				373.190.000		220.980.000				220.980.000		
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan	Terwujudnya pelayanan adm. perkantoran	100 %	674.820.000			100	134.964.000	100	76.427.000	100	57	100	76.427.000	100	11
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evluasi kinerja pernagkaat daerah dan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	100 %	62.380.000			100	12.476.000	100	12.476.000	100	100	100	12.476.000	100	20
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	47.380.000			4	9.476.000	4	9.476.000	100	100	4	9.476.000	20	20
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Lap	15.000.000			7	3.000.000	7	3.000.000	100	100	7	3.000.000	20	20
2	Adm. Keuangan perangkat daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah	60 Dok	231.825.000			24	46.365.000	6	19.500.000	25	42	24	19.500.000	40	8
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	231.825.000			12	46.365.000	6	19.500.000	50	42	6	19.500.000	10	8
3	Adm. Barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah	60 Dok	18.000.000			12	3.600.000	12	900.000	100	25	12	900.000	20	5
4	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengaman barang milik daerah SKPD	60 Dok	18.000.000			12	3.600.000	12	900.000	100	25	12	900.000	20	5
4	Adm. Umum perangkat daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 unit laptop dan 1 unit AC	100 %	254.930.000			100	50.986.000	14	31.429.000	100	62	100	31.429.000	100	12
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	60 Bulan	31.500.000			12	6.300.000	6	3.675.000	50	58	6	3.675.000	10	12
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	30.430.000			4	6.086.000	4	6.086.000	100	100	4	6.086.000	20	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Lap	193.000.000			13	38.600.000	8	27.754.000	62	72	8	27.754.000	12	14
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa surat menyurat dan penyediaan materai	690 Lembar	7.150.000			138	1.430.000	69	715.000	50	50	69	715.000	10	10
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	690 Lembar	7.150.000			138	1.430.000	69	715.000	50	50	69	715.000	10	10
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan da perijinan kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 dan 8 unit roda 2	160 unit	100.535.000			32	20.107.000	22	11.407.000	69	57	22	11.407.000	14	11
9	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	90 unit	93.785.000			18	18.757.000	8	10.057.000	44	54	8	10.057.000	9	11
10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	70 unit	6.750.000			14	1.350.000	14	1.350.000	100	100	14	1.350.000	20	20
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya pelayanan administrasi perekonomian pembangunan dan sumber daya alam	100 %	1.191.130.000			100	238.226.000	100	144.553.000	100	61	100	144.553.000	100	12
7	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	229.660.000			100	45.932.000	100	37.353.000	100	81	100	37.353.000	100	16
11	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD/BLUD	Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD/BLUD	10 Dok	81.375.000			2	16.275.000	1	7.805.000	50	48	1	7.805.000	10	10
12	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	10 Lap	148.285.000			2	29.657.000	1	29.548.000	50	100	1	29.548.000	10	20
8	Pelaksanaan Adm. Pembangunan	Terfasilitasinya penyusunan program dan pembangunan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100 %	888.635.000			100	177.727.000	100	98.949.000	100	56	100	98.949.000	100	11
13	Fasilitasi penyusunan prog. Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	50 Dok	359.920.000			10	71.984.000	3	71.954.000	30	100	3	71.954.000	6	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
14	Pengendalian dan evaluasi prog. Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan pembangunan	60 Lap	226.115.000			12	45.223.000	-	-	-	-	-	0	0	0
15	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	60 Lap	302.600.000			12	60.520.000	4	26.995.000	33	45	4	26.995.000	7	9
9	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Tersedianya profil dan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam	60 Bln	72.835.000	0		12	14.567.000	2	8.251.000	17	57	2	8.251.000	3	11
16	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	60 Bln	72.835.000			12	14.567.000	2	8.251.000	17	57	2	8.251.000	3	11
Rata-rata capaian kinerja (%)				1.865.950.000				373.190.000		220.980.000	55,73	63,31		220.980.000	11,15	13,12
Predikat Kinerja											R	R			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			80,31				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:													

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PBJ

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN WAJIB																
	Bagian PBJ																
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU	100	%					123.106.550								
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%													
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%													
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%													
1	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19	Doku men	100			19	3.286.000								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	Dokum en	16.430.000			7	3.286.000	7	3.286.000	100	100	7	3.286.000	20	20
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah	60	Dokum en				12		6		50		6		10	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	216.900.000			100	43.380.000								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60	Dokumen	216.900.000			12	43.380.000	9	16.646.000	75	38	9	16.646.000	15	8
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	21.000.000			100	4.200.000								
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	60	Dokumen	21.000.000			12	4.200.000	3	0	25	0	3	0	5	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	253.792.750			100	50.758.550								
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10	Paket	59.160.000			2	11.832.000	0	11.832.000	0	100	0	11.832.000	-	20
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	10	Paket	28.547.750			2	5.709.550	0	5.709.550	0	100	0	5.709.550	-	20
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	166.085.000			5	33.217.000	2	29.188.422	40	88	2	29.188.422	8	18
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Laporan	5.200.000			2	1.040.000								
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10	Laporan	5.200.000			2	1.040.000	2	1.040.000	100	100	2	1.040.000	20	20
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	25	Unit	102.210.000			5	20.442.000								
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	Unit	84.710.000			2	16.942.000	3	6.000.000	150	35	3	6.000.000	30	7
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	17.500.000			3	3.500.000	4	3.500.000	133,3	100	4	3.500.000	27	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PRESENTASE PAKET PENGADAAN BARANG/JASA YANG TRANSPARAN DAN TEPAT WAKTU	100	%	3.229.551.000			100	645.910.200								
7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	100	%	3.229.551.000			100	645.910.200								
12	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	20	Dok	2.091.490.000			4	418.298.000	3	103.809.950	75	25	3	103.809.950	15	5
13	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	20	Dok	1.086.591.000			4	217.318.200	3	23.779.600	75	11	3	23.779.600	15	2
14	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	220	orang	51.470.000			44	10.294.000	0	492.000	0	5	0	492.000	-	0,96
Rata-rata capaian kinerja (%)					3.229.551.000				769.016.750		205.283.522	56,11	50,18		205.283.522	11,22	10,04
Predikat Kinerja												R	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas											Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		53,09				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:														

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	84.189.166.980			100 %	16.861.695.796	100	8.133.835.769	100	48	20	8.133.835.769	20	10
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %		52		52		10		10	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %		30		30		9		9	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %		38		38		8		8	
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95 dok	48.800.000			19 dok	9.760.000	19	9.760.000	100	100	19	9.760.000	20	20
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	28.130.000			12 Dok	5.626.000	12	5.626.000	100	100	12	5.626.000	20	20
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Lap	20.670.000			7 Lap	4.134.000	7	4.134.000	100	100	7	4.134.000	20	20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	9.397.953.430			100 %	1.879.590.686	24	980.416.519	24	52	11	980.416.519	11	10
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org/bln	8.872.053.430			25 Org/bln	1.774.410.686	6	962.716.519	24	54	6	962.716.519	24	11
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	525.900.000			12 Dok	105.180.000	3	17.700.000	25	17	3	17.700.000	5	3
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	73.125.000			100 %	14.625.000	3	5.250.000	25	36	3	5.250.000	5	7
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dok	73.125.000			12 Dok	14.625.000	3	5.250.000	25	36	3	5.250.000	5	7
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	2.591.808.000			100 %	518.361.600	52	362.359.800	52	70	10,32	362.359.800	10	14
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	50.715.000			5 Paket	10.143.000	2	5.000.000	40	49	2	5.000.000	8	10
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	651.051.000			3 Paket	130.210.200	2	92.210.000	67	71	2	92.210.000	13	14
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Paket	1.144.027.050			3 Paket	228.805.410	2	182.909.000	67	80	2	182.909.000	13	16

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	342.255.000			3 Paket	68.451.000	1	26.776.000	33	39	1	26.776.000	7	8
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	43.574.950			3 Paket	8.714.990	2	5.500.000	67	63	2	5.500.000	13	13
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Perundang - undangan yang disediakan	20 Dok	82.500.000			4 Dok	16.500.000	2	8.000.000	50	48	2	8.000.000	10	10
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Lap	277.685.000			17 Lap	55.537.000	9	41.964.800	53	76	9	41.964.800	11	15
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	951.304.000			100 %	207.542.200	50	55.432.500	50	27	10,00	55.432.500	10	6
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	86.407.000			12 Lap	17.281.400	6	7.660.000	50	44	6	7.660.000	10	9
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	951.304.000			12 Lap	190.260.800	6	55.432.500	50	29	6	55.432.500	10	6
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	185 Unit	2.082.105.000			37 Unit	423.002.000	38	103.788.000	102	25	7,57	103.788.000	4	5
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 unit	1.958.770.000			18 unit	391.754.000	8	98.190.000	44	25	8	98.190.000	9	5
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	71.500.000			15 unit	14.300.000	5	2.500.000	33	17	5	2.500.000	7	3
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	51.835.000			4 unit	10.367.000	1	3.098.000	25	30	1	3.098.000	5	6
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	20 Unit	32.905.000			4 Unit	6.581.000								
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Administrasi Keuangan, pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan DPRD	75 Unit	59.797.292.800			100 %	11.959.458.560	91	5.823.078.950	91	49	66,67	5.823.078.950	89	10
18	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 Org/bln	55.824.941.550			25 Org/bln	11.164.988.310	25	5.436.209.550	100	49	25	5.436.209.550	100	10
19	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	25 Paket	1.729.116.250			5 Paket	345.823.250	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	2.243.235.000			25 Orang	448.647.000	25	386.869.400	100	86	25	386.869.400	100	17
8	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	425 Unit	9.246.778.750			85 Unit	1.849.355.750	7	784.005.000	8	42	1,41	784.005.000	0	8

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
21	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Fraksi DPRD	35 Lap	305.110.750			7 unit	61.022.150	-	2.600.000	-	4	-	2.600.000	-	1
22	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	375 Lap	541.668.000			75 unit	108.333.600	3	81.405.000	4	75	3	81.405.000	1	15
23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	15 Paket	8.400.000.000			3 unit	1.680.000.000	3	700.000.000	100	42	3	700.000.000	20	8
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	37.582.595.000			100 %	10.745.155.000	10	3.703.493.500	10	34	10	3.703.493.500	60	10
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan														
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Ranperda	5 Lap	100.505.000			5 Lap	2.760.932.000	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	952.160.000			1 Dok	190.432.000								
25	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dok	12.751.995.000			3 Dok	2.550.399.000								
26	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dok	100.505.000			1 Dok	20.101.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran	10 Lap	75.000.000			2 Lap	202.805.000	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	75.000.000			2 Dok	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	10 Dok	75.000.000			2 Dok	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD	10 Dok	319.700.000			2 Dok	63.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	10 Dok	218.200.000			2 Dok	43.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dok	326.125.000			2 Dok	65.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Lap	246.430.000			1 Lap	49.286.000	1	49.235.000	100	100	1	49.235.000	20	20
32	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Lap	246.430.000			1 Lap	49.286.000	1	49.235.000	100	100	1	49.235.000	20	20

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
12	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	15 Lap	7.965.755.000			100 %	1.893.151.000	3	1.293.727.300	100	78	3	1.293.727.300	20	16
33	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	15 Dok	7.965.755.000			3 Dok	1.593.151.000	3	1.241.227.300	100	78	3	1.241.227.300	20	16
34	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim Ahli	15 Orang	450.000.000			3 Orang	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD	7 orang	1.050.000.000			7 orang	210.000.000	7	52.500.000	100	25	7	52.500.000	100	5
36	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0 Dok	-					-	-			-	-		
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	30 Lap	19.848.715.000			100 %	3.969.743.000	2	1.333.617.000	33	45	2	1.333.617.000	7	9
37	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan kerja DPRD	30 Lap	468.300.000			6 Lap	93.660.000	2	42.550.000	33	45	2	42.550.000	7	9
38	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun	5 Dok	75.150.000			1 Dok	15.030.000	1	4.050.000	100	27	1	4.050.000	20	5
39	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	10 Dok	19.305.265.000			2 Dok	3.861.053.000	-	1.287.017.000	-	33	-	1.287.017.000	-	7
14	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	9.346.190.000			6 Lap	1.869.238.000	4	1.026.914.200	67	55	4	1.026.914.200	13	11
40	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	30 Lap	9.346.190.000			6 Dok	1.869.238.000	4	1.026.914.200	67	55	4	1.026.914.200	13	11
41	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan kinerja DPRD	1 Lap				1 Lap	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)			100 %	121.771.761.980			100 %	27.606.850.796	61,91	11.837.329.269	61,91	42,88	61,91	11.837.329.269	61,91	9,72
Predikat Kinerja											R	SR			R	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			73,85				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja		: Adanya komitmen Pimpinan dalam mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui upaya - upaya peningkatan kualitas pelayanan prima dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD secara administratif : Tersedianya regulasi perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tugas - tugas : Tersedianya anggaran yang memadai														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		: Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur : Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas - tugas														
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan meningkatkan kinerja														
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutn		: -														

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	12.218.358.500			100 %	2.421.860.700	52,63	1.245.115.880	52,63	51,41	11,58	1.245.115.880	11,58	10,19
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %		15,00		15,00		3,00		3,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %		0,00		0,00		18,13		18,13	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi	100 %				100 %		0,00		0,00		7,69		7,69	
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95 dok	96.618.000			19 dok	19.323.600	11	19.323.600	57,89	100,00	11	19.323.600	11,58	20,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	52.792.500			12 Dok	10.558.500	6	10.558.500	50,00	100,00	6	10.558.500	10,00	20,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Lap	43.825.500			7 Lap	8.765.100	5	8.765.100	71,43	100,00	5	8.765.100	14,29	20,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	10.781.515.500			100 %	2.156.303.100	0,00	1.138.708.440	0,00	52,81	19	1.138.708.440	19,33	10,56
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Org/bln	10.423.265.500			29 Org/bln	2.084.653.100	29,00	1.107.095.440	100,00	53,11	29	1.107.095.440	20,00	10,62
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	358.250.000			1 Dok	71.650.000	-	31.613.000	-	44,12	-	31.613.000	-	8,82
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	55.800.000			100 %	11.160.000	-	3.400.000	-	30,47	-	3.400.000	-	6,09
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dok	55.800.000			1 Dok	11.160.000	-	3.400.000	-	30,47	-	3.400.000	-	6,09
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	705.260.000			100 %	122.214.000	15,00	29.722.700	15,00	24,32	3,00	29.722.700	3,00	4,21
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.865.000			1 Paket	1.973.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	348.175.000			13 Paket	69.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	50.150.000			3 Paket	10.030.000	3	10.030.000	100,00	100,00	3	10.030.000	20,00	20,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	28.490.000			2 Paket	5.698.000	-	2.500.000	-	43,88	-	2.500.000	-	8,78

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	268.580.000			1 Lap	34.878.000	-	17.192.700	-	49,29	-	17.192.700	-	6,40
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	329.975.000			100 %	65.995.000	-	31.046.890	-	47,04	-	31.046.890	-	9,41
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Lap	329.975.000			1 Lap	65.995.000	-	31.046.890	-	47,04	-	31.046.890	-	9,41
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	130 Unit	249.190.000			26 Unit	46.865.000	0,00	22.914.250	0,00	48,89	7,69	22.914.250	5,92	9,20
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	224.860.000			15 unit	41.999.000	8,00	22.414.250	53,33	53,37	8	22.414.250	10,67	9,97
13	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	15.000.000			10 unit	3.000.000	2,00	500.000	20,00	16,67	2	500.000	4,00	3,33
14	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	9.330.000			1 unit	1.866.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	4.418.474.500			100 %	691.790.300	52,38	238.760.100	52,38	34,51	14	238.760.100	14,29	5,40
		Persentase data pembangunan daerah yang terupdate	100 %				100 %		-		-		-		-	
		Persentase pemenuhan kegiatan movev untuk perencanaan pembangunan daerah	100 %				100 %		0,00		0,00		13		12,50	
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	105 Dok	3.255.459.000			21 Dok	552.695.900	15	204.552.400	71,43	37,01	15	204.552.400	14,29	6,28
15	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Berita Acara	80.046.250			1 Berita Acara	13.969.500	1	4.294.500	100,00	30,74	1	4.294.500	20,00	5,37
16	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20 Berita Acara	225.726.750			4 Berita Acara	34.920.000	2	18.036.000	50,00	51,65	2	18.036.000	10,00	7,99
17	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	10 Berita Acara	404.049.000			2 Berita Acara	63.151.000	1	46.068.200	50,00	72,95	1	46.068.200	10,00	11,40
18	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	55 Usulan	494.737.000			11 Usulan	58.097.400	11	58.097.400	100,00	100,00	11	58.097.400	20,00	11,74
19	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15 dok	2.050.900.000			3 dok	382.558.000	-	78.056.300	-	20,40	-	78.056.300	-	3,81
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	32 Lap	923.570.750			8 Lap	103.270.400	4	33.576.700	50,00	32,51	4	33.576.700	12,50	3,64

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	32 Lap	923.570.750			8 Lap	103.270.400	4	33.576.700	50,00	32,51	4	33.576.700	12,50	3,64
9	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	10 Dok	239.444.750			2 Dok	35.824.000	-	631.000	-	1,76	-	631.000	-	0,26
21	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	10 Dok	239.444.750			2 Dok	35.824.000	-	631.000	-	1,76	-	631.000	-	0,26
III	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA)	100 %	1.922.029.750			100 %	328.377.900	-	69.250.800	-	21,09	-	69.250.800	-	3,60
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA)	100 %				100 %		-		-		-		-	
		Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA)	89 %				85 %		-		-		-		-	
		Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	89 %				85 %		-		-		-		-	
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	20 Lap	819.987.750			4 Lap	142.150.700	-	29.177.650	-	20,53	-	29.177.650	-	3,56
22	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	5 Lap	74.998.500			1 Lap	12.923.700	-	7.875.700	-	60,94	-	7.875.700	-	10,50
23	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Lap	164.855.000			1 Lap	25.325.500	-	9.556.100	-	37,73	-	9.556.100	-	5,80
24	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	5 Lap	74.982.000			1 Lap	12.765.500	-	5.345.000	-	41,87	-	5.345.000	-	7,13
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Lap	505.152.250			1 Lap	91.136.000	-	6.400.850	-	7,02	-	6.400.850	-	1,27

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	20 Lap	542.306.500			4 Lap	93.392.350	-	12.817.300	-	13,72	-	12.817.300	-	2,36
26	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	5 Lap	49.999.000			1 Lap	9.924.800	-	1.299.800	-	13,10	-	1.299.800	-	2,60
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Lap	258.942.250			1 Lap	44.341.050	-	5.365.050	-	12,10	-	5.365.050	-	2,07
28	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	5 Lap	49.997.250			1 Lap	9.383.450	-	758.450	-	8,08	-	758.450	-	1,52
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Lap	183.368.000			1 Lap	29.743.050	-	5.394.000	-	18,14	-	5.394.000	-	2,94
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	20 Lap	559.735.500			4 Lap	92.834.850	-	27.255.850,00	-	29,36	-	27.255.850	-	4,87
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	5 Lap	50.000.000			1 Lap	10.000.000	-	4.525.000	-	45,25	-	4.525.000	-	9,05
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Lap	152.861.000			1 Lap	24.944.400	-	8.329.400	-	33,39	-	8.329.400	-	5,45
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	5 Lap	49.999.000			1 Lap	9.918.600	-	243.600	-	2,46	-	243.600	-	0,49

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Lap	306.875.500			1 Lap	47.971.850	-	14.157.850	-	29,51	-	14.157.850	-	4,61
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %	8.448.054.250			100 %	1.330.860.650	-	190.296.660	-	14,30	-	190.296.660	-	2,25
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerpan inovasi daerah	100 %				100 %		-		-		-		-	
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	7.176.361.750			100 %	1.074.685.350	-	174.337.035	-	16,22	-	174.337.035	-	2,43
34	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Lap	2.940.548.750			1 Lap	383.235.750	-	71.414.075	-	18,63	-	71.414.075	-	2,43
35	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	5 Lap	481.247.750			1 Lap	48.382.550	-	6.327.500	-	13,08	-	6.327.500	-	1,31
36	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang di tertibkan	20 Rekom	2.467.204.000			4 Rekom	431.555.800	-	51.416.000	-	11,91	-	51.416.000	-	2,08
37	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	20 Lap	1.287.361.250			4 Lap	211.511.250	-	45.179.460	-	21,36	-	45.179.460	-	3,51
14	Penelitian dan pengembangan bidang Sosial & Kependudukan	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	119.846.000			100 %	92.437.000	-	4.925.000	-	5,33	-	4.925.000,00	-	4,11
38	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dok	119.846.000			1 Dok	92.437.000	-	4.925.000	-	-	-	4.925.000	-	4,11
39	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	1 Dok	119.846.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata	1 Dok	119.846.000				-			-					
41	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	1 Dok	119.846.000				-			-					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
42	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	1 Dok	119.846.000				-			-					
15	Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase implementasi rencana inovasi dan teknologi	100 %	1.151.846.500			100 %	163.738.300	-	11.034.625	-	6,74	-	11.034.625	-	0,96
43	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	25 Lap	1.151.846.500			5 Lap	163.738.300	-	11.034.625	-	6,74	-	11.034.625	-	0,96
V	PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase pemenuhan perencanaan dan fasilitasi program pengelolaan perbatasan	100 %	139.735.805			100 %	13.137.850	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan	5 dok	139.735.805			1 dok	13.137.850	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah rencana aksi pembangunan Kawasan perbatasan yang disusun	5 dok	139.735.805			1 dok	13.137.850	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)			100 %	27.146.652.805			100 %	4.786.027.400	45,86	1.743.423.440	45,86	36,43	9,31	1.743.423.440	9,31	6,42
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			58,43				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Disiplin Kerja													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja													
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			: Perlu Peningkatan Kinerja baik Perencanaan maupun pelaksanaan dalam melaksanakan semua rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah													

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100	%	256.448.537.738			100	51.289.707.548	42	6.561.348.499	42	13	42	6.561.348.499	42	3
		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%				100		10		10		10		10	
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	%				100		-		-		-		-	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	95	Doku men	642.010.000			19	128.402.000	8	68.550.775	42	53	8	68.550.775	8	11
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	Doku men	331.760.000			11	66.352.000	6	27.274.000	55	41	6	27.274.000	11	8
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lapor an	133.135.000			2	26.627.000	2	20.734.875	100	78	2	20.734.875	20	16
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Lapor an	177.115.000			6	35.423.000	2	20.541.900	33	58	2	20.541.900	7	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	253.646.417.088			100	50.729.283.418	3	6.254.693.349	3	12	3	6.254.693.349	3	2
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	Oran g	252.378.573.588			35	50.475.714.718	-	6.118.125.859	-	12	-	6.118.125.859	-	2
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3500	Doku men	1.213.525.000			700	242.705.000	126	125.877.860	18	52	126	125.877.860	4	10
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lapor an	54.318.500			1	10.863.700	1	10.689.630	100	98	1	10.689.630	20	20

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Doku men	203.465.000			100	40.693.000	-	35.943.000	-	88	-	35.943.000	-	18
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Doku men	203.465.000			1	40.693.000	-	35.943.000	-	88	-	35.943.000	-	18
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	%	1.253.755.150			100	250.751.030	26	136.027.247	26	54	26	136.027.247	26	11
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	269.259.450			2	53.851.890	1	51.022.153	50	95	1	51.022.153	10	19
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	222.600.700			1	44.520.140	-	24.212.994	-	54	-	24.212.994	-	11
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lapor an	761.895.000			20	152.379.000	11	60.792.100	55	40	11	60.792.100	11	8
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	222.000.000			100	44.400.000	-	21.119.850	-	48	-	21.119.850	-	10
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lapor an	222.000.000			1	44.400.000	-	21.119.850	-	48	-	21.119.850	-	10
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	480.890.500			100	96.178.100	-	45.014.278	-	47	-	45.014.278	-	9
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95	Unit	415.678.000			19	83.135.600	5	41.393.278	26	50	5	41.393.278	5	10
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	Unit	65.212.500			30	13.042.500	7	3.621.000	23	28	7	3.621.000	5	6
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	%	777.617.374.730			100	155.523.474.946	10	69.148.058.240	10	44	10	69.148.058.240	10	9
		Persentase Layanan Pentausahaan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100	%				100						-		-	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase Penyusunan dan Penyampaian LKPD sesuai SAP Tepat Waktu	100	%			100		2		2		2		2	
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Anggaran	100	%	6.114.330.000		100	1.222.866.000	20	334.403.711	20	27	20	334.403.711	20	5
14	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Doku men	519.980.000		2	103.996.000	-	6.442.005	-	6	-	6.442.005	-	1
15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Doku men	564.475.000		2	112.895.000	-	15.796.700	-	14	-	15.796.700	-	3
16	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	230	Doku men	446.665.000		46	89.333.000	-	33.570.000	-	38	-	33.570.000	-	8
17	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	230	Doku men	716.095.000		46	143.219.000	-	37.958.265	-	27	-	37.958.265	-	5
18	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	230	Doku men	95.870.000		46	19.174.000	46	1.499.000	100	8	46	1.499.000	20	2
19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	230	Doku men	84.950.000		46	16.990.000	-	1.234.506	-	7	-	1.234.506	-	1
20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Doku men	1.397.370.000		2	279.474.000	2	37.294.018	100	13	2	37.294.018	20	3
21	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	20	Doku men	1.890.670.000		4	378.134.000	-	175.766.740	-	46	-	175.766.740	-	9
22	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	10	Doku men	57.330.000		2	11.466.000	-	4.080.000	-	36	-	4.080.000	-	7
23	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	Doku men	208.585.000		2	41.717.000	-	19.653.477	-	47	-	19.653.477	-	9
24	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10	Doku men	47.325.000		2	9.465.000	-	324.000	-	3	-	324.000	-	1

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
25	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	230	Orang	85.015.000			46	17.003.000	-	785.000	-	5	-	785.000	-	1
8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	100	%	2.345.267.500			100	469.053.500	8	185.183.983	8	39	8	185.183.983	8	8
26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25000	Dokumen	1.017.850.000			5000	203.570.000	1.038	82.794.567	21	41	1.038	82.794.567	4	8
27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1000	Dokumen	305.940.000			200	61.188.000	80	27.898.518	40	46	80	27.898.518	8	9
28	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	25	Dokumen	208.772.500			5	41.754.500	-	7.595.030	-	18	-	7.595.030	-	4
29	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1080	Dokumen	358.885.000			216	71.777.000	60	45.290.540	28	63	60	45.290.540	6	13
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180	Dokumen	306.500.000			36	61.300.000	16	20.816.848	44	34	16	20.816.848	9	7
31	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	130	Dokumen	147.320.000			26	29.464.000	12	788.480	46	3	12	788.480	9	1

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	2.621.438.750			100	524.287.750	4	203.250.638	4	39	4	203.250.638	4	8
32	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5	Laporan	299.525.000			1	59.905.000	-	33.058.000	-	55	-	33.058.000	-	11
33	Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5	Dokumen	87.240.000			1	17.448.000	1	17.072.000	100	98	1	17.072.000	20	20
34	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	5	Laporan	395.095.000			1	79.019.000	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10	Laporan	629.073.750			2	125.814.750	2	85.304.158	100	68	2	85.304.158	20	14
36	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dokumen	955.230.000			2	191.046.000	2	48.391.480	100	25	2	48.391.480	20	5
37	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	230	Orang	255.275.000			46	51.055.000	-	19.425.000	-	38	-	19.425.000	-	8
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	100	%	766.303.002.230			100	153.260.600.446	-	68.425.219.908	-	45	-	68.425.219.908	-	9
38	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	710	Laporan	733.731.818.500			142	146.746.363.700	-	68.365.278.908	-	47	-	68.365.278.908	-	9

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan	16.500.000.000			1	3.300.000.000	1	59.941.000	100	2	1	59.941.000	20	0
40	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	560	Desa	16.071.183.730			112	3.214.236.746	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	233.336.250			100	46.667.250	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Dokumen	233.336.250			1	46.667.250	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penetapan SSH Tepat Waktu	100	%	2.233.308.000			100	446.661.600	-	167.456.694	-	37	-	167.456.694	-	7
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	%				100		17		17		17		17	
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	100	%	2.233.308.000			100	446.661.600	16	167.456.694	16	37	16	167.456.694	16	7
42	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen	502.980.000			1	100.596.000	-	47.156.534	-	47	-	47.156.534	-	9
43	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Laporan	379.860.000			1	75.972.000	-	39.853.868	-	52	-	39.853.868	-	10
44	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	25	Laporan	260.805.000			5	52.161.000	-	3.772.500	-	7	-	3.772.500	-	1
45	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Laporan	199.175.000			1	39.835.000	-	2.825.000	-	7	-	2.825.000	-	1
46	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	25	Laporan	151.118.000			5	30.223.600	-	11.046.100	-	37	-	11.046.100	-	7

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
47	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50	Doku men	263.650.000			10	52.730.000	4	9.494.000	40	18	4	9.494.000	8	4
48	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Lapor an	296.240.000			1	59.248.000	-	45.520.404	-	77	-	45.520.404	-	15
49	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	Lapor an	179.480.000			1	35.896.000	-	7.788.288	-	22	-	7.788.288	-	4
Rata-rata capaian kinerja (%)					1.036.299.220.468				207.259.844.094		75.876.863.433	26,12	36,64		75.876.863.433	5,22	7,33
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		39,77					

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja

: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Badan Pendapatan untuk menyukkseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

: Terkendala dengan belum optimal dalam realisasi pengeluaran

Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran

Tindakanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya

:

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	75,02 %	31.408.908.354			100	6.019.860.369	33	1.924.031.440	33	32	17	1.924.031.440	22	6
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	5,55 %													
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	21,59 %													
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100,00 %													
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95 Dokumen	300.313.631			19	58.872.915	7	16.735.245	37	28	7	16.735.245	7	6
1	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,00 Dokumen	269.035.950			12	52.741.510		16.735.245	0	32	0	16.735.245	0	6
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,00 Laporan	31.277.681			7	6.131.405		-	0	0	0	-	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	24.415.629.154		-	100	4.784.225.525	21	1.767.755.358	21	37	11	1.767.755.358	11	7
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	239,00 Org/Bln	24.079.934.453			46	4.720.625.525		1.751.855.358	0	37	0	1.751.855.358	0	7
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	11,00 Dokumen	335.694.701			7	63.600.000		15.900.000	0	25	0	15.900.000	0	5
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	134.513.690		-	100	26.370.000	100	2.400.000	100	9	50	2.400.000	50	2
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25,00 Dokumen	134.513.690			5	26.370.000	5	2.400.000	100	9	5	2.400.000	20	2
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	2.575.204.014		-	100	368.627.169	0	27.450.000	0	7	0	27.450.000	0	1
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	140.000.000			-	-		-	0	0	0	-	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	32,00	Pake t	544.093.734			-	-		-	0	0	0	-	0	0
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10,00	Pake t	640.779.804			2	125.618.700		27.450.000	0	22	0	27.450.000	0	4
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10,00	Pake t	975.173.421			1	191.173.469		-	0	0	0	-	0	0
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,00	Lapo ran	275.157.055			8	51.835.000		-	0	0	0	-	0	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	187.524.128			100	37.651.000	38	14.445.285	38	38	19	14.445.285	19	8
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Lapo ran	1.105.000			1	1.105.000		-	0	0	0	-	0	0
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	Lapo ran	186.419.128			12	36.546.000		14.445.285	0	40	0	14.445.285	0	8
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100	%	3.795.723.737		-	100	744.113.760	4	95.245.552	4	13	2	95.245.552	2	3
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126,00	Unit	717.102.781			31	140.581.260		92.470.552	0	66	0	92.470.552	0	0
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	41,00	Unit	18.017.950			10	3.532.500		-	0	0	0	-	0	0
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	15,00	Unit	3.060.603.006			3	600.000.000		2.775.000	0	0	0	2.775.000	0	2
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	Persentase Realisasi Pajak Daerah	21,13	%	4.767.358.612		-	21,13	934.593.994	0	111.345.000	0	12	0	111.345.000	0	2
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lain-Lain	73,51	%				73,51									
		Persentase Realisasi PBB	5,36	%				5,36									
		Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi Pendapatan	1	OPD				1									
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	4.767.358.612		-	100	934.593.994	50	111.345.000	50	12	25	111.345.000	25	2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
16	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	60,00	Doku men			12	50.973.824	6	2.550.000	50	5	6	2.550.000	10	1	
17	pengolahan pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporaan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60,00	Lapo ran			12	383.334.717	6	44.075.000	50	11	6	44.075.000	10	2	
18	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60,00	Laya nan			12	195.893.928	6	12.670.000	50	6	6	12.670.000	10	1	
19	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60,00	Doku men			12	225.247.137	6	30.255.000	50	13	6	30.255.000	10	3	
20	Pembinaan dan Pengawasan Pengeloaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60,00	Lapo ran			12	79.144.388	6	21.795.000	50	28	6	21.795.000	10	5	
Rata-rata capaian kinerja (%)			36.176.266.965			-		6.954.454.363		2.035.376.440	19,44	16,36		2.035.376.440	3,89	2,62	
Predikat Kinerja										-		SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			47,317					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Badan Pendapatan untuk menyuksekkan rencana kerja yang sudah ditetapkan														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :			: Terkendala dengan belum optimal dalam realisasi pengeluaran														
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran														
Tindakanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:														

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			9.289.288.590		-		4.309.221.868								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH		4.810.266.684		-		2.078.065.863			-	-	-	-	-	-
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		71.077.500		-		34.538.750			-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokum en	51.000.000	-	-	11	25.000.000	7	4.680.000	64	19	7	4.680.000	32	9
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Lapora n	20.077.500	-	-	7	9.538.750	5	4.206.000	71	44	5	4.206.000	36	21
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		4.167.182.252		-		1.961.008.463			-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Bulan	4.031.372.252	-	-	12	1.894.603.463	6	975.684.847	50	51	6	975.684.847	25	24
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokum en	135.810.000	-	-	12	66.405.000	6	21.493.000	50	32	6	21.493.000	25	16
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu		29.500.000		-		13.500.000			-	-	-	-	-	-
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokum en	29.500.000	-	-	12	13.500.000	6	4.456.000	50	33	6	4.456.000	25	15
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah		418.785.932		-		55.818.650			-	-	-	-	-	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	53.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	61.791.370	-	-	12	30.395.000	6	4.127.000	50	14	6	4.127.000	25	7
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	52.388.562	-	-	12	25.423.650	6	3.177.600	50	12	6	3.177.600	25	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Lapora n	251.606.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.400.000		-		13.200.000			-	-	-	-	-	-
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Lapora n	26.400.000	-	-	12	13.200.000	6	5.399.200	-	-	6	5.399.200	25	20
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		97.321.000		-		-			-	-	-	-	-	-
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	97.321.000	-	-	-	-	6	8.168.000	-	-	6	8.168.000	27	8
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		3.611.772.793		-		1.779.216.325			-	-	-	-	-	-
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian		415.029.654		-		202.222.273			-	-	-	-	-	-
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokum en	32.854.066	-	-	1	16.426.150	1	268.400	100	2	1	268.400	50	1
16	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	238 Dokum en	317.068.574	-	-	119	154.743.200	-	78.081.400	-	50	-	78.081.400	-	25
17	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	140 Dokum en	40.601.802	-	-	70	18.800.632	52	2.110.100	74	11	52	2.110.100	37	5
18	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	238 Dokum en	24.505.212	-	-	119	12.252.291	49	2.376.500	41	19	49	2.376.500	21	10
9	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		567.862.729		-		272.446.274			-	-	-	-	-	-
19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Lapora n	106.703.439	-	-	450	43.366.920	75	4.004.600	17	9	75	4.004.600	8	4
20	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokum en	461.159.290	-	-	100	229.079.354	-	505.200	-	0	-	505.200	-	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
10	Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN		2.544.331.550		-		1.272.164.478			-	-	-	-	-	-
21	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya rapat kerja musawarah Kabupaten	2 Orang	81.193.432	-	-	1	40.596.000	-	481.800	-	1	-	481.800	-	1
22	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokum en	59.998.834	-	-	1	29.999.165	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	58 Dokum en	2.403.139.284	-	-	29	1.201.569.313	27	913.118.500	93	76	27	913.118.500	47	38
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		84.548.860		-		32.383.300			-	-	-	-	-	-
24	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	300 Dokum en	30.309.910	-	-	150	5.320.300	-	680.700	-	13	-	680.700	-	2
25	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Lapora n	54.238.950	-	-	10	27.063.000	-	6.068.200	-	22	-	6.068.200	-	11
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PENGEMBANGAN SDM ASN		867.249.113		-		451.939.680			-	-	-	-	-	-
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan penajangan struktural dan Diklat CPNS Daerah		867.249.113		-		451.939.680			-	-	-	-	-	-
26	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Orang	867.249.113	-	-	6	451.939.680	6	194.790.200	100	43	6	194.790.200	50	22
Rata-rata capaian kinerja (%)				9.289.288.590		-		4.309.221.868		2.233.877.247	30,01	16,79		2.233.877.247	16,94	9,09
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			87,68				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Inspektorat untuk menyukkseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan													
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana serta kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Perlu adanya peningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja oleh Bendahara Pengeluaran													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			: Akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala													

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100	%	22.418.324.870		100	3.540.321.961	10,7	1.654.086.847	10,67	46,72	100	1.654.086.847	100	7,38
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%		100	100		23,3		23,31		23,31		23,31	
		Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%												
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%												
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	95	dokumen	17.157.230		19	3.363.500	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	dokumen	8.587.542		12	1.683.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	laporan	8.569.688		7	1.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	20.554.721.717		47	3.196.318.591	3	1.537.630.347	6	48	3	1.537.630.347	3	7
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	256	Org/bulan	20.303.752.271		35	3.147.118.591	3	1.537.630.347	9	49	3	1.537.630.347	1	8
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	dokumen	250.969.446		12	49.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	18.363.618		12	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	laporan	18.363.618		12	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan	100	%	563.875.400		52	82.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	256	orang	563.875.400		52	82.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	570.532.873		38	111.847.150	17	25.537.000	45	23	17	25.537.000	17	4
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Pake t	6.677.216		1	1.309.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	318	Pake t	56.563.769		12	11.088.750	6	3.955.000	50	36	6	3.955.000	2	7
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	lapor an	380.106.489		9	74.516.000	5	13.537.000	56	18	5	13.537.000	11	4
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Pake t	94.743.006		12	18.573.400	6	8.045.000	50	43	6	8.045.000	30	8
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20	doku men	32.442.392		4	6.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	unit	283.972.949		4	55.670.000	4	55.650.000	100	100	4	55.650.000	25	20
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	283.972.949		4	55.670.000	4	55.650.000	100	100	4	55.650.000	20	20
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	108.390.226		24	28.412.800	6	7.604.500	25	27	6	7.604.500	6	7
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lapo ran	4.636.814		12	909.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	lapor an	103.753.413		12	27.503.800	6	7.604.500	50	28	6	7.604.500	10	7
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	48	unit	301.310.857		12	59.068.920	9	27.665.000	75	47	9	27.665.000	19	9
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	256.600.548		11	50.303.920	8	18.900.000	73	38	8	18.900.000	20	7
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	44.710.309		1	8.765.000	1	8.765.000	100	100	1	8.765.000	100	20
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK	6	tem uan	4.707.888.825		5	1.404.413.769	-	259.347.000	-	18		259.347.000	-	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
		Persentase Review dokumen Perangkat Daerah (RKA, RENSTRA, LKIP, DAK dan dokumen lainnya)	100	%											-	
		Persentase Review dokumen pemerintah Daerah (RKPD, Perubahan RKPD, RPJPD, RPJMD, LKPJ, LPPD, LKIP, KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan dan dokumen lainnya)	100	%												
		Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	3	Leve I												
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP	3	Leve I												
		Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang Profesional	100	%												
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	100	%												
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	100	%												
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	4.007.805.575		125	1.067.910.669	48	186.410.000	38	17	48	186.410.000	48	5
17	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30	Lap	753.369.470		6	147.690.400	4	70.380.000	67	48	4	70.380.000	13	9
18	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	170	Lap	733.868.838		81	433.252.769	21	30.260.000	26	7	21	30.260.000	12	4
19	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10	Lap	169.210.538		2	33.172.000	1	14.620.000	50	44	1	14.620.000	10	9
20	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	55	Lap	766.074.033		11	150.181.000	7	32.810.000	64	22	7	32.810.000	13	4
21	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50	Lap	292.410.020		11	50.160.000	8	-	73	-	8	-	16	-
22	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	50	Kese paka tan	589.655.775		10	115.596.000	6	11.310.000	60	10	6	11.310.000	12	2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
23	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	Doku men			4	137.858.500	1	27.030.000	25	20	1	27.030.000	5	4	
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	%			50	336.503.100	12	72.937.000	24	22	12	72.937.000	12	10	
24	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	50	Lap			10	4.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	Lap			40	332.293.100	12	72.937.000	30	22	12	72.937.000	12	11	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Nilai Integritas Pencegahan Korupsi	78	%			70	6.828.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	5	Keg			1	6.828.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg			1	6.828.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)				27.161.045.908					4.951.564.230		1.913.433.847	33,88	38,64		1.913.433.847	11,1	4,7
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR	
									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			51,87					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kemauan dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Inspektorat untuk menyukseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kurangnya sarana dan prasarana serta kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Inspektorat																	
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu adanya peningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat																	
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala																	

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOBALAIN																	
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya sarana dan prasarana Kantor-	100	%	18.049.964.190			100	3.614.290.838	25	1.824.157.464	25	50,47	25	1.824.157.464	25,00	10,11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75	Dok	213.680.000			15	42.736.000	2	27.407.000	13,33	64,13	2	27.407.000	2,67	12,83
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Dok	193.280.000			10	38.656.000	5	26.747.000	50,00	69,19	5	26.747.000	10,00	13,84
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	25	Lap	20.400.000			5	4.080.000	5	660.000	100,00	16,18	5	660.000	20,00	3,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	17.452.746.690			100	3.490.549.338	25	1.757.161.864	25,00	50,34	25	1.757.161.864	25,00	10,07
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.820	Org	17.218.746.690			47	3.443.749.338	6	1.737.661.864	13	50,46	6	1.737.661.864	0,21	10,09
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	234.000.000			1	46.800.000	1	19.500.000	100,00	41,67	1	19.500.000	20,00	8,33
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkatat daerah	100	%	4.800.000			100	4.800.000	25	1.200.000	25,00	25,00	25	1.200.000	25,00	25,00
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	4.800.000			1	4.800.000	1	1.200.000	100,00	25,00	1	1.200.000	20,00	25,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	100	%	121.930.000			100	24.824.000	25	17.983.600	25,00	72,44	25	17.983.600	25,00	14,75

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
6	Penyediaan komponen intsalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	5	paket	2.190.000		1	438.000	1	438.000	100,00	100,00	1	438.000	20,00	20,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	paket	51.450.000		1	10.290.000	1	6.174.000	100,00	60,00	1	6.174.000	200,00	12,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	31.780.000		1	6.356.000	1	3.813.600	100,00	60,00	1	3.813.600	20,00	12,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Lap	38.700.000		4	7.740.000	2	7.558.000	50,00	97,65	2	98	10,00	0,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan Pemerintahan daerah	100	%	25.662.500		100	5.132.500	25	400.000	25,00	7,79	25	400.000	25,00	1,56
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	20	Lap	25.662.500		4	5.132.500	2	400.000	50,00	7,79	2	400.000	10,00	1,56
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	%	231.145.000		4	46.249.000	1	20.005.000	25,00	43,25	1	20.005.000	25,00	8,65
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	231.245.000		4	46.249.000	2	20.005.000	50,00	43,25	2	20.005.000	10,00	8,65
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	64.362.500		100	12.872.500	50	10.742.500	50,00	83,45	50	10.742.500	50,00	16,69
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanannya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	100	%	64.362.500		100	12.872.500	50	10.742.500	200,00	83,45	50	10.742.500	50,00	16,69

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
13	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75	Usulan			15	7.732.000	15	7.732.000	100,00	100,00	15	7.732.000	20,00	20,00
14	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap			1	5.140.500	1	3.010.500	100,00	58,56	1	3.010.500	20,00	11,71
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	100	%			100	32.540.000	25	13.140.000	25,00	40,38	25	13.140.000	25,00	8,08
8	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%			100	32.540.000	25	13.140.000	25,00	40,38	25	13.140.000	25,00	8,08
15	Sinergitas dengan Keplosian Negara Rebuplik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Keplosian Negara Rebuplik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25	Lap			5	22.170.000	4	13.140.000	80,00	59,27	4	13.140.000	16,00	11,85
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%			100	12.285.000	25	1.967.000	25,00	16,01	25	1.967.000	25,00	3,20
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penugasan	5	Lap			1	12.285.000	1	1.967.000	100,00	16,01	1	1.967.000	20,00	3,20
16	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	Laporan			1	9.655.000	0	1.967.000	0,00	20,37	0	1.967.000	0,00	4,07
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100	%			100	24.701.000	25	9.801.600	25,00	39,68	25	9.801.600	25,00	7,94

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
10	Faslitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa	Presentasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa	100	%	123.505.000			100	24.701.000	25	9.801.600	25,00	39,68	25	9.801.600	25,00	7,94
17	Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFaslitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Lap	81.005.000			1	16.201.000	0	9.801.600	0,00	60,50	0	9.801.600	0,00	12,10
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	4.061.825.000			100	859.960.000	25	367.093.024	25,00	42,69	25	367.093.024	25,00	9,04
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanannya koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100	%	4.061.825.000			100	859.960.000	25	367.093.024	25,00	42,69	25	367.093.024	25,00	9,04
1	Kelurahan Metina		100	%	1.306.700.000			20	261.340.000	4	63.501.400	20,00	24,30	4	63.501.400	4,00	4,86
18	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	25	Lemba ga Kemas yaraka tan	113.925.000			5	22.785.000	5	29.120.000	100,00	127,80	5	29.120.000	20,00	25,56
19	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasaran yang terbangun	25	Paket	85.900.000			5	17.180.000	1	922.600	20,00	5,37	1	922.600	4,00	1,07
20	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	Pokma s/Orm as	878.100.000			5	175.620.000	2	27.300.000	40,00	15,54	2	27.300.000	8,00	3,11
21	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	25	Lap	228.775.000			5	45.755.000	2	6.158.800	40,00	13,46	2	6.158.800	8,00	2,69
2	Kelurahan Mokdale		100	%	1.553.000.000			100	310.600.000	25	153.875.000	25,00	49,54	25	153.875.000	25,00	9,91
22	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30	Lemba ga Kemas yaraka tan	108.037.500			6	21.607.500	2	18.607.500	33,33	86,12	2	18.607.500	6,67	17,22

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
23	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdyaan Masyarakat di Kelurahan	35	Pokmas/Ormas	1.203.500.000			7	240.700.000	5	123.580.000	71,43	51,34	5	123.580.000	14,29	10,27
24	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	15	Lap	241.462.500			3	48.292.500	1	11.687.500	33,33	24,20	1	11.687.500	6,67	4,84
3	Kelurahan Namodale		100	%	1.202.125.000			100	288.020.000	25	149.716.624	25,00	51,98	25	149.716.624	25,00	12,45
25	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25	Lemba ga Kemas yarakatan	77.200.000			5	15.440.000	4	14.760.000	80,00	95,60	4	14.760.000	16,00	19,12
26	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasaran yang terbangun	25	Paket	237.975.000			5	47.595.000	2	47.145.000	40,00	99,05	2	47.145.000	8,00	19,81
27	Pemberdyaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdyaan Masyarakat di Kelurahan	25	Pokmas /Ormas	827.125.000			5	165.425.000	2	68.222.624	40,00	41,24	2	68.222.624	8,00	8,25
28	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	25	Lap	297.800.000			5	59.560.000	3	19.589.000	60,00	32,89	3	19.589.000	12,00	6,58
Rata-rata capaian kinerja (%)					22.523.781.690				4.556.649.338		2.226.901.588	60,39	52,79	2,79	2.226.901.588	18,42	8,47
Predikat Kinerja											R	R			SR	SR	
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		70,98						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :						adanya kemauan dan dedikasi personalia menyelesaikan dan menyukkseskan Renja yang di tetapkan											
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :						rendahnya SDM dan masi kurang PNS pada Kecamatan Lobalain											
Tindakanlajut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :						Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja											
Tindakanlajut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :						Perlu adanya peningkatan SDM aparatur baik dari kualitas maupun kuantitas											

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN ROTE BARAT LAUT																		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	11.141.886.679			25		2.216.227.758	0	993.215.820				993.215.820		
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100															
		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100															
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100															
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	Dokumen	126.002.000			17	dok	16.159.750		3.400.000		21		3.400.000		3
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85	Dokumen	126.002.000			17	dok	16.159.750		3.400.000	-	21	-	3.400.000	-	3
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	10.542.450.609			100	%	2.109.021.208		466.248.070				466.248.070		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.030	Org/Bln	10.222.283.541			406	org/bln	2.048.741.208	232	464.948.070	57	23	232	464.948.070	11	5
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	320.167.068			1	dok	60.280.000	1	1.300.000	100	2	1	1.300.000	20	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100	%	48.192.000			100	%	9.600.000		-		-		-		-
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	dokumen	48.192.000			1	dok	9.600.000		-						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100	%				100	%								
				163.608.389					30.903.800		30.903.800				30.903.800		
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	pake t				1	paket		11.530.000	1	11.530.000	100	100	1	11.530.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10	Pake t				2	paket		7.619.800		7.619.800	-	100	-	7.619.800
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lapo ran				1	lapo ran		11.754.000	1	11.754.000	100	100	1	11.754.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%				100	%		6.345.000		2.000.000				2.000.000
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	Lapo ran				1	lapo ran		6.345.000	2	2.000.000	200	32	2	2.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%				100	%		44.198.000		25.715.880	-			25.715.880
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25	Unit				5	unit		44.198.000		25.715.880				25.715.880
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100	%				100	%		21.645.200		15.865.200	-			15.865.200
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%				100	%		21.645.200		15.865.200	-			15.865.200

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lapo ran 1.403.476.902			1	lemb aga	12.645.200	1	12.645.200	100	100	1	12.645.200	20	1
11	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lapo ran 52.730.102			1	lapra n	9.000.000	1	3.220.000	100	36	1	3.220.000	20	6
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	CAKUPAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	100	% 33.124.800			100	% 8.240.000	4.420.000						4.420.000		-
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	% 33.124.800			100	% 8.240.000	4.420.000						4.420.000		
12	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	Dok men 33.124.800			1	lapor an	8.240.000	1	4.420.000	100	54	1	4.420.000	20	13
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	% 53.131.200			100	% 8.325.000	- 2.295.920				28		2.295.920		-
9	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	% 53.131.200			100	% 8.325.000									
13	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamat	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	Dok 53.131.200			1	dok 8.325.000	2.295.920			-	28		2.295.920		
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan perencanaan dan fasilitasi program pengelolaan perbatasan	100	% 51.326.828			100	% 9.682.000	9.682.000						9.682.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.		K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4			5			6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
10	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan																		
14	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	DOK		51.326.828				1	dok	9.682.000	1	9.682.000	100	100	1	9.682.000	20	19
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%		1.350.746.800				100	%	268.000.000		64.050.000				107.392.000		
11	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lem baga		358.307.500				1	lemb aga	11.616.000	1	64.050.000	100	551	1	107.392.000	20	30
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5	Pok mas/ orma s		629.275.800				1	Pok mas/ orma s	193.000.000	1	64.050.000	100	33	1	64.050.000	20	10
16	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	Lapo ran		363.163.500				1	Lapo ran	63.384.000	1	43.342.000	100	68	1	43.342.000	20	12
Rata-rata capaian kinerja (%)						14.086.423.311						2.532.119.958		1.132.870.940	53,57	37,15		1.132.870.940	10,71	5,65
Predikat Kinerja															R	SR			SR	SR
RENCANA ANGGARAN KAS												Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		46,60						
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Kecamatan Rote Barat Laut untuk menyukseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana serta kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Rote Barat Laut																	
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Perlu adanya peningkatan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Rote Barat Laut																		
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya		:																		

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	1.917.527.125		-	100	1.343.802.554								
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %													
		Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %													
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %													
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	64 Dokumen	57.696.856			12	-								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64 Dok	57.696.856			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %	1.762.329.049			12	1.267.722.554								
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Org/Bln	1.712.829.049			14	1.184.822.554	3	506.284.822	21	42,73	3	506.284.822	0,31	30
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	49.500.000			5	82.900.000	3	19.930.000	60	24,04	3	19.930.000	60	40
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah perangkat daerah tepat waktu	100 %	4.200.000			1	9.000.000								
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	5 Dokumen	4.200.000			12	9.000.000	3	-	25	-	3	-	60	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan umum perangkat daerah	100 %	49.387.220			100	31.145.000								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	10.728.220			10	12.300.000	3	3.000.000	30	24,39	3	3.000.000	30	28
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	16.059.000			5	18.845.000	3	10.051.000	60	53,34	3	10.051.000	60	63
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan	22.600.000			12	-	3	6.000.000	25	-	3	6.000.000	8	27
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	120 Laporan	16.766.000			120	11.235.000								
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	2.626.000			60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Laporan	14.140.000			60	11.235.000	-	4.950.000	-	44,06	-	4.950.000	-	35
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	30 Unit	27.148.000			30	24.700.000								
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	27.148.000			30	24.700.000	8	18.000.000	27	72,87	8	18.000.000	27	66
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksanannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	140 BA	18.569.241			140	12.074.000								
		Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	140 BA	18.569.241			140	12.074.000								
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	140 BA	18.569.241			140	12.074.000								
11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	140 BA	18.569.241			140	12.074.000	-	12.074.000	-	100	-	12.074.000	-	65
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	60 Laporan	9.210.257			60	10.200.000								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	60 Lapo ran	9.210.257			60	10.200.000								
12	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Lapo ran	9.210.257			60	10.200.000	-	6.950.000	-	68	-	6.950.000	-	75
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi	5 Lapo ran	10.100.000			5	19.380.000								
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Lapo ran	10.100.000			5	19.380.000								
13	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Lapo ran	10.100.000			5	19.380.000	4	19.380.000	80	100,00	4	19.380.000	1	192
Rata -rata Capaian Target Kinerja (%)				1.955.406.623				1.385.456.554	-	606.619.822	32,81	52,96	-	606.619.822	24,55	62,06
Predikat Kinerja											SR	R			SR	R
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			50,96				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja									: Semangart kerja aparatur Kecamatan Rote Barat Daya							
Faktor penghambat keberhasilan kinerja									: Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Rote Barat Daya							
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya									: Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja							
Tindakanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya									:							

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	6.949.946.635			100	1.389.989.327	25	676.902.010	25	49		676.902.010	0	10
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	210.500.000			100	42.100.000		15.690.000				15.690.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	90 Doku men	210.500.000			18	42.100.000	9	15.690.000	50	37	9	15.690.000	10	7
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.270.761.635			100	1.254.152.327	3	620.902.010				620.902.010		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Bulan	6.059.561.635			18	1.211.912.327	7	606.822.010	39	50	7	606.822.010	1	10
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 bulan	211.200.000			12	42.240.000	6	14.080.000,00	50	33	6	14.080.000,00	10	7
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	39.000.000			100	7.800.000	-	2.600.000,00			-	2.600.000,00		
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 bulan	39.000.000			12	7.800.000	4	2.600.000,00	33	33	4	2.600.000,00	7	7
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		200.170.000			100	40.034.000	25	17.352.000			25	17.352.000		
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	50.000.000			1	10.000.000	1	10.000.000,00	100	100	1	10.000.000,00	20	-
6	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 Bulan	26.865.000			12	5.373.000	3	1.497.000,00	25	28	3	1.497.000,00	5	6
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	120 Bulan	27.100.000			24	5.420.000	6	1.537.000	25	0	6	1.537.000	5	6
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 Bulan	96.205.000			110	19.241.000	3,00	4.318.000,00	2,73	22,44	3,00	4.318.000,00	1	4
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	58.380.000			24	11.676.000	6	5.346.000				5.346.000		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Bulan	15.730.000			12	3.146.000	6	3.146.000	50	100	6	3.146.000	10	20
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	42.650.000			12	8.530.000	6	2.200.000	50	26	6	2.200.000	10	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	171.135.000			6	34.227.000	6	15.012.000				15.012.000		
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	171.135.000			6	34.227.000	6	15.012.000	100	44	6	15.012.000	20	9
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	40.500.000			100	13.580.000	25	6.600.000				6.600.000		
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	40.500.000			100	13.580.000	25	6.600.000				6.600.000		
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	40 Usulan	40.500.000			8	8.100.000	3	6.600.000	38	81	3	6.600.000	8	16
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	15 Org	27.400.000			3	5.480.000		-	-	-	-	-	-	-
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN TERHADAP BANGUNAN LIAR MAUPUN BANGUNAN TIDAK BERIJIN PADA JALAN POROS KECAMATAN	100 %	51.000.000			100	10.200.000	-							
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	51.000.000			100	10.200.000	-							
14	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	51.000.000			12	10.200.000		-	-	-	-	-	-	-
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	49.125.000			100	9.825.000								
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	49.125.000			12	9.825.000								

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
V	15 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	Doku men	49.125.000			12	9.825.000		-	-		-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA	100	%	31.290.000			100	6.258.000	-	-			-		
	10 Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100	%	31.290.000			100	6.258.000	-	-			-		
	16 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pendayagunaan Aset Desa	35	Doku men	31.290.000			7	6.258.000	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)			7.121.861.635					1.429.852.327		683.502.010	40,17	39,67	6	683.502.010	7,52	6,91
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			65,14				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD kecamatan Rote Barat untuk menyuksekan rencana kerja																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Rote Barat																
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja																
Tindakanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Aparatur baik dalam aspek kualitas dan kuantitas yang dijabarkan dalam Renja OPD Kecamatan Rote Barat																

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan tepat waktu	100	%	8.519.111.504		100	1.255.842.582	26,04	645.199.876	26	51	26	645.199.876	26	8
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaain Perangkat Daerah	100	%			100									
		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%			100									
		Prsentase Barang milik Daerah dalam kondisi Baik	100	%			100									
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	90	Dok	947.500.000		18	7.078.500	4	5.830.000	22	82	4	5.830.000	4	1
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57	Dok	893.000.000		13	6.170.500	8	5.358.000	62	87	8	5.358.000	14	1
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Laporan	54.500.000		5	908.000	2	472.000	40	52	2	472.000	6	1
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	6.830.863.504		100	1.150.739.082	24	575.808.876	24	50	24	575.808.876	24	8
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang/Bulan	6.615.463.504		18	1.109.699.082	-	558.708.876	0	50	0	558.708.876	0	8
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	215.400.000		12	41.040.000	5	17.100.000	42	42	5	17.100.000	8	8
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	45.000.000		100	9.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Dokumen	45.000.000		12	9.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	351.500.000		32	48.514.000	82	43.963.500	257	91	82	43.963.500	82	13
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000		12	375.000	-	-	0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	17	Paket	143.000.000			5	39.915.000	5	39.915.000	100	100	5	39.915.000	29	28
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	87.000.000			12	6.009.000	6	3.611.000	50	60	6	3.611.000	10	4
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	28.000.000			1	2.215.000	-	437.500	0	20	0	437.500	0	2
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	Lap	68.500.000			2	-	-	-	0	0	0	-	0	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	32.250.000			24	5.794.000	23	2.664.000	95	46	23	2.664.000	23	8
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	6.750.000			12	497.000	6	497.000	50	100	6	497.000	10	7
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	25.500.000			12	5.297.000	9	2.167.000	75	41	9	2.167.000	15	8
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	68	Unit	311.998.000			12	34.717.000	19	16.933.500	158	49	19	16.933.500	28	5
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	34	Unit	296.865.000			6	33.967.000	2	16.933.500	33	50	2	16.933.500	6	6
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	15.133.000			6	750.000	-	-	0	0	0	0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	124.640.000			100	2.580.000	-	0	0	0	0	0	0	0
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%	124.640.000			45	2.580.000	-	0	0	0	0	0	0	0
15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	225	Laporan	124.640.000			45	2.580.000	-	-	0	0	0	0	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100	%	180.000.000			100	19.554.000	40	19.554.000	40	100	40	19.554.000	40	11

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	%	180.000.000			45	19.554.000	40	19.554.000	89	100	40	19.554.000	40	11
16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	157	Lembaga Kemasya rakatan	180.000.000			45	19.554.000	40	19.554.000	89	100	40	19.554.000	25	11
4	PRGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	CAKUPAN KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	269.790.000			100	17.242.500	3	7.065.000	3	41	3	7.065.000	3	3
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	269.790.000			12	17.242.500	3	7.065.000	25	41	3	7.065.000	3	3
17	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Laporan Sinergitas Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	Laporan	269.790.000			12	17.242.500	6	7.065.000	50	41	6	7.065.000	10	3
5	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	65.000.000			100	10.735.000	3	9.175.000	3	85	3	9.175.000	3	14
10	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	65.000.000			7	10.735.000	3	9.175.000	43	85		9.175.000	0	14
18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35	Dokumen	65.000.000			7	10.735.000	3	9.175.000	43	85	3	9.175.000	9	14
Rata-rata capaian kinerja (%)					9.158.541.504				1.305.954.082		680.993.876	35,18	46		680.993.876	7,93	5,59
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		87,38					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yg tinggi dari personalia yg ada pada OPD kecamatan Rote Selatan utk menyukkseskan rencana kerja yg sudah ditetapkan														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Kurang tersedianya sarana pendukung pekerjaan pada OPD Kecamatan Rote Selatan														
Tindakanljut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja														
Tindakanljut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:														

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ROTE TENGAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	9.544.676.000			100	%	2.014.127.328		820.621.492			820.621.492			
		Persentase Terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%				100	%									
		Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%				100	%									
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%				100	%									
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja perangkat daerah	80	Dokumen	259.815.000			16	Dokumen	29.570.000		16.782.000			16.782.000			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	Dokumen	230.454.000			11	Dokumen	24.570.000	8	16.782.000	73	68	8	16.782.000	15	7
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	25	Laporan	29.361.000			5	Laporan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	135	Orang/bulan	8.658.524.000			27	Orang/bulan	1.889.667.328		752.499.492			752.499.492			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang/bulan	8.412.024.000			23	Orang/bulan	1.841.167.328	-	752.499.492	-	41	0	752.499.492	-	9
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20	Dokumen	246.500.000			4	Dokumen	48.500.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	5	Dokumen	21.000.000			1	Dokumen	4.200.000		-			-			
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	21.000.000			1	Dokumen	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	60	Paket	350.140.000			12	Paket	46.288.000		32.885.000			32.885.000			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	5	Paket	19.000.000			1	Paket	2.086.000	1	2.086.000	100	100	1	2.086.000	20	11
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	Paket	93.375.000			1	Paket	3.500.000	1	3.500.000	100	100	1	3.500.000	20	4
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	Paket	78.077.000			1	Paket	14.000.000	1	8.667.000	100	62	1	8.667.000	20	11
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	Paket	50.428.000			1	Paket	7.622.000	-	3.316.000	-	44	-	3.316.000	-	7

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	109.260.000			8	Laporan	19.080.000	3	15.316.000	38	80	3	15.316.000	8	14
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	10	Laporan	82.238.000			2	Laporan	14.310.000		6.860.000				6.860.000		
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Laporan	12.818.000			1	Laporan	2.210.000	1	2.210.000	100	100	1	2.210.000	20	17
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	Laporan	69.420.000			1	Laporan	12.100.000	1	4.650.000	100	38	1	4.650.000	20	7
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	40	Unit	172.959.000			12	Unit	30.092.000		11.595.000				11.595.000		
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30	Unit	134.204.000			6	Unit	23.592.000	3	9.595.000	50	41	3	9.595.000	10	7
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	5	Unit	20.635.000			5	Unit	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	18.120.000			1	Unit	2.000.000	1	2.000.000	100	100	1	2.000.000	20	11
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksanannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	1.846.623.000			100	%	300.140.000		118.150.000				118.150.000		
		Terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	100	%			100	%										
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	142.123.000			100	%	17.400.000		13.730.000				13.730.000		
16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	Lembaga Kemasyar akatan	89.573.000			8	Lembaga Kemasyar akatan	13.730.000	8	13.730.000	100	100	8	13.730.000	20	15
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	Laporan	52.550.000			8	Laporan	3.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	140	Lembaga Kemasyar akatan	1.704.500.000			28	Lembaga Kemasyar akatan	282.740.000		104.420.000				104.420.000		
18	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	Lembaga Kemasyar akatan	250.000.000			8	Lembaga Kemasyar akatan	21.840.000	4	21.770.000	50	100	4	21.770.000	10	9
19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40	Pokmas/ Ormas	1.079.500.000			8	Pokmas/ Ormas	215.900.000	4	82.650.000	50	38	4	82.650.000	10	8

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
20	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	60	Laporan	375.000.000			12	Laporan	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
III	COORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	40	Laporan	45.412.500			8	Laporan	2.600.000		-			-			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	40	Laporan	45.412.500			8	Laporan	2.600.000		-			-			
21	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40	Laporan	45.412.500			8	Laporan	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	
IV	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi	5	Dokumen	50.300.000			1	Dokumen	750.000		-			-			
10	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	Dokumen	50.300.000			1	Dokumen	750.000		-			-			
22	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dokumen	50.300.000			1	Dokumen	750.000	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)					11.487.011.500			100		2.317.617.328	25,49	938.771.492	25,49	40,51	62,75	938.771.492	62,75	8,17
Predikat Kinerja												SR	SR			R	SR	
Rencana Anggaran Kas											Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			50,12				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD kecamatan Rote Tengah untuk menyuksekkan rencana kerja yang sudah ditetapkan															
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Rote Tengah															
Tindakanlajut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja															
Tindakanlajut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:															

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANTAI BARU

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	11.117.795.956			100	2.328.387.393	18	827.882.182	18	36	18	827.882.182	18	7
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian	100	%				100									
		Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		%													
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%													
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95	Dok	263.353.625			100	20.230.000	17	10.200.000	17	50	17	10.200.000	18	4
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dok	253.779.110			18	20.230.000	3	10.200.000	17	50	17	10.200.000	28	4
2	Evaluasi kinerja persngkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	35	Laporan	9.574.515			100	-	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prrsentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100	%	9.743.669.413			29	2.221.457.443	3	785.443.182	10	35	10	785.443.182	10	8
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Org/Bl n	9.433.241.361			12	2.174.657.443	3	785.443.182	25	36	25	785.443.182	17	8
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	310.428.052			100	46.800.000	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi BMD perangkat daerah tepat waktu	100	%	56.834.075			12	11.520.000	-	0	0	0	0	0	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	56.834.075			100	11.520.000	0	0	0	0	0	0	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan pelayanan umum perangkat daerah	100	%	514.861.064			12	40.827.950	20	20.459.000	163	50	163	20.459.000	163	4
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.315.498			-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	65	paket	373.922.634			-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	56.219.913			100	14.249.000	35	8.000.000	35	56	35	8.000.000	234	14
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	34.095.029			12	11.170.950	3	5.000.000	25	45	25	5.000.000	250	15
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	39.307.990			100	15.408.000	0	7.459.000	0	48	0	7.459.000	-	19
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	289.856.966			13	12.240.000	-	1.780.000	0	15	0	1.780.000	-	1
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	289.856.966			100	12.240.000	6	1.780.000	6	15	6	1.780.000	129	1
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100	%	249.220.813			100	22.112.000	23	10.000.000	23	45	23	10.000.000	23	4
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75	Unit	249.220.813			100	22.112.000	23	10.000.000	23	45	23	10.000.000	30	4

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	%	134.765.915			4	1.700.000	2	850.000	50	50	50	850.000	50	1
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penugasan	0	%	134.765.915			4	1.700.000	2	850.000	50	50	50	850.000	50	1
13	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi	20	Dok	134.765.915			4	1.700.000	2	850.000	50	50	50	850.000	250	1
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	100	%	1.434.370.663			100	280.270.000		122.062.000	0	44	0	122.062.000	-	9
8	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentae pemberdayaan desa	100	%	509.025.736			100	35.870.000		15.580.000	0	43	0	15.580.000	-	3
14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	125	lemba ga	256.294.129			25	24.360.000		14.560.000	0	60	0	14.560.000	-	6
15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	125	orang	252.731.607			25	11.510.000		1.020.000	0	9	0	1.020.000	-	0
9	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentae pemberdayaan kelurahan	100	%	925.344.927			100	244.400.000		106.482.000	0	44	0	106.482.000	-	12
16	Sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	500	Unit	147.551.172			100	29.158.000		29.158.000	0	100	0	29.158.000	-	20
17	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	265	Lapora n	524.773.705			45	140.242.000		77.324.000	0	55	0	77.324.000	-	15
18	Evaluasi kelurahan	Jumlah hasil evaluasi kelurahan	45	Lap	253.020.050			45	75.000.000		0	0	0	0	0	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	100	%	34.324.700			100	6.660.050		-	0	0	0	0	-	-	
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	%	34.324.700			100	6.660.050		-	0	0	0	0	-	-	
19	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	34.324.700			28	6.660.050	-	0	0	0	0	0	-	-	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	75.000.000			100	9.860.000	5	3.400.000	5	34	5	3.400.000	5	5	
11	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15	Dok	75.000.000			100	9.860.000	5	3.400.000	5	34	5	3.400.000	33	5	
20	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75	dok	75.000.000			15	9.860.000	5	3.400.000	33	34	33	3.400.000	44	5	
Rata-rata capaian kinerja (%)					12.796.257.234				100	2.626.877.443	18	954.194.182	10,71	27,77	0	954.194.182	49,12	4,58
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR	
Rencana Anggaran Kas									44,40	1.087.581.688	Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		45,27					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah															
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan pelaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan															
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/ dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja															
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:															

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LANDULEKO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4				6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%	3.989.207.690		100	882.732.690	25	422.952.159	25	48	0	412.952.159	0	10
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja perangkat daerah	100	%	87.043.750		100	17.408.750	26	4.488.150	26	26	0	4.488.150	0	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	Dok	45.003.000		11	9.000.600	4	2.540.000	36	28	4	2.540.000	7	6
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	35	Dok	42.040.750		7	8.408.150	2	1.948.150	29	23	2	1.948.150	6	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	3.365.474.940		100	765.714.940	24	387.138.009	24	51	0	387.138.009	0	12
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang	3.172.994.940		8	728.574.940	2	387.138.009	25	53	2	387.138.009	5	12
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	192.480.000		1	37.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100	%	39.600.000		100	3.600.000	-	0	0	0	0	0	0	0
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD SKPD	5	Dok	39.600.000		1	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100	%	346.912.000		100	59.992.000	33	20.021.000	33	33	0	10.021.000	0	3
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapn Kantor	Jumlah peralatan Kantor	4	unit	130.000.000			10.000.000	100	10.000.000				10.000.000		
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	60	Bulan	70.040.000		1	13.000.000	-	3.724.000	-	29	-	3.724.000	-	5
8	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang disediakan	60	Bulan	46.800.000		1	9.000.000	-	3.000.000	-	33	-	3.000.000	-	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4				6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	100.072.000			4	27.992.000	1	3.297.000	25	12	1	3.297.000	25	3
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	89.085.000			100	17.005.000	28	4.805.000	28	28	0	4.805.000	0	5
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan	60	Bulan	89.085.000			3	17.005.000	1	4.805.000	33	28	1	4.805.000	2	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	61.092.000			100	19.012.000	34	6.500.000	34	34	0	6.500.000	0	11
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30	Unit	61.092.000			6	19.012.000	-	6.500.000	-	34	-	6.500.000	-	11
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	166.538.800			100	34.538.800	21	7.285.000	21	21	0	7.285.000	0	4
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	166.538.800			100	34.538.800	21	7.285.000	21	21	0	7.285.000	0	4
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Keamsyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Di Desa	90	Lembga	104.555.000			7	12.555.000	3	7.285.000	43	58	3	7.285.000	3	7
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Dok	61.983.800			1	21.983.800	-	-	-	-	-	-	-	-
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN TERHADAP BANGUNAN LIAR MAUPUN BANGUNAN TIDAK BERIJIN PADA JALAN POROS UTAMA KECAMATAN	100	%	60.005.000			100	20.005.000	5	1.020.000	5	5	0	1.020.000	0	2
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	%	60.005.000			100	20.005.000	5	1.020.000	5	5	0	1.020.000	0	2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4				6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
14	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	Dok	60.005.000			1	20.005.000	-	1.020.000	-	5	-	1.020.000	-	2
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	119.088.480			100	14.000.000	-	0	0	0	0	-	0	0
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Seseai Penugasan Kepala Daerah	100	%	119.088.480			100	14.000.000	1	-	1	0	0	-	0	0
15	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Hasil Laporan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	1	Lap	119.088.480			1	14.000.000	-	-	0					
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100	%	54.800.000			100	14.800.000	-	9.700.000				9.700.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terselenggaranya fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100	%	54.800.000			100	14.800.000	-	9.700.000	0			9.700.000		
16	Fasilitasi pengeloaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah rekomendasi pengeloaan keuangan dan pendayahgunaan aset desa	5	Dok	54.800.000			7	14.800.000	-	9.700.000	0			9.700.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)					4.389.639.970			100	966.076.490	25	440.957.159	11,95	18,99	0	440.957.159	3,00	3,89
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		71,50					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD kecamatan Landu Leko untuk menyukseskan rencana kerja yang sudah di														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Landu Leko														
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja														
Tindakanlanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:														

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN NDAO NUSE																	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayananan Administrasi Perkantoran	100 %	758.765.578	0	-			768.965.578								
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %		0												
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35 Dokumen	37.927.000	0	-			48.127.000								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	37.927.000	0	-	12	dok	37.927.000	9	20.191.000	75	53	9	20.191.012	100	53
2	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Laporan	10.200.000	-	-	7	Laporan	10.200.000	3	10.200.000	43	100	3	10.200.007	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	651.368.578	0	-			651.368.578	2	217.719.133	40	40	2	217.719.139	0	40
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 Org/ Bln	611.978.578	0	-	5	org/bln	611.978.578	2	215.769.133	40	35	2	215.769.138	0	35
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	39.390.000	0	-	1	dok	39.390.000	-	1.950.000	-	5	-	1.950.001	0	5
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	4.200.000	0	-	1		4.200.000	-	-	-	-	-	1	0	0
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	4.200.000	0	-	1	dok	4.200.000								
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	35.772.000	0	-	6		35.772.000	10	16.537.000	167	-	10	16.537.006	0	0
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	10.792.000	0	-	3	paket	10.792.000	2	6.908.000	67	64	2	6.908.003	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	10.100.000	0	-	2	paket	10.100.000	6	2.189.000	-	22	6	2.189.002	0	0
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.880.000	0	-	1	laporan	14.880.000	2	7.440.000	-	50	2	7.440.001	0	0
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	29.498.000	0	-			29.498.000								
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	29.498.000	0	-	7	unit	29.498.000	2	16.976.000	29	58	2	16.976.007	0	58
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	41.135.000	0	-			29.235.000								
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	41.135.000	0	-			29.235.000								
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	20.035.000	0	-	1	lembaga	20.035.000	1	20.035.000	-	100	1	20.035.001	0	100
11	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	21.100.000	0	-	4	laporan	9.200.000	-	-	-	-	-	4	0	0
III	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	CAKUPAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	100 %	14.350.000	0	-			14.350.000								
7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	14.350.000	0	-			14.350.000								
12	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.350.000	0	-	4	laporan	14.350.000	-	1.750.000	-	12	-	1.750.004	0	12

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	25.348.000	0	-			25.348.000									
13	Pelaksanaan Tuga Forum koordinasi pimpinan di kecamat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Doku men	25.348.000	0	-	1 dok		25.348.000	-	0	-	-	-	1	0	0	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan perencanaan dan fasilitasi program pengelolaan perbatasan		11.740.000	0				11.740.000									
8	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan			0													
14	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1	11.740.000	0		1 dok		11.740.000	1	6.027.000	-	51	1	6.027.001	0	51	
Rata-rata capaian kinerja (%)				851.338.578		-				849.638.578		299.806.133	35,37	41,47		299.806.178	15,38	31,03
Predikat Kinerja												SR	SR				SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			42,963					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD Kecamatan Ndao Nuse untuk menyukseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan															
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana serta kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Ndao Nuse															
Tindakanlajut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Perlu adanya peningkatan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ndao Nuse															
Tindakanlajut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:															

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	6.409.710.942			100	1.245.572.436		-						
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100														
		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100														
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100														
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	55	Dokumen	180.775.961			11	17.862.000								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	Dokumen	180.775.961			11	17.862.000	18	26.362.000	164	148	18	26.362.000	33	15
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	5.765.494.178			100	1.139.235.436								
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.050	Org/ Bln	5.523.126.981			210	1.091.440.576	60	1.000.126.896	29	92	60	1.000.126.896	6	18
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	40	Dokumen	242.367.197			8	47.794.860	3	8.880.000	38	19	3	8.880.000	8	4
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100	%	51.670.632			100	10.200.000								
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Bulan	51.670.632			12	10.200.000	-	3.400.000	-	33	-	3.400.000	-	7

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100	%	233.524.123			100	40.172.000								
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	Paket	30.387.708			12	4.750.000	-	13.680.000	-	288	-	13.680.000	-	45
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	50.877.272			12	8.782.000	-	2.640.000	-	30	-	2.640.000	-	5
7	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	Paket	72.406.015			4	11.100.000								
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	laporan	79.853.128			8	15.540.000	8	31.080.000	100	200	8	31.080.000	20	39
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	30.077.507			100	4.760.000	-							
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan	6.293.622			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	23.783.885			12	4.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	148.168.541			100	33.343.000								
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	148.168.541			6	33.343.000	1	5.000.000	17	15	1	5.000.000	3	3
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100	%	1.600.073.494			100	17.891.000								
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	229.716.903			100	17.891.000								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	Lembag a Kemasy	146.351.857			8	15.527.000	8	12.327.000	100	79	8	12.327.000	20	8
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	laporan	83.365.046			8	2.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	100	%	1.370.356.591			100	252.200.000	-							
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	Lembag a Kemasy	379.530.075			12	6.208.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Pokmas /Ormas	737.806.466			100	177.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	12	laporan	253.020.050			12	68.112.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN TERHADAP BANGUNAN LIAR MAUPUN BANGUNAN TIDAK BERIJIN PADA JALAN POROS KECAMATAN	100	%	362.588.658			100	33.377.000								
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	%	180.392.654			100	10.457.000								
17	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	500	laporan	180.392.654			100	10.457.000	25	18.112.000	25	173	25	18.112.000	5	10
11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	%	60.990.960			100	0								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
18	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika dan pemeliharaan keutuhan NKRI				60.990.960			-	-								
12	Program Pembinaan dan Pegawsan Pemerintahan Desa	Presentasi Pemenuhan Perencanaan dan Fasilitasi Program Pengelolaan Perbatasan	100	%	121.205.044			100	22.920.000				-		-		-
19	Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Daerah Perbatasan	5	Dokumen	60.602.522			1	11.460.000		11.460.000						
20	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa	Jumlah dukumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dokumen	60.602.522			1	11.460.000		11.460.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)					8.372.373.094					1.296.840.436		1.144.527.896	29,46	63,34		1.121.607.896	5,89 9,05
Predikat Kinerja												SR	R			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		65,45					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Adanya kemauan keras dan dedikasi yang tinggi dari personalia yang ada pada OPD kecamatan Rote Timur untuk menyukkseskan rencana kerja yang sudah ditetapkan														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:														

Perangkat Daerah : Kecamatan Loaholu

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7.187.052.997			100	1.397.612.488	-	607.161.502	-	43		607.161.502		
		Terwujudnyasarana dan prasarana kantor	100 %				100									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	245.480.000			100	37.740.000		26.520.000	-	70		26.520.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54 Dok	207.010.000			10	30.260.000	4	19.040.000	40	63	4	19.040.000	7	9
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27 Lap.	38.470.000			7	7.480.000	7	7.480.000	100	100	7	7.480.000	26	19
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.491.742.997			100	1.295.462.488		530.166.502				530.166.502		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	6.276.522.997			16	1.253.222.488	6	530.166.502	38	42	6	530.166.502	20	8
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dok	215.220.000			4	42.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	45.000.000			100	9.000.000		-						
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52 Dok	45.000.000			4	9.000.000	3	-	75	-	3	-	6	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	100 %	234.639.000			100	23.579.000		23.579.000				23.579.000		
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5.406.000			1	906.000	1	906.000	100	100	1	906.000	20	17
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 Paket	69.280.000			1	6.030.000	1	6.030.000	100	100	1	6.030.000	20	9

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	54.627.000			3	9.717.000	3	9.717.000	100	100	3	9.717.000	6	18
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	38.026.000			2	6.926.000	2	6.926.000	100	100	2	6.926.000	4	18
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	67.300.000			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	46.740.000			12	8.240.000	25	8.240.000				8.240.000		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	46.740.000			12	8.240.000	12	8.240.000	100	100	12	8.240.000	20	18
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	123.451.000			100	23.591.000		18.656.000				18.656.000		
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	123.451.000			3	23.591.000	2	18.656.000	67	79	2	18.656.000	13	15
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	99.365.000			100	14.415.000	25	8.535.000	25			8.535.000		
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Usulan Prioritas Desa	100 %	99.365.000			100	14.415.000		8.535.000				8.535.000		
13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Lembaga Kemasyarakatan	76.950.000			11	8.500.000	11	8.500.000	100	100	11	8.500.000	20	11
14	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	22.415.000			1	5.915.000	-	35.000	-	1	-	35.000	-	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berizin pada poros utama Kecamatan	100	%	116.495.000			100	6.725.000	25	-				-		
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	116.495.000			100	6.725.000	25	-				-		
15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	Laporan	116.495.000			12	6.725.000	3	-	25	-	3	-	5	-
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertb Administrasi	100	%	39.400.000			100	3.600.000		3.600.000				3.600.000		
10	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya Desa yang Tertib Administrasi	100	%	39.400.000			100	3.600.000		3.600.000				3.600.000		
16	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49	Dok.	39.400.000			1	3.600.000	1	3.600.000	100	100	1	3.600.000	2	9
Rata-rata capaian kinerja (%)					7.442.312.997				1.422.352.488		619.296.502	66,82	61,56		619.296.502	10,58	9,48
Predikat Kinerja												S	R			SR	SR
Rencana Anggaran Kas										Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100		42,10					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja					: Semangart kerja aparaturn Kecamatan Loaholu												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja					: Rendahnya kualitas & kuantitas Sumber Daya Aparatur pada OPD Kec. Loaholu dan Kurangnya sarana prasarana penunjang dlm penyelesaian pekerjaan												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja pada triwulan berikut												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya					:												

PERANGKAT DAERAH : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Layanan Pembinaan Politik,Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	100	%	15.604.514.090	-	100	3.035.925.232	28	858.973.909	28	28		858.973.909		6
I	URUSAN PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Layanan Pembinaan Politik,Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	100	%	15.604.514.090	-	100	3.035.925.232	28	858.973.909	28	28		858.973.909		6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100	%	7.030.717.770	-	100	1.380.297.704	38	652.055.909	47	47		652.055.909		9
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	60	Dok	34.850.000		12	6.970.000	6	5.780.000	50	83		5.780.000		17
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dok	34.850.000		12	6.970.000	6	5.780.000	50	83	6	5.780.000	10	17
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	6.064.055.520		194	1.264.544.704	85	566.562.897	101	45		566.562.897		9
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	org	5.999.388.520		182	1.199.877.704	78	545.345.897	43	45	78	545.345.897	9	9
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dok	64.667.000		12	64.667.000	7	21.217.000	58	33	7	21.217.000	15	33
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	24.000.000			4.800.000	7	1.200.000	58	25		1.200.000		5
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Bln	24.000.000		12	4.800.000	7	1.200.000	58	25	7	1.200.000	12	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	581.161.250			53.644.800	4	47.916.650	-	89		47.916.650		8
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Pake t	21.775.000		1	4.355.000	-	2.537.000	-	58	-	2.537.000	-	12
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	pake t	71.640.000		1	9.146.000	1	7.164.000	78	78	1	7.164.000	16	10
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	pake t	112.096.250		1	11.928.000	1	9.999.850	84	84	1	9.999.850	17	9
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	Lap	375.650.000		50	28.215.800	15	28.215.800	30	100	15	28.215.800	6	8
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	104.251.000			20.850.200	47	7.916.362		38		7.916.362		8
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	7.475.000		12	1.495.000	3	1.495.000	25	100	3	1.495.000	5	20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap		96.776.000	12	19.355.200	7	6.421.362	58	33	7	6.421.362	12	7
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35	Unit		222.400.000	7	29.488.000	77	22.680.000		77		22.680.000		10
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	unit		222.400.000	7	29.488.000	6	22.680.000	86	77	6	22.680.000	17	10
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	%		3.578.780.000		656.624.264	66	58.067.000		9		58.067.000		2
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700	org		3.578.780.000	140	656.624.264	66	58.067.000	47	9		58.067.000		2
12	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700	org		3.578.780.000	140	656.624.264	66	58.067.000	47	9	66	58.067.000	9	2
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Peran Partai Politik	100	%		3.427.246.320		685.449.264	0	1.127.000	5	0	0	1.127.000	1	0
13	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	15	dok		3.427.246.320	3	685.449.264	0	1.127.000	5	0	0	1.127.000	1	0
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tertatanya kelembagaan Ormas	100	%		68.210.000		13.642.000	15	13.642.000		100		13.642.000		20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100	
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tertatanya kelembagaan Ormas	100 %	68.210.000				13.642.000	15	13.642.000		100		13.642.000		20
14	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 org	68.210.000			15	13.642.000	15	13.642.000	100	100	15	13.642.000	20	20
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 %	127.360.000				25.472.000	100	24.622.000		97		24.622.000		19
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 %	127.360.000				25.472.000	100	24.622.000		97		24.622.000		19
15	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 org	127.360.000			100	25.472.000	100	24.622.000	100	97	100	24.622.000	20	19
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan nasional , kualitas fasiltasi penanganan konflik sosial	100 %	1.372.200.000				274.440.000	16	109.460.000		40		109.460.000		8
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 %	1.372.200.000				274.440.000	16	109.460.000		40		109.460.000		8

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10=9/4x100		
16	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150	org	92.900.000			30	18.580.000	25	7.440.000	83	40	25	7.440.000	17	8
17	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60	Lap	1.279.300.000			12	255.860.000	6	102.020.000	50	40	6	102.020.000	10	8
Rata-rata capaian kinerja (%)				15.604.514.090			-		3.035.925.232		858.973.909	53,13	55,68		858.973.909	10,79	10,85
Predikat Kinerja												R	R			SR	SR
Rencana Anggaran Kas									Tingkat Realisasi Anggaran Kas (12= 11/(7+8+9+10)*100			68,01					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: meningkatnya semangat kerja aparatur														
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: terbatasnya dana, jumlah personil														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: meningkatkan koordinasi														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			: perencanaan program /kegiatan prioritas sesuai renstra OPD														

Secara umum, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao periode tahun 2025-2029 adalah:

1. Perangkat Daerah konsisten terhadap anggaran kas yang telah disusun.
2. Perangkat Daerah belum melaksanakan SOP secara Konsisten.
3. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
4. Keterlambatan beberapa Perangkat Daerah (OPD) dalam menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam menyelesaikan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan menaati anggaran kas setiap triwulan.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur di bidang perencanaan baik di Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao maupun di setiap Perangkat Daerah untuk melakukan perencanaan yang tepat sasaran dan mampu melakukan pengendalian dan evaluasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
3. Peningkatan disiplin pegawai, penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah untuk lebih proaktif dan mandiri serta mengembangkan partisipasi unsur penegak hukum dan masyarakat.
4. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara Tim Anggaran Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran termasuk proses administrasi pelelangan dan penetapan panitia pengadaan barang dan jasa.
5. Perlu memberikan pembinaan dan teguran terhadap Perangkat Daerah pengelola program, kegiatan dan sub kegiatan belum mencapai target dan lambat menyampaikan laporan pada waktu yang ditetapkan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahap awal dari suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Kondisi yang diinginkan pada 1 (satu) tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sejumlah Permasalahan Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rote Ndao diuraikan sebagai berikut :

A. Permasalahan Pembangunan Nasional

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau. dan ekonomi biru
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nrlar tambah di dalam negeri
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

B. Permasalahan Pembangunan Provinsi NTT

- Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan wilayah yang mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata;
- Belum optimalnya pengembangan potensi kawasan pariwisata berbasis pengembangan ekonomi lokal;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi untuk Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- Belum optimalnya integrasi konektivitas darat, laut, dan udara antar pulau di Wilayah Nusa Tenggara;
- Keterbatasan sumber air untuk memenuhi kegiatan ekonomi serta terjadi penurunan kinerja bendung akibat sedimentasi.
- Tingginya tingkat kerawanan pangan di Wilayah Nusa Tenggara.
- Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, tsunami, dan gempa bumi.
- Rendahnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan Pendidikan.
- Rendahnya kapasitas masyarakat/SDM lokal dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi.

C. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari hasil kinerja indikator makro daerah. Berdasarkan hasil kinerja indikator makro daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 maka permasalahan pokok pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.67

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Belum Optimalnya SDM yang berkompeten, sehat dan unggul a. IPM 64,59 poin b. Harapan lama sekolah: 13,23 tahun c. Skor literasi Masyarakat 51,70 poin d. Usia harapan hidup 65,85 tahun e. Prevalensi stunting 37,8% f. Angka Kematian Ibu: 116,99 g. Angka Kematian Bayi 15,21	1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
2. Belum optimalnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing a. PDRB ADHB: Rp. 25.603.988,- b. Tingkat pengangguran terbuka: 2,42 % c. Pertumbuhan ekonomi: 3,2% d. Realisasi investasi daerah: Rp. 334,13 Miliar,- e. Persentase peningkatan PAD: 0,63% f. Kunjungan wisata: 16.374 orang g. Indeks Gini: 0,323	2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil dan merata
3. Belum optimalnya kesejahteraan sosial, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat a. Persentase Penduduk Miskin : 25,78% b. Angka kriminalitas : 376 kasus	3. Penanggulangan kemiskinan, dan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) dan perlindungan masyarakat
4. Belum optimalnya ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta lingkungan hidup berkelanjutan a. Indeks Resiko Bencana: 150,75 poin b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 68,17 poin	4. Peningkatan pembangunan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, mitigasi serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
5. Belum optimalnya Infrastruktur yang tangguh dan menyeluruh a. Indeks Kualitas Infrastruktur: 32,88 b. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap: 44,83% c. Persentase Infrastruktur perumahan dan pemukiman layak: 81,64%	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas
6. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik a. Nilai SAKIP: B b. Indeks RB: 61,83 c. Indeks Inovasi: 40,18 d. Indeks SPBE: 3,35 e. IKM: 89,29	6. Peningkatan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

- Pendidikan
 - Rendahnya aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan SD dan SMP;
 - Belum semua lembaga PAUD memiliki sarana dan Prasarana yang memadai;
 - Kurangnya kualitas sumber daya manusia tenaga kependidikan;
 - Kurangnya akses pendidikan non-formal;
 - Belum ada sekolah berbasis keunggulan lokal (keunggulan di bidang teknologi atau seni)

2. Kesehatan
 - a. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka kematian balita (AKABA);
 - b. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang;
 - c. Kurangnya tenaga kesehatan berkualitas (Rasio dokter per 1.000 penduduk: 0,2);
 - d. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik;
 - b. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi kabupaten;
 - c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - d. Cakupan rumah tinggal bersanitasi belum optimal;
 - e. Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak belum optimal;
 - f. Belum optimalnya pengelolaan drainase perkotaan;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih rendahnya cakupan rumah layak huni;
 - b. Masih adanya permukiman kumuh;
 - c. Masih terbatasnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik;
 - d. Masih luasnya lahan kritis;
 - e. Pengelolaan sampah masih rendah (Pengelolaan Sampah: 72,49%);
 - f. Ancaman abrasi pantai (Wilayah Pesisir Terdampak: 30 km);
 - g. Belum optimalnya konservasi lingkungan dan satwa endemik; dan
 - h. Belum optimalnya infrastruktur energi.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
 - a. Rendahnya cakupan penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3).
 - b. Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dan kekeringan;
 - c. Belum optimalnya cakupan pelaksanaan penegakan perda (%).
6. Bencana
 - a. Masih kurangnya desa tangguh bencana;
 - b. Belum optimalnya upaya pencegahan bencana alam;
 - c. Belum optimalnya penanganan pasca bencana;
7. Sosial
 - a. Belum optimalnya pemberdayaan dan penanganan PMKS;
 - b. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberian jaminan sosial kepada PMKS.
 - c. Kelompok rentan belum dipenuhi hak-haknya secara optimal.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
 - a. Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan;
 - b. Belum tersedianya BLK;
 - c. Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
 - d. Minimnya pelatihan tenaga kerja berbasis industri;
 - e. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dalam pemanfaatan teknologi.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - b. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Masih rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
3. Pangan
 - a. Belum optimalnya capaian pola pangan harapan;
 - b. Belum optimalnya pengawasan pembinaan dan keamanan pangan.
4. Pertanahan
 - a. Masih rendahnya luas lahan bersertifikat.
 - b. Belum optimalnya penataan bidang tanah yang menjadi aset Pemda.
5. Lingkungan Hidup
 - a. Masih beroperasinya TPA/TPST secara terbuka (open dumping);
 - b. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
 - c. Masih kurangnya volume sampah tertangani; dan
 - d. Rendahnya ruang terbuka hijau.
6. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Masih rendahnya pasangan berakate nikah;
 - c. Masih rendahnya persentase kepemilikan kartu identitas anak.
7. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor desa;
 - b. Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial;
 - c. Masih rendahnya Bumdes berkembang;
 - d. Masih kurangnya jumlah desa maju.
 - e. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan dan keluarga berencana (KB);
 - b. Rendahnya rasio akseptor KB;
 - c. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
9. Perhubungan
 - a. Belum tersedianya sarana dan prasarana uji KIR;
 - b. Belum maksimalnya alat kelengkapan jalan
 - c. Belum terpenuhinya standar keselamatan transportasi;
 - d. Minimnya fasilitas transportasi publik di daerah terpencil.
10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika belum optimal;
 - b. Indeks keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan;
 - c. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih perlu ditingkatkan;
 - d. Hanya 30% layanan publik sudah terdigitalisasi;
 - e. Belum meratanya jaringan internet (Desa dengan akses internet: 60%).
11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
 - b. Masih rendahnya modal usaha koperasi;
 - c. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
 - d. Belum optimalnya pengembangan UMKM (Jumlah UMKM aktif: 1.250);
 - e. Belum adanya kebijakan ekonomi hijau.
12. Penanaman Modal
 - a. Masih rendahnya investasi berskala nasional;
 - b. Belum berperannya investasi dalam sistem perekonomian dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Masih kurangnya promosi investasi untuk menarik minat investor;
 - d. Kurangnya investasi sektor swasta.
13. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
14. Statistik
 - a. Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data/statistik daerah.
 - b. Belum semua perangkat daerah terintegrasi dalam Rote Satu Data

15. Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi daerah.

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.
- b. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.

17. Perpustakaan

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah;
- b. Akses layanan perpustakaan belum optimal;
- c. Rendahnya minat baca masyarakat.

18. Kearsipan

- a. Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- b. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata.

- a. Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
- c. Rendahnya promosi wisata;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana di destinasi wisata;
- e. Masih rendahnya SDM kepariwisataan
- f. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

2. Pertanian.

- a. Kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian;
- b. Penggunaan teknologi budidaya pertanian dan penganeekaragaman produk pengolahan hasil pertanian yang belum memadai;
- c. Kurangnya pengembangan produk unggulan.
- d. Kurang kuota subsidi pupuk.
- e. Masih rendahnya penggunaan pupuk organik
- f. SDM petani masih perlu ditingkatkan .

3. Kelautan dan Perikanan.

- a. Belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan hasil perikanan;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
- c. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya.
- d. Belum berkembangnya perikanan budidaya.

- e. Rendahnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan.
- 4. Perdagangan.
 - a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.
 - b. Belum optimalnya penggunaan teknologi oleh pedagang dalam memasarkan produk.
- 5. Perindustrian
 - a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin;
 - b. Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) produk unggulan daerah.
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana industri.
- 6. Transmigrasi.
 - a. Terbatasnya ketrampilan para transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasi;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana transmigrasi lokal.

d. Pendukung Urusan Pemerintahan

- 1. Sekretariat Daerah
 - a. Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
 - b. Pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan masih perlu ditingkatkan;
 - c. SDM pengelola barang dan jasa masih perlu ditingkatkan.
- 2. Sekretariat DPRD

Penetapan Perda agar sesuai dengan yang direncanakan dan tepat waktu.

e. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- 1. Perencanaan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
 - b. Belum optimalnya penyelarasan dan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
 - c. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalitas SDM Perencana.
- 2. Keuangan
 - a. Masih banyak Perangkat Daerah dalam menyerap/merealisasikan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun;
 - b. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Pendataan aset-aset yang belum tersertifikasi.

3. Kepegawaian
 - a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah;
 - b. Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN;
 - c. Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;
 - d. Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
 - e. Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.
4. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Rendahnya kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan RPD/RPJMD;
 - c. Rendahnya inovasi perangkat daerah; dan
 - d. Belum adanya regulasi daerah terkait riset dan inovasi daerah.
5. Pengawasan
 - a. Masih rendahnya Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B.
 - b. Persentase Tindak lanjut hasil temuan APIP dan BPK masih perlu ditingkatkan.
 - c. Level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP masih perlu ditingkatkan.

f. Urusan Kewilayahan

1. Kecamatan
 - a. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan.
 - b. Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

g. Urusan Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Pembinaan politik, kestuan bangsa dan kewaspadaan dini masih perlu ditingkatkan.
 - b. Pembinaan Ormas/LSM masih perlu ditingkatkan.
2. Non Urusan
 - a. Layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih rendahnya persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan. Analisis kerangka ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan tahun sebelumnya.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Rote Ndao baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian nasional, provinsi maupun perekonomian daerah. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 sebesar 5,31 %, tahun 2024 pertumbuhan sebesar 5,05% pada tahun 2024. Peningkatan ini cenderung positif pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, sehingga berimbas pada peningkatan mobilitas barang dan jasa serta produktivitas masyarakat. PDB Per Kapita pada tahun 2022 sebesar Rp. 71.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp.4.000.000 menjadi Rp. 75.500.000 pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan tahun 2022 sebesar 9,57% turun menjadi 8,57% di tahun 2024. Indeks pembangunan manusia tahun 2022

sebesar 72,91 meningkat menjadi 75,02 pada tahun 2024. Indikator perekonomian nasional tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Perekonomian Nasional Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,69	5,31	5,05	5,03
2.	Pertumbuhan Investasi (Rupiah)	447.063,6	1.207.200,0	1.418.900,0	1.261.380,0
3.	PDB Per Kapita (Rp)	62.200.000	71.000.000	75.000.000	78.600.000
4.	Tingkat Inflasi (%)	1,87	5,51	2,61	1,57
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	9,57	9,36	8,57
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,49	5,86	5,32	4,91
7.	Rasio Gini (poin)	0,381	0,381	0,388	0,381
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	72,29	72,91	74,39	75,02

Ket:*(Inflasi Triwulan 4 (Empat) Desember 2021, 2021, 2022 & 2024)

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2022-2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 bertema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Adapun Arah kebijakan RKP Tahun 2026 dilaksanakan melalui:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah Kebijakan RKP Tahun 2026 dalam rangka pengembangan ekonomi dilaksanakan melalui *Major Project*, antara lain:

- Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
- Destinasi Pariwisata Prioritas
- Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
- Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
- Pengelolaan Terpadu UMKM
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Transformasi digital
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Sasaran Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026, antara lain:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,80 - 6,30 %
- Tingkat Kemiskinan 6,50 - 7,50 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44 – 4,96 %
- Rasio Gini 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia 0,57
- Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14 %
- Indek Kualitas lingkungan Hidup 76,67

3.1.2 Perekonomian Provinsi NTT

Capaian Indikator ekonomi makro Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2024, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan dengan kondisi perekonomian yang sudah mulai membaik seiring dengan kondisi perekonomian nasional yang sudah baik. Peningkatan ekonomi Provinsi NTT juga berbanding lurus terhadap penurunan tingkat pengangguran karena semakin terbukanya lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Capaian indikator ekonomi makro Provinsi NTT, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Ekonomi Makro Provinsi NTT Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,52	3,05	3,52	3,66

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.	Tingkat Inflasi (%)	1,67	6,65	2,42	1,19
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	20,99	20,05	19,96	19,48
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,77	3,54	3,14	3,02
5.	Rasio Gini	0,356	0,339	0,381	0,316
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,28	65,90	66,68	67,39

Ket:*(Inflasi Triwulan 4 (Empat) Desember 2021, 2022, 2023 & 2024)

Sumber: BPS Prov. NTT Tahun 2021-2024

Arah kebijakan Provinsi NTT tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 diarahkan pada Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar melalui:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan.
2. Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal.
3. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
4. Pencapaian dan pemenuhan SPM.
5. Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran Makro Provinsi NTT Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,43 - 5,01 %
2. Tingkat Kemiskinan 18,12 – 18,74 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,45 – 4,66 %
4. Rasio Gini 0,319 – 0,324
5. Indeks Modal Manusia 0,463
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 61,82 %
7. Indek Kualitas lingkungan Hidup 80,19

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Rote Ndao

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 11,78%. Dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha PDRB, 2 (dua) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, yaitu industri pengolahan dan jasa pendidikan sedangkan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya tidak mengalami konsistensi pertumbuhan. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Rote Ndao
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rote Ndao				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,01	4,01	4,84	2,42	1,98
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,22	2,07	1,85	3,48	4,82
C.	Industri Pengolahan	-4,11	-5,68	4,45	9,13	7,23
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	25,54	6,74	1,19	11,78	10,84
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	11,90	0,45	2,16	4,42
F.	Konstruksi	-10,28	4,30	0,01	7,87	0,38
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	-6,13	3,59	7,29	5,19	5,02
H.	Transportasi dan pergudangan	-2,44	2,98	9,62	2,72	8,03
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,23	4,23	5,40	3,82	7,67
J.	Informasi dan Komunikasi	13,60	0,96	3,46	2,40	3,23
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,93	2,70	0,79	1,35	4,41
L.	Real Estate	- 0,42	5,38	3,76	2,45	1,97
M.	Jasa Perusahaan	-40,31	-14,44	2,96	2,93	5,34
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,29	-3,23	0,13	0,01	5,97
O.	Jasa Pendidikan	1,58	-1,72	-0,57	2,75	2,99
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	8,91	1,88	4,67	3,59
Q.	Jasa Lainnya	-9,72	0,04	0,40	4,24	2,57
	Produk Domestik Regional Bruto	0,21	2,24	3,52	2,80	3,20

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2025

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan tabel 3.4 bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Rote Ndao menurut Lapangan Usaha pada tahun 2020 Rp. 1.931,72 (miliar) mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 2.169,12 (miliar). Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan. Rincian PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
		Miliar Rp	Miliar Rp	Miliar Rp	Miliar Rp	Miliar Rp
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	898,52	934,60	979,86	1.003,54	1.023,46
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,35	15,66	15,95	16,51	17,30

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
		Miliar Rp	Miliar Rp	Miliar Rp	Miliar Rp	Miliar Rp
C.	Industri Pengolahan	23,85	22,50	23,50	25,64	27,50
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,42	1,51	1,53	1,71	1,90
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,14	2,39	2,40	2,45	2,56
F.	Konstruksi	95,11	99,20	99,21	107,02	107,42
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	145,67	150,90	161,90	170,30	178,85
H.	Transportasi dan pergudangan	60,49	62,29	68,29	70,14	75,78
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,31	3,49	3,63	3,90
J.	Informasi dan Komunikasi	116,96	118,08	122,17	125,11	129,15
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,78	16,21	16,33	16,55	17,28
L.	Real Estate	20,63	21,74	22,56	23,11	23,57
M.	Jasa Perusahaan	00,91	0,78	0,80	0,83	0,87
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	272,87	264,06	264,39	264,42	280,20
O.	Jasa Pendidikan	187,74	184,51	183,45	188,50	194,13
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,11	75,27	76,69	80,27	83,15
Q.	Jasa lainnya	1,97	1,97	1,97	2,06	2,11
Produk Domestik Regional Bruto		1.931,72	1.974,99	2.044,51	2.101,79	2.169,12

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2025

Selama 4 (empat) tahun terakhir PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kontribusi sektor ini terus mengalami peningkatan dari 47,65 persen pada tahun 2020, menjadi 48,57 persen tahun 2021 dan menurun lagi menjadi 48,84 persen pada tahun 2024. Sektor pendukung utama lainnya yaitu jasa pendidikan dari 13,17 persen pada tahun 2020, turun menjadi 12,65 persen pada tahun 2021 dan turun lagi menjadi 12,06 persen pada tahun 2024. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebesar 13,43 persen, tahun 2021 menurun menjadi 12,72 persen dan tahun 2024 kembali menurun menjadi 11,22 persen, sedangkan sektor lainnya memiliki kontribusi yang masih rendah masing-masing di bawah 8%. Berikut rincian tabel Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020-2024:

Tabel 3.5
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Lapangan Usaha		2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.510,32	47,65	1.592,66	48,57	1.736,86	49,59	1.835,22	49,14	1.912,56	48,84

Lapangan Usaha		2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
B.	Pertambangan dan Penggalian	23,02	0,73	23,74	0,72	24,97	0,71	26,55	0,71	27,73	0,71
C.	Industri Pengolahan	38,47	1,21	36,46	1,11	39,28	1,12	46,70	1,25	53,35	1,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	0,05	1,78	0,05	1,89	0,05	2,18	0,06	2,41	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,74	0,09	3,10	0,09	3,16	0,09	3,25	0,09	3,43	0,09
F.	Konstruksi	140,80	4,44	148,93	4,54	157,34	4,49	174,60	4,68	176,45	4,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	211,47	6,67	224,75	6,85	252,67	7,21	280,83	7,52	304,00	7,76
H.	Transportasi dan pergudangan	100,74	3,18	104,33	3,18	120,22	3,43	131,74	3,53	145,91	3,73
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	0,19	6,14	0,19	6,61	0,19	7,08	0,19	7,84	0,20
J.	Informasi dan Komunikasi	132,74	4,19	134,06	4,09	139,28	3,98	143,41	3,84	150,66	3,85
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,31	0,70	23,95	0,73	26,08	0,74	26,97	0,72	28,05	0,72
L.	Real Estate	31,54	1,00	32,84	1,00	36,84	1,05	40,42	1,08	44,68	1,14
M.	Jasa Perusahaan	1,71	0,05	1,47	0,04	1,55	0,04	1,62	0,04	1,74	0,04
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425,74	13,43	417,07	12,72	419,86	11,99	435,71	11,67	439,43	11,22
O.	Jasa Pendidikan	417,33	13,17	414,83	12,65	418,61	11,95	445,80	11,94	472,28	12,06
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,79	3,15	109,92	3,35	114,14	3,26	128,99	3,45	141,88	3,62
Q.	Jasa Lainnya	3,19	0,10	3,22	0,10	3,38	0,10	3,61	0,10	3,74	0,10

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
Produk Domestik Regional Bruto	3.169,43	100	3.279,26	100	3.502,73	100	3.734,68	100	3.916,13	100

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2025

c. PDRB Perkapita

Salah satu indikator kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Nilai PDRB perkapita Kab. Rote Ndao ADHB sejak tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat PDRB perkapita sebesar Rp. 22.046.062,- dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 25.595.000,-

Tabel 3.6
 Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2024

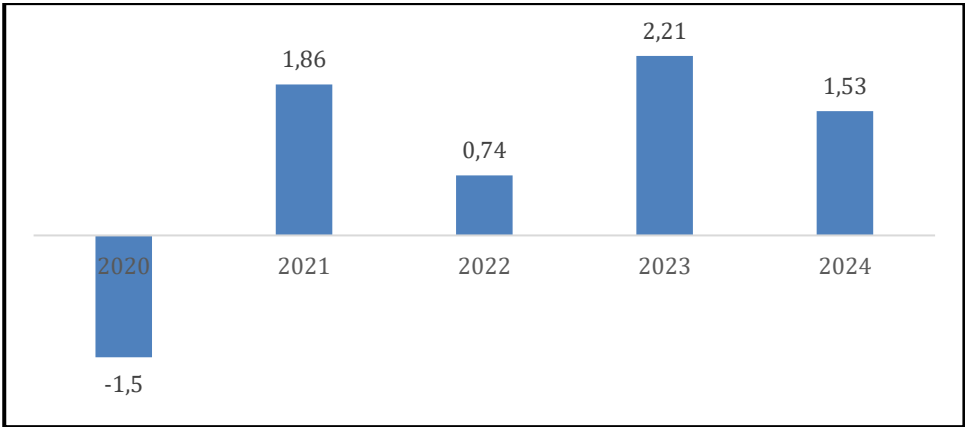
URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB					
ADHB (Miliar Rupiah)	3.169,43	3.279,26	3.502,73	3.734,68	3.916,13
ADHK (Miliar Rupiah)	1.931,72	1.974,99	2.044,51	2.101,79	2.169,12
PDRB Perkapita					
ADHB (Rupiah)	22.046.062	22.512.940	23.750.070	24.891.360	25.595.000
ADHK (Rupiah)	13.436.744	13.558.810	13.810.280	13.954.280	14.176.000

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2025

d. Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya nilai mata uang. Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Adapun data inflasi Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dan 2024 di ambil dari data hasil rilisn Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut grafik laju inflasi Kabupaten Rote Ndao pada Triwulan 4 (empat) Desember 2020-Desember 2024.

Grafik 3.1
Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024



Ket:*(Inflasi Triwulan 4 (Empat) Desember 2020, 2021, 2022,2023 & 2024)
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2021 dan BPS Provinsi NTT Tahun 2023-2024

Pada tahun 2020 Kabupaten Rote mengalami deflasi sebesar 1,50%, tahun 2021 mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,86% dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,74%, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 2,21% dan tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1,53%

Tabel 3.7
Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2024	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	107,32	0,94
2	Pakaian dan Alas Kaki	100,82	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar lainnya	102,27	-
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,86	-
5	Kesehatan	101,60	-0,01
6	Transportasi	110,84	-0,04
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,38	-0.05
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	100,81	0,01
9	Pendidikan	100,18	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,02	0,09
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,50	0,57

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.8 berikut, inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk

mengatasi masalah inflasi, diantaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Pada Desember 2024 Kabupaten Rote Ndao menurut kelompok pengeluaran mengalami inflasi sebesar 1,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar angka riil inflasi di Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan indeks harga konsumen disebabkan oleh naiknya semua kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok transportasi dan makanan, minuman dan tembakau. Untuk mengatasi inflasi, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar strategi penanggulangannya dapat diketahui.

Upaya mengendalikan laju inflasi perlu dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi daerah, melakukan pemantauan dan pemberian informasi harga sembako, pengendalian harga komoditas strategis/utama (beras, cabe dan bawang merah), pemantauan dan pengendalian BBM, serta melakukan antisipasi kenaikan harga menjelang hari raya keagamaan. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah dengan memperlancar arus distribusi barang dengan peningkatan konektivitas antar daerah dari jalur laut mengingat Kabupaten Rote Ndao sebagai kabupaten kepulauan.

Tabel 3.8
Inflasi Kabupaten Rote Ndao Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2022-2024

No	Kelompok Pengeluaran	2022	2023	2024
1	Makanan, minuman dan tembakau	1,02	2,46	0,94
2	Pakaian dan alas kaki	-0,01	0,08	0,02
3	Perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,01	1,83	-
4	Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga	0,01	0,60	-
5	Kesehatan	0,00	1,53	-0,01
6	Transportasi	-0,33	4,33	-0,04
7	Informasi, komunikasi dan jasa keuangan	0,00	0,18	-0,05
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	0,00	0,27	0,01
9	Pendidikan	0,00	0,01	-
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0,00	3,93	0,09
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	0,05	1,41	0,57
	U M U M / T O T A L	0,74*	2,21	1,53

Ket:*(Inflasi Triwulan 4 (Empat) Desember 2022, 2023 & 2024)

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2023-2024

e. **Kemiskinan**

Angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan sejak tahun 2021 yakni sebesar 28,08% dan pada tahun 2024 menjadi 25,78%. Penurunan ini dipengaruhi oleh strategi melalui pendekatan penajaman program kegiatan dan sasaran penerima manfaat, yaitu:

- a) Menurunkan beban pengeluaran melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Lansia, Bantuan Disabilitas, Bantuan Bencana;
- b) Meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan akses pekerjaan, bantuan modal usaha;
- c) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui konektivitas wilayah dan akses pelayanan dasar.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebesar 5,36%, mengalami peningkatan menjadi 5,82% tahun 2021, tahun 2022 kembali menurun sebesar 5,31%, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,97% dan tahun 2024 meningkat menjadi 5,23%. Indeks Keparahan Kemiskinan juga semakin menurun menunjukkan semakin rendah ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin, dapat diartikan bahwa kegiatan pembangunan mampu meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Rote Ndao dan pada gilirannya secara bertahap mengurangi jumlah penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 sebesar 1,67% dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,41%.

Tabel 3.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	322.619	48.770	27,54	5,36	1,35
2021	341.135	51.710	28,08	5,82	1,67
2022	372.179	52.430	27,45	5,31	1,47
2023	410.491	53.550	27,05	4,97	1,24
2024	426.843	52.890	25,78	5,23	1,41

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2025

Berdasarkan data yang tersaji di atas bahwa perkembangan penduduk miskin sejak tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, selama kurun waktu 5 tahun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao yang paling tinggi adalah pada tahun 2021 dengan persentase penduduk miskin sebesar 28,08% dengan Garis Kemiskinan (GK) Rp. 322.619/bulan/kapita. Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 25,78%.

f. **Pengangguran**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 69,46% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,16%, tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 73,20% dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 78,55% dan tahun 2024 sebesar 71,82%. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 4,90%, kembali mengalami penurunan menjadi 3,67% pada tahun 2021, pada tahun 2023 turun menjadi 3,50% , kemudian tahun 2024 meningkat menjadi 3,53%.

2. **Target Perekonomian Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2026**

Kondisi perekonomian yang bergejolak akibat krisis ekonomi global mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, provinsi maupun Kabupaten Rote Ndao. Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao cenderung akan bertumbuh secara positif, jika dilihat tren perkembangan tahun 2020-2024. Berikut prospek perekonomian pada tahun 2025-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Prospek Perekonomian Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	TARGET	
		TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,60	4,50
2	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	26,39	27,19
3	Inflasi (%)	1,75	1,70
4	Tingkat Kemiskinan (%)	24,51	23,24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,40	2,36
6	Angkatan Kerja (%)	72,54	73,26
7	Indeks Pembangunan Manusia (%)	66,58	66,67
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,59	77,76
9	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	45,55	45,55
10	Indeks Gini (Poin)	0,321	0,320

Sumber: RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029
BKA Kab. Rote Ndao, 2025

Prediksi kondisi ekonomi Kabupaten Rote Ndao tahun 2026 secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan

ekonomi provinsi, jika terdapat perubahan maka target-target akan dikoreksi sesuai perkembangan ekonomi Nasional dan Provinsi NTT.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu tahap perencanaan pembangunan adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Oleh karena itu arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- (1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
- (2) Disiplin anggaran adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keadilan anggaran pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif

agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

- (4) Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dengan memberi dukungan terhadap sejumlah program prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2025-2029 untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti kualitas sumber daya manusia dan penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, permasalahan ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup berkelanjutan, serta penanggulangan bencana, pengelolaan potensi unggulan terutama pariwisata dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan memiliki daya ungkit bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang memadai dan pengentasan kemiskinan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, sarana prasarana yang dapat menunjang konektivitas wilayah dan akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi dengan menempatkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan daerah yang didukung oleh sektor pertanian dan perikanan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

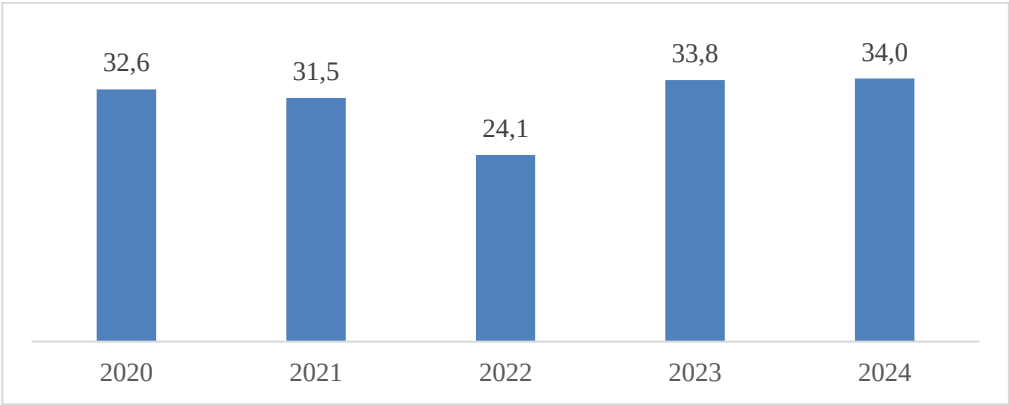
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer antar-daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi
 - a. Hibah
 - b. Dana darurat; dan/atau
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2026, dipengaruhi oleh program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, baik itu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah. Kebijakan pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak dan retribusi yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak. Ekstensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak dan retribusi daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar, tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya ini dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah.
 - b. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan kegiatan optimalisasi penggalan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dan retribusi daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 sektor PAD yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan rincian sektor pajak daerah sebesar Rp. 11.165.927.823, sektor retribusi sebesar Rp. 5.486.843.025, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.920.741.531 dan sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 3.615.969.918 Berikut rincian grafik sektor PAD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.

Grafik 3.2
PAD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)



BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2024

3. Pendapatan Transfer yaitu pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi ataupun Kab/Kota lainnya. Kebijakan Pendapatan Transfer sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah dan perbaikan LPPD;
 - b. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK fisik, maka dilakukan pengusulan melalui aplikasi Krisna oleh Perangkat Daerah Pengampuh DAK Fisik, dimana pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan DAK Non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana oleh pemerintah pusat;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan melalui upaya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rincian realisasi pendapatan Tahun 2022 – 2024 dan Target Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2026

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RAPBD 2026
1	2	3	4	5	6
Pendapatan	800.695.726.668,95	895.421.393.437,59	869.319.821.304,98	853.317.064.677	853.317.064.677
Pendapatan Asli Daerah	24.189.482.297,00	33.885.585.638,59	34.099.657.720,68	45.555.129.165	45.555.129.165
Pajak Daerah	11.165.927.823,00	15.934.199.650,70	19.254.375.291,99	28.167.025.309	28.167.025.309

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RAPBD 2026
1	2	3	4	5	6
Retribusi Daerah	5.486.843.025,00	7.612.877.375,00	7.518.500.354	10.347.113.319	10.347.113.319
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.920.741.531,00	7.132.456.526,00	3.755.363.280	5.000.000.000	5.000.000.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.615.969.918,00	3.206.052.086,89	3.571. 378.794,69	2.040.990.537	2.040.990.537
Pendapatan Transfer	744.438.850.855,00	854.349.477.695,00	829.066.162.017,00	800.302.141.512	800.302.141.512
Transfer Pemerintah Pusat	623.618.977.040	708.357.093.249	678.046.028.880,00	784.356.856.000	784.356.856.000
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	98.578.052.000	124.562.286.000	127.569.205.000,00		
Transfer Antar Daerah	17.404.189.815,00	21.430.098.446	23.450.928.137,00	15.945.285.512	15.945.285.512
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.067.393.516,95	7.186.330.104,00	6.154.001.567,30	7.459.794.000	7.459.794.000
Pendapatan Hibah	20.628.091,95	28.605.877	215.254.685,30		
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	32.067.393.516,95	7.157.724.227	5.938.746.882	7.459.794.000	7.459.794.000

Sumber: BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2025, diolah

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja daerah secara makro terdiri atas :

a. Belanja operasi

Merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

c. Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

2. Efisiensi dan efektivitas anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Transparansi dan akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026:

1. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah.
2. Memprioritas belanja yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
3. Melaksanakan program-program yang bersifat wajib mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta dukungan/pendampingan program-program pemerintah provinsi/pusat
4. Memprioritaskan belanja mandatori seperti belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan SDM aparatur.
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan pencegahan dan penanggulangan stunting;
6. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah (Kebijakan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K)
7. Berpedoman pada standar harga satuan Kabupaten Rote Ndao tahun 2026;

Rincian realisasi belanja Tahun 2022 – 2024 dan target belanja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2026

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RAPBD 2026
1	2	3	4	5	6
Belanja	813.429.616.328,05	855.647.257.677,73	867.604.940.265,05	872.547.801.677	923.551.913.161,85
Belanja Operasi	511.901.906.714,05	517.439.019.579,73	582.664.244.546,55	621.477.260.893	602.731.372.377,85
Belanja Pegawai	286.229.161.198,00	290.635.690.990	341.227.696.755	419.136.260.422	482.660.761.050
Belanja Barang Dan Jasa	216.805.591.727,05	203.443.748.164,73	206.106.268.384,55	190.714.924.207	102.459.686.579
Belanja Bunga	0	0	0	0	5.984.848.484,85
Belanja Hibah	7.450.653.789,00	22.759.580.425	35.230.279.407	11.126.076.264	11.126.076.264
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RAPBD 2026
1	2	3	4	5	6
Belanja Bantuan Sosial	1.416.500.000,00	600.000.000	100.000.000	500.000.000	500.000.000,00
Belanja Modal	156.236.433.484,00	182.700.144.208	125.988.888.811,50	95.824.417.638	165.574.417.638
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	31.035.410.792,00	28.662.841.889	18.786.391.695	12.930.533.980	12.930.533.980
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	28.309.558.041,00	41.754.600.518	36.377.117.554,50	12.078.521.500	37.123.921.500
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	95.939.001.903,00	110.801.545.523	69.195.557.134	66.952.035.608	111.656.635.608
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	952.462.748,00	1.481.156.278	1.629.822.428	3.863.326.550	3.863.326.550,00
Belanja Tidak Terduga	524.831.500,00	886.938.096	325.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	524.831.500,00	886.938.096	325.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000,00
Belanja Transfer	144.766.444.630,00	154.621.155.794	158.626.806.907	151.946.123.146	151.946.123.146
Belanja Bagi Hasil	1.429.878.630,00	1.789.251.994	2.368.134.718	3.214.236.746	3.214.236.746,00
Belanja Bantuan Keuangan	143.336.566.000,00	152.831.903.800	156.258.672.189	148.731.886.400	148.731.886.400,00
Surplus / (Defisit)	(12.733.889.659,10)	39.774.135.759,86	1.714.881.039,93	(19.230.737.000)	70.234.848.484,85

Sumber: BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin tetap berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana.

Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari pada belanja daerah maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN). Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur pembiayaan daerah di bawah ini akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit atau surplus. Rincian realisasi pembiayaan Tahun 2022 – 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2026

URAIAN	Realiasasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RAPBD 2026
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.304.725.000,85	27.317.749.314,49	56.279.527.625,42	24.730.737.000	98.462.121.212,12
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	50.207.842.591,10	27.070.835.341,75	56.279.527.625,42	24.730.737.000	28.712.121.212,12

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RAPBD 2026
1	2	3	4	5	6
Anggaran Sebelumnya					
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-		-	69.750.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00	10.500.000.000	10.500.000.000	5.500.000.000	28.227.272.727,27
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-			
Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000	10.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah (Pokok Utang)	-	-	-	-	22.727.272.727,27
PEMBIAYAAN NETTO	39.804.725.000,85	16.817.749.314,49	45.779.527.625,42	19.230.737.000	70.234.848.484,85
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	27.070.835.341	56.591.885.074,35	47.494.408.665,35	0	0

Sumber: BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2022 - 2025

a. Kebijakan penerimaan pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Untuk menutup defisit keuangan daerah akibat rencana belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang ditujukan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah yang belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan kapasitas riil keuangan daerah. Mekanisme dan teknis pelaksanaan pinjaman daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

1. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
2. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang pelayanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik

serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air bersih sesuai dengan target RPJMD dan SPM yaitu 100%.

6. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menentukan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
7. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)

1. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2026 bersaldo nol.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

1. Kebijakan Pembiayaan Kolaboratif

Kebijakan strategis daerah Kabupaten Rote Ndao adalah kualitas sumber daya manusia dan penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, permasalahan ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup berkelanjutan, serta penanggulangan bencana, pengelolaan potensi unggulan terutama pariwisata dan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya kolaborasi berbagai *stakeholder* dengan sumber pembiayaan di luar dari APBD Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian rencana program kegiatan prioritas yang belum dianggarkan melalui APBD dapat dibiayai melalui sumber anggaran lainnya baik dari APBN, APBD Provinsi, Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun melalui skema kerja sama pemerintah daerah dan perusahaan. Dana CSR di Kabupaten Rote Ndao bersumber dari beberapa

perusahaan antara lain ASTRA Foundation, Bank NTT, Bank BNI dan Bank BRI. Beberapa LSM yang sedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah antara lain:

Tabel 3.14
Kolaborasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Nama Lembaga Swadaya Masyarakat	Bidang Kegiatan	Keterangan
1.	PM <i>Childfund</i>	Peningkatan SDM anak dan keluarga	
2.	STIR	Pendidikan	
3.	Regional 1000 Cita Bangsa	Stunting	
4.	Regional <i>World Food Programme</i> (WFP)	Pangan	
5.	Regional Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP)	Kesehatan	
6.	UNICEF	Pendidikan dan Kesehatan	
7.	Momentum	AKI/AKB dan Stunting	
8.	UNDP Astea-2 Rote Ndao	Pemberdayaan masyarakat dan perubahan iklim	
9.	Yapeka Rote Ndao	Konservasi alam pesisir	
10.	Surf Aid	Kesehatan dan Stunting	
11.	Garamin	Difabel	

Sumber: Bapelitbangda Kab. Rote Ndao, 2025

2. Pinjaman Daerah

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, menyadari akan tantangan dan kebutuhan dalam membiayai pembangunan di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya fiskal dari APBD Kabupaten Rote Ndao, pilihan pinjaman daerah menjadi alternatif yang dapat memberikan solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah wajib memperhatikan beberapa prinsip dasar, seperti penggunaan pinjaman untuk kegiatan investasi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Perencanaan pinjaman daerah dapat menjadi langkah strategis guna mengatasi keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki dampak strategis dan signifikan bagi perkembangan daerah. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2026 merencanakan melakukan pinjaman daerah sebesar Rp.69.750.000.000, diharapkan melalui pinjaman daerah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rote Ndao yaitu: **Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif.**

Untuk mendukung penerapan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi.
3. Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya
4. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan

Tujuan pembangunan adalah rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam periode tertentu sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Tujuan menggambarkan arah dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah, baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran yang lebih terukur dari tujuan pembangunan. Sasaran menggambarkan hasil spesifik yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan indikator yang jelas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Target indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berbasis elektronik		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,83	62,50	65,00
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah	Poin	89,29	90,00	91,00
		Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan		Persentase kualitas Infrastruktur berkelanjutan	%	49,52	53,09	54,22
		Meningkatnya Pembangunan infrastruktur	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	44,83	46,61	48,45
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74
		Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	108,99	107,00	106,00
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,17	77,59	77,76
3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,40	66,58	66,77
			Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul	Indeks Pendidikan	Poin	0,629	0,632	0,634
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	3,60	4,50
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	%	1,98	2,48	2,98
			Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	%	6,35	7,35	8,35
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	0,63	24,71	7,12
5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	25,78	24,51	23,24
		Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,40	2,36
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95
			Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	50,43	51,24	52,05
		Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	64,66	65,77	66,39
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,653	0,660	0,673

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 tidak terlepas dari isu strategis nasional, provinsi serta mencermati hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, capaian indikator makro daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi, termasuk berbagai perkembangan dan dinamika yang berkembang saat Musrenbang tahun 2025.

Adapun isu strategis nasional sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
6. Transformasi Sistem Pangan
7. Transformasi Energi Baru Terbarukan

Isu strategis provinsi antara lain:

1. Transformasi Sosial:
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola:

Isu strategis kabupaten antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang;
5. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas;

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.2.2 Tema dan Prioritas pembangunan

1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2026, pemerintah pusat telah menetapkan Tema dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu **Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’. Untuk mencapai target sasaran pembangunan, ditetapkan prioritas nasional sebagai Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari delapan prioritas pembangunan diatas, memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2
17 Program prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik cepat

Program Prioritas		Program Hasil Terbaik Cepat	
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Pemberantasan kemiskinan.	5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi	8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif		
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.		
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.		
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani		
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.		
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.		

Program Prioritas		Program Hasil Terbaik Cepat	
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam		
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.		
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.		

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kegiatan Prioritas Utama

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)
Prioritas Nasional 2	2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest
	3	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan
	5	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7	Pembangunan pangan akuatik (blue food)
	8	Pembangunan pangan hewani
	9	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	10	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11	Peningkatan penyediaan energi
	12	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energ
	12	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	13	Konservasi sumberdaya air
	14	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
	15	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	16	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	17	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	18	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	19	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	20	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	21	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
	22	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	23	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	24	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	25	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	26	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	27	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	28	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas BorobudurYogyakarta-Prambanan
	29	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramen
	30	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
	31	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo
	32	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
Prioritas Nasional 4	33	Pengembangan koperasi sektor produksi
	34	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	35	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	36	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	37	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	38	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	39	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	40	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	41	Penurunan kematian ibu dan anak
	42	Pencegahan dan penurunan stunting
	43	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	44	Penuntasan TBC
	45	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	46	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	47	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis
	48	Investasi pelayanan kesehatan primer
	49	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
	50	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	51	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
Prioritas Nasional 5	54	Pengembangan hilirisasi Nikel
	55	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	56	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	57	Pengembangan hilirisasi Timah
	58	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	59	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	60	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	61	Pengembangan hilirisasi Kimia
	62	Pengembangan industri semikonduktor
	63	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	64	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	65	Pengembangan industri dirgantara
	66	Pengembangan KEK Sei Mangkei
	67	Pengembangan KIT Batang
	68	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	69	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	70	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	71	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	72	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
	73	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
	74	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	75	Pencegahan tindak pidana korupsi
	76	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN
	77	Transformasi digital layanan publik prioritas
	78	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	79	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	80	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	81	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	82	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel. 4.4 Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
1.	Pengentasan Kemiskinan	1	Penanggulangan Kemiskinan
		2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3	Sekolah Rakyat
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate
3.	Kesehatan untuk semua	1	Stunting
		2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3	Jaminan Kesehatan Nasional
		4	Penuntasan TBC
		5	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4	Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1	Pengendalian Inflasi
		2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
		3	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

2. Tema dan prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026

Tema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah **“Peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan
2. Pemberdayaan komunitas
3. Pemerataan infrastruktur berkelanjutan
4. Pemerataan akses dan layanan kesehatan
5. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
6. Reformasi birokrasi dan HAM
7. Kolaborasi ayo bangun NTT

Selain program prioritas yang merupakan pilar dari Gubernur dan Wakil Gubernur juga terdapat Dasa Cita yang merupakan program pembangunan daerah antara lain:

1. Dasa Cita 1 : Dari ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern, dan Aman;
2. Dasa Cita 2 : Milenial dan Perempuan Motot Kreativitas Lokal;
3. Dasa Cita 3 :Wisata NTT Pengerak Ekonomi Lokal;
4. Dasa Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat;
5. Dasa Cita 5 : Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan bebas Stunting
6. Dasa Cita 6 : Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan;
7. Dasa Cita 7 : Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
8. Dasa Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Pubbblik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
9. Dasa Cita 9 : Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
10. Dasa Cita 10 : Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

3. Tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, tema dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 serta tema dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

Tema RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 adalah **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Ekonomi Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan Melalui Penguatan Sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Peternakan Dalam Bingkai Ita Esa**. Tema tersebut di atas memiliki arti bahwa pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sumber daya manusia yang berkualitas, ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan daerah yakni sektor pariwisata, pertanian, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 ditekankan pada program dan kegiatan yang benar-benar secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta membiayai program/kegiatan yang bersifat mandatori dan mendesak. Prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, melalui:
 - a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan perangkat desa berupa pelatihan dan beasiswa
 - b. Optimaslisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi
 - c. Penerapan sistem kearsipan digital dan tanda tangan elektronik
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
 - e. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
 - f. Peningkatan pelayanan publik dengan penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya, melalui:
 - a. Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin dan berprestasi
 - b. Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler berbasis budaya bagi siswa dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta SD/SMP unggul
 - c. Peningkatan layanan kesehatan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis siklus hidup
 - d. Peningkatan sarana, prasarana dan mutu pendidikan
 - e. Pencegahan dan penanganan stunting.
3. Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal, melalui:
 - a. Fasilitasi UMKM berstandar BPOM dan perluasan pasar
 - b. Peningkatan pariwisata (festival dan promosi budaya, turnamen, *car free day*)
 - c. Pemberian modal usaha inklusif
 - d. Peningkatan pengawasan barang bersubsidi dan bahan pokok lainnya

- e. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
- f. Peningkatan jumlah kunjungan wisata
- g. Peningkatan potensi pendapatan asli daerah
- h. Peningkatan sarana prasarana perdagangan
- 4. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial), melalui:
 - a. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kelompok rentan lainnya
 - b. Penguatan integrasi penanganan PMKS
 - c. Pemberian bantuan sosial, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan
 - d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
- 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada kawasan strategis dan daerah kantung kemiskinan
 - b. Peningkatan infrastruktur sanitasi dan air bersih
 - c. Penataan kota Ba'a berkelanjutan
 - d. Peningkatan layanan persampahan kota Ba'a
 - e. Peningkatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Adapun program program pembangunan daerah yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dianalogikan sebagai **“Mbule Sio”**. Kata MBULE: diartikan sebagai Bulir yang merupakan satuan atau kuantifikasi dari hasil panen seperti padi/jagung. Kata SIO diartikan sebagai angka Sembilan yang secara adat memiliki makna kesempurnaan. Secara harafiah **“MBULE SIO”** merupakan 9 Bulir agenda/tekad untuk membawa transformasi bagi masyarakat Rote Ndao secara Bersama sama dalam 5 tahun ke depan. Adapun program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang tertuang dalam **“MBULE SIO”** yakni:

A. MBULE ESA

Diartikan sebagai ROTE NDAO AMANAH, yaitu dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dilaksanakan secara bersih, efektif, transparan, profesional dan anti korupsi sehingga mampu mengadminstrasikan keadilan sosial di Kabupaten Rote Ndao.

B. MBULE DUA

Diartikan sebagai ROTE NDAO CERDAS, merupakan strategi transformasi pendidikan melalui peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan yang berdaya saing dalam mewujudkan generasi siswa yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Adaptif) dengan fasilitas yang memadai dan inklusif serta didukung tenaga kependidikan tersebar secara merata dan berkualitas, dengan kurikulum yang inovatif pada muatan lokal.

C. MBULE TELU

Diartikan sebagai ROTE NDAO SEHAT, yang merupakan transformasi kesehatan dengan mengoptimalikan pembangunan Kesehatan secara MAHIR (Merata, Aksesibel, Holistik, dan

Integratif) serta Upaya meningkatkan fasilitas kesehatan yang memadai dengan didukung oleh tenaga medis terlatih dalam perawatan efektif dan empatik untuk pencegahan penyakit.

D. MBULE HA

Diartikan sebagai ROTE NDAO SEJAHTERA, melalui upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penyediaan fasilitas layanan dasar yang memadai.

E. MBULE LIMA

Diartikan sebagai ROTE NDAO BERTANI, untuk memajukan sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.

F. MBULE NE

Diartikan sebagai ROTE NDAO BERDAYA, dengan memperkuat pilar ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, BUMDES dan mendorong terciptanya Desa Mandiri untuk meningkatkan peluang kerja.

G. MBULE HITU

Diartikan sebagai ROTE NDAO AKSES, yaitu membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial yang berkeadilan.

H. MBULE FALU

Diartikan sebagai ROTE NDAO MALOLE, dengan memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata sebagai motor transisi ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kunjungan wisatawan.

I. MBULE SIO

Diartikan sebagai ROTE NDAO HARMONI, dengan mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan juga mengembangkan budaya olah raga.

4.2.3. Sinkronisasi Isu Strategis, Tema, Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Makro Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026

Sinkronisasi isu strategis merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan arah pembangunan antara Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Nasional. Sinkronisasi ini bertujuan agar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Sinkronisasi isu strategis serta prioritas pembangunan Kab. Rote Ndao tahun 2026 dengan Provinsi NTT dan Nasional sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sinkronisasi Isu Strategis Kabupaten Rote Ndao
dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026

Nasional	Provinsi NTT	Kab. Rote Ndao
1. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	1. Transfermasi Sosial	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		2. Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan
2. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	2. Transformasi Ekonomi	3. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
		4. Peningkatan kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang
3. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	3. Transformasi Tata Kelola	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas
		7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.	3. Transformasi Tata Kelola	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	1. Transformasi Sosial	5.Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
6. Transformasi Sistem Pangan	2. Transformasi Ekonomi	3. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
7. Transformasi Energi Baru Terbarukan	2. Transformasi Ekonomi	3. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Secara keseluruhan, sinkronisasi isu strategis Kabupaten Rote Ndao dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026 menunjukkan arah kebijakan yang harmonis dan saling mendukung. Dengan memperkuat koordinasi dan integrasi antarlevel pemerintahan,

Rote Ndao dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan daerah kepulauan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam kerangka pembangunan nasional.

Tema pembangunan merupakan rumusan singkat yang menggambarkan arah dan prioritas utama pembangunan pada suatu tahun perencanaan. Sinkronisasi tema pembangunan adalah proses penyalarsan arah, fokus, dan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan dan tema pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi, agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan harmonis, saling mendukung, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tabel 4.6
Sinkronisasi Tema Pembangunan Kabupaten Rote Ndao
dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026

Nasional	Provinsi NTT	Kab. Rote Ndao
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Ekonomi Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan Melalui Penguatan Sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Peternakan Dalam Bingkai Ita Esa

Sinkronisasi tema pembangunan merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap tingkatan pemerintahan bergerak searah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui sinkronisasi ini, pembangunan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Sinkronisasi prioritas pembangunan merupakan proses penting dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Rote Ndao selaras dengan kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Rote Ndao
dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2026

Nasional		Provinsi NTT		Kab. Rote Ndao	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	4	Kesejahteraan bersama; jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat	4	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial)
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	1	Dari ladang dan laut ke pasar : efisien, modern dan aman	3	Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan

Nasional		Provinsi NTT		Kab. Rote Ndao	
	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				berbasis potensi dan kearifan lokal
		3	Wisata NTT penggerak ekonomi lokal		
		7	Jalan, air, listrik, rumah layak huni : mewujudkan NTT yang sejahtera	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta lingkungan hidup yang berkelanjutan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Dari ladang dan laut ke pasar : efisien, modern dan aman	3	Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal
		2	Milenial dan perempuan motor kreativitas lokal	4	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial)
		3	Wisata NTT penggerak ekonomi lokal		
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2	Milenial dan perempuan motor kreativitas lokal	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya
		3	Wisata NTT penggerak ekonomi lokal	4	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial)

Nasional		Provinsi NTT		Kab. Rote Ndao	
		5	Posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting		
		6	Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi unggulan		
		9	Membangun NTT digital : akses merata, komunikasi lancar	1	Peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Dari ladang dan laut ke pasar : efisien, modern dan aman	3	Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1	Dari ladang dan laut ke pasar : efisien, modern dan aman	3	Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal
		2	Milenial dan perempuan motor kreativitas lokal	4	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial)
		3	Wisata NTT penggerak ekonomi lokal		
		7	Jalan, air, listrik, rumah layak huni : mewujudkan NTT yang sejahtera	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta lingkungan hidup yang berkelanjutan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	8	Pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin	3	Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal
		10	Ayo bangun NTT, kolaborasi bersama	1	Peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	10	Ayo bangun NTT, kolaborasi bersama	1	Peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik

Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Nasional Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan dalam arah dan substansi kebijakan pembangunan. Ketiganya berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal dan membangun manusia yang unggul dan berdaya saing.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dan proyeksi pencapaian kinerja pemerintah sebelumnya. Prioritas pembangunan tahun 2026 ini adalah pedoman untuk mengarahkan pola pembangunan yang berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk fokus pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029.

Tabel 4.8
Keselarasan Asta Cita, Dasa Cita dan Mbule Sio

ASA CITA	DASA CITA	MBULE SIO	KETERKAITAN DENGAN ASTA CITA DAN DASACITA
1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1 Dari Ladang dan Laut ke Pasar, Efisien, Modern dan Aman	1 Rote Ndao Amanah	- ASTA CITA 1 DAN 7 - DASA CITA 4, 8 DAN 9
2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2 Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	2 Rote Ndao Cerdas	- ASTA CITA 4 - DASA CITA 6
3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	3 Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	3 Rote Ndao Sehat	- ASTA CITA 4 - DASA CITA 5

ASA CITA	DASA CITA	MBULE SIO	KETERKAITAN DENGAN ASTA CITA DAN DASACITA
4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	4 Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat	4 Rote Ndao Sejahtera	- ASTA CITA 6 - DASA CITA 7
5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5 Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	5 Rote Ndao Bertani	- ASTA CITA 5 - DASA CITA 1
6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6 Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	6 Rote Ndao Berdaya	- ASTA CITA 6 - DASA CITA 2
7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	7 Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni, Mewujudkan NTT yang Sejahtera	7 Rote Ndao Akses	- ASTA CITA 7 - DASA CITA 4, 8 DAN 9
8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	8 Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	8 Rote Ndao Malole	- ASTA CITA 3 - DASA CITA 3
	9 Membangun NTT Digital, Akses Merata, Komunikasi Lancar	9 Rote Ndao Harmoni	- ASTA CITA 8 - DASA CITA 10
	10 Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama		

Sumber : RPJMD Kab. Rote Ndao tahun 2025-2029

Target indikator sasaran makro pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Rote Ndao tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026

No.	Indikator	Target Nasional	Target Prov. NTT	Target Kab. Rote Ndao
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80 - 6,30	4,43 - 5,01	4,50
2	PDRB Per Kapita (Juta)	27,0 – 27,7	24,71	27,19
3	Inflasi (%)	2,5±1	3,5 ± 1	1,70
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 - 7,50	18,12 – 18,74	23,24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,45 – 4,66	2,36
6	Indeks Gini (Poin)	0,377 – 0,380	0,319 – 0,324	0,320
7	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,57	0,463	
	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)			67,77
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14	61,82	-
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,67	80,19	77,76

Sumber : RKPD Provinsi NTT 2026
RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029

4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi daerah adalah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, melalui berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam sistem birokrasi yang akan mendorong daerah berkembang lebih maju. Oleh karena itu, inovasi merupakan faktor dalam sistem pemerintahan daerah dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah dan daya saing daerah.

Inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima serta peningkatan daya saing daerah. Selama periode 2023 - 2025 terdapat inovasi unggulan daerah Kab. Rote Ndao yang sudah dilaksanakan antara lain:

Tabel 4.10

Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023-2025

NO	INOVASI DAERAH	TAHUN AWAL PELAKSANAAN	TAHAPAN	OUTCOME	KETERKAITAN DENGAN MBULE SIO	PERANGKAT DAERAH
1	E-LKPJ	2023	Inisiasi	Terwujudnya pelaporan dokumen LKPJ/LPPD Kabupaten Rote Ndao yang tepat waktu	Rote Ndao Amanah	Bag. Adm. Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat
2	TULI DEI	2023	Inisiasi	Meningkatnya kualitas pelayan masyarakat	Rote Ndao Amanah	Kecamatan Landuleko
3	ADI MANJA (Aplikasi Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa)	2023	Inisiasi	Meningkatnya pelayanan informasi terkait permasalahan kesehatan jiwa	Rote Ndao Sehat	Dinas Kesehatan
5	Pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi/ MANALOLO	2023	Inisiasi	Meningkatnya pendataan terhadap orang asing, organisasi asing, serta imigran ilegal di wilayah hukum Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao Harmoni	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah Menggunakan Media Elektronik	2023	Inisiasi	Meningkatnya penerimaan PAD	Rote Ndao Amanah	Badan Pendapatan Daerah
6	e_Lapor Bu KesDa (Elektronik_Laporan Bulanan Kesehatan Daerah)	2023	Inisiasi	Terwujudnya data perencanaan, evaluasi serta penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat guna	Rote Ndao Sehat	Dinas Kesehatan
7	IMA, TAFEFELE BALI' HITA ADAT NA	2023	Inisiasi	Meningkatkan pendapatan para pengrajin tenun ikat	Rote Ndao Harmoni, Rote Ndao Sejahtera, Rote Ndao Berdaya	Kecamatan Rote Barat
8	PeKA DESA	2023	Inisiasi	Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Rote Ndao Amanah	Inspektorat
9	TI' LANGGA	2023	Inisiasi	Meningkatnya cakupan wilayah rentan pangan	Rote Ndao Amanah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10	Potensi Dan Tantangan Budidaya Lagundi	2024	Inisiasi	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Rote Ndao Sejahtera, Rote Ndao Berdaya	Kecamatan Rote Timur
11	Optimalisasi Sistem Monitoring Dana Desa	2024	Inisiasi	Meningkatnya Pengelolaan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Rote Ndao Amanah	Kecamatan Rote Barat

NO	INOVASI DAERAH	TAHUN AWAL PELAKSANAAN	TAHAPAN	OUTCOME	KETERKAITAN DENGAN MBULE SIO	PERANGKAT DAERAH
	Menggunakan Aplikasi Tunggu Ndon					
12	BA'ARUNASITA	2025	Inisiasi	Terwujudnya Urban Farming di kota Ba'a melalui gerakan Barunasita	Rote Ndao Bertani	Kecamatan Lobalain
13	MAI FALI (Manajemen Akurasi Informasi: Fasilitasi Aksi Layanan Integrasi)	2025	Inisiasi	Meningkatnya informasi/data stunting	Rote Ndao Sehat	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
14	HOHOLOK (Sistem Informasi Supervisi Pekerjaan Konstruksi)	2025	Inisiasi	Meningkatnya sistem pengawasan teknis pekerjaan	Rote Ndao Akses	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	SOI SALAK (Sistem Optimalisasi Tindak Lanjut Audit Keuangan)	2025	Inisiasi	Meningkatnya pengawasan internal daerah	Rote Ndao Amanah	Inspektorat
16	E-ASET MALOLE (Digitalisasi Pengelolaan Aset Daerah)	2025	Inisiasi	Meningkatnya pengelolaan aset perangkat daerah	Rote Ndao Amanah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	ESA OFFICE (Ekosistem Smart Office)	2025	Inisiasi	Meningktanya transformasi digital birokrasi	Rote Ndao Amanah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18	MASANE'DA ASyIK (Alarm System Informasi Klaim)	2025	Inisiasi	Meningkatnya tata kelola data RSUD dalam pelayanan	Rote Ndao Sehat	Rumah Sakit Umum Daerah
19	ENO INA (Sistem Kemantapan Jalan Kabupaten)	2025	Inisiasi	Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap	Rote Ndao Akses	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Nusa Fua Adminduk	2025	Inisiasi	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	Rote Ndao Amanah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21	SIO ESA (Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan)	2025	Inisiasi	Meningkatnya pelaporan kegiatan ormas	Rote Ndao Harmoni	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INOVASI DAERAH	TAHUN AWAL PELAKSANAAN	TAHAPAN	OUTCOME	KETERKAITAN DENGAN MBULE SIO	PERANGKAT DAERAH
22	UMA NELAU	2025	Inisiasi	Meningkatnya data kondisi rumah tidak layak huni (RTLH)	Rote Ndao Sejahtera	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
23	LAYNDES SIA HITA UМЕНA	2025	Inisiasi	Meningkatnya pelayanan publik di desa berbasis digital	Rote Ndao Amanah	Kecamatan Rote Barat
25	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	2023	Uji Coba	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pemerintah.	Rote Ndao Amanah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	SIPEKERJA	2024	Uji Coba	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Rote Ndao Amanah	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
26	SIPEKERJA	2024	Uji Coba	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Rote Ndao Amanah	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
27	TERAS PETANG (Ternak Sehat Petani Tenang)	2024	Uji Coba	Meningkatnya kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao Bertani	Dinas Peternakan
28	ROTEKS (Rote Teknologi Kesehatan Ternak)	2024	Uji Coba	Meningkatnya produktivitas ternak, kesehatan hewan dan porfitabilitas usaha peternakan	Rote Ndao Bertani	Dinas Peternakan
29	Program Generasi Emas Rote Ndao (PERMATA) 2045	2024	Uji Coba	Meningkatnya generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045	Rote Ndao Cerdas, Rote Ndao Sehat	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	ROTE NDAO TANGGUH	2023	Penerapan	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Rote Ndao Sejahtera dan Rote Ndao Harmoni	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	AU MUFA'DA	2023	Penerapan	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat	Rote Ndao Amanah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
32	TULU FALI	2023	Penerapan	Meningkatnya distribusi bantuan sosial yang adil dan merata bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao Sejahtera	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33	OFALANGGA	2023	Penerapan	Meningkatnya Penyampaian Laporan LKPJ Pemerintah Daerah	Rote Ndao Amanah	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	INOVASI DAERAH	TAHUN AWAL PELAKSANAAN	TAHAPAN	OUTCOME	KETERKAITAN DENGAN MBULE SIO	PERANGKAT DAERAH
34	ROTE SMART SERVICE	2023	Penerapan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan responsif	Rote Ndao Amanah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
35	Elektronifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	2024	Penerapan	Meningkatnya PAD sektor retribusi pelayanan pasar	Rote Ndao Amanah	Badan Pendapatan Daerah
36	KOKOLAK	2024	Penerapan	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rote Ndao Amanah	Inspektorat
37	BASAN TESA	2024	Penerapan	Meningkatnya kualitas pencatatan administrasi barang milik perangkat daerah	Rote Ndao Amanah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
38	Festival Rote Malole	2025	Penerapan	Meningkatnya PAD sektor Pariwisata	Rote Ndao Malole	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*), serta pendekatan substansi secara *holistik-tematik*, *integratif*, dan *spasial* dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bersumber pendanaan dari APBD Kabupaten Rote Ndao.

5.1 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Rekapitulasi pagu indikatif pada program berdasarkan urusan dalam RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.1
REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM PER URUSAN TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
1	DINAS PENDIDIKAN				269.978.308
1.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	221.949.015
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	80,48	47.495.753
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	29,71	
		Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,99	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI	%	67,21	
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS	%	64,06	
		Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI	%	72,67	
		Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS	%	65,46	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,74	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	72,13	
		Angka Putus Sekolah SD/MI/ Paket A	Oran g	0	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	Oran g	0	
		Satuan PAUD yang menerapkan PAUD HI	%	41,03	
		Jumlah sekolah inklusif (PAUD)	Satua n Pendi dikan	3	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan Guru	%	0,45	233.539
		Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	61,14	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	24,37	150.000
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase siswa yang memahami bahasa dan sastra daerah	%	83,33	150.000
2	DINAS KEPEMUDAAAN DAN OLAHRAGA				7.221.692
2.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	135.182
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	100,00	4.845.107
		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	100,00	
		Persentase pemuda berprestasi dan tidak mampu yang memperoleh beasiswa	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlit yang berprestasi	%	87,73	2.166.403
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	100,00	75.000
		Persentase anggota pramuka yang aktif	%	100,00	
3	DINAS KESEHATAN				92.273.322
3.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	60.902.157
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI)	per 100.0 00 KH	115,00	23.149.909
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita)	%	28,20	
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100,00	
		Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Warga Negara Dengan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100,00	
		Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	72,00	
		Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	%	26,89	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	78,43	7.800.403
		Persentase Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas	%	84,67	
		Persentase Pemenuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe sesuai standar (7 Spesialis (4 dasar dan 3 Penunjang)	%	100,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	81,00	142.950
		Persentase Posbindu Aktif	%	100,00	
		Persentase Orang yang discreaning di Posbindu	%	100,00	
		Persentase Posyandu Aktif	%	100,00	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman	%	95,00	277.901
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	100,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				103.000.000
4.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	5.337.984
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	35,75	16.655.384
		Persentase embung/bendung kondisi baik	%	54,44	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak (%)	%	77,11	10.950.000
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	%		5.000.000
		Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	%		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	84,54	6.498.082

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung layak fungsi	%	44,44	181.674
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	48,46	57.976.874
		Persentase jalan strategis desa terbangun	%	47,16	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	7,39	100.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,55	300.000
		Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan sesuai RTRW	%	86,00	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				11.405.400
5.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.593.022
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	95.200
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/kota Yang Ditangani	%	11,74	2.241.217
		Persentase rumah layak huni terbangun	%	57,51	
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	300.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kehati	%	9,09	250.000
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	23,81	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Angka	77,76	225.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah	%	100,00	25.000
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani dan dikelola	%	75,94	5.475.960
5.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas lahan pemda bersertifikat	%	12,29	200.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			6.307.329	
6.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	5.544.150
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
6.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda/Perkada Kabupaten/Kota	%	0,07	664.502
		Persentase pelanggaran Perda/Perbup yang ditindak	%	100,00	
		Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100,00	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	%	100,00	98.677
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2.646.530	
7.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.398.367
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
7.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	1.248.163
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana	%	66,31	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
8	DINAS SOSIAL				2.156.612
8.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.832.891
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
8.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	69,20	96.785
		persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100,00	
		Persentase Pelayanan dan penanganan Fakir Miskin	%	100,00	
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	%	100,00	155.243
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,06	39.352
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	50,39	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	11,58	
		Persentase Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	
		Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	%	100,00	
	Program Pemberdayaan Sosial	persentase lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkatnya kualitas dalam pelayanan sosial	%	100,00	32.340
		Persentase pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	%	100,00	
9	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				2.371.215
9.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.741.580
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
9.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	91,67	144.292
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	%	50,00	35.000
	Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	40,48	226.500
9.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	0,80	89.999
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	4,25	133.842
		Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	%	100,00	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.839.513
10.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.989.540
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
10.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	100,00	20.000
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	64,00	
		Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	100,00	
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	84,43	20.600
		Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,05	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100,00	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga sejahtera	%	12,15	20.402
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	87,35	234.112
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Poin	50,55	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak (0 s/d <18 Tahun)	%	0,11	
10.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	3,02	302.900
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	26,70	
		Cakupan Pengendalian Penduduk	%	65,00	
		Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan	%	15,17	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontarsepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	52,50	3.324.457
		Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	64,10	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	5,70	
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	18,50	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	%	100,00	925.000
		Indeks Lansia Berdaya	%	55,90	
		Indeks Pengasuhan Remaja	%	80,50	
		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera	%	29,70	
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				13.847.130
11.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	6.517.101
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
11.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	65,50	37.499
		Persentase cadangan pangan daerah	%	10,23	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan desa rawan pangan	%	2,33	57.834
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100,00	45.438
11.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Produksi Tanaman Pangan	%	1,62	5.339.279
		Persentase Produksi Hortikultura	%	0,81	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	69,17	1.800.000
		Persentase prasarana pertanian yang diadakan	%	23,33	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	2,28	49.976
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.500.674
12.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.990.424
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
12.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	42,00	178.356
		Persentase penerbitan KK	%	100,00	
		Persentase penerbitan KTP Elektronik	%	100,00	
		Persentase Kepemilikan identitas kependudukan Digital	%	30,60	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	96,00	90.270
		Persentase penerbitan Akta Perkawinan	%	72,00	
		Persentase penerbitan Akta Kematian	%	96,00	
		Persentase penerbitan Akta Perceraian	%	45,00	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	%	100,00	241.624
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.413.101
13.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.353.874
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
13.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100,00	25.706
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100,00	643.206
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100,00	
		Persentase Pemberdayaan Bumdes	%	29,70	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD)	%	100,00	350.314
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100,00	
		Persentase Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi	%	100,00	
14	DINAS PERHUBUNGAN				9.364.395
14.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	4.424.395
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
14.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas laut	%	23,84	70.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang kondisi ideal	%	25,28	4.870.000
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				3.488.241
15.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.389.058
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
15.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	100,00	10.716
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	90,05	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,55	1.066.011.
15.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS)	Poin	2,00	13.850
15.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	8.603

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN				7.996.256
16.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.673.923
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
16.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	33,66	20.000
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	2,44	62.000
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang telah terfasilitasi untuk pengembangan produk	%	0,54	2.741.001
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	%	7,66	50.000
16.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0,33	1.993.710
		Persentase Pemenuhan sarana Pedagang Kaki Lima (PKL)	%	100,00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan pengawasan barang-barang kebutuhan pokok, penting dan bersubsidi	%	100,00	65.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	35,48	16.480
16.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil dan Menengah	%	12,66	346.641
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana IKM	%	100,00	5.500
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar	%	55,92	27.500
		Persentase Industri yang telah memiliki ijin	%	5,40	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				2.775.304
17.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.150.100
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
17.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100,00	125.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	93,00	18.944
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	%	1,00	137.779
		Persentase Ketaatan Berinvestasi	%	42,00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	50,00	161.507
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	%	100,00	25.000
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				5.201.657
18.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.222.219.
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
18.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100,00	59.697
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda ditetapkan	%	22,05	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	9,97	362.257
		Persentase warisan nilai Seni dan Budaya Daerah yang dilestarikan	%	100,00	
18.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	100,00	519.650
		Persentase penyelenggaraan event pariwisata	%	26,88	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	90,91	1.883.429
		Persentase destinasi wisata yang dikelola	%	21,51	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	100,00	154.403
		Persentase SDM kepariwisataan	%	4,11	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				1.769.615
19.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.506.388

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
19.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	72,40	230.256
		Persentase kunjungan ke perpustakaan	%	100,00	
19.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip statis pada pemerintah	%	100,00	23.079
		Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (terdata dan tertata secara baik)	%	100,00	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	4,55	9.891
		Persentase in aktif yang telah di buatkan daftar arsip	%	5,00	
		Persentase aktif statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	2,50	
20	DINAS PERIKANAN				4.346.031
20.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.626.640
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
20.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.407	1.318.430
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan	%	8,60	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/k pt/Ta hun	67,19	349.047
		Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan	%	30,00	
		Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih	%	18,33	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	22,00	1.051.913
		Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih	%	0,35	
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan	%	1,92	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
21	DINAS PETERNAKAN				9.695.956
21.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	4.466.721
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
21.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Produksi Komoditas Peternakan	%	4,72	4.416.284
		Cakupan pemanfaatan luas lahan hijauan makanan ternak (HMT)	%	11,00	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan yang diadakan	%	10,83	220.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	%	6,00	508.733
		Persentase pengiriman ternak ke luar daerah	%	100,00	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin	%	100,00	84.218
		Persentase pemasaran hasil produksi peternakan	%	1,03	
22	BAGIAN UMUM				19.217.291
22.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	19.217.291
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
22.2	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	2.897.973
23	BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN DAN KESRA				9.545.060
23.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	7.787.270
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
23.2	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100,00	1.757.790
		Cakupan pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	
		Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	%	100,00	
24	BAGIAN HUKUM				256.379
24.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	97.268
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
24.2	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah	%	100,00	114.867
		Persentase Rancangan Perda yang Diharmonisasi dan diasistensi	%	100,00	
25	BAGIAN ORGANISASI				340.000
25.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	165.414
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
25.2	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	%	100,00	204.585
26	BAGIAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				600.000
26.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	134.964
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
26.2	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100,00	465.036
27	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				850.600
27.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	120.000
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
27.2	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	17,22	727.600
		Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	Skor	10,59	
		Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	Skor	26,67	
28	SEKRETARIAT DPRD				27.606.850
28.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	16.861.695
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
28.2	SEKRETARIAT DPRD				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	ketepatan penetapan perda APBD Tahun N	%	100,00	10.745.155
		persentase penetapan Ranperda Tahun N	%	100,00	
		persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100,00	
		Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100,00	
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	100,00	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				5.137.226
29.1	NON URUSAN				

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.855.343
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
29.2	PERENCANAAN				
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu	%	100,00	1.119.700
		Persentase data pembangunan daerah yang terupdate	%	100,00	
		Persentase pemenuhan kegiatan monev untuk perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA)	%	100,00	797.000
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK,PPM, PSDA)	%	100,00	
		Persentase capaian indikator kinerja daerah (Bidang IK,PPM, PSDA)	%	86,00	
		Persentase capaian indikator kinerja program (Bidang IK,PPM, PSDA)	%	86,00	
29.3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100,00	334.557
		persentase fasilitasi terkait penelitian,pengembangan,pengkajian dan penerapan di daerah	%	100,00	
29.4	PENGELOLAAN PERBATASAN				
	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Fasilitasi Program Pengelolaan Perbatasan	%	100,00	30.626
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				215.347.644
30.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	51.318.937
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
30.2	KEUANGAN				
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	34,29	163.481.025
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	9,50	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		Persentase Penerbitan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	%	100,00	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1,54	547.681
		Penetapan SSH Tepat Waktu	%	50	
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	100,00	
31	BADAN PENDAPATAN DAERAH				6.933.656
31.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	6.047.105
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
21.2	KEUANGAN				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,30	886.550
		Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	15,95	
		Persentase Realisasi Pajak daerah	%	100,00	
		Persentase Realisasi retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain	%	77,87	
		Persentase Realisasi PBB	%	67,20	
		Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi pendapatan	%	100,00	
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM				3.972.391
32.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.224.298
		persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
32.2	KEPEGAWAIAN				
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	100,00	1.598.765
		persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	%	100,00	
		Persentase pengembangan SDM ASN	%	100,00	
		persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	100,00	
		Persentase data kepegawaian yang ter-update, akurat, cepat dan tepat	%	100,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
		melaksanakan peraturan disiplin			
		Cakupan Pembinaan Korpri	%	100,00	
32.3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	100,00	149.326
		Persentase pengembangan SDM ASN	%	100,00	
		persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	%	100,00	
33	INSPEKTORAT DAERAH				4.546.760
33.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	3.326.118
		persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
33.2	INSPEKTORAT DAERAH				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	Temuan	9,00	1.213.869
		Persentase Review dokumen Perangkat Daerah (RKA, RENSTRA, LKIP, DAK dan dokumen lainnya)	%	100,00	
		Persentase Review dokumen pemerintah Daerah (RKPD, Perubahan RKPD, RPJPD, RPJMD, LKPJ, LPPD, LKIP, KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan dan dokumen lainnya)	%	100,00	
		Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level	1,00	
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level	1,00	
		Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang Profesional	%	84,00	
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	%	80,00	
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	80,00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Nilai Integritas Pencegahan Korupsi	%	76,51	6.772
34	KECAMATAN LOBALAIN				3.675.709
34.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	3.597.230
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
34.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	9.655
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	950.792
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	22.170
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	16.201
35	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT				2.254.029
35.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.203.984
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
35.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	6.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	30.545
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	5.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	8.500
36	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA				1.381.407
36.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.328.637
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
36.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	11.115
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	12.074
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	10.200
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	19.380

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
37	KECAMATAN ROTE BARAT				1.390.876
37.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.356.493
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
37.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	9.825
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	13.200
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	5.100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	6.258
38	KECAMATAN ROTE SELATAN				1.312.254
38.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.242.400
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
38.2	KECAMATAN				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	24.854
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	23.500
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	16.000
39	KECAMATAN ROTE TENGAH				2.350.179
39.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.999.609
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
39.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	5.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	25.030
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	29.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	5.000
40	KECAMATAN PANTAI BARU				2.455.007
40.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.320.223
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
40.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	2.400
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	118.263
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	6.660
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	9.860
41	KECAMATAN ROTE TIMUR				1.412.203
41.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
41.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	12.120
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	45.395
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	35.717
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	20.000

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
42	KECAMATAN NDAO NUSE				785.352
42.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	661.832
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
42.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	25.348
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	33.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	15.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	10.200
43	KECAMATAN LANDULEKO				922.168
43.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	116.287
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
43.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	7.500
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	15.165
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	7.500
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	10.000
44	KECAMATAN LOAHOLU				1.431.352
44.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.360.212
		persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	2026	
				TARGET	PAGU (x 1.000)
44.2	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	11.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	25.639
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	17.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	100,00	7.500
45	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.053.702
45.1	NON URUSAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.394.513
		persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	
		persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00	
		persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00	
45.2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100,00	662.836
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Pembinaan Aktivitas Partai Politik	%	100,00	632.798
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	%	100,00	13.642
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan ketahan ekonomi, sosial dan budaya	%	100,00	25.472
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	%	100,00	324.440
JUMLAH					923.551.913

5.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Pemerintah Pusat

Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Pemerintah Pusat merupakan upaya strategis untuk memastikan keterpaduan arah pembangunan nasional dan daerah. Pada Tahun 2026, sinkronisasi ini dilakukan dengan merujuk pada dokumen perencanaan nasional, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema nasional: **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif "**.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyesuaikan arah kebijakan, prioritas dan program pembangunan daerah dengan 8 Prioritas Nasional Tahun 2026, yaitu:

Tabel 5.2
Kontribusi Anggaran Kabupaten Rote Ndao terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026

No.	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1.	Prioritas 1 : Mempekokoh ideologi pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.891.677.546,00	0,94
2.	Prioritas 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	12.059.612.050,00	5,98
3.	Prioritas 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	60.508.964.960,00	30,01
4.	Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	82.804.554.484,00	41,07
5.	Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	32.987.304.400,00	16,36
6.	Prioritas 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	8.238.558.908,00	4,09
7.	Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	1.093.504.178,00	0,54
8.	Prioritas 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	2.023.282.546,00	1,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sangat menitikberatkan pembangunan SDM (Prioritas 4) sebagai landasan utama pembangunan jangka panjang, disusul oleh pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja (Prioritas 3). Distribusi anggaran ini menunjukkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial-kultural dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional Tahun 2026.

5.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Pemerintah Provinsi

Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan langkah strategis untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan. Sinergi ini penting untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan provinsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menetapkan tema pembangunan: **“Peningkatan Produktifitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif”**.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyelaraskan arah kebijakan, prioritas, dan program pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan provinsi, antara lain:

Tabel 5.3
Kontribusi Anggaran Kabupaten Rote Ndao terhadap Prioritas Provinsi NTT
Tahun 2026

No.	Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1.	Dari ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern, dan Aman;	17.637.950.272,00	7,39
2.	Milenial dan Perempuan Motot Kreativitas Lokal;	11.428.279.476,00	4,79
3.	Wisata NTT Pengerak Ekonomi Lokal;	5.288.226.210,00	2,22
4.	Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat	573.141.000,00	0,24
5.	Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan bebas Stunting	36.333.770.722,00	15,23
6.	Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan;	49.754.531.527,00	20,85
7.	Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	112.903.987.901,00	47,31

No.	Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
8.	Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	4.612.636.322,00	1,93
9.	Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar	91.433.800,00	0,04
10.	Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama	-	-

Distribusi anggaran tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara aktif mensinergikan kebijakan dan program prioritasnya dengan arah pembangunan Provinsi NTT, khususnya pada aspek jalan, air, listrik dan rumah layak huni. Sinkronisasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus mendukung terwujudnya visi Provinsi NTT sebagai wilayah tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

5.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta memastikan sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan strategis. Prioritas tersebut difokuskan pada upaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor-sektor kunci pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 antara lain:

Tabel 5.4
Kontribusi Anggaran Kabupaten Rote Ndao terhadap Prioritas Kabupaten Tahun 2026

No.	Prioritas Kabupaten	Alokasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1.	Rote Ndao Amanah (Mbule Esa)	21.603.394.282,28	5,36
2.	Rote Ndao Cerdas (Mbule Dua)	48.259.548.322,00	11,97
3.	Rote Ndao Sehat (Mbule Telu)	31.371.165.222,00	7,78
4.	Rote Ndao Sejahtera (Mbule Ha)	161.138.484.403,00	39,98
5.	Rote Ndao Bertani (Mbule Lima)	15.137.881.633,00	3,76
6.	Rote Ndao Berdaya (Mbule Ne)	8.278.591.672,00	2,05
7.	Rote Ndao Akses (Mbule Hitu)	100.835.548.468,00	25,02

No.	Prioritas Kabupaten	Alokasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
8.	Rote Ndao Malole (Mbule Falu)	8.033.443.110,00	1,99
9.	Rote Ndao Harmoni (Mbule Sio)	8.422.141.100,00	2,09

Komposisi alokasi anggaran menggambarkan arah strategis pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang menempatkan ROTE NDAO SEJAHTERA (Mbule Ha), yaitu melalui upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penyediaan fasilitas layanan dasar yang memadai. Pendekatan ini selaras dengan semangat mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang sejahtera, berdaya saing dan berkarakter budaya.

5.5 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan SPM yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut:

TABEL 5.5
RENCANA PROGRAM YANG MENDUKUNG STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
A	BIDANG PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persentase partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (%)	100.00	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase partisipasi anak usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar (%)	99.93		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase partisipasi anak usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100.00		
B	BIDANG KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100.00	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	100.00		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100.00		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100.00		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) (%)	100.00		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 Tahun) (%)	100.00	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 Tahun ke atas) (%)	100.00		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100.00		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%)	100.00		
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100.00		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (%)	100.00		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (%)	100.00	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
C	BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga berakses air minum layak (%)	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak (%)	100.00		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
D	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (%)	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Perumahan
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (%)	100.00		
E	BIDANG TRANTIBUM LINMAS					
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Hukum Perda/Perkada (%)	13.98	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	2,500.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	150.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	50.00		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatnya penanggulangan kebakaran (%)	100.00		
F	BIDANG SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi (%)	78.59	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi (%)	100.00		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	23.90	Dinas Sosial	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin (%)	98.30		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat (%)	100.00		

5.6 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan

wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya dengan pendanaan bersifat indikatif seperti pada tabel berikut:

TABEL 5.6
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2026 (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	5	10	61	269.978.308.000
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	8	19	7.221.692.000
3	Dinas Kesehatan	5	18	304	92.273.322.825
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	13	34	103.000.000.000
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	16	29	11.405.400.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	21	6.307.329.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	22	2.646.530.000
8	Dinas Sosial	5	14	23	2.156.612.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	11	18	2.500.674.044
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	9	28	3.413.101.000
11	Dinas Perhubungan	3	10	18	9.364.395.000
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	14	18	3.488.241.000
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8	14	21	7.996.256.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	11	21	2.775.304.000
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	12	28	5.201.657.000
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	11	23	1.769.615.000
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	24	41	7.839.513.000
18	Dinas Perikanan	4	13	17	4.346.031.000
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9	25	35	13.847.130.000
20	Dinas Peternakan	6	16	20	9.695.956.000
21	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5	12	20	2.371.215.000
22	Sekretariat Daerah				
	Bagian Umum	1	10	29	19.217.291.000
	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2	6	15	9.545.060.470
	Bagian Hukum	2	6	12	256.379.000
	Bagian Organisasi	1	7	16	340.000.000
	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2	9	19	600.000.000

NO	OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2026 (RP)
1	2	3	4	5	6
	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	2	8	15	850.600.000
23	Sekretariat DPRD	2	15	43	27.606.850.000
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5	17	44	5.137.226.486,57
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	50	215.347.644.161,28
26	Badan Pendapatan Daerah	2	8	21	6.933.656.000
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	12	25	3.972.391.000
28	Inspektorat	3	11	28	4.546.760.000
29	Kecamatan Lobalain	3	9	29	3.675.709.000
30	Kecamatan Rote Barat Laut	4	9	19	2.254.029.000
31	Kecamatan Rote Barat Daya	2	7	18	1.381.407.000
32	Kecamatan Rote Barat	3	8	17	1.390.876.000
33	Kecamatan Rote Selatan	3	8	19	1.312.254.000
34	Kecamatan Rote Tengah	2	8	21	2.350.179.000
35	Kecamatan Pantai Baru	3	10	20	2.455.007.000
36	Kecamatan Rote Timur	3	9	19	1.412.203.256
37	Kecamatan Ndao Nuse	2	7	18	785.352.000
38	Kecamatan Landuleko	4	8	19	922.168.000
39	Kecamatan Loaholu	3	8	17	1.431.352.000
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	18	3.053.702.000
JUMLAH		178	526	1.676	923.551.913.161

Sumber: Hasil Pengolahan Data Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2026

Matriks program, kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disajikan secara terperinci pada lampiran RKPD Tahun 2026.

5.7 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Perangkat Daerah yang menjadi sumber usulan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total 14 usulan
2. Bidang perekonomian dan sumber daya alam:
 - a. Dinas Peternakan terdapat 1 program, 1 kegiatan, 1 sub kegiatan dengan total 21 usulan
 - b. Dinas Perikanan terdapat 1 program, 1 kegiatan, 1 sub kegiatan dengan total 58 usulan
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 2 program, 2 kegiatan, 3 sub kegiatan dengan total usulan 38 usulan

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
 - a. Dinas Pendidikan terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan 5 usulan
 - b. Dinas Kesehatan terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan 3 usulan

Rekapan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.7
Rekapan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Total Usulan	Verifikasi Perangkat Daerah	Verifikasi TAPD	Usulan Ditotak	Usulan Disetujui
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	14	14	0	14
2	Dinas Pendidikan	5	5	5	0	5
3	Dinas Kesehatan	3	3	3	0	3
4	Dinas Perikanan	58	58	58	0	58
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38	38	38	0	38
6	Dinas Peternakan	21	21	21	0	21
Total		139	139	139	0	139

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dinilai secara sistematis dan berkesinambungan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengukur, menilai dan membandingkan baik secara kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao. Indikator-indikator tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

6.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,68	63,00	65,00
2	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah	Poin	89,29	90,00	91,00
6	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Misi 2 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan dimulai dari wilayah timur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi				
7	Persentase kualitas Infrastruktur berkelanjutan	%	49,52	53,09	54,22
8	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	44,83	46,61	48,45
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	108,99	107,00	106,00
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,17	77,59	77,76
	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya				
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,40	66,58	66,77
13	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50
14	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20
15	Indeks Pendidikan	Poin	0,629	0,632	0,634
	Misi 4 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal				
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	3,60	4,50
17	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	%	1,98	2,48	2,98
18	Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	%	6,35	7,35	8,35
19	Persentase Peningkatan PAD	%	0,63	24,71	7,12
	Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan				
20	Tingkat Kemiskinan	%	25,78	24,51	23,24
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,40	2,36
22	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95
23	Indeks pemberdayaan Gender	Poin	50,43	51,24	52,05
24	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	64,66	65,77	66,39
25	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,653	0,660	0,673

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 baik tingkat dampak (*Impact*) maupun tingkat hasil (*outcome*), yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum. Penetapan IKD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2 dibawah ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,27	72,11	72,95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	46,50	51,50	56,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Persentase rumah tangga memiliki air minum layak (%)	%	73,37	75,82	77,11	Dinas PUPR
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	N/A	0,465	0,473	Dinas PKPLH
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,17	77,59	77,76	Dinas PKPLH
6	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	%	80,69	83,26	84,54	Dinas PUPR
7	Persentase Sampah yang Ditangani dan Dikelola	%	56,78	75,01	75,94	Dinas PKPLH
8	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	Poin	0,016	0,018	0,020	Dinas PKPLH
9	Indeks Risiko Bencana	Poin	108,99	107,00	106,00	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,52	0,55	0,58	BPBD
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,61	1,56	1,54	DP3AP2KB, BPS
12	Kepadatan Penduduk	Orang/Km²	119,48	121,37	123,27	DP3AP2KB, BPS
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	3,60	4,50	Dinas Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Koperindag, DPMPPTSP dan Transnaker, BPS
2	Tingkat Kemiskinan	%	25,78	24,51	23,24	Dinas Sosial, BPS
3	PDRB per Kapita ADHB	Rupiah	25.603.988	26.396.124	27.188.260	Dinas Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Koperindag, DPMPPTSP, Transnaker, BPS

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,40	2,36	Dinas Nakertrans, BPS
5	Indeks Gini	Poin	0,323	0,321	0,320	Dinas Sosial, BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,40	66,58	66,77	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPS
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50	Dinas Kesehatan, BPS
8	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	116,99	116,00	115,00	Dinas Kesehatan
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	15,21	12,62	11,63	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20	Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB
11	Cakupan pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Covorage)	%	25,00	66,00	67,45	Dinas Kesehatan
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	89,00	89,50	90,00	Dinas Kesehatan
13	Indeks Pendidikan	Poin	0,629	0,632	0,634	Dinas Pendidikan, BPS
14	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83	7,88	7,92	Dinas Pendidikan, BPS
15	Harapan lama sekolah	Tahun	13,23	13,28	13,32	Dinas Pendidikan, BPS
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,53	10,53	10,56	Dinas Pendidikan
17	Angka Literasi	%				Dinas Pendidikan
	SD	%	50,88	53,38	55,88	
	SMP	%	60,05	61,15	62,25	
18	Angka Numerasi	%				Dinas Pendidikan
	SD	%	48,06	50,96	53,86	
	SMP	%	56,42	57,92	59,42	
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65,02	65,25	66,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	N/A	0,465	0,473	DKISP Data pengukuran
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	26,63	27,00	36,89	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,88	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
23	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95	Dinas Sosial
24	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	3,18	3,58	4,17	Dinas Nakertrans
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	86,46	86,46	86,87	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
26	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	N/A	54,18	54,62	Disbudpar
27	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	15,00	15,00	16,00	DP3AP2KB
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,810	0,804	0,797	DP3AP2KB
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	85,60	85,85	86,09	DP3AP2KB
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,43	51,24	52,05	DP3AP2KB, BPS
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Rasio Ketergantungan	%	63,67	63,04	62,28	Dinas Transnaker, BPS
2	Persentase koperasi berkualitas	%	19,70	24,39	25,37	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
3	Pesentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	4,60	5,36	6,13	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
4	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan	%	0,014	0,015	0,016	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag, BPS
5	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi dan Makan Minum	%	0,20	0,20	0,20	Disbudpar, BPS
6	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	16.374	19.000	22.000	Disbudpar
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,82	72,54	73,26	Dinas Nakertrans
8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	40,18	41,00	42,00	Bapperida
9	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	N/A	67,04	67,84	PKPLH, Dinas PKP
10	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	%	N/A	26,20	27,79	PKPLH, Dinas PKP
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	%	N/A	5,30	5,40	Dinas KISP
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	9,75	9,80	9,85	Dinas PMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Perindag, BPS
13	Realisasi Investasi Daerah	Milyar Rupiah	334,13	350,13	366,13	Dinas PMPTSP
14	Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	%	32,88	34,72	36,56	Dinas PUPR
15	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	64,66	65,77	66,39	Dinas PKPLH, Dinas PUPR
16	Persentase rumah layak huni terbangun	%	57,15	57,33	57,51	Dinas PKPLH
17	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	44,83	46,61	48,45	Dinas PUPR
18	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74	Dinas PUPR
19	Persentase desa maju dan berkembang	%	75,00	79,46	82,14	DPMPD, 11 Kec
20	Persentase Desa Mandiri	%	-	-	0,89	DPMPD, 11 Kec

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
21	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,653	0,664	0,673	DPMPD, 11 Kec
22	Rasio Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	0,492	0,557	0,622	Bapenda
23	Tingkat Inflasi	%	1,53	1,75	1,70	Bagian Ekbang, Dinas KUKM Perindag, BPS
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,74	65,00	65,00	Bagian Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55	Dinas KISP
3	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	2,57	2,57	2,58	Bagian Organisasi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	Poin	89,29	89,30	89,32	Bagian Organisasi
5	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD, Inspektorat
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	62,68	63,00	65,00	Bagian Organisasi
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	Bagian Organisasi
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	N/A	76,00	77,00	BKAD
9	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,10	2,24	2,31	BKAD
10	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00	BKPSDMD
11	Persentase Penegakan Perda	%	20,00	25,00	30,00	Satpol PP
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
13	Konflik SARA	Jumlah Peristiwa	0	0	0	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama
14	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	24,58	22,58	20,58	Satpol PP
15	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	15	15	16	Bagian Hukum
16	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,10	3,57	4,04	Bapperida
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH						
A.	URUSAN WAJIB YANG BERAKITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.	PENDIDIKAN					
1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,23	13,28	13,32	Dinas Pendidikan, BPS
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83	7,88	7,92	Dinas Pendidikan, BPS
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	86,59	70,39	80,48	Dinas Pendidikan
4	Persentase Capaian PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif)	%	25,64	35,90	41,03	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	92,23	92,34	92,41	Dinas Pendidikan
6	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	76,63	78,20	78,57	Dinas Pendidikan

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
7	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	14,68	29,21	29,71	Dinas Pendidikan
8	Angka putus sekolah	Orang	15	12	6	Dinas Pendidikan
9	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	67,20	69,56	70,65	Dinas Pendidikan
10	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	97,05	98,50	99,50	Dinas Pendidikan
11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,28	95,00	96,74	Dinas Pendidikan
12	Angka Literasi					
	SD	%	50,88	53,38	55,88	Dinas Pendidikan
	SMP	%	60,05	61,15	62,25	Dinas Pendidikan
13	Angka Numerasi					
	SD	%	48,06	50,96	53,86	Dinas Pendidikan
	SMP	%	56,42	57,92	59,42	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN					
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	116,99	116,00	115,00	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	15,21	12,62	11,63	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 KH	15,79	15,00	14,00	Dinas Kesehatan
6	Prevalensi wasting balita	%	14,60	13,90	13,60	Dinas Kesehatan
7	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	50,00	58,33	58,33	Dinas Kesehatan
8	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
9	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	83,00	88,00	88,50	Dinas Kesehatan
10	Insidensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	106,47	417,00	362,00	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Covarage)	%	25,00	66,00	67,45	Dinas Kesehatan
12	Prevalensi HIV/AIDS	Per 1.000 Penduduk	0,34	0,30	0,30	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	44,83	46,61	48,45	Dinas PUPR
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74	Dinas PUPR
3	Persentase rumah tangga bersanitasi dan memiliki air minum layak	%	80,69	83,26	84,54	Dinas PUPR
4	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97,31	97,50	97,55	Dinas PUPR
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	33,47	35,23	37,00	Dinas PUPR

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
6	Persentase jalan strategis desa terbangun	%	41,26	42,74	47,16	Dinas PUPR
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	31,79	33,77	35,75	Dinas PUPR
8	Persentase rumah tangga memiliki air minum layak	%	73,37	75,82	77,11	Dinas PUPR
9	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	%	80,69	83,26	84,54	Dinas PUPR
10	Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan sesuai RTRW	%	81,47	85,00	86,00	Dinas PUPR
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%	12,25	12,20	12,15	Dinas PKPLH
2	Persentase rumah layak huni terbangun	%	57,15	57,33	57,51	Dinas PKPLH
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	24,58	22,58	20,58	Satpol PP
2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	%	20,00	26,67	33,33	Satpol PP
3	Persentase gangguan tantribun dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
4	Waktu Tingkat tanggap (respons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
6	BENCANA					
1	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	108,99	107,00	106,00	BPBD
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,52	0,55	0,58	BPBD
3	Persentase penanganan pra bencana	%	100,00	100,00	100,00	BPBD
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	107,00	100,00	100,00	BPBD
5	Persentase penanganan pasca bencana	%	66,00	65,65	66,31	BPBD
7	SOSIAL					
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95	Dinas Sosial
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani	%	76,37	70,02	70,68	Dinas Sosial
B.	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
1	TENAGA KERJA					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,82	72,54	73,26	Dinas Nakertrans
2	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	26,63	27,00	36,89	Dinas Nakertrans
3	Persentase tenaga kerja lokal yang terampil dan produktif (bersertifikat)	%	5,46	11,25	17,32	Dinas Nakertrans
4	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	3,18	3,60	4,24	Dinas Nakertrans

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
5	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Nakertrans
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	85,60	85,85	86,09	DP3AP2KB
2	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,11	0,05	0,04	DP3AP2KB
3	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	Nilai	54,40	55,60	56,80	DP3AP2KB
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,43	51,24	52,05	DP3AP2KB, BPS
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,810	0,804	0,797	DP3AP2KB
6	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	DP3AP2KB
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	51,56	53,54	54,53	DP3AP2KB
3	PANGAN					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,27	72,11	72,95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	55,50	60,50	65,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Persentase ketersediaan pangan utama	%	37,83	39,02	40,02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	PERTANAHAN					
1	Persentase luas lahan Pemda bersertifikat	%	10,04	11,17	12,29	Dinas PKPLH
5	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,17	77,59	77,76	Dinas PKPLH
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	53,33	70,30	70,50	Dinas PKPLH
3	Persentase sampah yang ditangani dan dikelola	%	56,78	75,01	75,94	Dinas PKPLH
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Poin	89,95	90,00	91,00	Dinas Kependudukan dan Capil
2	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	94,19	96,00	96,20	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	88,77	90,00	92,00	Dinas Kependudukan dan Capil
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	64,39	66,00	68,00	Dinas Kependudukan dan Capil
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	37,42	41,50	42,00	Dinas Kependudukan dan Capil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,653	0,664	0,673	DPMPD
2	Persentase desa maju dan	%	75,00	79,46	82,14	DPMPD

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	berkembang					
3	Persentase Bumdes berkembang	%	23,76	26,73	29,70	DPMPD
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,61	1,56	1,54	DP3AP2KB
2	Total fertility rate (TFR) / Angka Kelahiran Total	Angka	3,04	3,01	3,02	DP3AP2KB
3	Angka Prevalensi Kontarsepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	50,32	51,00	52,50	DP3AP2KB
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	29,40	28,00	26,70	DP3AP2KB
9	PERHUBUNGAN					
1	Persentase kualitas layanan perhubungan	%	33,98	36,36	36,91	Dinas Perhubungan
2	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	13,97	96,45	97,16	Dinas Perhubungan
3	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	53,99	27,93	29,64	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Poin	99,90	76,70	76,73	DKISP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55	DKISP
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	skor	100,00	90,00	95,00	DKISP
4	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	%	0,84	2,52	10,92	DKISP
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase koperasi berkualitas	%	19,70	24,39	25,37	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Persentase koperasi aktif	%	84,73	32,68	33,66	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
3	Persentase peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah	%	3,07	3,07	3,72	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
12	PENANAMAN MODAL					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PMPTSP	Poin	92,04	92,30	92,96	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.242	1.392	1.542	DPMPTSP
3	Realisasi Investasi Daerah	Milyar Rupiah	334	350	366	DPMPTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	0,10	0,10	0,13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	%	0,20	0,28	0,33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Persentase atlit yang mendapatkan medali dalam	%	21,62	86,86	87,73	Dinas Kepemudaan

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	Kejurprov/Kejurda					Olahraga
14	STATISTIK					
1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS)	Poin	1,34	1,75	2,00	Dinas KISP
2	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral	%	70,00	80,00	90,00	Dinas KISP
15	PERSANDIAN					
1	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40,61	41,00	41,50	Dinas KISP
2	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
16	KEBUDAYAAN					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	N/A	54,18	54,62	Disbudpar
2	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	18,68	23,08	24,18	Disbudpar
3	Persentase sanggar seni yang aktif	%	25,77	30,93	36,08	Disbudpar
17	PERPUSTAKAAN					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65,02	65,25	66,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Poin	91,08	91,10	91,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	Nilai	70,07	71,30	72,40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN					
1	Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	%	13,64	13,65	20,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	52,27	59,09	65,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C.	LAYANAN URUSAN PILIHAN					
1	PARIWISATA					
1	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi Makan dan Minum	%	0,002	0,003	0,004	Disbudpar
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	16.374	19.000	22.000	Disbudpar
3	Persentase Desa Wisata	%	16,96	17,86	18,75	Disbudpar
2	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Persentase produksi perikanan meningkat	%	7,98	8,00	8,02	Dinas Perikanan
2	Produksi perikanan laut	Ton	13.621	14.710	15.890	Dinas Perikanan
3	Produksi perikanan darat	Ton	18,40	19,00	22,00	Dinas Perikanan
4	Konsumsi ikan	kg/ perkapita/Tahun	59,51	64,26	67,19	Dinas Perikanan
3	PERTANIAN					
1	Persentase Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan	%	0,30	30,70	43,40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Produksi sektor pertanian	Ton	156.134,07	100.000,00	105.000,00	Dinas Pertanian

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
						dan Ketahanan Pangan
3	Produksi sektor perkebunan	Ton	5.149,76	5.000,00	5.100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	3,16	3,42	4,72	Dinas Peternakan
5	Populasi ternak besar	ekor	101.251	103.151	110.237	Dinas Peternakan
6	Populasi ternak kecil	ekor	144.377	149.278	153.757	Dinas Peternakan
7	Populasi ternak unggas	ekor	118.310	124.350	130.567	Dinas Peternakan
4	PERDAGANGAN					
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	7,76	8,66	9,08	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	5,02	5,59	7,76	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
5	PERINDUSTRIAN					
1	Rasio Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan	%	1,36	0,015	0,016	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian	%	7,23	9,09	10,00	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
6	TRANSMIGRASI					
1	Persentase transmigran yang mandiri	%	53,80	53,82	53,85	Dinas Transnaker
2	Persentase transmigran lokal yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Transnaker
D.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pemkesra
2	Persentase layanan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pemkesra
3	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pemkesra
4	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,74	65,00	65,00	Bagian Hukum
5	Persentase produk hukum daerah yang diharmonisasi dan diasistensi	%	166,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
6	Presentase fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan Kasus perdata dan TUN pemerintah daerah	%	83,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
7	Persentase publikasi produk hukum daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	166,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
8	Persentase capaian layanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
9	Persentase perangkat daerah	%	98,04	100,00	100,00	Bagian

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu					Perekonomian dan Adm Pembangunan
10	Persentase BUMD yang sehat	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
11	Ketersediaan data potensi sumberdaya alam	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Skor	36,66	43,21	54,46	Bagian PBJ
13	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	14,51	16,62	17,22	Bagian PBJ
14	Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	Skor	8,82	8,82	10,59	Bagian PBJ
15	Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	Skor	13,33	17,78	26,67	Bagian PBJ
16	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
17	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
18	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
19	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK, Anjab dan Peta Jabatan	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
20	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	poin	90,22	90,30	90,32	Bagian Organisasi
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	Poin	89,29	89,30	89,32	Bagian Umum
23	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokolan	%	92,16	100,00	100,00	Bagian Umum
2	SEKRETARIAT DPRD					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD	poin	85,50	85,58	85,66	Sekretariat DPRD
2	Persentase rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah	%	175,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
3	Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	%	170,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
3	PERENCANAAN					

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
1	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Poin	20,42	21,00	22,00	Bapperida
2	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	Bapperida
3	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	%	96,49	85,00	86,00	Bapperida
4	KEUANGAN					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	NA	76,00	77,00	BKAD
3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,10	2,24	2,31	BKAD
4	Penetapan APBD	Tepat waktu / Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD
5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,16	5,00	4,50	BKAD
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	BKAD
7	Persentase pengelolaan aset daerah	%	75,65	75,74	75,79	BKAD
8	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	0,63	24,71	7,12	Bapenda
9	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan	%	3,92	5,32	5,34	Bapenda
10	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	102,36	100,00	100,00	Bapenda
5	KEPEGAWAIAN					
1	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00	BKPSDMD
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kopetensi	%	92,18	93,75	95,05	BKPSDMD
3	Persentase terpenuhinya formasi ASN sesuai dengan ANJAB dan ABK	%	58,69	59,00	60,25	BKPSDMD
4	Persentase data ASN yang diperbaharui tepat waktu	%	88,72	89,72	90,72	BKPSDMD
5	Persentase ASN kinerja baik	%	99,03	99,15	99,30	BKPSDMD
6	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,73	99,75	99,80	BKPSDMD
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	62,00	64,00	67,00	BKPSDMD
2	Persentase ASN yang telah lulus pendidikan dan pelatihan struktural	%	100,00	100,00	100,00	BKPSDMD
7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	40,18	41,00	42,00	Bapperida
2	Persentase implementasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan inovasi daerah	%	100,00	100,00	100,00	Bapperida
8	PENGAWASAN					

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
1	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	Temuan	9,00	10,00	9,00	Inspektorat
2	Persentase evaluasi AKIP perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
3	Level Maturitas SPIP	Level	0	1,00	1,00	Inspektorat
4	Level Kapabilitas APIP	Level	1,00	1,00	1,00	Inspektorat
5	Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang profesional	%	76,00	80,00	84,00	Inspektorat
6	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	%	75,00	77,00	80,00	Inspektorat
7	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	75,33	75,95	76,55	Inspektorat
G	KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN LOBALAIN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lobalain	Poin	86,83	86,85	86,87	Kec. Lobalain
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Lobalain
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Lobalain
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Lobalain
2	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote barat Laut	Poin	92,28	93,00	93,50	Kec. RBL
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. RBL
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. RBL
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. RBL
3	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote barat Daya	Poin	80,00	81,00	82,00	Kec. RBD
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. RBD
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	100,00	100,00	Kec. RBD
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	100,00	100,00	Kec. RBD
4	KECAMATAN ROTE BARAT					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Barat	Poin	88,17	89,00	90,00	Kec. Rote Barat
2	persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Barat
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Barat
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Barat
5	KECAMATAN ROTE SELATAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Selatan	Poin	88,83	89,50	90,00	Kec. Rote Selatan
2	Persentase penyelesaian	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Selatan

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	pengaduan masyarakat					
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Selatan
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Selatan
6	KECAMATAN ROTE TENGAH					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Tengah	Poin	87,78	82,00	83,00	Kec. Rote Tengah
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Tengah
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Tengah
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Tengah
7	KECAMATAN PANTAI BARU					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pantai Baru	Poin	86,67	80,00	82,00	Kec. Pantai Baru
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Pantai Baru
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Pantai Baru
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	85,00	90,00	100,00	Kec. Pantai Baru
8	KECAMATAN ROTE TIMUR					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Timur	Poin	86,39	87,50	88,00	Kec. Rote Timur
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Timur
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Timur
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Rote Timur
9	KECAMATAN NDAO NUSE					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ndao Nuse	Poin	91,72	93,00	93,50	Kec. Ndao Nuse
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Ndao Nuse
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Ndao Nuse
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Ndao Nuse
10	KECAMATAN LANDU LEKO					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Landu Leko	Poin	87,83	88,50	89,00	Kec. Landu Leko
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Landu Leko
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Landu Leko
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Landu Leko
11	KECAMATAN LOAHOLU					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Loaholu	Poin	91,39	92,00	92,50	Kec. Loaholu
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Loaholu

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	100,00	100,00	Kec. Loaholu
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	Kec. Loaholu
PEMERINTAHAN UMUM						
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	86,46	86,46	86,87	Badan Kesbangpol
3	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	24,55	45,45	68,18	Badan Kesbangpol
4	Persentase peran potensi paham radikal dan konflik sosial budaya yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						
A.	URUSAN WAJIB YANG BERAKITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.	PENDIDIKAN					
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	86,59	70,39	80,48	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	83,86	83,91	83,97	Dinas Pendidikan
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	86,59	70,39	80,48	Dinas Pendidikan
4	Persentase Penduduk usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pensisikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	14,68	29,21	29,71	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN					
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,07	0,06	0,06	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	58,13	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan	%	67,30	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	66,05	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	86,62	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	79,65	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
8	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	67,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	81,88	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Satandar	%	84,14	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
11	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	51,62	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Satandar	%	129,48	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Palayanan TBC Sesuai Standar	%	47,40	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	125,96	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	0,57	3,33	4,37	Dinas PUPR
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota	%	73,37	75,82	77,11	Dinas PUPR
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	80,69	83,26	84,54	Dinas PUPR
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	44,83	46,61	48,45	Dinas PUPR
5	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	6,09	6,09	7,39	Dinas PUPR
6	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	Dinas PUPR
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	Dinas PKPLH
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/kota	%	-	-	-	Dinas PKPLH
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	-	-	11,74	Dinas PKPLH

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/kota Yang Ditangani					
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	12,25	12,20	12,15	Dinas PKPLH
5	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Pada Kawasan Kumuh	%	-	-	11,44	Dinas PKPLH
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	Kantor Sat PolPP
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	20,00	25,00	30,00	Kantor Sat PolPP
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	90,91	100,00	100,00	Kantor Sat PolPP
4	Waktu Tanggap (Respons Time) Penanganan Kebakaran	Menit	7,09	10,00	12,00	Kantor Sat PolPP
6	SOSIAL					
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	%	8,61	9,68	10,52	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	90,83	100,00	100,00	Dinas Sosial
B.	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
1	TENAGA KERJA					
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,136	0,144	0,151	Dinas Transnaker
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	2.980.624.948	3.113.757.993	3.246.526.160	Dinas Transnaker
3	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	21,09	22,93	26,11	Dinas Transnaker
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/kota	%	67,48	69,11	73,17	Dinas Transnaker
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	0,08	0,06	0,05	DP3AP2KB
2	Persentase ARG pada Belanja	%	3,69	3,81	3,94	DP3AP2KB

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	Langsung APBD					
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	0,13	0,12	0,11	DP3AP2KB
3	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,17	77,59	77,76	Dinas PKPLH
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	56,78	75,01	75,94	Dinas PKPLH
3	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan,Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	3,59	4,10	5,13	Dinas PKPLH
4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Perekaman KTP Elektronik	%	94,19	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Capil
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	88,87	95,00	96,00	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	37,42	41,50	42,00	Dinas Kependudukan dan Capil
4	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	4,55	6,82	9,09	Dinas Kependudukan dan Capil
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	25,00	20,54	16,96	DPMPD
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	0	0,89	DPMPD
6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	50,32	51,00	52,50	DP3AP2KB
2	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	%	20,04	19,70	18,50	DP3AP2KB
7	PERHUBUNGAN					
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	81,50	81,50	81,50	Dinas Perhubungan
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	%	0,315	0,360	0,361	Dinas Perhubungan
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	-	-	DKISP
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	100,00	100,00	DKISP
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	%	84,84	100,00	100,00	DKISP

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota					
9	STATISTIK					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	DKISP
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	DKISP
10	PERSANDIAN					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40,61	41,00	41,50	DKISP
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase koperasi berkualitas	%	19,70	24,39	25,37	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Pesentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	4,60	5,36	6,13	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
12	PENANAMAN MODAL					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	86,00	91,00	93,00	DPMPTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	58	59	60	Dinas Kepemudaaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	85	86	87	Dinas Kepemudaaan dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	16	17	18	Dinas Kepemudaaan dan Olahraga
13	PERPUSTAKAAN					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	70,07	71,30	72,40	Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	56,80	60,80	64,80	Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan
14	KEARSIPAN					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	28,46	28,90	29,34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	%	56,80	60,80	64,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
C.	LAYANAN URUSAN PILIHAN					
1	PARIWISATA					
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	50.552.000	45.000.000	46.000.000	Disbudpar
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	76,20	83,36	85,74	Disbudpar
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	79,85	87,98	91,64	Disbudpar
4	Tingkat hunian akomodasi	%	39,39	42,93	50,51	Disbudpar
2	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota	Ton	12.378,00	12.678,00	13.078,00	Dinas Perikanan
3	PANGAN					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Hektar	5,00	5,20	5,40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	8,02	9,13	10,23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-56	-4,46	-6,67	Dinas Peternakan
4	PERDAGANGAN					
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	65,81	26,01	100,00	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	34,90	34,90	35,48	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
5	PERINDUSTRIAN					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1,85	2,18	2,52	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
6	PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,46	14,61	15,77	BKAD
2	Rasio PAD terhadap pendapatan	%	2,21	2,95	3,30	BKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0	1,00	1,00	Inspektorat
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	1,00	1,00	1,00	Inspektorat
5	Rasio belanja urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer	%	40,69	39,54	39,31	BKAD

\	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	11
	expenditures)					
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
7	PENGADAAN					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	Bagian PBJ
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	86,53	71,43	71,43	Bagian PBJ
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	48,17	10,04	10,19	Bagian PBJ
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	6,48	16,42	35,44	Bagian PBJ
8	KEPEGAWAIAN					
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,41	76,00	78,00	BKPSDM
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,77	24,00	26,00	BKPSDM
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,58	32,00	34,00	BKPSDM
9	MANAJEMEN KEUANGAN					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-0,29	-7,44	-5,15	BKAD
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-3,47	-25,15	-20,85	BKAD
3	Manajemen aset	Poin	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	BKAD
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,14	5,16	4,69	BKAD
10	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	99,97	99,95	99,95	BKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	BKAD

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berkenaan. RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi di masa mendatang. Penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dilakukan melalui proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Proses ini mencerminkan semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang berkelanjutan dan berkeadilan.

RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan tahun 2026, yaitu: **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Ekonomi Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan Melalui Penguatan Sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Peternakan Dalam Bingkai Ita Esa**". Dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sumber daya manusia yang berkualitas, ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan daerah yakni sektor pariwisata, pertanian, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan menjadi faktor kunci dalam memastikan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RKPD ini tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao.

Akhirnya, dengan ditetapkannya RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil. Semoga pelaksanaan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah kepulauan terdepan di wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. ROTE NDAO TAHUN 2026**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Dinas Pendidikan			269.978.308.000,00			269.623.773.330,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			269.978.308.000,00			269.623.773.330,00	
	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			269.978.308.000,00			269.623.773.330,00	
1	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	221.949.015.830,00			221.966.954.330,00	
	1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	32.982.500,00			36.148.000,00	
	1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	30.457.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32.148.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2.525.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	221.559.049.330,00			221.559.049.330,00	
	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2079 Orang/bulan	221.312.980.330,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	221.312.980.330,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64 Dokumen	246.069.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	246.069.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	57.093.500,00			57.093.500,00	
	1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	35.493.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35.493.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	163 Laporan	21.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	164.275.500,00			179.048.500,00	
	1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.374.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.374.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	33.650.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.503.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38.276.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.368.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.368.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	89.380.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	89.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	67.615.000,00			67.615.000,00	
	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.615.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	67.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68.000.000,00			68.000.000,00	
	1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	65.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, 2. Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, 3. Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, 4. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI, 5. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS, 6. Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI, 7. Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS, 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, 9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B, 10. Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, 11. Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B, 12. Satuan PAUD yang menerapkan	1. 93,91, 2. 25,32, 1. %, 2. %, 3. %, 4. 67,21, 5. 64,06, 4. %, 5. %, 6. %, 7. 9. 72,13, 10. 5, 11. 9. %. 10. Orang, 11.	47.495.753.170,00			47.123.280.000,00	
	1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-12 tahun Meningkatnya Rasio Ketersedian Sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7-12 tahun	100%	26.507.861.170,00			26.135.388.000,00	
	1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	175.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga Timur Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Lekona Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Hundihipo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							SD Longgo Koli	RBL		Busalangga Timur			
							SD Deteasa	Rotim		Hundihopo			
							SD Lelebe	Panbar		Lekona			
	1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	296.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	296.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	679.750.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	679.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	150 Satuan Pendidikan	18.249.310.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	18.249.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	70.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	582.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Papela Kab. Rote Ndao, Loaholu, Tasilo Kab. Rote Ndao, Loaholu, Pembri Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Tasilo Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Pembri	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	582.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							SD Negeri Papela	2 Ruang		Papela, Kecamatan Rote timur			
							SD Inpres Tasilo	2 Ruang		Tasilo, Kecamatan Loaholu			
							SD Negeri Oefoe	2 Ruang		Sedeoen, Kecamatan Rote Barat			
							SD Inpres Hurulai	2 Ruang		Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya			
							SD Negeri Ndao	2 Ruang		Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut			
1	1	2	2.01	48		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Tualima	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							SD Negeri Ndao	1 Unit		Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut			
1	1	2	2.01	49		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	50		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	150 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	51		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	43 Ruang	5.222.473.170,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga Barat Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga Timur Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Tualima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Helebeik Kab. Rote Ndao, Lobalain, Tuanatuk Kab. Rote Ndao, Lobalain, Baadale Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Suebela Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Nggodimeda Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Keoen Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Edalode Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Serubeba Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Ndaonuse	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							SD Gmit Noandale	3 Ruang		Lobalain			
							SD Negeri Nduadi	3 Ruang		Landu Leko			
							SD Negeri Dailafa	2 Ruang		Landu Leko			
							SD Inpres Edalode	3 Ruang		Panbar			
							SD Inpres Oehu	2 Ruang		Panbar			
							SD Negeri Landeoe	2 Ruang		RBL			
							SD Negeri Holomanu	3 Ruang		Ndao Nuse			
							SD Negeri Rarano	2 Ruang		Rotim			
							SD Gmit Oeulu	6 Ruang		Rotim			
							SD Negeri Sotimori	2 Ruang		Landu Leko			
							SDN Daelafa	3 Ruang		Landu Leko			
							SD Gmit Oebela	8 Ruang		Loaholu			
							SD Negeri Oebole	2 Ruang		Loaholu			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							SD/MI Darul Falah Oelaba	4 Ruang		Loholu			
							SD Gmit Oemaulain	1 Ruang		Lobalain			
							SD Negeri Oly	3 Ruang		Ndao Nuse			
							SD Negeri Mbiu	3 Ruang		Ndao Nuse			
							SD Gmit Kakaek	4 Ruang		Pantai Baru			
							SD Inpres Deranitan	2 Ruang		Rote Barat Daya			
							SD Negeri Mbadokai	9 Ruang		Rote Barat Daya			
							SD Negeri Landu	4 Ruang		Rote Barat Daya			
							SD Negeri Longgo	3 Ruang		Rote Barat Laut			
							SD Inpres Oeoko	4 Ruang		Rote Barat Laut			
							SD Negero Nda	3 Ruang		Rote Barat Laut			
							SD Negeri Inaoe	6 Ruang		Rote Selatan			
							SD Gmit Inggufao	6 Ruang		Rote Tengah			
							SD Gmit Hutu	5 Ruang		Rote Tengah			
							SD Inpres Nggodimeda	2 Ruang		Rote Tengah			
							SD Inpres Batula	4 Ruang		Rote Timur			
							SD Inpres Deteasa	3 Ruang		Rote Timur			
							SD Kimadale	1 Ruang		Rote Timur			
							SD Nahaudoen	3 Ruang		Lobalain			
							SD Ndudale	5 Ruang		Lobalain			
							SD Negeri Nda	3 Ruang		Rote Barat Laut			
1	1	2	2.01	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	607.928.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Lobalain, Oematamboli Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Nggodimeda Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Suebela Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Oeledo Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Serubeba Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Sedeeon Kab. Rote Ndao, Loaholu, Boni Kab. Rote Ndao, Loaholu, Sibenda Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Boni Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Sibenda	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SD	607.928.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 13-15 tahun Meningkatkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13-15 tahun	100%	13.563.784.000,00			13.563.784.000,00	
	1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	750.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Tesa Bela	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							SMP 4 Pantai Baru	1 Unit		Kecamatan Pantai Baru			
	1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Mundek Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Oelua Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Lobalain, Kuli Aisele Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Sotimori	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							SMP 1 RBL	3 Ruang		Kecamatan Loaholu			
							SMP 2 Lobalain	3 Ruang		Kecamatan Lobalain			
							SMP Satap Batulai	3 Ruang		Kecamatan Lobalain			
							SMP 1 Lobalain	3 Ruang		Kecamatan Lobalain			
							SMP 3 Lobalain	3 Ruang		Kecamatan Lobalain			
							SMP Ita Esa	3 Ruang		Kecamatan Loaholu			
							SPM N 1 Landu Leko	4 Ruang		Kecamatan Landu Leko			
							SMP Negeri 2 Rote Barat Daya	3 Ruang		Kecamatan Rote Barat Daya			
	1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	344.699.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	344.699.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	43 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	43 Satuan Pendidikan	11.000.405.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	11.000.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	43 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Dodaek	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							SMP Satap Folaoen	1 Ruang		Kecamatan Rote Selatan			
	1	1	2	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	253.680.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMP	253.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya pendidikan anak usia dini	100%	5.369.574.000,00			5.369.574.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	295 Orang	1.050.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	266.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	266.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	154.160.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	154.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	133 Satuan Pendidikan	2.946.594.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	2.946.594.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	231.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							TK Efata	1 Ruang		Kecamatan Lobalain			
							PAUD Paulus Busalangga	1 Ruang		Kecamatan Rote Barat Laut			
	1	1	2	2.03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	720 Orang	250.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket	296.320.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	296.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	172 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.054.534.000,00			2.054.534.000,00	
	1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	1.904.534.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	1.904.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	250 Peserta Didik	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	24,37%	150.000.000,00			150.000.000,00	
	1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya pegembangan Kurikulum Muatan Lokal	100%	150.000.000,00			150.000.000,00	
	1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Indeks pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik, 3. persentase Tenaga Pendidik yang Memiliki Kompetensi	0,45 % 1. 61,14, 2. 61,14 1. %, 2 %	233.539.000,00			233.539.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	100%	233.539.000,00			233.539.000,00	
	1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	193 Dokumen	185.930.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	185.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11 Laporan	47.609.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	47.609.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase siswa yang memahami bahasa dan sastra daerah	83,33%	150.000.000,00			150.000.000,00	
	1	1	6	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bahasa dan Sastra Daerah	1 Bahasa	150.000.000,00			150.000.000,00	
	1	1	6	2.01	2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	150.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						Dinas Kesehatan			92.273.322.825,00			92.556.117.188,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			92.267.122.825,00			92.549.917.188,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			92.267.122.825,00			92.549.917.188,00	
6	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	60.895.957.603,00			60.992.324.666,00	
	1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 dokumen	69.680.000,00			83.400.383,00	
	1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	56.580.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	68.402.950,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	13.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.997.433,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	60.314.426.453,00			60.314.986.453,00	
	1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1004 Orang/bulan	60.040.918.453,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60.040.918.453,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	244.948.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	244.948.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	28.560.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	28.800.000,00			28.800.000,00	
	1	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	39.285.000,00			46.560.000,00	
	1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	39.285.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	289.135.250,00			345.206.930,00	
	1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	178.820.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	178.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.288.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44.589.730,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.019.250,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19.891.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	71.008.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	101.906.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	66.406.900,00			66.406.900,00	
	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.406.900,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	66.406.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	11 unit	88.224.000,00			106.964.000,00	
	1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	88.224.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	106.964.000,00	DINAS KESEHATAN
7	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 Per 100.000 KH 34.00 % 40 % 76.51 %	23.149.909.662,00			23.336.336.962,00	
	1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar penyandang disabilitas Persentase faskes primer dengan kelengkapan SPA sesuai standar Persentase faskes primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar Persentase ketersediaan Labkesmas yg memenuhi standar Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase ketersediaan Pustu sesuai standar	100 % 69 % 70 % 50 % 54.48 % 65 %	14.345.781.725,00			14.573.269.025,00	
	1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	14 Unit	9.006.448.710,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	9.006.448.710,00	DINAS KESEHATAN
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Pilasue			Rote Selatan			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Dodaek			Rote Selatan			
							PembangunanPuskesmas Pembantu Lenguselu			Rote Selatan			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Lidabesi			Rote Tengah			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Nggodimeda			Rote Tengah			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Netenaen			Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi berat Puskesmas pembantu Oenggaut			Rote Barat			
							Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Tunganamo			Pantu Baru			
							Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Limakoli			Rote Tengah			
							Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Nuse			Ndao Nuse			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Holoama			Lobalain			
							Rehabilitasi Puskesmas pembantu Lifuleo			Landu Leko			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Sotimori			Landu Leko			
							Pembangunan Puskesmas Pembantu Oebole			Loaholu			
	1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	150.850.665,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	150.850.665,00	DINAS KESEHATAN
							Puskesmas Oele	1 Unit		Kecamatan Rote Selatan			
							Puskesmas Feapopi	1 Unit		Kecamatan Rote Tengah			
	1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	35 Unit	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	327.487.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	165.585.950,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	165.585.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	14 Paket	4.833.552.400,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	4.833.552.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	89.344.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	89.344.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 % 41 % 77 % 80.00 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60.00 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	8.518.880.555,00			8.477.820.555,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3485 Orang	50.215.680,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	50.215.680,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3475 Orang	303.346.146,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	303.346.146,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1594 Orang	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13504 Orang	80.000.406,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	55.000.406,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28807 Orang	22.104.390,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	22.104.390,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88793 Orang	90.257.558,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	90.257.558,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15331 Orang	17.193.068,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	17.193.068,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5935 Orang	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1406 Orang	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	122 Orang	17.111.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	17.111.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2351 Orang	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	10.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4049 Orang	22.204.700,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	22.204.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	38.108.417,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	38.108.417,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	263.247.290,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	263.247.290,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	76.004.350,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	69.004.350,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	263.425.850,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	263.425.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	5.713.222.200,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	5.713.222.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	84.039.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	84.039.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	127.056.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	127.056.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12296 Orang	39.593.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	39.593.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	241.751.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	241.751.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	100%	85.008.800,00			85.008.800,00	
	1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	85.008.800,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	85.008.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan (Puskesmas)	77%	200.238.582,00			200.238.582,00	
	1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	12 Unit	200.238.582,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	200.238.582,00	DINAS KESEHATAN
8	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	78,43%	7.800.403.500,00			7.800.403.500,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas Persentase Pemenuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe sesuai standar (7 Spesialis (4 dasar dan 3 Penunjang)	84.67 % 100 %	6.817.451.000,00			6.817.451.000,00	
	1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1004 Orang	6.817.451.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	6.817.451.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	14.53 %	982.952.500,00			982.952.500,00	
	1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	982.952.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	982.952.500,00	DINAS KESEHATAN
9	1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar Persentase Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman	100 % >95 %	277.901.750,00			277.901.750,00	
	1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75%	18.000.000,00			18.000.000,00	
	1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	18.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80%	100.370.000,00			100.370.000,00	
	1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	100.370.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	100.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	80%	159.531.750,00			159.531.750,00	
	1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	159.531.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	159.531.750,00	DINAS KESEHATAN
10	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	142.950.310,00			142.950.310,00	
	1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100%	39.845.220,00			39.845.220,00	
	1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	39.845.220,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	39.845.220,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	103.105.090,00			103.105.090,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	103.105.090,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	103.105.090,00	DINAS KESEHATAN
	X					NON URUSAN			6.200.000,00			6.200.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.200.000,00			6.200.000,00	
11	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	6.200.000,00			6.200.000,00	
	X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	11 unit	6.200.000,00			6.200.000,00	
	X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	6.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.200.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Eahun			1.814.852.348,00			1.814.852.348,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.814.852.348,00			1.814.852.348,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.814.852.348,00			1.814.852.348,00	
12	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	1.806.494.348,00			1.806.494.348,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Persentase rumah sakit dengan	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60.00 % 48 % 76 % 100 % undefined undefined 2,75 % 2.75 % 100 %	1.806.494.348,00			1.806.494.348,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	79.391.400,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	79.391.400,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2790 Orang	55.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	55.200.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	13.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	13.500.000,00	PUSKESMAS EAHUN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	192 Orang	8.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	8.100.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	484.029.600,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	484.029.600,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.300.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.050.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	13.050.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.000.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.200.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	163.133.600,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	163.133.600,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	758.288.548,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	758.288.548,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	160.044.800,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	160.044.800,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1011 Orang	1.350.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.350.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	16.856.400,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	16.856.400,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3.450.000,00	PUSKESMAS EAHUN
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	39.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	39.600.000,00	PUSKESMAS EAHUN
13	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	8.358.000,00			8.358.000,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	8.358.000,00			8.358.000,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.358.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	8.358.000,00	PUSKESMAS EAHUN
						Puskesmas Sotimori			793.865.837,00			806.658.389,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			793.865.837,00			806.658.389,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			793.865.837,00			806.658.389,00	
14	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 Per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	782.516.437,00			795.308.989,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 % 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 per 1000 KH 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	782.516.437,00			795.308.989,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126 Orang	35.595.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	35.595.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1021 Orang	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	10.200.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4 Orang	5.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	5.400.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	116 Orang	6.900.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	6.900.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	149.011.098,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	161.803.650,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.000.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.450.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	15.450.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	4.500.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	900.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	900.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	101.808.700,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	101.808.700,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	300.419.989,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	300.419.989,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	110.125.250,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	110.125.250,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	88 Orang	600.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	600.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	16.856.400,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	16.856.400,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.950.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	16.800.000,00	PUSKESMAS SOTIMORI
15	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbind Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	11.349.400,00			11.349.400,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	11.349.400,00			11.349.400,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.349.400,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	11.349.400,00	PUSKESMAS SOTIMORI
						Puskesmas Korbafo			1.186.366.007,00			1.186.366.007,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.186.366.007,00			1.186.366.007,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.186.366.007,00			1.186.366.007,00	
16	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	1.177.750.907,00			1.177.750.907,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia subur (sasaran WUS usia 15-49	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	1.177.750.907,00			1.177.750.907,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	81.360.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	81.360.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1732 Orang	54.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	54.000.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	25.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	25.200.000,00	PUSKESMAS KORBAFO

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	144 Orang	7.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	7.800.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	223.214.800,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	223.214.800,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	9.000.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	20.400.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	7.200.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.800.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	121.206.800,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	121.206.800,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	466.477.057,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	466.477.057,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	123.922.400,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	123.922.400,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	203 Orang	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.000.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.170.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	10.170.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	5.599.850,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	5.599.850,00	PUSKESMAS KORBAFO
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	14.400.000,00	PUSKESMAS KORBAFO
17	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	8.615.100,00			8.615.100,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	8.615.100,00			8.615.100,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.615.100,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	8.615.100,00	PUSKESMAS KORBAFO
						Puskesmas Sonimanu			920.026.300,00			920.026.300,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			920.026.300,00			920.026.300,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			920.026.300,00			920.026.300,00	
18	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	913.436.600,00			913.436.600,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	913.436.600,00			913.436.600,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134 Orang	86.509.500,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	86.509.500,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1086 Orang	26.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	26.400.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	12.000.000,00	PUSKESMAS SONIMANU

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	136 Orang	7.350.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	7.350.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	259.345.450,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	259.345.450,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.000.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	15.300.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1.950.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.950.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.200.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	71.732.950,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	71.732.950,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	313.339.750,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	313.339.750,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	94.137.700,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	94.137.700,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	513 Orang	900.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	900.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1.271.250,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.271.250,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.200.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	16.800.000,00	PUSKESMAS SONIMANU
19	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreening di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	6.589.700,00			6.589.700,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	6.589.700,00			6.589.700,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.589.700,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	6.589.700,00	PUSKESMAS SONIMANU
						Puskesmas Feapopi			1.140.497.663,00			1.140.497.663,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.140.497.663,00			1.140.497.663,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.140.497.663,00			1.140.497.663,00	
20	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	1.134.820.663,00			1.134.820.663,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	1.134.820.663,00			1.134.820.663,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	68.928.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	68.928.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1732 Orang	20.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	20.400.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	19.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	19.800.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	164 Orang	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.800.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	293.046.500,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	293.046.500,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	10.200.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	16.200.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.450.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	300.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	300.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	177.322.350,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	177.322.350,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	339.011.813,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	339.011.813,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	125.158.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	125.158.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	402 Orang	600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	600.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	23.448.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	23.448.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.356.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3.356.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	1 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	28.800.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
21	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	5.677.000,00			5.677.000,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	5.677.000,00			5.677.000,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.677.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5.677.000,00	PUSKESMAS FEAPOPI
						Puskesmas Baa			3.364.535.795,00			3.384.479.795,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.364.535.795,00			3.384.479.795,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.364.535.795,00			3.384.479.795,00	
22	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 155 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	3.347.491.595,00			3.367.435.595,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	3.347.491.595,00			3.367.435.595,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	263.335.052,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	263.335.052,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6019 Orang	115.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	115.200.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	17.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	17.400.000,00	PUSKESMAS BAA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	460 Orang	18.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	18.300.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	589.399.800,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	589.399.800,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	2.400.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	32.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	32.700.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	8.400.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	11.400.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	293.049.250,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	293.049.250,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.658.095.843,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	1.658.095.843,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	248.214.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	268.158.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	776 Orang	1.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.800.000,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	47.163.600,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	47.163.600,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.834.050,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	2.834.050,00	PUSKESMAS BAA
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	37.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	37.800.000,00	PUSKESMAS BAA
23	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	17.044.200,00			17.044.200,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	17.044.200,00			17.044.200,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	17.044.200,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	17.044.200,00	PUSKESMAS BAA
						Puskesmas Oele			975.970.503,00			975.970.503,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			975.970.503,00			975.970.503,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			975.970.503,00			975.970.503,00	
24	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	975.470.503,00			975.470.503,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Prevalensi anemia pada wanita usia subur (sasaran WUS usia 15-49 tahun) % Puskesmas melakukan screening	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 448 /100000 LH 76 % 2.75 % 100 %	975.470.503,00			975.470.503,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	74.030.250,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	74.030.250,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1167 Orang	26.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	26.400.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	12.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	12.600.000,00	PUSKESMAS OELE

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	121 Orang	5.550.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	5.550.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	281.408.700,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	281.408.700,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.000.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	32.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	32.700.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.350.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.600.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	84.874.900,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	84.874.900,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	291.217.353,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	291.217.353,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	126.319.300,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	126.319.300,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	17 Orang	900.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	900.000,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.797.500,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	17.797.500,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.122.500,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3.122.500,00	PUSKESMAS OELE
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12.600.000,00	PUSKESMAS OELE
25	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	500.000,00	PUSKESMAS OELE
						Puskesmas Busalangga			1.942.756.305,00			1.942.756.305,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.942.756.305,00			1.942.756.305,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.942.756.305,00			1.942.756.305,00	
26	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	1.937.976.105,00			1.937.976.105,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian8 Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	1.937.976.105,00			1.937.976.105,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	166.276.800,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	166.276.800,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3041 Orang	48.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	48.000.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	27.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	27.000.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	269 Orang	8.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	8.700.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	416.843.700,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	416.843.700,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	900.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	21.600.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	16.605.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	16.605.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.000.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	207.127.050,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	207.127.050,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	828.650.555,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	828.650.555,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	139.837.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	139.837.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	201 Orang	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.600.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	30.510.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	30.510.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.926.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.926.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	14.400.000,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
27	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	4.780.200,00			4.780.200,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	4.780.200,00			4.780.200,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.780.200,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.780.200,00	PUSKESMAS BUSALANGGA
						Puskesmas Oelaba			1.560.959.157,00			1.560.959.157,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.560.959.157,00			1.560.959.157,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.560.959.157,00			1.560.959.157,00	
28	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	1.560.459.157,00			1.560.459.157,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	1.560.459.157,00			1.560.459.157,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	16.656.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS	16.656.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2218 Orang	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12.000.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	14.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	14.400.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	207 Orang	7.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	7.500.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	499.958.250,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	499.958.250,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1.500.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	15.000.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.350.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	4.350.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	4.200.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	155.028.600,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	155.028.600,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	676.130.907,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	676.130.907,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	121.522.900,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	121.522.900,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	825 Orang	1.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1.500.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.212.500,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	11.212.500,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1.500.000,00	PUSKESMAS OELABA
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	18.000.000,00	PUSKESMAS OELABA
29	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	500.000,00	PUSKESMAS OELABA
						Puskesmas Batutua			3.080.046.282,00			2.990.046.282,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.080.046.282,00			2.990.046.282,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.080.046.282,00			2.990.046.282,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
30	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	3.071.747.482,00			2.981.747.482,00	
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia 15-49 tahun	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	3.071.747.482,00			2.981.747.482,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	98.746.800,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	98.746.800,00	PUSKESMAS BATUTUA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4770 Orang	69.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	69.600.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Orang	22.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	22.800.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	340 Orang	9.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	9.600.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	642.921.400,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	642.921.400,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	2.700.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	22.800.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.468.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	15.468.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	11.400.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	230.737.100,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	230.737.100,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.685.195.632,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	1.595.195.632,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	199.158.500,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	199.158.500,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	235 Orang	1.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.200.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	48.307.500,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	48.307.500,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	6.312.550,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	6.312.550,00	PUSKESMAS BATUTUA
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.800.000,00	PUSKESMAS BATUTUA
31	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	8.298.800,00			8.298.800,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	8.298.800,00			8.298.800,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.298.800,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	8.298.800,00	PUSKESMAS BATUTUA
						Puskesmas Delha			1.252.023.935,00			1.252.023.935,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.252.023.935,00			1.252.023.935,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.252.023.935,00			1.252.023.935,00	
32	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	1.251.523.935,00			1.251.523.935,00	
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia 15-49	11.63 per 1000 KH 9.5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0.79 % 8 per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2.75 % 100 %	1.251.523.935,00			1.251.523.935,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	61.792.500,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	61.792.500,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1787 Orang	19.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	19.200.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	6.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	6.000.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	123 Orang	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.000.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	303.380.300,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	303.380.300,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	9.000.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.450.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.600.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	82.716.550,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	82.716.550,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	601.383.235,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	601.383.235,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	115.412.350,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	115.412.350,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	377 Orang	1.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.200.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14.539.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	14.539.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.650.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.650.000,00	PUSKESMAS DELHA
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	25.200.000,00	PUSKESMAS DELHA
33	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	500.000,00	PUSKESMAS DELHA
						Puskesmas Ndao			679.948.243,00			679.948.243,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			679.948.243,00			679.948.243,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			679.948.243,00			679.948.243,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
34	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata presentase pelayanan 12 SPM Angka kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 % 115 per 100.000 KH 34 % 40 % 76.51 %	679.448.243,00			679.448.243,00	
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian bayi Angka kematian neonatal Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target DM dalam pengendalian Eliminasi 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, dan leher rahim) Eliminasi malaria Eliminasi NTD (Kusta) Hipertensi dalam pengendalian Insiden Hepatitis B Insiden HIV Insiden Tuberkulosis Penurunan Angka kematian Dengue Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI Persentase cakupan JKN Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia Persentase imunisasi bayi lengkap Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi) Prevalensi anemia pada wanita usia 15-49 tahun	11,63 Per 1000 KH 9,5 per 1000 KH 41 % 77 % 80 % 1 per 1000 penduduk 1 per 1000 penduduk 80 % 0,79 % 8 Per 1000 penduduk 362 orang - orang 76 % 100 % 60 % 48 % 76 % 100 % 2,75 % 100 %	679.448.243,00			679.448.243,00	
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90 Orang	51.627.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	51.627.000,00	PUSKESMAS NDAO

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	13.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	13.500.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	4.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.500.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	79 Orang	2.850.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	2.850.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	148.860.100,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	148.860.100,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	1.000.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	9.000.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	4.500.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.600.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	50.143.900,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	50.143.900,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	247.070.743,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITAS I	247.070.743,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	109.836.250,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	109.836.250,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1276 Orang	3.750.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	3.750.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.910.250,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	7.910.250,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	6.300.000,00	PUSKESMAS NDAO
	1	2	2	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	15.000.000,00	PUSKESMAS NDAO
35	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Orang yang discreaning di Posbindu Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Persentase Posyandu Aktif Persentase Posbindu Aktif	62 % 81 % >90 % 91 %	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina	100%	500.000,00			500.000,00	
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	500.000,00	PUSKESMAS NDAO
						Rumah Sakit Umum Daerah Baa			16.800.728.800,00			17.253.715.300,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.800.728.800,00			17.253.715.300,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			16.800.728.800,00			17.253.715.300,00	
36	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	115 KH	9.132.595.800,00			9.585.582.300,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan SPA (Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) serta ketersediaan obat dan BMHP	54,48%	6.625.679.500,00			7.078.666.000,00	
	1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	1.232.512.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1.379.257.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
	1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	16.875.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	55.025.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
	1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	103.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	153.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
	1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	5.272.892.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5.490.984.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1.787.926.300,00			1.787.926.300,00	
	1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1.787.926.300,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.787.926.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
	1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	100%	718.990.000,00			718.990.000,00	
	1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	718.990.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	718.990.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
37	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi	66,67 % 9,18 %	7.668.133.000,00			7.668.133.000,00	
	1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	7.500.816.000,00			7.500.816.000,00	
	1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	339 Orang	7.500.816.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	7.500.816.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
	1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	167.317.000,00			167.317.000,00	
	1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6 Orang	167.317.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	167.317.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			103.000.000.000,00			100.247.735.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			103.000.000.000,00			100.247.735.000,00	
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			103.000.000.000,00			100.247.735.000,00	
38	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang di sampaikan tepat waktu	100%	5.337.984.602,00			6.639.699.602,00	
	1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang di sampaikan tepat waktu	19 Dokumen	110.000.000,00			125.000.000,00	
	1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	62.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	55.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	62.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	3.244.384.602,00			3.296.384.602,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	3.046.384.602,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.046.384.602,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	198.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	11.400.000,00			11.400.000,00	
	1	3	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	100%	449.200.000,00			572.875.000,00	
	1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	157.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	170.875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	250.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Besar yang tersedia	1 Unit	1.000.000.000,00			2.071.040.000,00	
	1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar							
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	371.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	70.000.000,00			70.000.000,00	
	1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	44 Unit	453.000.000,00			493.000.000,00	
	1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	150.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase embung/bendung kondisi baik	54,44%	16.655.384.400,00			17.268.404.400,00	
	1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Kegiatan Yang di Bangun dan Di Rehabilitasi	61 Unit	9.080.805.000,00			9.693.825.000,00	
	1	3	2	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai							
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,330 KM	1.230.815.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.230.815.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Normalisasi Kali Saindale	33 Meter		Suebela, Kec. Rote Tengah			
							Normalisasi Kali Cina	33 Meter		Metina, Kec. Lobalain			
							Normalisasi Kali Menggelama	33 Meter		Per. Menggelama, Kec. Lobalain			
							Normalisasi Kali Mekar	33 Meter		Baadale, Kec. Lobalain			
							Normalisasi Kali Metina	33 Meter		Kel. Metina, Kec. Lobalain			
							Normalisasi Kali Metina (Pasar Metina)	33 Meter		Kel. Metina, Kec. Lobalain			
							Normalisasi Kali Olalain	33 Meter		Kel. Onatali, Kec. Rote Tengah			
							Nomalisasi Kali Meombolo	33 Meter		Tesabela, Kec. Pantai Baru			
							Nomalisasi Kali Ufalen	33 Meter		Siomeda, Kec. Rote Tengah			
							Nomalisasi Kali Balol	33 Meter		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Nomalisasi Kali Alas	33 Meter		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
	1	3	2	2.01	105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,189 KM	734.990.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.348.010.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Penanggulangan Abrasi Pantai Namondao	33 Meter		Kel. Namodale, Kec. Lobalain			
							Penanggulangan Abrasi Pantai Oefoe	33 Meter		Sedoeen, Kec. Rote Barat			
							Penanggulangan Abrasi Pantai Oenggae	33 Meter		Oenggae, Kec. Pantai Baru			
							Penanggulangan Abrasi Pantai Papela	33 Meter		Papela, Kec. Rote Timur			
							Penanggulangan Abrasi Pantai Kokadale	33 Meter		Tungganamo, Kec. Pantai Baru			
							Penanggulangan Abrasi Pantai Lohaen	33 Meter		Landu, Kec. Rote Barat Daya			
	1	3	2	2.01	121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit	1.740.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Temas Kab. Rote Ndao, Lobalain, Oeleka Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Daleholu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan Embung Malok	1 Unit		Daleholu, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan Bendung Kali Oeleka	1 Unit		Oleka, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Bendung Masianak	1 Unit		Temas, Kec. Rote Barat Laut			
	1	3	2	2.01	129	Rehabilitasi Embung							
							Jumlah Embung yang Direhabilitasi	40 Unit	5.375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	5.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Rehabilitasi Embung Bobolok	1 Unit		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Fulakmoan (Laemadak)	1 Unit		Hundihuk, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Takai	1 Unit		Sanggaoen, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Embung Fi'ibolok	1 Unit		Keoen, Kec. Pantai Baru			
							Rehabilitasi Embung Oeharak 2	1 Unit		Oeseli, Kec. Rote Barat Daya			
							Rehabilitasi Embung Oelolok	1 Unit		Sedeoen, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Embung Eahu	1 Unit		Mundek, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Embung Lasamadedein	1 Paket		Matasio, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Bendung Suelain (Tahap Dua)	1 Paket		Suelain, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Bendung Saendale	1 Paket		Suebela, Kec. Rote Tengah			
							Rehabilitasi Bendung Lela	1 Paket		Lidabesi, Kec. Rote Tengah			
							Rehabilitasi Embung Noisek	1 Paket		Oebela, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Embung Kolesokok	1 Paket		Lekik, Kec. Rote Barat Daya			
							Rehabilitasi Embung Daebeuk	1 Paket		Edalode, Kec. Pantai Baru			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Rehabilitasi Embung Luahak	1 Paket		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Moresa	1 Paket		Batulilok, Kec. Pantai Baru			
							Rehabilitasi Embung Danotalu	1 Paket		Kolobolon, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Bendung Nilolilol	1 Paket		Temas, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Nggala'ana	1 Paket		Suebela, Kec. Rote Tengah			
							Rehabilitasi Embung Lua Lela	1 Paket		Lidamanu, Kec. Rote Tengah			
							Rehabilitasi Embung Benggolasi	1 Paket		Lakamola, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Embung Oepoeh	1 Paket		Batefalu, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Embung Ba'i Ma	1 Paket		Hundihopo, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Embung Deruoen	1 Paket		Matanae, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Embung Nunuanak	1 Paket		Lidor, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Embung Eahuk	1 Paket		Mundek, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Embung Lekomeo	1 Paket		Busalangga Barat, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Moihelo Ndenda	1 Paket		Temas, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Oemasik	1 Paket		Nggelodae, Kec. Rote Selatan			
							Rehabilitasi Embung Tekonaun	1 Paket		Daleholu, Kec. Rote Selatan			
							Rehabilitasi Embung Lemengge	1 Paket		Dalek Esa, Rote Barat Daya			
							Rehabilitasi Embung Lifuhanik	1 Paket		Lentera, Kec. Rote Barat Daya			
							Rehabilitasi Embung Kakaek	1 Paket		Lenupetu, Kec. Pantai Baru			
							Rehabilitasi Embung Lakamola	1 Paket		Lakamola, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Embung Oelolot	1 Paket		Oelolot, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Embung Mbueain	1 Paket		Mbueain, Kec. Rote Barat			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Rehabilitasi Embung Oenitas	1 Paket		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Embung Toliadanon	1 Paket		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Embung Bebalain 1	1 Paket		Bebalain, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Embung Tuabuna (Leka)	1 Paket		Kolobolon, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi embung Daebilanak	1 Paket		Tuanatuk, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi embung Masundale	1 Paket		I,la, Kec. Rote Timur			
1	3	2	2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi yang di Bangun, tingkatkan dan di rehabilitasi	5,900 KM	7.574.579.400,00			7.574.579.400,00	
1	3	2	2.02	2		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2,800 KM	3.301.664.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3.301.664.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan Jaringan Irigasi Kompleks Persawahan Batu Kapa	100 Meter		Limakoli, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Komplek Persawahan Balofuan	100 Meter		Siomeda, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Mborilanggas	100 Meter		Oebatu, Kec. Rote Barat Daya			
							Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Persawahan Keba	100 Meter		Bolatena, Kec. Landu Leko			
							Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Lipadei	100 Meter		Maubesi, Kec. Rote Tengah			
							Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Sawah Nuna	100 Meter		Lenguselu, Kec. Rote Selatan			
							Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Noana	100 Meter		Oelunggu, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Ladadanon	100 Meter		Maubesi, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Lifunanggak Doit	100 Meter		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Lelete Besi	100 Meter		Oelunggu, Kec. Lobalain			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan Jaringan Irigasi Manulai	100 Meter		Holoama, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Oeina (Komplek Persawahan Lekonak)	100 Meter		Helebeik, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Kompleks Persawahan Mokdale	100 Meter		Mokdale, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Kompleks Persawahan Moresa	100 Meter		Batulilok, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Nauina	100 Meter		Edalode, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Kompleks Persawahan Kapadanon dan Paoana	100 Meter		Nusakdale, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Danokak	100 Meter		Ofalangga, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Lanamok	100 Meter		Olafuliha'a, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Kompleks Persawahan Kapadanon dan Paoana	100 Meter		Nusakdale, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Oemilan	100 Meter		Daiama, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Masi	100 Meter		Siomeda, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Nggaenama	100 Meter		Lidamanu, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Batukapa Balafuan	100 Meter		Limakoli, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Persawahan Diuama	100 Meter		Lakamola, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Irigasi	100 Meter		Matasio, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Irigasi	100 Meter		Matanae, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Persawahan Ol - Moleme'o	100 Meter		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Irigasi Sosoledale	100 Meter		Pilasue, Kec. Rote Selatan			
	1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,200 KM	1.774.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.774.999.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Netenain	100 Meter		Netenain, Kec. Rote Barat Laut			
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Oederas (Lokonoen)	100 Meter		Dalek Esa, Rote Barat Daya			
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Olakayo	100 Meter		Suebela, Kec. Rote Tengah			
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bolatena (Keba)	100 Meter		Bolatena, Kec. Landu Leko			
							Peningkatan Jaringan Irigasi Oeina	100 Meter		Helebeik, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Jaringan Irigasi Ninia Dale	100 Meter		Matasio, Kec. Rote Timur			
							Peningkatan Jaringan Irigasi Opu Ey	100 Meter		Holoama, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Jaringan Irigasi Feo Ama	100 Meter		Holoama, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Jaringan Irigasi Peersawahaan Hadaoek Letek	100 Meter		Oebafok, Kec. Rote Barat Daya			
1	3	2	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,900 KM	2.247.915.400,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2.247.915.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mondale	100 Meter		Serubeba, Kec. Rote Timur			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lanamok	100 Meter		Tungganamo, Kec. Pantai Baru			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tuanatuk	100 Meter		Tuanatuk, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Oeine	100 Meter		Lidor, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dalenembada	100 Meter		Daodolu, Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dano Koli	100 Meter		Kel. Busalangga, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Soloe)	100 Meter		Baadale, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ndudale (Nates)	100 Meter		Baadale, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tuanembe	100 Meter		Daodolu, Rote Barat Laut			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Persawahaan Balak	100 Meter					
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Persawahan Dano Talu	100 Meter		Kolobolon, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Persawahan Delasadale	100 Meter		Namodale, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100 Meter		Lekonak, Kec. Pantai Baru			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lefakulen	100 Meter		Lidabesi, Kec. Rote Tengah			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Persawahan Laemadak	100 Meter		Hundihuk, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kolofao	100 Meter		Tebile, Kec. Rote Selatan			
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Soloe	100 Meter		Lenguselu, Kec. Rote Selatan			
							Rehabilitasi saluran air irigasi Umesuun - Paonituk	100 Meter		Modosinal, Ingguinak, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi jaringan irigasi Domalen	100 Meter		Maubesi, Kec. Rote Tengah			
	1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,540 KM	250.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	77,11%	10.950.000.000,00			10.800.000.000,00	
	1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Terlayani air Minum Layak	835 Rumah Tangga	10.950.000.000,00			10.800.000.000,00	
	1	3	3	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	101 Liter/Detik	8.900.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	8.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Oeteis	2 Liter/Detik		Oebau, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Letuak	2 Liter/Detik		Oebau, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Dolasi	2 Liter/Detik		Dolasi, Kec. Rote Barat Daya			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA/Sumur Ho'ak	2 Liter/Detik		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA/Sumur Tou Henuk Dusun Rinalolon	2 Liter/Detik		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Ofalangga	2 Liter/Detik		Ofalangga, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Oepapan	2 Liter/Detik		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Lifuoe	2 Liter/Detik		Mukekuku, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Lundale	2 Liter/Detik		Mukekuku, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Kakaek Dale	2 Liter/Detik		Onatali, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Lobehuk	2 Liter/Detik		Daudolu, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Oetefu	2 Liter/Detik		Oetefu, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Kolobolon	2 Liter/Detik		Kolobolon, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Istua	2 Liter/Detik		Kuli Aisele, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Jaringan Perpipaan M.A Busalaten	2 Liter/Detik		Lidabesi, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Jaringan Perpipaan M.A Tolama	2 Liter/Detik		Tolama, Kec. Loaholu			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Suelain	2 Liter/Detik		Suelain, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Nusakdale	2 Liter/Detik		Nusakdale, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Bo'a	2 Liter/Detik		Bo'a, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Bolatena	2 Liter/Detik		Bolatena, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Daeurendale	2 Liter/Detik		Daeurendale, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Hundihopo	2 Liter/Detik		Hundihopo, Kec. Rote Timur			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Sosalain	2 Liter/Detik		Nggelodae, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Inaoe	2 Liter/Detik		Inaoe, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Matasio	2 Liter/Detik		Matasio, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Serubeba	2 Liter/Detik		Serubeba, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Nioen	2 Liter/Detik		Daeurendale, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Dalakumen	2 Liter/Detik		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Sumur Gali Dusun Istua	2 Liter/Detik		Kuli Aisele, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Oenitas	2 Liter/Detik		Kel. Onatali, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Minum Jaringan Perpipaan (Sumur)	2 Liter/Detik		Balaoli, Kec. Loaholu			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan (Sumur Bor)	2 Liter/Detik		Ingguinak, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Mata air Nitahu (Sumur Gali)	2 Liter/Detik		Modosinal, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan M.A. Dusun Say (Sumur Gali)	2 Liter/Detik		Mbueain, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Mata Air Rakendo (Sumur Gali)	2 Liter/Detik		Anarae, Kec. Ndao Nuse			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan M. A. Sosalain	2 Liter/Detik		Nggelodae, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Sumur Bor Baimbakun	2 Liter/Detik		Lekik, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan M. A. Modosinal	2 Liter/Detik		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan Jaringan Perpipaan M. A. Oeseli	2 Liter/Detik		Oeseli, Kec. Rote Barat Daya			
	1	3	3	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250 SR	2.050.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Perluasan Jaringan Perpipaan MA. Dolasi	25 SR		Dolasi, Kec. Rote Barat Daya			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Perluasan Jaringan Perpipaan MA. Modosinal			Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Perluasan Jaringan Perpipaan MA. Dodaek	25 SR		Dodaek, Kec. Rote Selatan			
							Perluasan Jaringan Perpipaan MA. Sotioe	25 SR		Oebole, Kec. Loaholu			
							Perluasan Jaringan Perpipaan M. A. Oelim	25 SR		Holulai, Kec. Loaholu			
							Perluasan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Minum Jaringan Perpipaan Mbali/Sumur Gali (Dusun Bule)	25 SR		Tolama, Kec. Loaholu			
							Perbaikan Sarana Prasarana Air Minum Jaringan Perpipaan Lobehuk (Dusun Dolukoen)	25 SR		Daudolu, Kec. Rote Barat Laut			
							Peningkatan Jaringan Perpipaan Sumur Bor Hundihopo	25 SR		Hundihopo, Kec. Rote Timur			
							Peningkatan Jaringan Perpipaan MA. Lopolain	25 SR		Nggelodae, Kec. Rote Selatan			
41	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	84,54%	6.498.082.248,00			6.498.082.248,00	
	1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik yang terbangun	1950 Rumah Tangga	6.498.082.248,00			6.498.082.248,00	
	1	3	5	2.01	44	Penyediaan Unit pengolahan setempat							
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1950 Rumah Tangga	6.498.082.248,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	6.498.082.248,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oeseli, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oebou, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oetefu, Kec. Rote Barat Daya			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oelasin, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oehandi, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Mbokak, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oebafok, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Lekik, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Fuafuni, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Lalukoen, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Dalek Esa, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Sanggandolu, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Dolasi, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Batutua, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Sakubatun, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oehandi, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Lentera, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Meoain, Kec. Rote Barat Daya			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Lidamanu, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Maubesi, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Lidabesi, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Suebela, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Siomeda, Kec. Rote Tengah			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Nggodimeda, Kec. Rote Tengah			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oenggae, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Keoen, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Edalode, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Tungganamo, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Batulilok, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oebau, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Nusakdale, Kec. Pantai Baru			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oebela, Kec. Loaholu			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Tolama, Kec. Loaholu			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Holulai, Kec. Loaholu			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Mbueain, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Sedeeoen, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Kuli Aisele, Kec. Lobalain			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Sanggaoen, Kec. Lobalain			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Kuli, Kec. Lobalain			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Suelain, Kec. Lobalain			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Faifua, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Matanae, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Londalusi, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Serubeba, Kec. Rote Timur			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Hundihipo, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Batefalu, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Lakamola, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Tebole, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Pilasue, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Daleholu, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Nggelodae, Kec. Rote Selatan			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Modosinal, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Netenaen, Kec. Rote Barat Laut			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Nemberala, Kec. Rote Barat			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Maeoe, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Tenalai, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Daeurendale, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Pukuafu, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Papela, Kec. Rote Timur			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Tolama, Kec. Loaholu			
							Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	25 Rumah Tangga		Busalangga Barat, Kec. Rote Barat Laut			
42	1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	72,73%	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00	
	1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana persampahan yang dibangun	1 Unit	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00	
	1	3	7	2.01	15	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	6 Ton/hari	5.000.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan TPA	6.25 Ton/hari		Maubesi, Kec. Rote Tengah			
43	1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase persetujuan bangunan gedung layak fungsi	44,44%	181.674.000,00			181.674.000,00	
	1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pengendalian Bangunan Gedung	10 Dokumen	181.674.000,00			181.674.000,00	
	1	3	8	2.01	19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	8	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi							
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	9 Dokumen	131.674.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	131.674.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan desa strategis terbangun Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi mantap	47,16 % 49,34 %	57.976.874.750,00			53.459.874.750,00	
	1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yg di tingkatkan, Di Rehabilitasi dan Panjang Jembatan di rehab dan di bangun	45,50 KM	57.976.874.750,00			53.459.874.750,00	
	1	3	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan							
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	567,818 KM	632.874.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	640.874.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	10	2.01	55	Rehabilitasi Jalan							
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12 KM	6.225.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oelasin Kab. Rote Ndao, Lobalain, Tuanatuk Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Rehabilitasi Ruas Jalan Tuanatuk - Todan	0.5 KM		Tuanatuk, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Oelasin - Tekeme (Lapen)	0.5 KM		Oelasin, Sanggandolu, Kec. Rote Barat Daya			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Laitasi - Todan (Lapen)	0.5 KM		Tuanatuk, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lekunik - Oele (Tembok Penahan)	0.5 KM		Lekunik, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Tualima - Netenain (Perkerasan)	0.5 KM		Tualima, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Nggefak - Daudolu (Lapen)	0.5 KM		Daudolu, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Baadale - Daudolu (Perkerasan)	0.5 KM		Baadale, Kec. Lobalain			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Oetutulu - Daudolu (Perkerasan)	0.5 KM		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Oenggelan - Hundihuk (Perkerasan)	0.5 KM		Netenaen, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Folakmoan - Hundihuk (Perkerasan/Segmen 1)	0.5 KM		Hundihuk, Kec. Rote Barat Laut			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Oelaba (Perkerasan/Segmen 2)	0.5 KM		Oelua, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Oebole - Tasilo (Perkerasan)	0.5 KM		Oebole, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Balaoli - Tasilo (Perkerasan)	0.5 KM		Tasilo, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Boni - Aduoen (Perkerasan/Segmen 3)	0.5 KM		Boni, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Boni - Aduoen (Perkerasan/Segmen 2)	0.5 KM		Boni, Kec. Loaholu			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Mbueain (Perkerasan/Segmen 1)	0.5 KM		Mbueain, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Mbueain (Perkerasan/Segmen 3)	0.5 KM		Mbueain, Kec. Rote Barat			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Mbueain (Perkerasan/Segmen 5)	0.5 KM		Mbueain, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Nemberala - Mbueain (Perkerasan/Segmen 1)	0.5 KM		Mbueain, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Nemberala - Mbueain (Perkerasan/Segmen 2)	0.5 KM		Sedoeen, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Oelolot (Perkerasan/Segmen 2)	0.5 KM		Oelolot, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Manggis - Oelolot (Perkerasan)	0.5 KM		Oelolot, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Oefoe - Manggis (Perkerasan)	0.5 KM		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							Rehabilitasi Ruas Jalan Loedik - Oefoe (Perkerasan)	0.5 KM		Sedoeen, Kec. Rote Barat			
	1	3	10	2.01	56	Pemeliharaan Berkala Jalan							
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,250 KM	1.250.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pemeliharaan Berkala Ruas	0.25 KM		Kab. Rote Ndao			
							Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Alukama - Lekunik	0.5 KM		Mokdale, Kec. Lobalain			
	1	3	10	2.01	58	Rehabilitasi Jembatan							
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	9 Meter	1.552.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Daleholu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	1.552.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Rehabilitasi Jembatan Oele	9 Meter		Daleholu, Kec. Rote Selatan			
	1	3	10	2.01	59	Rekonstruksi Jalan							
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	32,75 KM	44.799.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	44.799.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan Jalan Lingkar Ndao	120 M3		Mbiu Lombo, Mbali Lendeiki, Kec. Ndao Nuse			
							Peningkatan Ruas Jalan Baubafan - Kolobolon (Hotmix)	0.5 KM		Oematamboli, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Ruas Jalan (Feopopi - Peto/Lapen)	0.5 KM		Kel. Onatali, Kec. Rote Tengah			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Peningkatan Ruas Jalan kotalain - Oehe (Lapen)	0.5 KM		Oeseli, Kec. Rote Barat Daya			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oedai - Holotula (Lapen)	0.5 KM					
							Peningkatan Ruas jalan Ofalangga - Kokadale (Lapen)	0.5 KM		Ofalangga, Kec. Pantai Baru			
							Peningkatan Ruas Jalan Batutua - Oele (Hotmix)	0.5 KM		Kolobolon, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Ruas Jalan Pokobatus - Batulilok (Lapen)	0.5 KM		Sonimanu, Kec. Pantai Baru			
							Peningkatan Ruas Jalan Oele - Batulilok (Lapen)	0.5 KM					
							Peningkatan Ruas Jalan Tudamedia - Nemberala (lapen)	0.5 KM		Boa, Kec. Rote Barat			
							Peningkatan Ruas Jalan Lidamanu - Lidor (Lapen)	0.5 KM		Lidamanu, Kec. Rote Tengah			
							Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Baadale	0.5 KM		Baadale, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Ruas Jalan Oenitas - Mbueain	0.5 KM		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							Peningkatan Ruas Jalan Balaoli - Tasilo	0.5 KM		Balaoli, Kec. Loaholu			
							Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Oelaba	0.5 KM		Oelaba, Kec. Loaholu			
							Peningkatan Ruas Jalan Fulakmon - Hundihuk	0.5 KM		Hundihuk, Kec. Rote Barat Laut			
							Peningkatan Ruas Jalan Nggelak - Seda (Lapen)	0.5 KM		Dodaek, Kec. Rote Selatan			
							-. Peningkatan Ruas Jalan Keoen - Naulaor (Hotmix)	0.5 KM		Keoen, Matasio, Serubeba, Kec. Pantai Baru dan Kec. Rote Timur			
							- Peningkatan Ruas Jalan Sua - Serubeba (Hotmix)	0.5 KM		Keoen, Kec. Pantai Baru			
							-. Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Mokdale (Lapen)	0.5 KM		Mokdale, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Tondao - Tulandale - Batukamba (Lapen)	0.5 KM		Metina, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Sanggaoen (Lapen)	0.5 KM		Sanggaoen, Kec. Lobalain			
							Pembangunan Ruas Jalan menuju TPA (Hotmix)	0.5 KM		Maubesi, Kec. Rote Tengah			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Peningkatan Ruas Jalan Baudale - Lela (Lapen)	0.5 KM		Maubesi, Lidabesi, Kec. Rote Tengah			
							Peningkatan Ruas Jalan Soao - Bakorolean (Lapen)	0.5 KM		Daicama, Kec. Landu Leko			
							- Peningkatan Ruas Jalan Sua - Sonimanu (Lapen)	0.5 KM		Keoen, Sonimanu, Kec. Pantai Baru			
							Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe (laper)	0.5 KM		Sotimori, Pukuafu, Kec. Landu Leko			
							Peningkatan Ruas Jalan Daurendale - Korlok (Hotmix)	0.5 KM		Lifuleo, Sotimori, Kec. Landu Leko			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oeteas - Takai (Lapen)	0.5 KM		Helebeik, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Poros Tengah (Hotmix)	0.5 KM		Lekunik, Sanggaoen, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Oetutulu (Lapen)	0.5 KM		Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut			
							Peningkatan Ruas Jalan Olafulihaa - Kakaek (Lapen)	0.5 KM		Oebau, Kec. Pantai Baru			
							Peningkatan Ruas Jalan Lidamanu - Mundeck (lapen)	0.5 KM		Lidor, Kec. Loaholu			
							Peningkatan Ruas Jalan Meoain - Dolasi (Lapen)	0.5 KM		Dalek Esa, Kec. Rote Barat Daya			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lekioen - Nusaklain (Jl. ABRI) (Hotmix)	0.5 KM		Kel Mokdale, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Olafulihaa (Lapen)	0.5 KM		Olafulihaa, Kec. Pantai Baru			
							Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Ombok - Ndeuama (Lapen)	0.5 KM		Busalangga Barat, Kec. Rote Barat laut			
							- Peningkatan Ruas Jalan Ranggafi - Tuaneo (Lapen)	0.5 KM		Sedeoen, Kec. Rote Barat			
							- Peningkatan Ruas Jalan Manggis - Oelolot (Lapen)	0.5 KM		Oenitas, Kec. Rote Barat			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oebafok - Temas (Lapen)	0.5 KM		Oebafok, Kec. Rote Barat Daya			
							Peningkatan Ruas Jalan Oedai - kotalain (Lapen)	0.5 KM		Oebou, Kec. Rote Barat Daya			
							Peningkatan Ruas Jalan Temas - Tolama (Lapen)	0.5 KM		Tolama, Kec. Loaholu			
							Peningkatan Ruas Jalan Daeurandale - Karfao (Hotmix)	0.5 KM		Lifuleo, Kec. Landu Leko			
							Pembangunan Jalan Lingkar Nuse	0.5 KM		Nuse, Kec. Ndao Nuse			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan Ruas Jalan Kola - Lelebe (Lapen)	0.5 KM		Nggodimeda, Kec. Rote Tengah			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Ingguinak Segmen Gereja Ora Et Labora Ingguinak - Kantor Desa Ingguinak (Lapen)	0.5 KM		Ingguinak, Kec. Rote Barat Laut			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oedai - Litianak (Lapen)	0.5 KM		Holulai, Kec. Loaholu			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oeina- Ingguinak (Lapen)	0.75 KM		Balaoli, Lidor, Kec. Loaholu			
							- Peningkatan Ruas Jalan Hundiho - Faifua (Lapen)	0.5 KM		Hundiho, Faifua, Kec. Rote Timur			
							- Peningkatan Ruas Jalan Namodale - Oelunggu (Lapen)	0.5 KM		Oelunggu, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Oeseli (Lapen)	0.5 KM		Oeseli, Kec. Rote Barat Daya			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oenitas - Mbueain (lapen)	0.5 KM		Oelunggu, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Oeno (Lapen)	0.5 KM		Oebafok, Kec. Rote Barat Daya			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oetefu - Oebou (lapen)	0.5 KM		Oetefu, Kec. Rote Barat Daya			
							- Peningkatan Ruas Jalan Oembouk - Oemilan (lapen)	0.5 KM		Busalangga Timur, Kec. Rote Barat Laut			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar fatubebelak (lapen)	0.5 KM		Busalangga Barat, Kec. Rote Barat laut			
							- Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Fiulain (lapen)	0.5 KM		Oebou , Kec. Rote Barat Daya			
							- Peningkatan Ruas Jalan Baudale - Mokdale (Hotmix)	0.5 KM		Namodale, Kec. Lobalain			
							- Peningkatan Ruas Jalan Manggis - Sedeoen (lapen)	0.5 KM					
							- Peningkatan Ruas Jalan Oelua - Oesuti (lapen)	0.5 KM					
							- Peningkatan Ruas Jalan Oelunggu - Poros Tengah (lapen)	0.5 KM		Oelunggu, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Ruas Jalan Batunase - Sambuku (Lapen)	0.5 KM		Baadale, Kec. Lobalain			
							Peningkatan Ruas Jalan Eahun - Kimadale (Lapen)	0.5 KM		Lakamola, Kec. Rote Timur			
							- Peningkatan Ruas Jalan Biuk - Lapangan Tesabela (lapen)	0.5 KM		Tesabela, Kec. Pantai Baru			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							- Peningkatan Ruas Jalan Meoain - Soruk (lapen)	0.5 KM					
							- Peningkatan Ruas Jalan Tebole - Nusakdale (lapen)	0.5 KM		Tebole, Kec. Rote Selatan			
	1	3	10	2.01	69	Pembangunan Jembatan							
							Panjang jembatan yang dibangun	19 Meter	3.517.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Keoen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3.517.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Pembangunan Jembatan Nggelanoen (Hoiledo)	19 Meter		Maubesi, Kec. Rote Tengah			
45	1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga pelaksana konstruksi yang bersertifikat	7,39%	100.000.000,00			100.000.000,00	
	1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga trampil konstruksi	20 Orang	100.000.000,00			100.000.000,00	
	1	3	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 Orang	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Perkotaan Ketaatan Terhadap RTRW	86,00 undefined 97,55 %	300.000.000,00			300.000.000,00	
	1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perda RTRW dan RDTR	1 Dokumen	250.000.000,00			250.000.000,00	
	1	3	12	2.01	11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Tata Ruang yang di hasilkan	1 Dokumen	50.000.000,00			50.000.000,00	
	1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			11.405.400.000,00			12.323.495.600,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.929.440.000,00			5.947.535.600,00	
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			4.929.440.000,00			5.947.535.600,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
47	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	2.593.022.080,00			3.562.850.600,00	
	1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	27.662.000,00			63.655.000,00	
	1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	14.912.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.355.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.750.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.300.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	2.297.844.980,00			2.769.889.600,00	
	1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.244.402.980,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.715.727.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.442.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54.162.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	12 Bulan	9.000.000,00			9.000.000,00	
	1	4	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan umum perangkat daerah	100%	150.215.600,00			206.981.500,00	
	1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.060.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.060.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.050.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.969.600,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	91.636.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	108.921.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	27.224.500,00			32.249.500,00	
	1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.224.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32.249.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	19 Unit	81.075.000,00			481.075.000,00	
	1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	81.075.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	81.075.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
48	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	95.200.000,00			95.200.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan rumah	2 Unit Rumah	95.200.000,00			95.200.000,00	
	1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	95.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	95.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
49	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase luas kawasan kumuh 10-15 yang ditangani, 2. Persentase rumah layak huni	1. 7,12, 85,16 %, %	2.241.217.920,00			2.289.485.000,00	
	1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan PKP	2 Dokumen	1.393.202.920,00			1.441.470.000,00	
	1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP							
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	1.393.202.920,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.441.470.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni	20 Unit	848.015.000,00			848.015.000,00	
	1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	848.015.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	848.015.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.475.960.000,00			6.375.960.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			200.000.000,00			200.000.000,00	
50	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Tanah Pemda Bersertifikat	12,29%	200.000.000,00			200.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Tanah Pemda	56 Dokumen	200.000.000,00			200.000.000,00	
	2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.275.960.000,00			6.175.960.000,00	
51	2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	300.000.000,00			300.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 Dokumen	300.000.000,00			300.000.000,00	
	2	11	2	2.01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota							
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
52	2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	70,50 Poin	225.000.000,00			225.000.000,00	
	2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen	175.000.000,00			175.000.000,00	
	2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2 Laporan	50.000.000,00			50.000.000,00	
	2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat							
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
53	2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20,62%	250.000.000,00			250.000.000,00	
	2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kehati	1 Dokumen	250.000.000,00			250.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.005 Ha	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
54	2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah	100%	25.000.000,00			25.000.000,00	
	2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki persetujuan	199 Pelaku usaha	25.000.000,00			25.000.000,00	
	2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
55	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang dikurangi persentase sampah yang di kelola	75.94 %	5.475.960.000,00			5.375.960.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang ditangani	3358 Ton	5.475.960.000,00			5.225.960.000,00	
	2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	8	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota							
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.204 Ton	1.675.960.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.925.960.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai							
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	4409 Ton	150.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah							
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah sampah yang terangkut	7757 Ton	0			150.000.000,00	
	2	11	11	2.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Satuan Polisi Pamong Praja			6.307.329.000,00			6.659.407.075,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.307.329.000,00			6.659.407.075,00	
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			6.307.329.000,00			6.659.407.075,00	
56	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.544.150.000,00			5.509.407.075,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.005.000,00			5.000.000,00	
	1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.005.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.257.366.400,00			1.794.468.200,00	
	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.187.526.400,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.719.468.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.840.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.125.600,00			12.000.000,00	
	1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.125.600,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	12.500.000,00			71.000.000,00	
	1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	12.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	172.658.000,00			151.870.000,00	
	1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.260.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.035.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.870.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.830.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.533.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.750.000.000,00			3.340.068.875,00	
	1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.750.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.340.068.875,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.470.000,00			20.000.000,00	
	1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.210.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.260.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	316.025.000,00			115.000.000,00	
	1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	296.525.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
57	1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda/Perkada Kabupaten/Kota Persentase pelanggaran Perda/Perbup yang ditindak	0.07 Persen 100 Persen	664.502.000,00			1.000.000.000,00	
	1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	600.017.000,00			866.000.000,00	
	1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.173.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	138.052.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	198.792.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	316.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	64.485.000,00			134.000.000,00	
	1	5	2	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	30.218.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	19.480.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	37.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	14.787.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
58	1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100 Persen	98.677.000,00			150.000.000,00	
	1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	52.947.000,00			50.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	52.947.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	45.730.000,00			100.000.000,00	
	1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	15 Orang	45.730.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			2.646.530.000,00			4.462.385.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.646.530.000,00			4.462.385.000,00	
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			2.646.530.000,00			4.462.385.000,00	
59	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	1.398.367.000,00			2.567.385.000,00	
	1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	5.366.190,00			6.635.400,00	
	1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.161.190,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.430.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2.205.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.205.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	26 orang/ bulan	1.101.983.310,00			2.161.880.000,00	
	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1.060.108.310,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	41.875.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	41.880.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.952.000,00			8.650.000,00	
	1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	8.952.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	79.338.000,00			82.452.100,00	
	1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	525.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	525.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.125.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.650.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	4.064.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.127.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	28.974.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.567.500,00			25.567.500,00	
	1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.092.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.092.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.475.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.475.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	177.160.000,00			282.200.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	175.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.160.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
60	1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	1.248.163.000,00			1.895.000.000,00	
	1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0			250.000.000,00	
	1	5	3	2.01	7	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.01	8	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	614.063.000,00			905.000.000,00	
	1	5	3	2.02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	54.063.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	11 Kawasan	485.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	485.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	100%	404.100.000,00			490.000.000,00	
	1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	14.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit							
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03	12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	239.900.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	100%	230.000.000,00			250.000.000,00	
	1	5	3	2.04	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	7 Kegiatan	130.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial			2.156.612.000,00			2.285.821.882,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.156.612.000,00			2.285.821.882,00	
	1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			2.156.612.000,00			2.285.821.882,00	
61	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	1.832.891.600,00			1.906.957.070,00	
	1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	23.400.000,00			24.890.440,00	
	1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.281.400,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.609.040,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.662.062.103,00			1.695.469.551,00	
	1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.610.262.103,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.642.628.371,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52.841.180,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100%	12.600.000,00			12.853.260,00	
	1	6	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.853.260,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	68.724.497,00			81.594.237,00	
	1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	493.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	502.909,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.746.597,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.618.751,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.100.900,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.326.609,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	40.384.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43.745.968,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.089.000,00			22.240.089,00	
	1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	727.200,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.089.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.512.889,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	45.016.000,00			69.909.493,00	
	1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	43.516.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	68.379.343,00	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.530.150,00	DINAS SOSIAL
62	1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkatnya kualitas dalam pelayanan sosial	100%	32.340.000,00			32.990.034,00	
	1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemampuan PSKS kelembagaan Masyarakat	100%	32.340.000,00			32.990.034,00	
	1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	32.340.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32.990.034,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
63	1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % 11,58 % 17,06 % 50,39 %	39.352.000,00			47.248.256,00	
	1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	100%	16.480.000,00			16.480.000,00	
	1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	16.480.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.480.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi non HIV/AIDS dan NAPZA	45 Orang	22.872.000,00			30.768.256,00	
	1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	22.872.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.768.256,00	DINAS SOSIAL
64	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 % 69,20 %	96.785.400,00			125.155.457,00	
	1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase database fakir miskin yang valid	100%	96.785.400,00			125.155.457,00	
	1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat							
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14.404.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.161.860,00	DINAS SOSIAL
	1	6	5	2.02	6	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
							0	0 0	12.823.400,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.573.671,00	DINAS SOSIAL
	1	6	5	2.02	8	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	30472 Usulan	69.558.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	89.419.926,00	DINAS SOSIAL
65	1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	100%	155.243.000,00			173.471.065,00	
	1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	10500%	155.243.000,00			173.471.065,00	
	1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10500 Orang	155.243.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	173.471.065,00	DINAS SOSIAL
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan			7.839.513.000,00			9.677.500.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.837.013.000,00			9.672.500.000,00	
	2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			3.284.655.400,00			4.332.500.000,00	
66	2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Meningkatnya layanan umum pada Perangkat Daerah	0 Rupiah 100 %	2.989.540.900,00			3.950.500.000,00	
	2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	0 Rupiah 100 % 100 % 100 % 100 %	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	2.634.482.750,00			3.500.000.000,00	
	2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	2.634.482.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	9.600.000,00			12.000.000,00	
	2	8	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	179.982.900,00			186.500.000,00	
	2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.986.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.996.900,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	125.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	35.475.250,00			42.000.000,00	
	2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	975.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.500.250,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.000.000,00			200.000.000,00	
	2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	120.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
67	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	100%	20.000.000,00			30.000.000,00	
	2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	100 % 100 % 100 %	20.000.000,00			30.000.000,00	
	2	8	2	2.02	8	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
							jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	100 orang	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
68	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	undefined undefined	20.600.000,00			50.000.000,00	
	2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Rasio kekerasan terhadap perempuan	100 % 100 % 100 %	20.600.000,00			50.000.000,00	
	2	8	3	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	80 orang	20.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
69	2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	100%	20.402.000,00			25.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar Persentase keluarga sejahtera	100 % 100 %	20.402.000,00			25.000.000,00	
	2	8	4	2.02	7	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Lembaga	20.402.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
70	2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	undefined undefined	234.112.500,00			277.000.000,00	
	2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak (0 s/d <18 Tahun)	0,06 Poin 100 % 100 %	94.823.500,00			112.000.000,00	
	2	8	7	2.01	7	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	10.290.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	7	2.01	9	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	84.533.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	119.089.000,00			140.000.000,00	
	2	8	7	2.02	8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang	119.089.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.200.000,00			25.000.000,00	
	2	8	7	2.03	9	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota							
							-	-	20.200.000,00	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.552.357.600,00			5.340.000.000,00	
71	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	100%	302.900.000,00			390.000.000,00	
	2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Cakupan Pengendalian Penduduk Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan	100 % 100 % 100 % 100 %	302.900.000,00			390.000.000,00	
	2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	89.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	153.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	3.324.457.600,00			3.765.000.000,00	
	2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Prevalensi Kontarsepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Rasio akseptor KB	100 % 100 % 100 %	1.054.506.600,00			1.210.000.000,00	
	2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	490.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	200.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	105.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Organisasi	259.206.600,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	738.501.000,00			510.000.000,00	
	2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Orang	638.501.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.02	7	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	813.001.000,00			1.095.000.000,00	
	2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2000 Orang	674.251.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1.010.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	20.250.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan							
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	20 Orang	105.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	718.449.000,00			950.000.000,00	
	2	14	3	2.04	5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas							
							Jumlah DASHAT di Kampung KB	1 Unit	484.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	29 Kampung	52.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	3	2.04	7	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20 Dokumen	181.949.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	925.000.000,00			1.185.000.000,00	
	2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera	100 % 100 %	139.600.000,00			365.000.000,00	
	2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	9.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	130.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	785.400.000,00			820.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	357.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	428.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X					NON URUSAN							
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							
74	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Meningkatnya layanan umum pada Perangkat Daerah	0 Rupiah 100 %	2.500.000,00			5.000.000,00	
	X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	0 Rupiah 100 % 100 % 100 % 100 %	2.500.000,00			5.000.000,00	
	X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			2.500.674.044,00			5.655.537.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.500.674.044,00			5.655.537.000,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.500.674.044,00			5.655.537.000,00	
75	2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.990.424.044,00			3.828.112.000,00	
	2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.393.000,00			24.700.000,00	
	2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.393.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.783.073.044,00			3.578.508.000,00	
	2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.729.883.044,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.520.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53.190.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	58.508.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.800.000,00			4.800.000,00	
	2	12	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	84.985.000,00			120.444.000,00	
	2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.838.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27.445.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.999.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.999.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	48.148.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.680.000,00			52.180.000,00	
	2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.680.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52.180.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.493.000,00			47.480.000,00	
	2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	45.493.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47.480.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
76	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	- Persentase Kepemilikan IKD,Persentase Penerbitan KIA, KK dan KTP Elektroni	30,60,42,100,100 %	178.356.000,00			800.000.000,00	
	2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	178.356.000,00			800.000.000,00	
	2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
							0	0 0	178.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
77	2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	- Persentase Penerbitan Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, dan Perceraian	96,72,45,96 %	90.270.000,00			187.425.000,00	
	2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Akta akta	4 Dokumen	90.270.000,00			187.425.000,00	
	2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	90.270.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	187.425.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
78	2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	100%	241.624.000,00			840.000.000,00	
	2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1 Laporan% 100 %	241.624.000,00			840.000.000,00	
	2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	241.624.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	840.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			3.413.101.000,00			3.478.647.006,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.373.101.000,00			3.440.210.100,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.373.101.000,00			3.440.210.100,00	
79	2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu. 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah. 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu. 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	2.353.874.780,00			2.405.461.280,00	
	2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan tepat waktu	19 Dokumen	31.512.500,00			59.700.000,00	
	2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	27.512.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.159.789.780,00			2.157.329.780,00	
	2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26/12 Orang/bulan	2.112.089.780,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.112.089.780,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	7.200.000,00			7.200.000,00	
	2	13	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	82.224.500,00			82.224.500,00	
	2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.250.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.484.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.484.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.490.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.490.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.990.000,00			2.990.000,00	
	2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.990.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	70.158.000,00			96.017.000,00	
	2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	17.341.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.817.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.817.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
80	2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100%	25.706.000,00			25.706.000,00	
	2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan Dan Institusi Desa	100%	25.706.000,00			25.706.000,00	
	2	13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa							
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	22 Desa	25.706.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.706.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
81	2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. 3. Persentase Pemberdayaan Bumdes	100%	643.206.000,00			643.728.600,00	
	2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa	100%	643.206.000,00			643.728.600,00	
	2	13	4	2.01	3	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	112 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	4	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	112 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	25.706.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.706.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	24 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	112 Laporan	500.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	112 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.522.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
82	2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD). 2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat . 3. Persentase Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi	100%	350.314.220,00			365.314.220,00	
	2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat	100%	350.314.220,00			365.314.220,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54 Dokumen	24.871.825,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.871.825,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga	154.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	154.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	20.942.395,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.942.395,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X					NON URUSAN			40.000.000,00			38.436.906,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			40.000.000,00			38.436.906,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
83	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu. 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah. 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu. 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	40.000.000,00			38.436.906,00	
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	40.000.000,00			38.436.906,00	
	X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38.436.906,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Dinas Perhubungan			9.364.395.000,00			3.195.231.316,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.364.395.000,00			3.195.231.316,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			9.364.395.000,00			3.195.231.316,00	
84	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	4.424.395.000,00			2.440.231.316,00	
	2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.181.000,00			72.181.000,00	
	2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	46.151.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	36.030.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36.030.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.021.394.098,00			2.051.205.414,00	
	2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.939.889.098,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.968.700.414,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.505.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	82.505.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	11.400.000,00			11.400.000,00	
	2	15	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	133.981.000,00			124.006.000,00	
	2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.075.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.861.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.861.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	50.345.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	53.345.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.105.000,00			26.105.000,00	
	2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.105.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.105.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	150.333.902,00			155.333.902,00	
	2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	150.333.902,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	155.333.902,00	DINAS PERHUBUNGAN
85	2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	4.870.000.000,00			730.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat	undefined undefined	830.000.000,00			700.000.000,00	
	2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	830.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	4.020.000.000,00			0	
	2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Sanggaoen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00			30.000.000,00	
	2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
86	2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	KONEKTIVITAS LAUT	23,84%	70.000.000,00			25.000.000,00	
	2	15	3	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00			0	
	2	15	3	2.09	1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	3	2.09	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	30.000.000,00			25.000.000,00	
	2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			3.488.241.000,00			3.102.899.999,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.488.241.000,00			3.102.899.999,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.465.787.200,00			3.048.199.999,00	
87	2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.389.058.872,00			2.308.199.999,00	
	2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.273.000,00			7.000.000,00	
	2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.598.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.675.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.135.955.322,00			2.019.999.999,00	
	2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	2.082.715.322,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.240.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	69.999.999,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	9.000.000,00			11.200.000,00	
	2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	109.605.150,00			153.000.000,00	
	2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.321.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.184.150,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.669.400,00			40.500.000,00	
	2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.669.400,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	75.556.000,00			76.500.000,00	
	2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	25.556.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
88	2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	10.716.450,00			26.500.000,00	
	2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.716.450,00			26.500.000,00	
	2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik							
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	10.716.450,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
89	2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	1.066.011.878,00			713.500.000,00	
	2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.066.011.878,00			713.500.000,00	
	2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	875.658.478,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	3	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE							
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	120.060.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	103.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	3	2.02	33	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah							
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	70.293.400,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			13.850.300,00			30.200.000,00	
90	2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	13.850.300,00			30.200.000,00	
	2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	13.850.300,00			30.200.000,00	
	2	20	2	2.01	21	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	6.250.450,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	2	2.01	22	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	7.599.850,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			8.603.500,00			24.500.000,00	
91	2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	8.603.500,00			24.500.000,00	
	2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.603.500,00			24.500.000,00	
	2	21	2	2.01	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	8.603.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			7.996.256.000,00			3.802.143.624,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.546.925.000,00			3.130.713.624,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.546.925.000,00			3.130.713.624,00	
92	2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1).Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu 2). Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah 3.) Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu 4.) Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100,100,100,100 %,%,%,%	2.673.923.624,00			2.673.923.624,00	
	2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	53.030.000,00			53.030.000,00	
	2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	38.211.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38.211.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	14.819.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.819.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	2.388.073.524,00			2.388.073.524,00	
	2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	2.318.273.524,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.318.273.524,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	69.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100%	11.400.000,00			11.400.000,00	
	2	17	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	127.955.000,00			127.955.000,00	
	2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.815.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	63.815.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.352.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.352.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.249.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.249.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.539.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	42.539.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.040.100,00			40.040.100,00	
	2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.040.100,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.040.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100%	53.425.000,00			53.425.000,00	
	2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	43.442.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43.442.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.283.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.283.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
93	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	84,73%	20.000.000,00			20.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	45 Koperasi	20.000.000,00			20.000.000,00	
	2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
94	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang mempunyai kompetensi	39,18%	0			94.000.000,00	
	2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	20 Koperasi	0			94.000.000,00	
	2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	94.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
95	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase pemberdayaan dan perlindungan anggota koperasi	100%	62.000.000,00			62.000.000,00	
	2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	100%	62.000.000,00			62.000.000,00	
	2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	6	2.01	9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
96	2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya Usaha Mikro yang terfasilitasi kemudahan perizinan	100%	50.000.000,00			50.000.000,00	
	2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase Usaha Mikro yang terfasilitasi kemudahan perizinan	100%	50.000.000,00			50.000.000,00	
	2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
97	2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.) Persentase Usaha Mikro yang telah terfasilitasi untuk pengembangan produk 2.) Nilai Produksi Produk Khas/unggulan Rote	1.) 33,73 2.) 2.895 1.) % 2.) Rupiah	2.741.001.376,00			230.790.000,00	
	2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	16 Usaha	2.741.001.376,00			230.790.000,00	
	2	17	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro							
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	153.821.376,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	2.587.180.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.790.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Pembangunan Gedung Sentra Kuliner	1 Paket		Kelurahan Namodale Kec. Lobalain			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.449.331.000,00			671.430.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.075.190.000,00			93.930.000,00	
98	3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.) Persentase sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi 2.) Persentase Pemenuhan sarana Pedagang Kaki Lima (PKL)	1.) 45,16 2.) 20 1.) % 2.) %	1.993.710.000,00			12.450.000,00	
	3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	30 Unit	1.993.710.000,00			12.450.000,00	
	3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30 Unit	1.993.710.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Pembangunan Pagar, Pelataran dan Lapak Pasar Busalangga	1 Paket		Desa Busalangga Kec. RBL			
99	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pengawasan barang-barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Bersubsidi	100%	65.000.000,00			65.000.000,00	
	3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14 Laporan	20.000.000,00			20.000.000,00	
	3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaaan Pupuk dan Pestisida Bersubsid	24 Laporan	45.000.000,00			45.000.000,00	
	3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
100	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang diTera dan Tera ulang	100%	16.480.000,00			16.480.000,00	
	3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	302 Unit	16.480.000,00			16.480.000,00	
	3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	302 Unit	16.480.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.480.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			374.141.000,00			577.500.000,00	
101	3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.) Persentase fasilitasi pengembangan SDM kelompok IKM 2.) Persentase peningkatan sarana dan prasarana IKM	1.) 11,9 2.) 63,64 1.) % 2.) %	346.641.000,00			550.000.000,00	
	3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	346.641.000,00			550.000.000,00	
	3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	346.641.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
102	3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.) Persentase Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar 2.) Persentase Industrri yang telah memiliki ijin	1.) 3,61 2.) 3,59 1.) % 2.) %	27.500.000,00			27.500.000,00	
	3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	27.500.000,00			27.500.000,00	
	3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas							
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2.775.304.000,00			2.983.873.900,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.618.331.600,00			2.826.901.500,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.618.331.600,00			2.826.901.500,00	
103	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1).Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu;2).Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah;3)Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu; 4)Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100,100,100,100 %	2.150.100.816,00			2.250.100.816,00	
	2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	60.640.000,00			60.640.000,00	
	2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	44.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	16.540.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.540.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.956.997.816,00			1.956.997.816,00	
	2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.956.997.816,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.956.997.816,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	80.090.000,00			80.090.000,00	
	2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.933.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.933.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.565.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.565.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.592.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	67.592.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.373.000,00			152.373.000,00	
	2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	52.373.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52.373.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase informasi peluang usaha sektor unggulan	100%	125.000.000,00			175.000.000,00	
	2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perda RUPM dan Peta Potensi Investasi Kabupaten Rote Ndao	2 Dokumen	125.000.000,00			175.000.000,00	
	2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
105	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100 5,56	18.944.100,00			50.000.000,00	
	2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	18.944.100,00			50.000.000,00	
	2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18.944.100,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
106	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	42,86%	161.507.684,00			161.507.684,00	
	2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	161.507.684,00			161.507.684,00	
	2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	49.999.684,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.999.684,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1200 Kegiatan Usaha	111.508.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	111.508.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
107	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	1,50%	137.779.000,00			165.293.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha,Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan EvaluasiPenilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan berusaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	86 PMA/PMDN,UMK /UMKM 30 PMA/PMDN, UMK/UMKM 100 %	137.779.000,00			165.293.000,00	
	2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	65.293.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.293.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal							
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	86 Kegiatan Usaha	72.486.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
108	2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	100%	25.000.000,00			25.000.000,00	
	2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	25.000.000,00			25.000.000,00	
	2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X					NON URUSAN			156.972.400,00			156.972.400,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			156.972.400,00			156.972.400,00	
109	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1).Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu;2).Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah;3)Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu; 4)Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100,100,100,100 %	156.972.400,00			156.972.400,00	
	X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	66.900.000,00			66.900.000,00	
	X	XX	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	66.900.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	66.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.800.000,00			7.800.000,00	
	X	XX	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	59.215.000,00			59.215.000,00	
	X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.715.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	58.715.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23.057.400,00			23.057.400,00	
	X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.057.400,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.057.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kepemudaan dan Olahraga			7.221.692.000,00			7.221.692.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.221.692.000,00			7.221.692.000,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.221.692.000,00			7.221.692.000,00	
110	2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	135.182.000,00			135.182.000,00	
	2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6.000.000,00			6.000.000,00	
	2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	37.182.000,00			37.182.000,00	
	2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Orang/bulan	21.582.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.582.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.000.000,00			6.000.000,00	
	2	19	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	74.000.000,00			74.000.000,00	
	2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	56.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.000.000,00			2.000.000,00	
	2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
111	2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Rasio Wirausaha Pemuda, 2. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif, 3. Persentase pemuda berprestasi dan tidak mampu yang memperoleh beasiswa	100%	4.845.107.000,00			4.845.107.000,00	
	2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	100%	4.695.107.000,00			4.695.107.000,00	
	2	19	2	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota							
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	4 Kegiatan	4.695.107.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4.695.107.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	150.000.000,00			150.000.000,00	
	2	19	2	2.02	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	650 Orang	150.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
112	2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlit yang berprestasi	87,73%	2.166.403.000,00			2.166.403.000,00	
	2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas siswa pada bidang olahraga	100%	2.166.403.000,00			2.166.403.000,00	
	2	19	3	2.01	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	2.166.403.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2.166.403.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
113	2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan, 2. Persentase anggota pramuka yang aktif	100%	75.000.000,00			75.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah dokumen pelaksanaan kapasitas organisasi Kepramukaan tingkat daerah	1 Dokumen	75.000.000,00			75.000.000,00	
	2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			5.201.657.000,00			6.053.029.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.644.173.890,00			2.810.673.890,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.644.173.890,00			2.810.673.890,00	
114	2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu.; 2) Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah.; 3) Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah.; 4) Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100.; 100.; 100, 100 %%%%	2.222.219.790,00			2.388.719.790,00	
	2	22	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	53.632.000,00			63.632.000,00	
	2	22	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	53.632.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	53.632.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.965.290.640,00			1.965.290.640,00	
	2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	1.908.590.640,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.908.590.640,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	56.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100%	10.200.000,00			10.200.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	22	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	106.550.250,00			108.050.250,00	
	2	22	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.793.950,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.793.950,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.765.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.765.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.846.300,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.846.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	56.145.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.145.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	62.408.900,00			62.408.900,00	
	2	22	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	715.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	715.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	61.693.900,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	61.693.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	10 unit	24.138.000,00			179.138.000,00	
	2	22	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	23.388.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.388.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	750.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
115	2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap pengembangan Kebudayaan.; 2). Persentase Warisan nilai seni dan budaya daerah yang dilestarikan	9,97.; 82,24 %	362.257.100,00			362.257.100,00	
	2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pagelaran seni dan budaya, jambore, festival putra putri tari ,bantuan peralatan kepada sanggar seni dan data obyek pemajuan kebudayaan	100%	362.257.100,00			362.257.100,00	
	2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional							
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	362.257.100,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	362.257.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
116	2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1).Persentase Warisan budaya yang dilestarikan.; 2) Persentase Cagar budaya dan Warisan Budaya tak benda ditetapkan	82,24.; 22,05 %	59.697.000,00			59.697.000,00	
	2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase data situs budaya	100%	59.697.000,00			59.697.000,00	
	2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya							
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	17 Objek	59.697.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	59.697.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
117	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1).Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan.; 2) Persentase Destinasi Wisata Yang dikelola	90,91.; 21,51 %	1.883.429.510,00			2.568.301.510,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	100%	1.883.429.510,00			2.568.301.510,00	
	3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	435.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	1.850.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Destinasi Kawasan Wisata Fiulain			Desa Oebou Kec. RBD			
	3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	33.429.510,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.429.510,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	214.872.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	2	2.03	10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
118	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1).Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata; 2).Persentase penyelenggaraan event pariwisata	100.; 26,88 %%	519.650.000,00			519.650.000,00	
	3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	519.650.000,00			519.650.000,00	
	3	26	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	119.650.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	119.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	3	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	400.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
119	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1).Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual; 2).Persentase SDM kepariwisataan	100.;3,76 %	154.403.600,00			154.403.600,00	
	3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	154.403.600,00			154.403.600,00	
	3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	74.403.850,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	74.403.850,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	5	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata							
							0	320 0	79.999.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	79.999.750,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			1.769.615.000,00			46.440.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.769.615.000,00			46.440.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.736.644.295,00			46.440.000,00	
120	2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	1.506.388.143,00			46.440.000,00	
	2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	18.520.000,00			5.400.000,00	
	2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	15.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.720.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.286.855.748,00			41.040.000,00	
	2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.245.815.748,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.040.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	41.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.400.000,00			0	
	2	23	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	116.007.595,00			0	
	2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.870.595,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.830.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.360.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	78.947.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	27.566.800,00			0	
	2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	754.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	26.812.800,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	52.038.000,00			0	
	2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	25.419.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	26.619.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
121	2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat:, 2. Persentase kunjungan ke perpustakaan	100%	230.256.152,00			0	
	2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	179.765.987,00			0	
	2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	50.419.950,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	2	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	191 Eksemplar	80.940.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	2	2.01	20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	48.405.537,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.490.165,00			0	
	2	23	2	2.02	9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	30 Orang	19.737.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	2	2.02	10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	10 Lokus	30.752.665,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
122	2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1. Tingkat ketersediaan arsip, 2. Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (terdata dan tertata secara baik)	33,26%	23.079.450,00			0	
	2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.771.000,00			0	
	2	24	2	2.02	4	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	8.771.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	14.308.450,00			0	
	2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	3 Pengguna	14.308.450,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
123	2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1. persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip:, 2. Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip: 4,08%, 3. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip: 60%, 4. persentase in aktif yang telah di buatkan daftar arsip: 60 %, 5. persentase aktif statis yang telah dibuatkan sarana bantutemu balik: 0,40%, 6. persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN: 0,40%	undefined undefined	9.891.255,00			0	
	2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	9.891.255,00			0	
	2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Daftar	9.891.255,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Dinas Perikanan			4.346.031.000,00			4.346.381.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.346.031.000,00			4.346.381.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.346.031.000,00			4.346.381.000,00	
124	3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.626.640.158,00			1.626.690.158,00	
	3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	26.075.000,00			26.125.000,00	
	3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	21.075.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.075.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.050.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.421.146.508,00			1.421.146.508,00	
	3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.348.423.508,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.348.423.508,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	72.723.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72.723.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100%	3.600.000,00			3.600.000,00	
	3	25	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	78.174.850,00			78.174.850,00	
	3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.252.850,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.252.850,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8.950.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	38.472.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38.472.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.386.800,00			47.386.800,00	
	3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.386.800,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47.386.800,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	17 Unit	50.257.000,00			50.257.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	22.187.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.187.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.570.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.570.000,00	DINAS PERIKANAN
125	3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih	33,03 % 3407 Ton 6,07 %	1.318.430.000,00			1.318.430.000,00	
	3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabuapten Kota	100%	1.318.430.000,00			1.318.430.000,00	
	3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil							
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 Orang	1.318.430.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.318.430.000,00	DINAS PERIKANAN
126	3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0,35 % 1,77 % 22 Ton	1.051.913.842,00			1.052.213.842,00	
	3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil	100%	30.000.000,00			30.300.000,00	
	3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	30.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.300.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentaase Pengelolaan Pembudidayaan ikan	100%	1.021.913.842,00			1.021.913.842,00	
	3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	330.564.589,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	330.564.589,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	4	2.04	9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29 Unit	691.349.253,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	691.349.253,00	DINAS PERIKANAN
127	3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih Angka Konsumsi Ikan	30 % 5,83 % 67,19 Kg/Kpt	349.047.000,00			349.047.000,00	
	3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	28.147.000,00			28.147.000,00	
	3	25	6	2.01	5	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko							
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	28.147.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28.147.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500 Kg	320.900.000,00			320.900.000,00	
	3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	150.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	170.900.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	170.900.000,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Peternakan			9.695.956.000,00			13.907.340.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.695.956.000,00			13.907.340.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			9.695.956.000,00			13.907.340.000,00	
128	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	4.466.721.000,00			4.206.650.000,00	
	3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.856.666,00			80.000.000,00	
	3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	28.370.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.486.666,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.212.064.334,00			3.861.650.000,00	
	3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4.146.544.334,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.791.650.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	65.520.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.600.000,00			7.800.000,00	
	3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.800.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	138.019.000,00			180.000.000,00	
	3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.550.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	42.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.718.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.251.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.250.000,00			30.600.000,00	
	3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	600.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.250.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.931.000,00			46.600.000,00	
	3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	39.131.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.600.000,00	DINAS PETERNAKAN
129	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemanfaatan luas lahan hijauan makanan ternak (HMT) Persentase Produksi Komoditas Peternakan	11000/ 1100 Ekor/Ha 4,72 %	4.416.284.000,00			2.614.500.000,00	
	3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	4.259.796.000,00			2.164.500.000,00	
	3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100 Dokumen	29.796.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	200 Dokumen	4.230.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.464.500.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	2	2.02	5	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	90.000.000,00			150.000.000,00	
	3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	150 Laporan	90.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Sanggaoen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	66.488.000,00			300.000.000,00	
	3	27	2	2.05	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan							
							Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	10 Ton	66.488.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	240.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan							
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	11 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
130	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang diadakan	12,24%	220.000.000,00			4.488.440.000,00	
	3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	220.000.000,00			4.488.440.000,00	
	3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	220.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	2.088.440.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
131	3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengiriman ternak ke luar daerah Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	100 % 6 %	508.733.000,00			2.300.000.000,00	
	3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	502.848.000,00			580.000.000,00	
	3	27	4	2.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular							
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	10000 Laporan	502.848.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	180.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	24000 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0			1.715.175.000,00	
	3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	11 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	1.715.175.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	5.885.000,00			4.825.000,00	
	3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100 Laporan	5.885.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.825.000,00	DINAS PETERNAKAN
132	3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin Persentase pemasaran hasil produksi peternakan	100 % 7,71 %	84.218.000,00			277.750.000,00	
	3	27	6	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	84.218.000,00			277.750.000,00	
	3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan							
							Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	6	2.02	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan							
							Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	3000 Laporan	14.218.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	6	2.02	3	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan							
							Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	40 Laporan	70.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	247.750.000,00	DINAS PETERNAKAN
133	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluh peternakan	100%	0			20.000.000,00	
	3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	0			20.000.000,00	
	3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
						Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan			13.847.130.000,00			15.524.630.001,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			140.772.550,00			290.772.550,00	
	2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			140.772.550,00			290.772.550,00	
134	2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	37.499.850,00			187.499.850,00	
	2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	37.499.850,00			87.499.850,00	
	2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	2	9	3	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota							
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	12.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	2	9	3	2.01	11	Pemantauan Stok Pangan							
							Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	24.999.850,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.999.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	0			100.000.000,00	
	2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
135	2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	57.834.700,00			57.834.700,00	
	2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	14.000.000,00			14.000.000,00	
	2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	43.834.700,00			43.834.700,00	
	2	9	4	2.02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	43.834.700,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43.834.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
136	2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	45.438.000,00			45.438.000,00	
	2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	45.438.000,00			45.438.000,00	
	2	9	5	2.01	6	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan							
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	45.438.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.438.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			13.706.357.450,00			15.233.857.451,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			13.706.357.450,00			15.233.857.451,00	
137	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.517.101.659,00			6.782.101.660,00	
	3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.095.700,00			12.095.700,00	
	3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11.445.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.445.750,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	649.950,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	649.950,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.296.178.659,00			6.296.178.660,00	
	3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	6.225.978.659,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.225.978.660,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	70.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.000.000,00			12.000.000,00	
	3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	112.632.300,00			112.632.300,00	
	3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.124.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.662.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.662.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.758.300,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.758.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	44.588.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44.588.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.650.000,00			25.650.000,00	
	3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	650.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	58.545.000,00			323.545.000,00	
	3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	58.545.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	58.545.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
138	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	5.339.279.791,00			5.339.279.791,00	
	3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	4.158.254.545,00			4.158.254.545,00	
	3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	4.030.580.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.030.580.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	127.674.545,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	127.674.545,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1.181.025.246,00			1.181.025.246,00	
	3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	671.914.623,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	671.914.623,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	389.289.623,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	389.289.623,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	2	2.02	4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman							
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	119.821.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	119.821.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
139	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	1.800.000.000,00			3.062.500.000,00	
	3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	1.800.000.000,00			3.062.500.000,00	
	3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.262.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	605.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	605.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
							Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	1 Unit		Desa Loleoen (Kec. Lobalain)			
							Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	1 Unit		Desa Oetutulu (Kec. RBL)			
							Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	1 Unit		Desa Matasio (Kec. Rotim)			
	3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	0	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
	3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	1.195.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	1.195.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
							Irigasi Air Tanah Dalam	1 Unit		Desa Loleoen Kec. Lobalain			
							Irigasi Air Tanah Dalam	1 Unit		Desa Temas Kec. RBL			
							Irigasi Air Tanah Dalam	1 Unit		Desa Oeseli Kec. RBD			
							Irigasi Air Tanah Dalam	1 Unit		Desa Hundihopec. Rotim			
140	3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	0			0	
	3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	0			0	
	3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
141	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	49.976.000,00			49.976.000,00	
	3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	49.976.000,00			49.976.000,00	
	3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	0	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	990 Unit	49.976.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.976.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KATAHANAN PANGAN
						Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			2.371.215.000,00			6.183.416.729,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.147.372.417,00			2.108.235.329,00	
	2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.147.372.417,00			2.108.235.329,00	
142	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.741.580.012,00			1.773.000.000,00	
	2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.148.268,00			18.399.919,00	
	2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10.148.268,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.930.054,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.469.865,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.582.175.534,00			1.603.385.522,00	
	2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.534.175.534,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.553.545.522,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.840.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.800.000,00			4.800.000,00	
	2	7	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.800.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	70.893.410,00			74.778.924,00	
	2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.154.940,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.480.430,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.189.470,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.189.494,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.549.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.109.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
							-	-	29.457.800,00			29.461.135,00	
	2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.430.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.433.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.027.800,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28.028.135,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
							-	-	44.105.000,00			42.174.500,00	
	2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	42.105.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.120.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.054.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
143	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
							-	-	144.292.405,00			297.235.329,00	
	2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
							-	-	144.292.405,00			297.235.329,00	
	2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	15 Orang	144.292.405,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	297.235.329,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
144	2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
							-	-	35.000.000,00			0	
	2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							
							-	-	35.000.000,00			0	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja							
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	35.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
145	2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	226.500.000,00			38.000.000,00	
	2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	212.500.000,00			13.000.000,00	
	2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	212.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	14.000.000,00			25.000.000,00	
	2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	4 Perkara	14.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
									223.842.583,00			4.075.181.400,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
									223.842.583,00			4.075.181.400,00	
146	3	32	2			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	0			1.300.000.000,00	
	3	32	2	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	0			1.300.000.000,00	
	3	32	2	2.01	3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi							
							Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2 Hektar	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
147	3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	89.999.613,00			2.340.000.000,00	
	3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	89.999.613,00			2.340.000.000,00	
	3	32	3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	89.999.613,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.850.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi							
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Kepala Keluarga	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	3	2.01	8	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat							
							Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	15 KK	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	3	2.01	20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi							
							Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
148	3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	133.842.970,00			435.181.400,00	
	3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	133.842.970,00			435.181.400,00	
	3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman							
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	15 Kepala Keluarga	133.842.970,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	210.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman							
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	225.181.400,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Sekretariat Daerah							
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
149	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.800.000,00			4.848.000,00	
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.800.000,00			4.848.000,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Umum			19.217.291.000,00			20.992.692.730,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			19.217.291.000,00			20.992.692.730,00	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			19.217.291.000,00			20.992.692.730,00	
150	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.217.291.000,00			20.992.692.730,00	
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.887.800,00			11.432.190,00	
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.888.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.332.400,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.999.800,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.099.790,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.429.486.562,00			6.750.960.890,00	
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/bulan	6.240.736.562,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.552.773.390,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	188.750.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	198.187.500,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	94.661.000,00			99.394.050,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	94.661.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	99.394.050,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	57.600.000,00			60.480.000,00	
	4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	57.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60.480.000,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.134.127.178,00			1.449.664.597,00	
	4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.694.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.928.700,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.600.150,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.680.157,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	102.148.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	107.255.925,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	224.976.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	275.648.100,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46.978.300,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.327.215,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1382 Laporan	693.730.228,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	947.824.500,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0			239.284.000,00	
	4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	239.284.000,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.622.963.000,00			1.704.111.150,00	
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.997.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.496.850,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.612.966.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.693.614.300,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.377.337.260,00			3.685.483.473,00	
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	203.526.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	261.485.700,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	976.257.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.116.565.800,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45.907.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48.202.875,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.114.570.760,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.220.299.298,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	37.076.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38.929.800,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	786.202.000,00			825.510.420,00	
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	175.436.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	184.207.800,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	189.766.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	199.254.300,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	121.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	127.048.320,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	300.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	315.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.806.053.000,00			2.946.355.650,00	
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2.114.181.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.219.890.050,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	691.872.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	726.465.600,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	2.897.973.200,00			3.220.016.310,00	
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	8 Laporan	1.020.349.200,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.071.366.660,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7 Laporan	1.528.397.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.781.961.300,00	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	8 Laporan	349.227.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	366.688.350,00	BAGIAN UMUM
						Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			9.545.060.470,00			5.483.597.158,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			9.545.060.470,00			5.483.597.158,00	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			9.545.060.470,00			5.483.597.158,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
151	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.787.270.470,00			2.091.373.939,00	
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.040.470,00			30.300.000,00	
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.200.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6.040.470,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.100.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	75.000.000,00			70.876.548,00	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.876.548,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	27.000.000,00			28.154.760,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28.154.760,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	184.000.000,00			287.230.577,00	
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.808.832,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40.804.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.422.100,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	120.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200.195.645,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.704.910.000,00			600.000.000,00	
	4	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.704.910.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	600.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.569.000,00			13.841.737,00	
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.989.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.028.979,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.580.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.812.758,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	759.751.000,00			1.060.970.317,00	
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	26.841.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.889.917,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.080.400,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	728.910.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.010.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
152	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	1.757.790.000,00			3.392.223.219,00	
	4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	837.790.000,00			2.006.705.219,00	
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.536.403.415,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	227.790.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	61.206.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	330.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	409.095.804,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	800.000.000,00			1.203.718.000,00	
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.203.718.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	120.000.000,00			181.800.000,00	
	4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	181.800.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Bagian Hukum			256.379.000,00			321.846.400,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			212.135.150,00			274.933.900,00	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			212.135.150,00			274.933.900,00	
153	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	97.268.000,00			104.210.400,00	
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	32.640.000,00			32.966.400,00	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	32.640.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32.966.400,00	BAGIAN HUKUM
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	24 Dokumen	4.800.000,00			4.848.000,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.848.000,00	BAGIAN HUKUM
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	27.376.000,00			29.190.500,00	
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.376.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29.190.500,00	BAGIAN HUKUM
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13.200.000,00			13.332.000,00	
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	13.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.332.000,00	BAGIAN HUKUM
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	19.252.000,00			23.873.500,00	
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	19.252.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.873.500,00	BAGIAN HUKUM
154	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Rancangan Perda yang Diharmonisasi dan diasistensi, 2. Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah,	100%	114.867.150,00			170.723.500,00	
	4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Perda yang Diharmonisasi dan diasistensi	100%	114.867.150,00			170.723.500,00	
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	83 Dokumen	37.547.700,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.156.500,00	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum							
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	44.994.950,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.172.000,00	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan							
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	83 Dokumen	32.324.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.395.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	X					NON URUSAN			44.243.850,00			46.912.500,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			44.243.850,00			46.912.500,00	
155	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	44.243.850,00			46.912.500,00	
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	44.243.850,00			45.914.500,00	
	X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.243.850,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.914.500,00	BAGIAN HUKUM
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0			998.000,00	
	X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	998.000,00	BAGIAN HUKUM
						Bagian Organisasi			340.000.000,00			357.045.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			340.000.000,00			357.045.000,00	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			340.000.000,00			357.045.000,00	
156	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik.	100%	340.000.000,00			357.045.000,00	
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	24.999.000,00			28.784.192,00	
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.675.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.499.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.109.192,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	37.144.000,00			37.515.440,00	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.144.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	37.515.440,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.200.000,00			4.242.000,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.242.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	75.287.500,00			83.753.442,00	
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.110.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.973.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.047.580,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.119.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.858.912,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.195.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54.736.950,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.580.000,00			12.120.000,00	
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.580.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.120.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.449.000,00			24.694.500,00	
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	24.449.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.694.500,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	-	-	162.340.500,00			165.935.426,00	
	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	49.410.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.904.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	39.123.900,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	41.476.660,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	73.806.600,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	74.554.666,00	BAGIAN ORGANISASI
						Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			600.000.000,00			600.000.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			600.000.000,00			600.000.000,00	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			600.000.000,00			600.000.000,00	
157	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu; Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah; Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu; Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100,100,100,100 %,%,%,%	134.964.000,00			134.964.000,00	
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	12.476.000,00			12.476.000,00	
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	9.476.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.476.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Orang/Bulan	46.365.000,00			46.365.000,00	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	46.365.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.365.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.600.000,00			3.600.000,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.600.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	50.986.000,00			50.986.000,00	
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.086.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.086.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	46616 Paket	6.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.300.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	38.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38.600.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.430.000,00			1.430.000,00	
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.430.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.430.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.107.000,00			20.107.000,00	
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18.757.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.757.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	1.350.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.350.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
158	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%	465.036.000,00			465.036.000,00	
	4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	156.432.000,00			156.432.000,00	
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	131.432.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	131.432.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	294.037.000,00			294.037.000,00	
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24 Dokumen	71.984.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	71.984.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	161.533.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	161.533.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	60.520.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60.520.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	14.567.000,00			14.567.000,00	
	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 Dokumen	14.567.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.567.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Bagian Pengadaan Barang / Jasa			850.600.000,00			850.800.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			847.600.000,00			847.800.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			847.600.000,00			847.800.000,00	
159	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	120.000.000,00			120.200.000,00	
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.600.000,00			3.800.000,00	
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	21.400.000,00			21.400.000,00	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.000.000,00			3.000.000,00	
	4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	75.000.000,00			75.000.000,00	
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.000.000,00			17.000.000,00	
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
160	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	727.600.000,00			727.600.000,00	
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	727.600.000,00			727.600.000,00	
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	217.306.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	217.306.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang	10.294.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.294.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
	X					NON URUSAN							
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							
161	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.000.000,00			3.000.000,00	
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.000.000,00			3.000.000,00	
	X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
						Sekretariat DPRD							
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	4	2				SEKRETARIAT DPRD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
162	4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu 4.Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1.100. 2.100 3.100 %	16.861.695.000,00			20.455.998.382,00	
	4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	9.760.000,00			11.809.600,00	
	4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.626.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.807.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.134.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.002.140,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.879.590.686,00			2.274.304.730,00	
	4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.774.410.686,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.147.036.930,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.180.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	127.267.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	14.625.000,00			17.696.250,00	
	4	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	14.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.696.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	518.360.804,00			680.564.004,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.143.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.273.030,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	130.210.200,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	157.554.342,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	228.805.410,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	276.854.546,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	68.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	91.241.260,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	8.714.194,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.944.276,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.537.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	104.731.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	207.542.200,00			251.126.062,00	
	4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.281.400,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.910.494,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190.260.800,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	230.215.568,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	70 Unit	423.002.000,00			511.832.420,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	391.754.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	474.022.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.303.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	10.367.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.544.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6.581.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.963.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan DPRD	100%	11.959.458.560,00			14.470.944.858,00	
	4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	11.164.988.310,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.509.635.855,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	345.823.250,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	418.446.133,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	448.647.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	542.862.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	100%	1.849.355.750,00			2.237.720.458,00	
	4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	61.022.150,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	73.836.802,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	108.333.600,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	131.083.656,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD							
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.680.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.032.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
163	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N 2.Persentase penetapan Ranperda Tahun N 3. Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 4.Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5. Persentase Produk hukum daerah yang ditetapkan	1.100. 2.100 3.100 %	10.745.155.000,00			16.306.233.320,00	
	4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Ranperda	8 Dokumen	2.760.932.000,00			4.462.901.080,00	
	4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	190.432.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	262.810.790,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	2.550.399.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.175.768.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	20.101.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.322.210,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran	10 Dokumen	202.805.000,00			299.989.250,00	
	4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	63.940.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	98.397.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	43.640.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	65.225.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	99.952.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	49.286.000,00			67.234.860,00	
	4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan							
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	49.286.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	67.234.860,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.893.151.000,00			2.227.712.710,00	
	4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.593.151.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.927.712.710,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	90.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	210.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20 Dokumen	3.969.743.000,00			4.919.542.980,00	
	4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	93.660.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	226.657.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	15.030.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.011.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses							
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.861.053.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.671.874.130,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	24 Dokumen	1.869.238.000,00			4.328.852.440,00	
	4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1.869.238.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.328.852.440,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			5.137.226.486,57			4.542.059.150,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.137.226.486,57			4.542.059.150,00	
	5	1				PERENCANAAN			4.772.042.486,57			4.075.594.300,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
164	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu 100%, Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah 100%, Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu 100%, Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100%	100%	2.855.342.486,57			2.647.390.700,00	
	5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	40.000.000,00			19.323.600,00	
	5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.558.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.765.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	2.367.182.486,57			2.156.303.100,00	
	5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.295.532.486,57	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.084.653.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71.650.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	71.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah tepat waktu	1 Dokumen	11.160.000,00			11.160.000,00	
	5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.160.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	56.000.000,00			70.000.000,00	
	5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	56.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100%	239.000.000,00			274.771.000,00	
	5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.973.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	80.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	106.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.698.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	140.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	82.000.000,00			65.995.000,00	
	5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	82.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.995.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	25 Unit	60.000.000,00			49.838.000,00	
	5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	53.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44.972.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.866.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
165	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu 100%, Persentase data pembangunan daerah yang terupdate 100%, Persentase pemenuhan kegiatan monev untuk perencanaan pembangunan daerah 100%	100%	1.119.700.000,00			1.009.685.650,00	
	5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	19 Dokumen	593.000.000,00			635.082.550,00	
	5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	44.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.145.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	90.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80.809.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan	77.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	98.947.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	382.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	410.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	100%	55.000.000,00			55.000.000,00	
	5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	55.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	8 Laporan	342.700.000,00			214.714.150,00	
	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	312.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	184.714.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Laporan	129.000.000,00			104.888.950,00	
	5	1	2	2.04	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	57.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47.888.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
166	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 100%, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA)100%, Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 85%, Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 85%	100%	797.000.000,00			418.517.950,00	
	5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	317.000.000,00			178.109.550,00	
	5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.999.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	87.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32.971.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.996.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	175.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	115.142.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	252.000.000,00			118.461.300,00	
	5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.999.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	72.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.788.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.999.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	140.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.673.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4%	228.000.000,00			121.947.100,00	
	5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	58.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.572.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.999.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	71.375.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			334.557.850,00			446.464.850,00	
167	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah 100%, Persentase fasilitasi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah 100%	100%	334.557.850,00			446.464.850,00	
	5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	48.382.550,00			96.249.550,00	
	5	5	2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	48.382.550,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	96.249.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan							
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	5	2	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	122.437.000,00			119.846.000,00	
	5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	122.437.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	119.846.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase implementasi rencana inovasi dan teknologi	100%	163.738.300,00			230.369.300,00	
	5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Laporan	163.738.300,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	230.369.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	6				PENGELOLAAN PERBATASAN			30.626.150,00			20.000.000,00	
168	5	6	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase pemenuhan perencanaan dan fasilitasi program pengelolaan perbatasan	100%	30.626.150,00			20.000.000,00	
	5	6	2	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan	1 Dokumen	30.626.150,00			20.000.000,00	
	5	6	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan							
							Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	30.626.150,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						Badan Keuangan dan Aset Daerah			215.347.644.161,28			222.140.899.489,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			215.347.644.161,28			222.140.899.489,00	
	5	2				KEUANGAN			215.347.644.161,28			222.140.899.489,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
169	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu; Persentase Terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah; Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu; Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100; 100; 100; 100 %; %; %; %	51.318.937.242,00			53.114.697.200,00	
	5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	154.766.000,00			244.426.100,00	
	5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	84.216.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	141.734.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	32.577.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55.725.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	37.973.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46.966.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	50.684.696.112,00			52.123.654.500,00	
	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50.391.617.412,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.763.303.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	282.215.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	349.269.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.863.700,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.082.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	46.453.000,00			47.876.300,00	
	5	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	46.453.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47.876.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	292.444.030,00			486.680.200,00	
	5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	53.851.890,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	109.504.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.520.140,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	91.065.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	194.072.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	286.110.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.400.000,00			45.292.500,00	
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	44.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.292.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	96.178.100,00			166.767.600,00	
	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	83.135.600,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	140.441.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	13.042.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.326.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
170	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu; Persentase Layanan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Sesuai SOP; Persentase Penyusunan dan Penyampaian LKPD sesuai SAP	100; 100; 100 %; %; %	163.481.025.131,00			168.232.369.789,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran	100%	1.343.122.000,00			2.178.194.800,00	
	5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	103.996.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	151.385.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	117.345.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	178.309.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	90.573.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	184.307.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	143.219.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	194.270.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	20.924.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.175.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	19.765.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.966.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	321.874.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	527.349.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	396.725.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	585.678.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	37.076.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	97.931.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	46.137.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	114.415.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	11.785.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27.022.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	33.703.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	73.382.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	100%	569.073.500,00			757.944.600,00	
	5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5000 Dokumen	283.190.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	327.976.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	200 Dokumen	64.588.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	86.480.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5 Dokumen	48.554.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	89.921.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen	75.177.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	91.005.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	61.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	87.575.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokumen	36.264.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	74.985.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	623.835.750,00			897.206.400,00	
	5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	85.407.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	88.902.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen	37.448.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80.200.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	87.987.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	103.315.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	140.892.750,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	246.683.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban							
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	221.046.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	297.905.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	51.055.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80.199.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	100%	160.898.326.631,00			164.351.418.789,00	
	5	2	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	5.984.848.485,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.984.848.485,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	142 Laporan	148.399.241.400,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	151.721.397.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.300.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.366.330.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	112 Laporan	3.214.236.746,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.278.842.904,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	46.667.250,00			47.605.200,00	
	5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	46.667.250,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47.605.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
171	5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SSH Tepat Waktu; Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100; 100 %; %	547.681.788,28			793.832.500,00	
	5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	100%	547.681.788,28			793.832.500,00	
	5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga							
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	112.496.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	146.699.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	83.122.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	190.423.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Laporan	62.871.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	74.865.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.695.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72.312.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	39.203.600,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70.112.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	94.108.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	108.365.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	59.248.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	76.192.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	46.938.188,28	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54.861.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah			6.933.656.000,00			6.933.656.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.933.656.000,00			6.933.656.000,00	
	5	2				KEUANGAN			6.933.656.000,00			6.933.656.000,00	
172	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1)Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu;2)Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah;3)Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu;4)persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik.	100;100;100;100 %;%;%;%	6.047.105.329,00			6.047.105.329,00	
	5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	58.872.915,00			58.872.915,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	52.741.510,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52.741.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6.131.405,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.131.405,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.784.225.525,00			4.784.225.525,00	
	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.720.625.525,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.720.625.525,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	63.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	63.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	26.370.000,00			26.370.000,00	
	5	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	26.370.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.370.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	396.977.129,00			396.977.129,00	
	5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	155.844.560,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	155.844.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	189.297.569,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	189.297.569,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	51.835.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.835.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa dan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	36.546.000,00			36.546.000,00	
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.546.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36.546.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	744.113.760,00			744.113.760,00	
	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	140.581.260,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	140.581.260,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.532.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.532.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
173	5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1).persentase PAD terhadap pendapatan daerah; 2).Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan;3)Persentase Realisasi Pajak daerah;4)Persentase Realisasi retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain;5)Persentase Realisasi PBB;6)Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi pendapatan.	3;15;100;88;88;100 %%%%	886.550.671,00			886.550.671,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	ntase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	886.550.671,00			886.550.671,00	
	5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	43.169.824,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43.169.824,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	383.334.394,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	383.334.394,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah							
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	171.934.928,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	171.934.928,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	225.247.137,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	225.247.137,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	62.864.388,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	62.864.388,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			3.972.391.000,00			4.876.900.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.972.391.000,00			4.876.900.000,00	
	5	3				KEPEGAWAIAN			3.823.064.957,00			4.406.900.000,00	
174	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	2.224.298.963,00			2.417.800.000,00	
	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	34.538.750,00			38.500.000,00	
	5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	9.538.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.961.008.463,00			2.072.000.000,00	
	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.894.603.463,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.405.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	13.500.000,00			15.000.000,00	
	5	3	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	171.518.550,00			221.500.000,00	
	5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							0	0 0	17.502.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.502.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							0	0 0	12.711.550,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	123.803.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.200.000,00			14.300.000,00	
	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000,00	-	-	14.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.533.200,00			56.500.000,00	
	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	30.533.200,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
175	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional, 2. persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, 3. Persentase pengembangan SDM ASN, 4. persentase pegawai dengan SKP bernilai baik, 5. Persentase data kepegawaian yang ter-update, akurat, cepat dan tepat, 6. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin, 7. Cakupan Pembinaan Korpri	100%	1.598.765.994,00			1.989.100.000,00	
	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	127.621.672,00			225.900.000,00	
	5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	13.139.900,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	119 Dokumen	90.430.600,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	173.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.01	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	70 Dokumen	12.655.913,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	119 Dokumen	11.395.259,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	209.734.468,00			304.000.000,00	
	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Dokumen	27.961.124,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 Dokumen	181.773.344,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	252.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	1.214.738.354,00			1.378.000.000,00	
	5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN							
							Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang	18.511.350,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	26.463.546,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	29 Orang	1.169.763.458,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	46.671.500,00			81.200.000,00	
	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15 Orang	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	150 Dokumen	5.171.550,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	16.499.950,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			149.326.043,00			470.000.000,00	
176	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional, 2. persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, 3. Persentase pengembangan SDM ASN	undefined undefined	149.326.043,00			470.000.000,00	
	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	149.326.043,00			470.000.000,00	
	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	149.326.043,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	470.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Inspektorat			4.546.760.000,00			5.550.269.326,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			4.546.760.000,00			5.550.269.326,00	
	6	1				INSPEKTORAT DAERAH			4.546.760.000,00			5.550.269.326,00	
177	6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	3.326.118.451,00			4.600.037.024,00	
	6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.086.000,00			3.431.106,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.543.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.717.338,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.543.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.713.768,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.084.846.591,00			4.166.899.210,00	
	6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	3.035.646.591,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.116.710.290,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.188.920,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.600.000,00			3.672.360,00	
	6	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.672.360,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.007.000,00			175.000.000,00	
	6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	1.007.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	175.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	93.457.460,00			114.095.278,00	
	6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.309.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.335.311,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.090.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.946.725,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.458.460,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.311.634,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	58.240.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	76.013.772,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	6.360.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.487.836,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55.670.000,00			56.788.967,00	
	6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	55.670.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.788.967,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.282.800,00			19.893.897,00	
	6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	779.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	927.271,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.503.800,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.966.626,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.168.600,00			60.256.206,00	
	6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	47.403.600,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.315.029,00	INSPEKTORAT
	6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.765.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.941.177,00	INSPEKTORAT

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
178	6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase Review dokumen Perangkat Daerah (RKA, RENSTRA, LKIP, DAK dan dokumen lainnya), 2. Persentase Review dokumen pemerintah Daerah (RKPD, Perubahan RKPD, RPJPD, RPJMD, LKPJ, LPPD, LKIP, KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan dan dokumen lainnya), 3. Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang Profesional, 4. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP, 5. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK 6. Jumlah Temuan BPK 7. Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP, 8. Nilai Hasil Kapabilitas APIP	100, 84, 80, 76.51 % 12 Temuan 1 Level	1.213.869.049,00			943.266.549,00	
	6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	1.092.354.279,00			803.263.761,00	
	6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	146.383.360,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150.658.977,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	143.284.750,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	146.759.237,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja							
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	32.903.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.838.757,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan							
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	11 Laporan	149.908.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	153.199.638,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	119 Laporan	394.511.979,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60.258.216,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10 Kesepakatan	89.908.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	117.919.480,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	135.455.190,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	140.629.456,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	121.514.770,00			140.002.788,00	
	6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian							
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	3.885.900,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.294.621,00	INSPEKTORAT
	6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	117.628.870,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	135.708.167,00	INSPEKTORAT
179	6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Nilai Integritas Pencegahan Korupsi	76,51%	6.772.500,00			6.965.753,00	
	6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.772.500,00			6.965.753,00	
	6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	6.772.500,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.965.753,00	INSPEKTORAT
						Kecamatan Lobalain			3.675.709.000,00				0
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.671.629.000,00				0
	7	1				KECAMATAN			3.671.629.000,00				0
180	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.597.230.500,00			0	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.676.000,00			0	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	22.676.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.492.549.338,00			0	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	3.443.749.338,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	48.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.800.000,00			0	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.823.662,00			0	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	438.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.289.662,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.356.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	7.740.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.132.500,00			0	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.132.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	46.249.000,00			0	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.249.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
181	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	26.372.500,00			0	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	26.372.500,00			0	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Lembaga Kemasyarakatan	21.232.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.140.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	-	0	KECAMATAN LOBALAIN
182	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	22.170.000,00			0	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	22.170.000,00			0	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.170.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
183	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	9.655.000,00			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	9.655.000,00			0	
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.655.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
184	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	16.201.000,00			0	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	16.201.000,00			0	
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	16.201.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
	X					NON URUSAN			4.080.000,00			0	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.080.000,00			0	
185	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.080.000,00			0	
	X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.080.000,00			0	
	X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.080.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOBALAIN
						Kelurahan Metina			283.340.000,00			0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			283.340.000,00			0	
	7	1				KECAMATAN			283.340.000,00			0	
186	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	283.340.000,00			0	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	283.340.000,00			0	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	22.785.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina	-	0	KELURAHAN METINA
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	15.180.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN METINA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	199.620.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN METINA
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	45.755.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN METINA
						Kelurahan Mokdale							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							
	7	1				KECAMATAN							
187	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	345.600.000,00			0	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	345.600.000,00			0	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.607.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN MOKDALE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN MOKDALE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	276.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN MOKDALE
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	40.292.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN MOKDALE
						Kelurahan Namodale							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							
	7	1				KECAMATAN							
188	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	291.400.000,00			0	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	291.400.000,00			0	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.440.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN NAMODALE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	26.975.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN NAMODALE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	189.425.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN NAMODALE
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	59.560.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN NAMODALE
						Kecamatan Rote Barat Laut							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							
	7	1				KECAMATAN							
189	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 persen	2.203.984.000,00			2.204.175.300,00	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	24.966.000,00			24.966.000,00	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen Dokumen	24.966.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.966.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.087.332.000,00			2.087.332.000,00	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.027.052.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.027.052.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen Dokumen	60.280.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60.280.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	9.600.000,00			9.600.000,00	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.600.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 persen	48.486.000,00			48.677.300,00	
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga	-	11.645.300,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.620.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga	-	7.696.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	14.336.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.336.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	6.600.000,00			6.600.000,00	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.600.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 persen	27.000.000,00			27.000.000,00	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	27.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27.000.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
190	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	30.545.000,00			30.545.000,00	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan desa	undefined undefined	30.545.000,00			30.545.000,00	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	22.545.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.545.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	8.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.000.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
191	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	5.000.000,00			5.000.000,00	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100 persen	5.000.000,00			5.000.000,00	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.000.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
192	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	6.000.000,00			6.000.000,00	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	6.000.000,00			6.000.000,00	
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.000.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
193	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	8.500.000,00			8.500.000,00	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	8.500.000,00			8.500.000,00	
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.500.000,00	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
						Kelurahan Busalangga			276.500.000,00				0
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			276.500.000,00				0
	7	1				KECAMATAN			276.500.000,00				0

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
194	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	276.500.000,00			0	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	276.500.000,00			0	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.616.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN BUSALANGGA
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	201.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN BUSALANGGA
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	63.384.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN BUSALANGGA
						Kecamatan Rote Barat Daya			1.381.407.000,00			0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.381.407.000,00			0	
	7	1				KECAMATAN			1.381.407.000,00			0	
195	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.328.637.277,00			0	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0			0	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.252.557.277,00			0	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.184.822.554,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	67.734.723,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	9.000.000,00			0	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.145.000,00			0	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.845.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.235.000,00			0	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11.235.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.700.000,00			0	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	24.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
196	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	12.074.000,00			0	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	12.074.000,00			0	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan	12.074.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
197	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	10.200.000,00			0	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	10.200.000,00			0	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
198	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	11.115.723,00			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	11.115.723,00			0	
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.115.723,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
199	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang tertib Pengelolaan Administrasi	0 Dokumen	19.380.000,00			0	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	19.380.000,00			0	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	19.380.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
						Kecamatan Rote Barat			1.390.876.000,00				0
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.390.876.000,00				0
	7	1				KECAMATAN			1.390.876.000,00				0

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
200	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.356.493.000,00			0	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	100%	51.790.000,00			0	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	51.790.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (%)	100%	1.222.207.000,00			0	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.179.967.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.240.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%	7.800.000,00			0	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum (%)	100%	30.793.000,00			0	
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.373.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.420.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	9.676.000,00			0	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.146.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.530.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	34.227.000,00			0	
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	34.227.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
201	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	13.200.000,00			0	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (%)	100%	13.200.000,00			0	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
202	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	100%	5.100.000,00			0	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100%	5.100.000,00			0	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
203	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	9.825.000,00			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100%	9.825.000,00			0	
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	9.825.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
204	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100%	6.258.000,00			0	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Desa dan Peraturan Desa	100%	6.258.000,00			0	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	6.258.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE BARAT
						Kecamatan Rote Selatan			1.312.254.000,00			1.312.659.082,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.306.957.000,00			1.307.362.082,00	
	7	1				KECAMATAN			1.306.957.000,00			1.307.362.082,00	
205	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 Persen	1.242.603.000,00			1.243.008.082,00	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	18 Dokumen	20.450.000,00			20.450.000,00	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.000.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8.450.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.450.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	1.146.334.000,00			1.146.739.082,00	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.105.294.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.105.699.082,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.040.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	41.040.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	9.000.000,00			9.000.000,00	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.000.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 Persen	31.605.000,00			31.605.000,00	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	375.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	375.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.500.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.297.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.297.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.215.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.215.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.218.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.218.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	497.000,00			497.000,00	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	497.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	497.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	7 Unit	34.717.000,00			34.717.000,00	
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	33.967.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33.967.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	750.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	750.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
206	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	24.854.000,00			24.854.000,00	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	5.300.000,00			5.300.000,00	
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.300.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Laporan	19.554.000,00			19.554.000,00	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	19.554.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19.554.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
207	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	23.500.000,00			23.500.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	23.500.000,00			23.500.000,00	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23.500.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
208	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	0			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	0			0	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE SELATAN
209	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100 Persen	16.000.000,00			16.000.000,00	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Terlasnanya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 Dokumen	16.000.000,00			16.000.000,00	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.000.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
	X					NON URUSAN			5.297.000,00			5.297.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			5.297.000,00			5.297.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
210	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.297.000,00			5.297.000,00	
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.297.000,00			5.297.000,00	
	X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.297.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.297.000,00	KECAMATAN ROTE SELATAN
						Kecamatan Rote Tengah			2.039.639.000,00			1.977.608.885,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.039.639.000,00			1.977.608.885,00	
	7	1				KECAMATAN			2.039.639.000,00			1.977.608.885,00	
211	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	1.999.609.000,00			1.901.307.000,00	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	27.500.000,00			62.000.000,00	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	24.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.886.167.000,00			1.711.955.000,00	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	1.837.667.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.662.455.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.500.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	4.200.000,00			4.200.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.200.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40.550.000,00			71.172.000,00	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.086.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.650.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.900.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.622.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.622.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	15.342.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	14.100.000,00			16.600.000,00	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.600.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.100.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	27.092.000,00			35.380.000,00	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	20.592.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.880.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.500.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
212	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Cakupan Forum Musyawarah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	25.030.000,00			30.740.000,00	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	25.030.000,00			30.740.000,00	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	20.030.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.030.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.710.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
213	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	5.000.000,00			9.027.885,00	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5.000.000,00			9.027.885,00	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.027.885,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
214	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	100%	5.000.000,00			26.534.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	5.000.000,00			26.534.000,00	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26 Orang	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26.534.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
215	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	100%	5.000.000,00			10.000.000,00	
	7	1	6	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100%	5.000.000,00			10.000.000,00	
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.000.000,00	KECAMATAN ROTE TENGAH
						Kelurahan Onatali			310.540.000,00			290.900.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			310.540.000,00			290.900.000,00	
	7	1				KECAMATAN			310.540.000,00			290.900.000,00	
216	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Cakupan Forum Musyawarah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	310.540.000,00			290.900.000,00	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	310.540.000,00			290.900.000,00	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	21.840.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Onatali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	KELURAHAN ONATALI
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	243.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Onatali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	165.900.000,00	KELURAHAN ONATALI
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Onatali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	KELURAHAN ONATALI
						Kecamatan Pantai Baru			2.455.007.000,00			2.650.203.393,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.455.007.000,00			2.650.203.393,00	
	7	1				KECAMATAN			2.455.007.000,00			2.650.203.393,00	
217	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	2.320.223.393,00			2.350.233.393,00	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	20.230.000,00			20.230.000,00	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	20.230.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20.230.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	22 Dokumen 100 %	2.221.457.443,00			2.223.457.443,00	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.174.657.443,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2.174.657.443,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	46.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48.800.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD perangkat daerah tepat waktu	100%	11.520.000,00			11.520.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	11.520.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.520.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perangkat daerah	100%	33.015.950,00			59.255.950,00	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.249.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.492.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.170.950,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.170.950,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.596.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32.593.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.000.000,00			13.770.000,00	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13.770.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100%	22.000.000,00			22.000.000,00	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	22.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.000.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
218	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	118.263.607,00			283.450.000,00	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	118.263.607,00			283.450.000,00	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Lembaga Kemasyarakatan	103.263.607,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Olafulihaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	233.507.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Olafulihaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49.943.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
219	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.660.000,00			6.660.000,00	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.660.000,00			6.660.000,00	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							0	0 0	6.660.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Olafulihaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.660.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
220	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	100%	9.860.000,00			9.860.000,00	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan	15 Dokumen	9.860.000,00			9.860.000,00	
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	9.860.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.860.000,00	KECAMATAN PANTAI BARU
						Kelurahan Olafulihaa			163.158.000,00			208.758.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			163.158.000,00			208.758.000,00	
	7	1				KECAMATAN			163.158.000,00			208.758.000,00	
221	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	163.158.000,00			208.758.000,00	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan kelurahan	100%	163.158.000,00			208.758.000,00	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	34.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34.000.000,00	KELURAHAN OLAFULIHAA
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	29.158.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29.158.000,00	KELURAHAN OLAFULIHAA
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	KELURAHAN OLAFULIHAA
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	95.600.000,00	KELURAHAN OLAFULIHAA
						Kecamatan Rote Timur			1.412.203.256,00			25.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.410.653.256,00			25.000.000,00	
	7	1				KECAMATAN			1.410.653.256,00			25.000.000,00	
222	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu. 2. persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	undefined %	1.297.420.475,00			25.000.000,00	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00			25.000.000,00	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.000.000,00	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.139.335.436,00			0	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.091.440.576,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	47.894.860,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.200.000,00			0	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	53.905.039,00			0	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.054.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.005.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	32.846.039,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.700.000,00			0	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.700.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.280.000,00			0	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	29.280.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
223	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0			0	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	0			0	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Dokumen	0	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
224	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	45.395.000,00			0	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	45.395.000,00			0	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan	45.395.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
225	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	35.717.781,00			0	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	35.717.781,00			0	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.717.781,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
226	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	12.120.000,00			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	12.120.000,00			0	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Orang	12.120.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
227	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100%	20.000.000,00			0	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-	20.000.000,00			0	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
	X					NON URUSAN			1.550.000,00			0	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.550.000,00			0	
228	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.550.000,00			0	
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.550.000,00			0	
	X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.550.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN ROTE TIMUR
						Kelurahan Londalusi			298.159.744,00			0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			298.159.744,00			0	
	7	1				KECAMATAN			298.159.744,00			0	
229	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	298.159.744,00			0	
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	298.159.744,00			0	
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Londalusi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN LONDALUSI
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	173.159.744,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Londalusi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN LONDALUSI
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Londalusi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KELURAHAN LONDALUSI
						Kecamatan Ndao Nuse			785.352.000,00			781.752.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			745.380.000,00			745.980.000,00	
	7	1				KECAMATAN			745.380.000,00			745.980.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
230	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	661.832.000,00			662.432.000,00	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.127.000,00			48.927.000,00	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	37.927.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	37.927.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.000.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	559.827.000,00			559.827.000,00	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	520.437.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	520.437.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.390.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	39.390.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.080.000,00			21.880.000,00	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7.000.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	14.880.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14.880.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.500.000,00			2.500.000,00	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	-	2.500.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.298.000,00			29.298.000,00	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	29.298.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29.298.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
231	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	100%	33.000.000,00			33.000.000,00	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	33.000.000,00			33.000.000,00	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24.000.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.000.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
232	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	15.000.000,00			15.000.000,00	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	15.000.000,00			15.000.000,00	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15.000.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
233	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25.348.000,00			25.348.000,00	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	25.348.000,00			25.348.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	25.348.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25.348.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
234	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100%	10.200.000,00			10.200.000,00	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	10.200.000,00			10.200.000,00	
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.200.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
	X					NON URUSAN			39.972.000,00			35.772.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			39.972.000,00			35.772.000,00	
235	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	39.972.000,00			35.772.000,00	
	X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.200.000,00			0	
	X	XX	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN NDAO NUSE
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.772.000,00			35.772.000,00	
	X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.772.000,00	Kab. Rote Ndao, Ndao Nuse, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35.772.000,00	KECAMATAN NDAO NUSE
						Kecamatan Landuleko			922.168.000,00			0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			156.453.060,00			0	
	7	1				KECAMATAN			156.453.060,00			0	
236	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	116.287.600,00			0	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			0	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.600.000,00			0	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	68.182.600,00			0	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.068.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.922.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.192.600,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.005.000,00			0	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.005.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.500.000,00			0	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
237	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	100 Persen	15.165.460,00			0	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	15.165.460,00			0	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Lembaga Kemasyarakatan	8.165.460,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
238	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen	7.500.000,00			0	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.500.000,00			0	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
239	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen	7.500.000,00			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	undefined undefined	7.500.000,00			0	
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
240	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi Meningkatkan fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	0 % 100 Persen	10.000.000,00			0	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-		10.000.000,00			0	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	X					NON URUSAN			765.714.940,00			0	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			765.714.940,00			0	
241	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	765.714.940,00			0	
	X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	765.714.940,00			0	
	X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	728.574.940,00	Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
	X	XX	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	37.140.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LANDULEKO
						Kecamatan Loaholu			1.431.352.000,00			0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.421.352.000,00			0	
	7	1				KECAMATAN			1.421.352.000,00			0	
242	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	1.360.212.500,00			0	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	17 Dokumen	47.500.000,00			0	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	40.020.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOA HOLU
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.480.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.235.462.500,00			0	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.193.222.500,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	42.240.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.000.000,00			0	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	35.000.000,00			0	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	9.250.000,00			0	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.250.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	24.000.000,00			0	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	24.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
243	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	25.639.500,00			0	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan terselenggaranya Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	100%	25.639.500,00			0	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.639.500,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
244	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	100%	17.000.000,00			0	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	17.000.000,00			0	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
245	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	11.000.000,00			0	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	17 Orang	11.000.000,00			0	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang	11.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
246	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	100%	7.500.000,00			0	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Desa yang Tertib Administrasi	100%	7.500.000,00			0	
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
	X					NON URUSAN			10.000.000,00			0	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			10.000.000,00			0	
247	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	10.000.000,00			0	
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000,00			0	
	X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	KECAMATAN LOAHOLU
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			3.053.702.000,00			3.553.932.454,00	

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		3.053.702.000,00			3.553.932.454,00	
	8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.053.702.000,00			3.553.932.454,00	
248	8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	1.394.513.904,00		1.476.381.404,00	
	8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.970.000,00			0	
	8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.970.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.264.544.704,00			1.199.877.704,00	
	8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.199.877.704,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.199.877.704,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	64.667.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4.800.000,00			9.600.000,00	
	8	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	67.861.000,00			191.547.700,00	
	8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.355.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.355.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.928.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22.418.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	42.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	144.974.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.850.200,00			19.356.000,00	
8	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.495.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.355.200,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19.356.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.488.000,00			56.000.000,00	
8	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	29.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
249	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	662.836.000,00			690.098.000,00	
	8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	662.836.000,00			690.098.000,00	
	8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka							
							Jumlah Paskibraka	25 Orang	662.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	690.098.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
250	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pembinaan Aktivitas Partai Politik	100%	632.798.096,00			885.269.050,00	
	8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	632.798.096,00			885.269.050,00	
	8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan							

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	632.798.096,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	835.269.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
251	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	100%	13.642.000,00			50.000.000,00	
	8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	13.642.000,00			50.000.000,00	
	8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 Orang	13.642.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
252	8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan ketahan ekonomi, sosial dan budaya	100%	25.472.000,00			75.000.000,00	
	8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	25.472.000,00			75.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	25.472.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
253	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial	100%	324.440.000,00			377.184.000,00	
	8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	324.440.000,00			377.184.000,00	
	8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	68.580.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21.324.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	255.860.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	255.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK